HAMZAH MUNDUR ATAU DIPAKSA?

FORUM

KEADILAN

SOEKARNOIS atau KOMUNIS

Setelah 33 Tahun Diasingkan, A.M. Hanafi Kembali "Angkatan 66 Itu Angkatan Konyol"

A.M. HANAFI

ISSN 0215-8280

MINGGUAN NO. 35 TAHUN VIII, 5 DESEMBER 1999

Rp 7800,00

MAJALAH MINGGUAN

FORUM
KEADILAN

Penerbit: PT Forum Adil Mandiri
SIUPP: No. 265/SK/MENPEN/D2/1990 Tanggal: 25 April 1990
Alamat: Kebayoran Center - Blok A No. 11 - 15 Kebayoran Baru - Velbak Jakarta 12120 PO BOX 1104/JKS Jakarta 12011 Telp. (021) 7255625 (Hunting System) Fax 7255645 (Redaksi), Fax 7255650 (Pemasaran).
E-mail: redaksi@forum.co.id. **Web Site:** http: //www.forum.co.id
Pencetak: PT Enka Parahiyangan, Jakarta (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

Komisaris Utama: Setyanto P. Santoso
Komisaris: Abdul Hadi Djamal, Karni Ilyas, Suryantono Tjahyono
Direktur Utama: Rahmat Ismail
Direktur: Aryono Madyanto, Noorca M. Massardi, Soetrisno

Pemimpin Umum: Soehadibroto
Wakil Pemimpin Umum: Harun Musawa
Pemimpin Perusahaan: Rahmat Ismail
Wakil Pemimpin Perusahaan: Soetrisno

REDAKSI
Pemimpin Redaksi: Noorca M. Massardi
Wakil Pemimpin Redaksi: Tony Hasyim
Redaktur Pelaksana: Ivan Haris P., Maman Gantra, Retno Kustiati, Sudarsono, Syatrya Utama, Zuhri Mahrus
Redaktur: Fahmi Imanullah, Hanibal WYW, Irawati, Johan Budi S.P., L.R. Baskoro, Munawar Chalil, Riza Sofyat, Sen Tjiauw
Koordinator Reportase (Jakarta): Wahid Rahmanto
Asisten Koordinator Reportase (Daerah & Luar Negeri): Sri Raharti H.
Reporter: Anne L. Handayani, Anton Bachtiar Rifa'i, Dedi Hermawan, Fenty Effendy, Mochamad Husni, Ronald Raditya, Teguh S. Usis, Victoria G.V. Sidjabat, Widiarsi Agustina, Yus Ariyanto
Manajer Produksi: H. Hatmantho. **Staf:** Nurmasari
Sekretaris Redaksi: Sri Rahayu.

KORESPONDEN
Jayapura: M. Kholifan (0967) 84154. **Medan:** Ade Nursa'adah 13033 id 465-563. **Menado:** Mustopa (0431) 844-939. **Padang:** Indra Sakti Nauli (0751) 58985. **Palembang:** Aina R. Azis (0711) 440-338. **Pekanbaru:** Wahyudi E.L. Panggabean (0761) 72208. **Pontianak:** Lamhot F. Sihotang (0561) 710-207. **Samarinda:** M. Bakri Djapar (0541) 271-211. **Surabaya:** Mochamad Toha (031) 894-43-05. **Ujungpandang:** Sukriansyah S Latief (0411) 495-263. **Yogyakarta:** M. Faried Cahyono (0274) 886-558, Khoirul Rosyadi (0274) 587-561
Kualalumpur: Riana T. Tuasikal (603-13-601-3517). **London:** Arya Gunawan (44-181-552-7296). **Melbourne:** Dewi Anggraeni (61-3-9439-7555). **Paris:** Gunawan Antara (33-1-424-519-46).

FOTO
Kepala Bagian: Achijar Abbas Ibrahim **Redaktur:** Fauzan Haryosoedigdo **Fotografer:** Krus Haryanto, Nasrullah
Staf: Asep Suherman, Iwanto HS, Winarno

RANCANG GRAFIS
Kepala Bagian: Selo Sumarsono
Desainer: Achmad Mufrodi, Habel JuZa Wondal, Noufal Fadhil M.

BAHASA
Redaktur: Erwin Y. Salim. **Staf:** Suhud

PUSAT DATA INFORMASI:
Arie Indra Manurung, Maman Samudra H., M. Hidayat, Sujianto, Yulnely Anri

USAHA
Sirkulasi
Mulyanto (Manajer), Budi Malau, C. Guntur Indrajaya, Denny Widayanti

Komunikasi Pemasaran
Susie K. Hatadji (Manajer), Sugihantoro

Iklan
Jackie Muaya (Manajer), Putu Sushantini (Pj. Koordinator), Ida Wati Darma, Winda Veralita **Staf:** Abdul Hasyim

Keuangan dan Umum
Dedy S. Muftie (Manajer), Bachrizon, Latifah, Porda MP, Saryono, Achmad Trijaya, Erna Rosbani, Emay Nurdiansyah, Sumirat Sari D

PSDM
Irza Mirzana, Eri Sari Gustini

EDP
Gunawan Wahyu (Manajer), Murdjito, M. Edwin, Donny Handoko

Pasukan Iklan

Iklan memang unik. Bagi sebagian orang, jika terlalu banyak, iklan akan mengganggu kenikmatan membaca. Sebaliknya, tak sedikit pula orang yang justru asyik memperhatikan iklan. Apalagi, jika iklan tersebut dikemas dalam format yang menarik. Bahkan, tak jarang orang membeli sebuah media cetak hanya karena ingin mencermati iklan yang dimuat.

Bagi pembaca, iklan adalah informasi. Bagi produsen, iklan adalah sarana untuk memperkenalkan produk. Bagi media massa seperti FORUM, iklan merupakan salah satu pemasukan yang cukup penting di samping pemasukan dari sirkulasi. "Saya kira cukup ideal jika pendapatan perusahaan adalah 30 persen iklan dan sisanya dari penjualan majalah," ujar Kepala Bagian Keuangan FORUM, Dedy S. Muftie.

Mengingat arti penting peran iklan dalam melancarkan perputaran roda perusahaan itulah, rasanya, tak salah jika manajemen FORUM menarik Jackie Muaya menjadi "komandan" pasukan iklan. Memang, idealnya, karir karyawan naik secara urut kacang. Cuma, mengingat kondisi personel yang cukup genting di bagian iklan, kehadiran orang baru yang sarat pengalaman rasanya tak terhindarkan.

Apalagi, perempuan setengah baya yang mulai bergabung dengan FORUM sejak September lalu itu dapat dikatakan cukup kenyang makan asam garam dunia periklanan. Setelah malang melintang di Selecta Grup selama satu dasawarsa sejak 1970-an, Jackie mampir ke perusahaan periklanan Indo Ad selama setahun. Toh, perempuan asal Ambon itu tetap tidak lepas dari dunia periklanan. Selepas dari Indo Ad, Jackie mendarat di salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia, BAT, sebagai *Public Relations Manager,* antara 1983 sampai 1990.

Dengan pengalaman segudang di dunia periklanan itulah, Jackie optimistis bisa mendongkrak penjualan halaman iklan di FORUM. "Saya kira, hubungan baik dengan teman-teman di perusahaan periklanan bisa dimanfaatkan," kata Jackie. Optimisme ini memang bukan tanpa alasan. Sebab, jajaran *account executive* (AE) yang berada di bawah komandonya merupakan personel-personel yang cukup tangguh. Terbukti, sejak September lalu, penjualan halaman iklan di FORUM mulai menyentuh target yang ditentukan manajemen. "Kami yakin bisa melampaui target yang dibebankan," kata Winda, salah seorang pemburu iklan di FORUM. Mudah-mudahan, kondisi perekonomian Indonesia memasuki milenium III yang diperkirakan akan membaik juga ikut mendongkrak penjualan halaman iklan FORUM. □

M.RIZAL

(ARAH JARUM JAM) IDA, RINA, HASYIM, WINDA DAN JACKIE MUAYA. *Bisa melampaui target.*

DAFTAR ISI

MAJALAH MINGGUAN
FORUM
KEADILAN
NO. 35, TAHUN VIII
29 NOVEMBER – 5 DESEMBER 1999

SELINGAN
MEREKA PERGI DENGAN LUKA

Pengungsi dari Aceh membanjiri Medan dan sekitarnya. Sejak "Bumi Rencong" itu menuntut referendum, para pendatang merasa tak aman. Teror dan ancaman terjadi di mana-mana. Para pengungsi dari Ternate juga mulai menyesaki kota Manado. Inilah kisah sedih mereka.

58

KULIT MUKA: *SELO SUMARSONO*
FOTO: *M. RIZAL*

FORUM UTAMA
MUKTAMAR DAN MASA DEPAN NU

Tak pelak, Nahdaltul Ulama (NU) telah menjadi kekuatan lama yang muncul kembali di panggung politik Indonesia. Karena itu, tak mengherankan bila Muktamar NU kali ini menjadi sangat penting artinya. Apalagi Gus Dur tidak akan memegang tampuk kepemimpinan di NU. Siapakah figur yang mampu membawa NU menjawab tantangan zaman? Apa peran Gus Dur dan Forum Langitan dalam Muktamar ini? Benarkah Khitah NU 1926 bakal dicabut? Poros Tengah ikut pula bermain?

14

ANNAS

BISNIS
CACUK SUDARJANTO, WAKIL KETUA BPPN

Selasa pekan lalu, SK penunjukan Cacuk Sudarjanto sebagai Wakil Ketua BPPN sudah turun. Dalam waktu dekat ini, mantan Direktur PT Telkom itu resmi dilantik. Namun, penunjukan Cacuk menimbulkan kontroversi di kalangan anggota Komisi IX DPR. Mengapa mereka tidak setuju? Benarkah masuknya Cacuk merupakan titipan "Poros Tengah" dan bertugas mengawasi Glenn M.S. Yusuf?

84
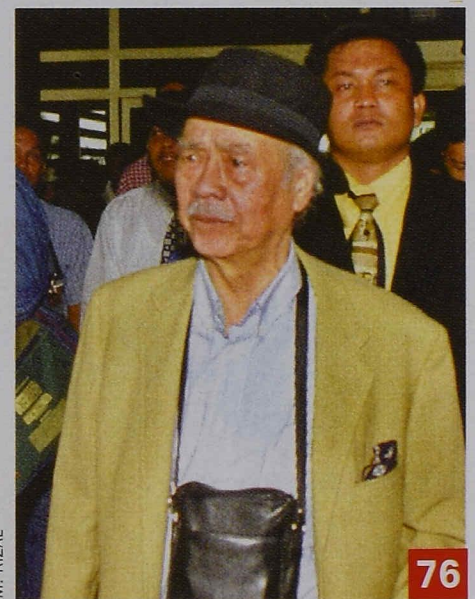
M. RIZAL

M. RIZAL

76

NASIONAL
PULANGNYA PELARIAN POLITIK

Mantan Duta Besar Indonesia di Kuba di masa Bung Karno, A.M. Hanafi, pulang kampung. Kabarnya, beberapa tokoh "Kiri" yang kini bermukim di Eropa dan Amerika pun akan menyusul pulang. Mereka berani pulang karena ada restu dari Gus Dur?

MANFAATKAN PELUANG BISNIS YANG MAKIN TERBUKA

Situasi ekonomi beranjak pulih, jaringan bisnis internasional menguat kembali, saatnya memanfaatkan berbagai peluangnya. Hubungi mitra mancanegara melalui SLI paling cepat: 001 INDOSAT.

CEPAT DAN JERNIH.

Kedubes RI di Kualalumpur Mengecewakan

Ketika Presiden Encik Abdurrahman Wahid berada di Singapura, masyarakat bisnis di sana berpeluang bertatap muka dengannya. Mereka mendapat penerangan tentang peluang *pelaburan* (penanaman modal) di Indonesia, serta jaminan kepada calon penanam modal sehubungan dengan keselamatan mereka di Indonesia.

Sesampai Encik Abdurrahman di Kualalumpur, ternyata tidak ada peluang bertatap muka, beramah tamah mesra dengan pengusaha dan calon pelabur Malaysia untuk Indonesia. Sebagai bangsa serumpun, kami merasa kecewa dan *terkilan*. Mengapa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kualalumpur tidak punya inisiatif menyelenggarakan acara seperti itu?

Menurut berita yang kami dapat, para staf KBRI di Kualalumpur, terutama bagian perdagangan, tidak *cergas* dan makan gaji buta saja. Mohon perhatian Presiden Encik Abdurrahman agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Pihak kami siap membantu perekonomian Indonesia karena kami juga asal muasalnya dari tanah Jawa.

Dato Muhammad Bin Abdullah
34 Jalan Damansara Utama
Kualalumpur

Ke Mana Kami Harus Pergi atau Mengungsi?

Hati siapa yang tak tersentak, bila akhir-akhir ini kita mendengar Sambas luluh lantak, Ambon bergolak, Makassar dan Irianjaya berteriak galak, serta Ternate berderak. Terakhir, warga Aceh berniat "menjatuhkan talak" dengan mengumandangkan tembang "kemerdekaan" secara serentak.

Kami yang tak jelas jati dirinya—karena lahir ke dunia atas kehendak Illahi, hasil "buah cinta" kedua orang tua yang berbeda suku bangsa—memahami keinginan saudara-saudaraku di Aceh, Makassar, dan Irianjaya yang sedang berupaya memisahkan jiwa raga dari pangkuan Indonesia. Itu disebabkan kentalnya penderitaan dan penggumpalan rasa kecewa akibat perlakuan tak adil serta semena-mena dari para penguasa yang terpusat di Jakarta.

Tapi, marilah kita coba merenungkan dalam-dalam. Perlakuan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan para pemegang kendali jabatan, sejujurnya bukan semata-mata hanya tertuju dan ditujukan kepada saudara-saudaraku di wilayah itu saja. Melainkan, merata dan terjadi di mana-mana, termasuk yang di Jakarta.

Pada dasarnya, yang salah bukanlah negara, tapi pemerintah atau orang yang mengelolanya. Kenapa yang sakit kepalanya tapi yang dipotong justru lehernya? Alangkah baiknya kita sementara bertumpu pada pemerintahan yang baru. Bila ternyata nanti tak mampu menampilkan kinerja yang bermutu, kepada merekalah tuntutan kita semua tertuju.

Jujur saja, bila niat pisah itu terlaksana, kami "spesies" yang tak jelas identitasnya, tapi banyak juga jumlahnya, ke mana akan dibawa serta. Mengungsi ke tempat bapak akan diusir pergi karena tidak sedarah asli lagi. Bertolak ke rumah emak akan disepak karena bukan lagi termasuk dalam silsilah anak pinak. Ke mana lagi harus pergi?

Drs. H.Y. Soesilo, S.H.
Wisma Partia Lt. 2-4
Jalan Enggano No. 94 B
Tanjungpriok
Jakarta, 14310

Referendum Aceh, Pemerintah Jangan Konyol

Keinginan rakyat Aceh untuk melakukan referendum tidak semestinya direspon pemerintah secara gegabah. Kasus Aceh tidaklah semata-mata persoalan pemerataan kesejahteraan yang memang tidak pernah berlangsung di masa Orde Lama dan Orde Baru. Masalah yang terjadi di sana berhubungan dengan usaha disintegrasi yang diperjuangkan GAM bertautan dengan tuntutan lama DI/TII masa Orde Lama. Jadi, apa pun opsi kompromi pemerintah akan sukar diterima sampai mereka memperoleh kemerdekaan.

Harus diingat, persoalan ketidakadilan bukan hanya terjadi di Aceh, tapi juga di seluruh provinsi RI, misalnya Kalimantan dan Irian, yang bahkan memberi kontribusi pemasukan dana ke pusat jauh lebih besar dibanding Aceh. Apabila referendum sampai terjadi di Aceh, semua provinsi akan menuntut hal serupa. Kalau Aceh bisa, mengapa yang lain tidak? Ukuran keistimewaan suatu wilayah kini tidak lagi ditentukan oleh embel-embel pemberian predikat dari pemerintah tempo dulu.

Kini, siapa yang paling banyak memberi sumbangan berharga kepada negeri ini, dia juga istimewa. Apalagi, sekarang masih euforia politik yang dengan gampang orang atau kekuatan-kekuatan tertentu merekayasa demo-demo/pawai untuk menuntut sesuatu kepada pemerintah, bertindak anarkis untuk menjatuhkan wibawa pemerintah, dan tuntutan lain. Jika pemerintah begitu mudah mengabulkannya, tanpa meminta pertimbangan rakyat RI secara menyeluruh (MPR atau referendum nasional oleh rakyat pemilik negara ini), itu namanya konyol.

Saya mengimbau kepada pemerintah, khususnya, dan rakyat yang ingin berpisah dengan RI di mana pun, sadarlah. Mestinya kita bersatu menyusun kekuatan menghadapi Barat yang kini bersorak memecah-belah bangsa kita dan ingin menghancurkan kemunculan kekuatan Islam dari Indonesia. Per-

hatikan Eropa kini sudah bersatu (Uni Eropa), Australia dan New Zealand serta Papua Nugini juga mulai berkolaborasi, Amerika Utara sudah membentuk kesatuan pasar, juga ras kuning Asia, dan negara-negara Arab. Mengapa kita mesti bercerai-berai?

Yanuar Ikbar
Jalan Mandala VII/138
Bandung 40193

Rakyat Aceh Tetaplah Bersama Kami

Terlalu sering kita mendengar dan melihat keinginan referendum rakyat Aceh melalui media cetak dan elektronik. Tapi, setelah melihat tayangan di televisi 10 November lalu, terjadi unjuk rasa lebih dari satu juta rakyat Aceh di halaman Masjid Raya Banda Aceh yang menuntut referendum, saya benar-benar terperangah dan hampir tidak percaya melihat kenyataan tersebut. Apakah sudah sedemikian rupa tuntutan referendum yang berkonotasi ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia ini?

Wahai saudaraku rakyat Aceh, saya mengimbau agar berpikirlah sekali lagi untuk menuntut referendum itu. Kita telah bersama-sama ratusan tahun memperjuangkan kemerdekaan ini dan telah puluhan tahun pula bersama-sama membangun bangsa ini.

Apabila perpisahan itu benar-benar terjadi, rakyat Aceh mungkin tertawa dan senang menyambutnya. Tapi, kami 200 juta rakyat di luar Aceh akan menangisinya, dan lebih menangis lagi 150 juta umat Islam Indonesia yang akan kehilangan "Serambi Mekkah"-nya. Karena itu, referendum bukanlah pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh. Masalah yang muncul dan berlarut-larut di wilayah itu lebih diakibatkan karena salah urus dari pemimpin-pemimpin kita.

Sekarang, dengan pemerintahan baru, saya yakin permasalahan Aceh akan dapat diselesaikan secara baik dan memuaskan rakyat Aceh. Karena itu, tetaplah bersama kami dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, peliharalah persatuan dan kesatuan bangsa kami, jauhkanlah kami dari permusuhan sesama kami, dan jangan pula pisahkan rakyat Aceh dari bangsa kami. Amin.

Syamsurizal
Jalan Melati No. 18
Palangkaraya

Tawaran Gelar Supercepat

Saya merasa "gatal" menyuarakan "unek-unek" yang akhir-akhir ini mengganjal dalam hati dan pikiran saya. Sebenarnya, saya tidak mendapatkan untung ataupun rugi jika saya tidak menulis dalam *public forum* ini, saya benar-benar *nothing to loose*.

Belakangan ini, harian *Kompas* kerap memuat iklan dari sebuah lembaga pendidikan yang terkesan sangat bombastis. Bahkan, kelihatan sangat mengkomersialisasi pendidikan, sehingga menjurus tidak etis. Padahal, pelayanan jasa pendidikan sebenarnya merupakan usaha anak bangsa yang teramat sangat mulia karena "ikut andil mencerdaskan bangsa". Tapi, cara pemasaran seperti itu menjadi kelihatan "nista", sehingga saya menjadi tertarik menulis surat pembaca ini.

Lihatlah pemuatan iklan AMERICAN GLOBAL UNIVERSITY memberikan DR. (HC) UNTUK PARA MASTER dengan hanya membayar langsung Rp 5 juta. Dalam iklan, "sang penjual gelar alias pabrik ijazah" berdalih untuk meningkatkan profesionalisme bagi para master dalam rangka otonomi daerah. Pertanyaan saya: Dari mana diperoleh peningkatan kualitas sumber daya manusia atau profesionalisme jika hanya diberi selembar kertas (ijazah) DR. (HC) tanpa ada usaha peningkatan diri dengan belajar keras dan disiplin tinggi?

Penawaran serupa datang dari STIE IPWI, Lincoln University, San Pedro College of Business Administration, American Institute of Management Studies, dan Senior University. Yang disebut terakhir bahkan menawarkan gelar profesor, meskipun orang tersebut bukan dosen. Asal mampu membayar sejumlah uang dan persyaratan yang ditentukan, gelar profesor dapat disandang.

Ketika saya menelusuri dengan cara yang sederhana, melalui telepon yang tertera pada iklan, ternyata lembaga-lembaga tersebut dikelola oleh orang yang sama. Salah satu dari "lembaga pendidikan" itu bahkan menawarkan untuk langsung ikut wisuda. Caranya? Asalkan sanggup membayar sejumlah biaya yang ditawarkan. Ada juga yang menawarkan seminar satu hari berbiaya Rp 500 ribu dengan imbalan sertifikat MBA.

Lebih afdal lagi, ada program yang disodorkan lembaga tersebut, yaitu "UMROH MBA". Artinya, program umrah 10 hari dan mendapatkan gelar MBA. Barangkali, wisudanya juga di Mekkah Al Mukaromah atau di Madinah Al Munawaroh. Program ini pun pernah diiklankan di harian yang sama. Bagaimana tanggapan dan pendapat Anda, khususnya institusi yang berwenang? Kami tunggu.

Tri Lindasay, S.E.
Bekasi

Tanggapan terhadap Simon P. Tobing

Menanggapi tulisan Simon Parlaungan L. Tobing dalam Forum Pembaca majalah FORUM No.33 Tahun VIII, 21 November 1999, yang berjudul "Tak Mempercayai Gus Dur", saya tergerak mengomentari tulisan tersebut. Alangkah bijaksana untuk tidak mengangkat kekurangan presiden baru yang telah dipilih wakil-wakil rakyat. Mereka ini pun dipilih melalui pemilu yang relatif demokratis, yang tentunya juga mereka mewakili Anda.

Seharusnya kita semua, seluruh komponen bangsa, merasa malu kepada Gus Dur yang dengan kekurangan pada dirinya masih bersedia memimpin bangsa yang sedang tercabik-cabik terancam disintegrasi ini. Kita tidak perlu malu kepada bangsa lain. Tapi, yang lebih penting, presiden dan wakilnya sudah terpilih. Selanjutnya, kewajiban seluruh komponen bangsa bersatu membantu Presiden dan Wakilnya beserta seluruh anggota kabinet, memperbaiki sendi-sendi kehidupan bangsa.

Marilah kita berprasangka baik saja kepada duet pemimpin bangsa dan para pembantunya dalam kabinet tersebut. Saya sangat yakin mereka semua tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan dan akan bekerja sepenuh hati dalam membangun negara Indonesia yang kita cintai.

Saya juga yakin akan dedikasi Kwik Kian Gie dengan tim ekonominya di kabinet mampu memperlihatkan kinerja yang baik, membenahi perekonomian Indonesia. Berilah mereka kesempatan bekerja tanpa direcoki oleh komentar-komentar yang tidak perlu. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai hasil kerja mereka.

H. Usman Husein
Jalan Candrawulan 4/14
Bandung 40264

Jaksa Agung, Kasus BMA Dipetieskan?

Pemilihan Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung yang baru membawa angin segar serta harapan baru bagi masyarakat pencari keadilan yang selama ini sangat memprihatinkan. Selamat atas terpilihnya Bapak! Selain reformasi hukum, ada satu agenda besar yang harus Bapak ketahui, yakni kasus PT Banyumas Mulia Abadi (BMA).

BMA yang mengaku perusahaan multilevel marketing (MLM) yang berskala nasional itu telah meraup uang rakyat dengan modus penggandaan uang. Menurut pegawai perusahaan, tak kurang dari Rp 10 triliun uang nasabah telah disikat.

Sayang, pengusutan kasus oleh kepolisian dan kejaksaan tidak berjalan mulus. Ada apa di balik semua ini?

Ada rumor di Medan, khususnya kalangan nasabah, disinyalir ada konspirasi tingkat elite politik dan pihak perusahaan untuk bermain petak umpet. Mereka seakan meloloskan pemilik BMA, M. Yusuf, dari tangan penegak hukum serta ikut "menghilangkan" dana masyarakat. Padahal, para nasabah sudah lama berusaha mendapatkan kembali uangnya, tapi seperti tidak digubris sama sekali.

Semoga Bapak Marzuki Darusman dapat menemukan solusi yang terbaik untuk kami para nasabah dengan membuka kasus ini sampai tuntas.

Ny. Agustina
Langkat Medan
Sumatra Utara

Bahasa Hukum BCA

Saya tertarik menghadirkan cerita ini, karena Forum Pembaca adalah satu wadah yang tepat untuk memahami bahasa hukum. Pada 8 November lalu, saya, salah seorang pemilik rekening BCA, melalui bantuan teman (pihak ketiga) bermaksud mengambil uang tabungan di BCA Cabang Muara Enim, Sumatra Selatan, dengan membawa slip penarikan yang telah saya tanda tangani (pada tempat yang disediakan) dan buku tabungan Tahapan BCA. Tapi, petugas BCA menolak pencairan tersebut.

Selanjutnya, saya datang langsung untuk minta penjelasan kepada petugas BCA Cabang Muara Enim, khususnya mengenai:

a. Penandatanganan slip penarikan (format terlampir).

b. Butir B.4 dari Ketentuan-Ketentuan Tabungan Hari Depan yang terdapat dalam buku Tahapan BCA yang berbunyi: "Setiap penarikan tunai, penabung harus menunjukkan buku tabungannya kepada petugas bank. Penarikan tunai yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dan kartu identitas asli penabung dan penerima kuasa."

Ternyata (setelah berdebat) antara saya dan pihak BCA berbeda persepsi dalam menerjemahkan kalimat tersebut.

Menurut penafsiran saya, surat kuasa dibutuhkan apabila pemilik rekening, sebagai penarik, tidak dapat memberikan tanda tangannya di slip penarikan karena alasan (situasi) tertentu. Sementara, petugas BCA berpendapat, apabila pemilik rekening (penabung) sebagai penarik tidak dapat hadir langsung untuk mencairkan dana tabungan, walaupun sudah menandatangani slip penarikan dan menyertakan buku tabungan, harus membuat surat kuasa.

Untuk memahami bahasa hukum ini dan untuk mengurangi rasa kecewa kami, mohon penjelasan pihak yang bersangkutan.

Deny Firdaus
SMK Negeri I Muaraenim
Jalan Saleh Kidam No. 22
Muaraenim, Sumatra Selatan, 31315

Mbak Mega Perlu Diganti

Voting dalam pemilihan Wakil Presiden pada SU MPR lalu yang mengantarkan Mbak Mega ke kursi RI-2, merupakan keputusan majelis yang sangat elegan. Dengan keputusan itu pula, figur putri proklamator itu bukan lagi semata-mata menjadi klaim bagi PDIP, tapi telah menjadi sosok dan tokoh milik seluruh rakyat Indonesia.

Pada konteks inilah, tuntutan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di lingkungan PDIP menjadi sangat realistis. KLB menjadi forum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan semua persoalan partai, termasuk mengevaluasi semua program partai. Kecuali itu, KLB sekaligus menjadi suksesi kepemimpinan di PDIP setelah Mbak Mega kini menjadi "Ibu Bangsa".

Suka atau tidak, posisi Mbak Mega sebagai Ketua Umum PDIP harus digantikan. Ia tak pantas lagi hanya memimpin sebuah partai,karena kapasitasnya telah melampaui seorang pemimpin partai. Jabatan barunya sebagai Wapres mengharuskannya lebih berkonsentrasi pada tugas-tugas pemerintahan. Karena itu, sangat tidak mungkin untuk memikirkan lagi masalah-masalah partai.

Suka atau tidak, suksesi harus terjadi di PDIP. Hal ini untuk kepentingan PDIP sendiri dan kepentingan bangsa pada umumnya.

Agoes Putra
Pondokbambu
Jakarta Timur

Saran untuk Hikam

Banyaknya sindiran, kritik, dan cemooh atas pemilihan A.S. Hikam sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) membuat saya ikut terusik memberi saran. Sebagai warga negara yang menyandang jabatan publik, sudah sewajarnya Hikam menjadi sorotan, sebagaimana yang ia lakukan terhadap aparat pemerintah/rezim sebelumnya dengan kritik tajam dan sinis.

Bagi saya, persoalannya, Hikam bak menabur angin terhadap pemerintahan Habibie. Semua kebijakan Habibie tak ada satu pun yang positif di matanya. Yang benar hanyalah cara dan pikirannya sendiri. Maka, ketika ia menerima jabatan Menristek, itu terasa janggal. Ia lupa, keberadaannya sebagai Menristek sesungguhnya karena balas budi Gus Dur, yang menjadi Presiden karena tak terlepas dari dukungan yang signifikan dari Habibie

dan Golkar.

Lucunya, setelah puas melecehkan kepemimpinan Habibie sebagai Presiden, Hikam mengatakan akan datang ke rumah Habibie. Ia ingin bertanya tentang kejelasan ruang lingkup dan kedalaman bidang tugas yang akan diemban. Sebab, menurut dia, Habibie memang pakarnya.

Atas sikap dan kiprah Hikam itu, saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Karena inkonsistensinya begitu telanjang. Selama ini, ia membawa-bawa status ilmuwan yang seharusnya obyektif. Tapi, dalam berkiprah, ia berperilaku sebagai petualang politik, sehingga terkesan licik. Saya menyarankan, Hikam sebaiknya mundur sebagai Menristek. Sebab, kemampuan, integritas, dan kualitas moralnya tidak layak menyandang jabatan itu.

Asadi Rasyid, S.H.
Depok, Jawa Barat

Menggugat Nasionalisme Kwik Kian Gie

Menarik sekali menyimak kolom "Jalan Menuju Kabinet" yang ditulis Suwarno Adiwijoyo dalam FORUM No. 33. Namun, ada sepenggal kalimat yang membuat saya kaget dan ingin berkomentar, yaitu pada penggalan kalimat: "...dengan memasang Kwik Kian Gie yang memiliki reputasi bidang ekonomi yang baik, dan nasionalisme yang kental...."

Dalam kalimat itu, penulis ingin menampilkan sosok Kwik yang masih keturunan Cina, ahli ekonomi, dan punya nasionalisme yang kental. Untuk sosok pertama dan kedua saya setuju. Tapi, untuk poin yang terakhir saya tidak sependapat.

Ketidaksetujuan saya itu dilatarbelakangi pernyataan Kwik sendiri yang ketika memberi alasan menolak tawaran Habibie untuk duduk di Kabinet Reformasi. Memang ia berhak menolak, tapi alasan yang dikemukannya sangat tidak masuk akal. "Saya bisa gila bila duduk di situ," katanya. Kalimat inilah yang tidak bisa saya terima.

Padahal, kita semua tahu, tugas kebinet itu superberat karena dibentuk ketika perekonomian kita berada pada titik rendah. Kini, setelah ekonomi kita bisa ditahan hingga tidak meluncur ke titik yang paling rendah, Kwik bersedia duduk sebagai Menko Ekuin pada Kabinet Persatuan Nasional.

Apakah Kwik tidak khawatir menjadi gila atau ia termasuk manusia Indonesia yang bersifat hipokrit? Bagi saya, Kwik Kian Gie tidak lebih dari seorang petualang politik yang egois, sehingga tidak layak disebut nasionalis.

Shabirun Husnum
Jalan Ambon No. 12
Bengkong PLTD
Batam

Ralat:

Pada Majalah FORUM edisi No. 32/VIII/14 November 1999, tidak tertulis nama LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan). Lembaga inilah yang berperan dalam menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Hukum UI untuk *polling* di rubrik Forum Utama.

Mohon maaf atas kelalaian tersebut.

KARIKATUR

MULYAWAN

KESIMPANGSIURAN KEBIJAKAN

ARBI SANIT
Pengamat Politik

Pemilihan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati serta pembentukan Kabinet Persatuan Nasional memang dibayangi berbagai masalah akut dan perlu penyelesaian mendesak. KKN dan krisis ekonomi yang mendalam terasa sebagai persoalan akut. Sementara, ketidakpuasan Aceh, Irianjaya, dan Ambon sehingga menuntut merdeka dari RI adalah mendesak untuk mendapatkan penyelesaian. Namun, setelah pemerintahan Presiden Gus Dur berlangsung satu bulan, belum terlihat tanda-tanda ketepatan cara pemerintah menanggulangi masalah-masalah tersebut, apalagi tanda-tanda keberhasilannya.

Memang wajar bila dikatakan bahwa pemerintah baru itu sedang mencari cara atau menyusun strategi pemecahan masalah. Tapi, belum terlihatnya pertanda ketepatan cara dan awal keberhasilan langkah telah menimbulkan kesan tentang pemerintah yang mati langkah atau dalam keadaan bingung. Itulah sebabnya dicoba menelusuri inti permasalahan yang dihadapi pemerintah. Apakah hal itu disebabkan kelemahan pelaksanaan (operasi) atau ketidaktepatan strategi?

Sesungguhnya, dalam sebulan terakhir ini, presiden sudah menetapkan berbagai keputusan untuk menanggulangi masalah. Untuk menyelesaikan masalah ketidakpuasan daerah, khususnya Aceh, sudah diperintahkan untuk mengadili pelanggar HAM. Dan, dengan menjanjikan bahwa pemerintah akan menentukan sikap atas tuntutan referendum rakyat Aceh dalam sebulan untuk kemudian disusul dengan perundingan dalam enam bulan, sesungguhnya sudah menjelaskan sikap presiden untuk menyelesaikan masalah Aceh secara politis dengan mekanisme perundingan.

Di luar itu, ternyata aparat keamanan dan para menteri bidang Polkam mencoba membuat kebijakan "tandingan". Menko Polkam dalam berbagai kesempatan memang menegaskan bahwa masalah Aceh sepatutnya diselesaikan melalui perundingan yang berarti menggunakan pendekatan politis. Tapi, oleh Kapolri—dan kemudian ditegaskan menteri pertahanan—disarankan supaya diberlakukan keadaan darurat militer terbatas di Aceh. Lalu, Presiden Gus Dur pun menjawab dengan menegaskan bahwa tidak akan diberlakukan keadaan darurat militer di Aceh. Itu berarti, Presiden tetap dengan strategi semula yang terdiri dari dua tahap. Pertama, meyakinkan masyarakat Aceh tentang penegakan HAM dengan mengadili para pelanggarnya secara terbuka. Kedua, melakukan perundingan dengan segenap pihak yang bersangkutan dengan masalah Aceh.

Memasuki bulan kedua kekuasaannya, Presiden Gus Dur tidak boleh membiarkan perpecahan kabinet yang menyebabkan pemerintah mati langkah. Kelemahan tersebut harus segera diatasi supaya tidak merongrong kepercayaan publik kepada lembaga kepresidenan.

"Kesimpangsiuran kebijakan pemerintah seperti itu dimungkinkan oleh mekanisme pembuatan kebijakan dalam kabinet yang tidak melembaga. Kebijakan pemerintah dibuat hanya berdasarkan saling pengertian antara presiden dan para menteri."

Kesimpangsiuran kebijakan pemerintah seperti itu dimungkinkan oleh mekanisme pembuatan kebijakan dalam kabinet yang tidak melembaga. Kebijakan dibuat hanya berdasarkan saling pengertian antara presiden dan para menteri. Asas kekeluargaan tetap dijadikan basis pembuatan keputusan pemerintah. Akibatnya, para menteri tidak diikat dan "ditekan" oleh mekanisme pembuatan keputusan kabinet yang melembaga, sehingga tetap merasa punya kesempatan membuat interpretasi berlainan. Malah, di luar rapat kabinet, membuat alternatif kebijakan yang berbeda dengan presiden.

Untuk mengatasinya, disarankan supaya Presiden memanfaatkan lembaga kabinet dan segenap mekanisme formalnya, di samping membangun kekuatan politik andalan di dalam dan luar kabinet untuk memperkuat keputusan kabinet, sehingga semua menteri melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, presiden perlu membangun komunikasi formal dengan para menteri untuk menyampaikan sikap dan keputusan-keputusannya. Rapat kabinet hendaknya dijadikan satu-satunya mekanisme pembuatan keputusan pemerintah. Rapat kabinet tentunya membahas masalah demi masalah secara mendasar dan tuntas untuk menghasilkan alternatif solusi. Alternatif solusi itu memerlukan voting untuk mendapatkan keputusan final agar setiap menteri terikat secara mekanis dengan keputusan tersebut.

Pendekatan kompetitif pembuatan keputusan pemerintah seperti itu mempersyaratkan adanya dukungan yang dapat diandalkan oleh Presiden dari mayoritas anggota kabinet. Rasanya, bagi Gus Dur tidak akan sukar mendapatkan dukungan mayoritas itu. Pengaruhnya kepada para menteri dari partai-partai "Poros Tengah", kedekatannya dengan Mega dan menteri-menteri dari PDIP, dan keluwesannya berhubungan dengan para menteri dari Golkar akan memudahkannya mendapatkan dukungan mayoritas dalam kabinet. Tentu saja dukungan tersebut bukan merupakan sikap permanen para menteri. Tapi dukungan itu diperoleh presiden melalui proses negosiasi masalah demi masalah.

Tentunya, kerangka kekuatan presiden dalam kabinet itu tidaklah terlepas dari proses politik yang memuluskannya menjadi presiden. Tapi, untuk memelihara kekuatannya sebagai presiden, Gus Dur memerlukan kekuatan dukungan yang loyal secara relatif permanen. Dukungan itu lebih mudah diperoleh dari partai-partai "Poros Tengah". Untuk itu, Gus Dur memerlukan NU dan kepemimpinannya yang baru sebagai mekanisme penggalang dukungan. NU yang berwawasan dan menegakkan kepemimpinan bagi segenap kekuatan Islam akan dapat diandalkan sebagai kekuatan yang relatif merupakan pendukung inti Presiden Gus Dur. ❑

Panasnya Kenduri Kaum Nahdliyin

K.H. Ahmad Hasyim Muzadi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dan K.H. Sahal Mahfudz sebagai Rais Am. Tapi, persaingan keras sempat terjadi. Selain Poros Tengah, konon konglomerat pun turut bermain. Mengapa NU kembali berasas Islam?

ANNAS

SALAWAT badar bergema ketika perolehan suara K.H. Hasyim Muzadi makin jauh meninggalkan perolehan suara K.H. Said Agil Siradj. Bahkan, meski penghitungan belum selesai, Kiai Agil langsung menghampiri Kiai Hasyim. Lantas, ia memeluk dan mencium Ketua Umum Tanfidziah PBNU baru itu. Dan, tak lama kemudian para peserta muktamar pun ikut menyerbu dan berebut menyalami dan mengelu-elukan K.H. Hasyim Muzadi.

Terpilihnya pengganti K.H. Abdurrahman Wahid secara demokratis itu melengkapi kegembiraan peserta muktamar. Sebab, beberapa jam sebelumnya, mereka juga telah mengelukan K.H. Sahal Mahfudz. Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Maslakul Huda, Pati, Jawa Tengah, itu terpilih sebagai Rais Am Syuriah PBNU. Tampil hampir tanpa saingan kuat, Kiai Sahal berhasil menangguk 288 suara dari 306 suara. Dari semula, mantan Wakil Rais Am itu memang diunggulkan menduduki posisi itu.

Jadi, pemilihan Ketua Umum PBNU memang lebih seru. Apalagi, dalam tahap penjaringan calon, Jumat dini hari, pekan lalu, sebenarnya muncul tujuh nama. Tapi, hanya tiga yang memenuhi persyaratan. Mereka adalah Kiai Hasyim yang meraih 149 suara, Kiai Said Agil yang mendapat 72 suara, dan Ir. H. Salahuddin Wahid yang diusulkan 56 cabang. Karena memperoleh kurang dari 40 kursi, empat nama lainnya, H. Achmad Bagdja, K.H. Mustofa Bisri, Drs. M.H. Wahab, dan H. Husnan, tak bisa mengikuti babak selanjutnya.

Seusai salat Subuh, pemilihan babak penentuan pun digelar. Sidang dibuka oleh Drs. H. Husen Habibu dari Sulawesi Tengah, setelah Rais Am K.H. Sahal Mahfudz hadir di arena muktamar. Tapi, kejutan terjadi sebelum kartu suara dibagikan. Tiba-tiba, Salahuddin yang juga adik Gus Dur itu mengundurkan diri. "Selain masih baru dalam organisasi NU, saya merasa belum layak memimpin NU," ujarnya. Pengunduran ini pun disambut dengan tepuk tangan meriah para muktamirin (peserta muktamar).

Dengan demikian, hanya dua calon yang bersaing ketat: Kiai Hasyim dan Kiai Said Agil. Tapi, akhirnya, ya itu tadi. Ketua PWNU Jawa Timur itu yang menang. Kiai Hasyim meraih 205, sedangkan Said mengantongi 105 suara. Ada tiga suara tidak sah karena tertulis nama Salahuddin yang sudah mundur dan satu suara abstain. "Saya memang yang terpilih, tapi saya
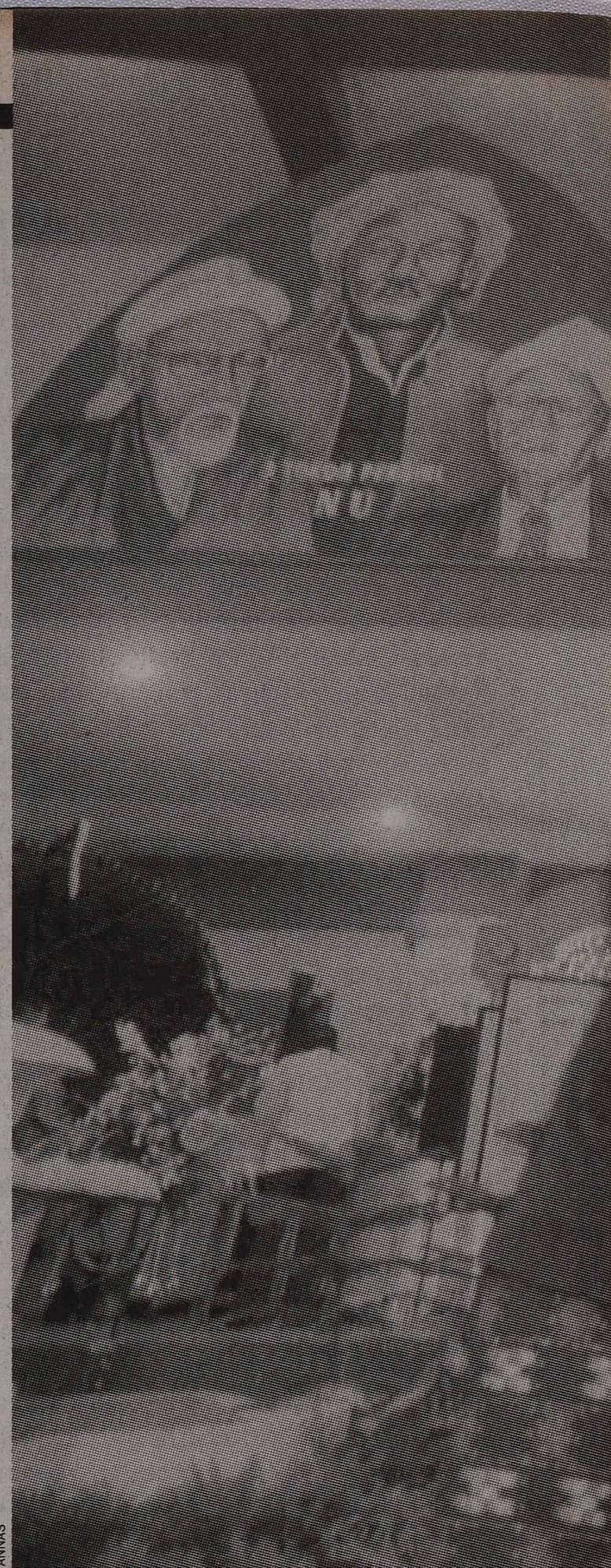
PEMILIHAN KETUA UMUM. *Isu suap politik sempat berembus.*

bukan yang terbaik," kata Hasyim merendah. Maka, selesailah persaingan ketat dan berbagai manuver para promotor kandidat.

Boleh dibilang, pertarungan mereka sudah dimulai jauh sebelum muktamar digelar. Kubu Kiai Hasyim Muzadi, misalnya, telah berkampanye di Jakarta sepekan sebelumnya. Mereka meluncurkan buku "Membangun NU Pasca-Gus Dur". Isinya, tak lain pemikiran-pemikiran Cak Hasyim—demikian ia biasa disapa—mengenai bagaimana membangun masa depan NU. Jadi, tampak sekali kesiapan Cak Hasyim untuk maju dalam pencalonan.

Uniknya, peluncuran buku itu juga dihadiri Fuad Bawazier, Ahmad Sumargono, dan tokoh-tokoh Poros Tengah. Konon, naiknya Hasyim Muzadi memang diinginkan Poros Tengah karena posisi Hasyim di Jawa Timur sangat membantu tumbuh suburnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jika Hasyim naik jadi Ketua Umum PBNU, diharapkan aliansi antara partai yang didirikan Gus Dur itu dan Poros Tengah akan menguat.

Menurut sumber FORUM, tak cuma Fuad yang dikenal jago lobi dari Poros Tengah yang menyokong, tapi juga mantan Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman.

Selain itu, Hasyim juga mempunyai tim sukses yang kuat. Para figur yang tergabung dalam tim ini, seperti Matori Abdul Djalil, Effendy Choiri, dan Deny Daruri dari Poros Tengah yang juga dekat dengan Fuad Bawazier dan Amien Rais.

Lain lagi, basis dukungan bagi Said Agil. Dosen IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu di-*back up* kalangan muda NU yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pemuda dan Pelajar NU (IPPNU), dan sebagainya. Para panitia nasional muktamar yang berasal dari Jakarta disebut-sebut pula berada di belakang Said Agil.

Nah, di Kediri, para pendukung setiap kandidat punya markas sendiri-sendiri. Tim sukses Kiai Hasyim menginap di Hotel Safari dan Jalan Wellirang 19. Sementara, para penyokong Kiai Said Agil tinggal di Jalan Sahardjo 10.

Semula, perang kandidat pramuktamar dilakukan dengan gaya klasik dan sederhana.

ANNAS
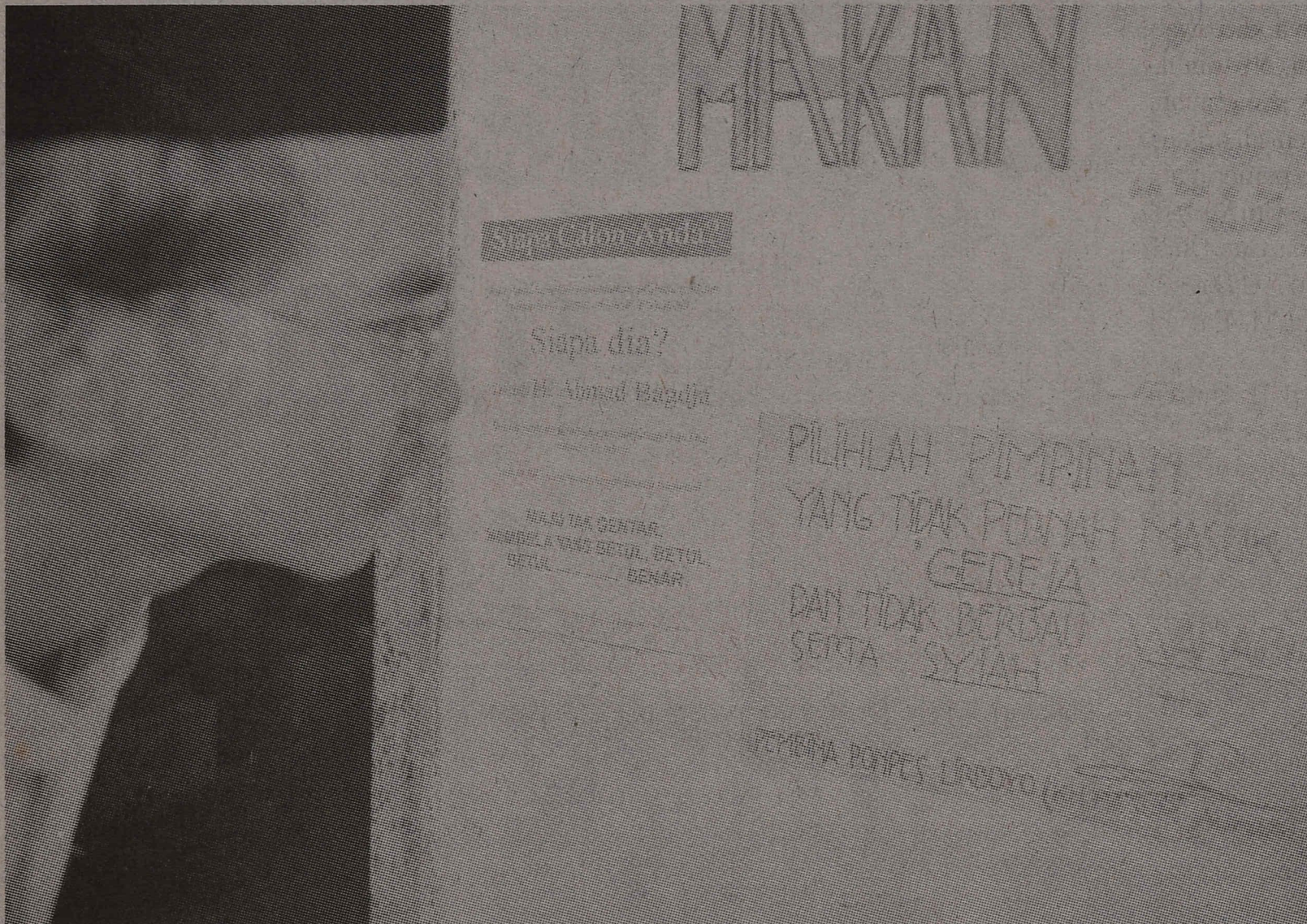
KRITERIA CALON. *Mustofa Bisri sempat jadi kuda hitam.*

Mereka hanya membagi-bagi buku, kaus, dan berbagai atribut lainnya. Tapi, ketika memasuki hari pertama muktamar, 20 November lalu, persaingan memanas. Manuver politik dilakukan silih berganti. Bahkan, belakangan rumor suap politik berembus. Persaingan makin sengit ketika setiap kandidat mencari dukungan ke K.H. Abdullah Faqih, dari Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Saat ini, Kiai Faqih memang paling disegani di kalangan ulama NU.

Tapi, yang terjadi selanjutnya telah keluar dari tradisi kaum nahdliyin. Mereka mengedarkan selebaran yang sifatnya mengejek dan menghina calon lain. "Pilihlah pemimpin yang tidak pernah masuk ke gereja dan tidak pernah berbau Wahabi," begitu bunyi salah satu selebaran itu. Di dalamnya terpampang foto Said Agil. Dan, di bagian lain tertulis tanda tangan dan komentar pembina Pesantren Lirboyo, K.H. Maksum Jauhari. "Said Agil itu murid terkutuk di sini," tulis Kiai Maksum. Terang saja, hal itu membuat pendukung Said mencak-mencak.

Karena itulah, para kiai sepuh NU segera bertindak. Sejumlah pertemuan tertutup mereka lakukan untuk membahas persaingan tak sehat itu. Bahkan, mereka sempat mempertimbangkan Mustofa Bisri sebagai calon kuda hitam. Ini sebagai upaya meredakan ketegangan kubu Hasyim dan Said Agil.

Tapi, rupanya, perang antarkubu itu tak juga berhenti. Bahkan, rumor suap politik kian kencang. Isu ini bermula dari *stand* mobil Timor. Pasalnya, anjungan mobil Timor yang berada di belakang arena muktamar itu "menghadiahkan" 18 mobil Timor kepada para kiai. Mobil dengan nomor khusus itu lantas mereka pakai selama muktamar. Hasyim yang dituding berada di balik pemberian hadiah itu mengelak. "Itu bukan saya," ujarnya.

Kendati begitu, konon, memang ada beberapa perusahaan ikut "mensponsori" muktamar. Kiai Hasyim, misalnya, dituduh mendapat dukungan dana dari PT Maspion. Dan, menurut kabar, panitia di Lirboyo mendapat sumbangan yang cukup besar dari pabrik rokok keretek Gudang Garam, Kediri.

Karena persaingan kian tak terkendali, akhirnya 12 ulama sepuh melakukan pertemuan tertutup lagi. Dalam pertemuan di rumah Kiai Idris, mereka membahas secara intensif trik politik yang dimainkan para tim sukses Hasyim dan Said Agil. Salah satu keputusan dalam pertemuan itu adalah mengajak para kandidat dan muktamirin kembali kepada yang *haq* serta bertindak sesuai dengan akhlakul karimah.

Para kiai sepuh pun akhirnya benar-benar menampilkan K.H. Mustofa Bisri sebagai calon alternatif. Tim sukses Gus Mus—begitulah panggilan akrabnya—segera bergerak. Tapi, yang mengherankan, kiai asal Rembang itu malah memilih diam dan tidur pada saat pemilihan. Dan, akhirnya, Gus Mus, yang disokong kubu Jakarta dan Yogyakarta, malah tak mau maju. Tak lain karena jumlah pendukungnya kurang dari 40 suara alias tidak memenuhi syarat pencalonan.

Kegagalan Gus Mus sebenarnya lebih karena ia tak didukung tim sukses yang memadai. Meskipun sejumlah kiai sepuh lebih senang kepadanya, keinginan sejumlah pihak menggegolkan Gus Mus tak membuahkan hasil. Tak lain, lantaran memang dari segi penggalangan suara, mereka benar-benar payah.

Mustofa Bisri bukan tak menyadari hal itu. Karena itu, dalam pertemuan di Hotel Merdeka, Kediri, 24 November lalu, selain mengatakan tak hendak mencalonkan diri, ia juga mengatakan sudah saatnya organisasi NU dikembalikan ke bentuk semula. Secara organisasi, NU harus lebih kuat di Syuriahnya karena NU memang organisasi para ulama. "Sudah saatnya NU kembali ke bentuk semula, yang di dalamnya Tanfidziah hanyalah pelaksana," ujar Kiai yang juga penyair itu.

Kasak-kusuk yang berlebihan dalam muktamar itu juga membuat Kiai Faqih gundah. Bahkan, menurut kabar, kiai dari Tuban itu marah karena beberapa kiai terlibat dalam dukung-mendukung. "Mbah Faqih marah-marah. Kiai kok ikut-ikutan dukung-mendukung," kata seorang sumber FORUM menirukan kata-kata Kiai Faqih. Akhirnya, Kiai Faqih memilih menyendiri dan pulang ke Tuban.

Konon, sebelumnya skenario memang sudah ditata rapi. Sudah ada pertemuan pendahuluan antara Gus Dur, Kiai Faqih, dan Hasyim Muzadi di Tuban, Oktober lalu, tak lama setelah Gus Dur menjadi Presiden. Menurut kabar, waktu itu sudah ada kesepakatan komposisi ketua dan wakil Rais Am dan Tanfidziah. "Kiai Sahal dan Kiai Hasyim sudah diplot sejak di situ," kata sumber FORUM.

Walaupun terbukti skenario itu yang terwujud, tak semua peserta menyambut baik

terpilihnya Kiai Hasyim. Soalnya, di bawah kepemimpinan Hasyim Muzadi, NU dikhawatirkan akan menjadi gerbong pemerintah. Organisasi itu tidak lagi bisa menjadi organisasi rakyat yang kritis terhadap pemerintah. "Tak mungkin pribadi seperti Hasyim Muzadi bisa mengatakan "tidak" kepada Gus Dur," kata K.H. Malik Madani dari PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta kepada M. Faried Cahyono dari FORUM.

Namun, menurut pengamat NU Andree Feillard, dengan terpilihnya Cak Hasyim, ada juga keuntungannya buat NU sebagai organisasi. Menurut Andree, kelemahan Gus Dur selama ini karena ia seorang visioner dan gagal dalam membina NU sebagai organisasi. "Hasyim bisa membuat NU sukses secara organisatoris. Cabang-cabang akan terurus sebagaimana sudah dibuktikan Hasyim di Jawa Timur," kata Feillard.

Memang, tak hanya soal nakhoda yang diributkan. Masalah lain yang seru dibicarakan adalah soal perubahan asas. Inilah untuk pertama kali masalah asas kembali diperdebatkan setelah NU mengubah asas Islam menjadi Pancasila dalam Muktamar ke-27 NU di Situbondo, 1984.

Dalam sidang yang dipimpin K.H. Hafidz Ustman, sejumlah pendapat muncul, misalnya dari Effendy Yasid, dari PCNU Magelang. Menurut dia, penerapan asas Islam di NU pada Muktamar Situbondo adalah paksaan Orde Baru. "Setelah rezim Orba hilang, mestinya direvisi lagi," ujarnya. Penerapan asas Pancasila dinilai tidak sesuai dengan "Khittah 1926".

Memang, sejak berdiri tahun 1926, asas NU adalah Islam. Pemerintahan Soeharto menginginkan agar Pancasila dipakai sebagai satu-satunya asas. Dan, NU akhirnya menurutinya pada Muktamar Situbondo. Saat itu Kiai Achmad Siddiq berhasil mencarikan argumentasi untuk menerima asas tunggal Pancasila bagi ormas ini. Yang menarik, saat itu NU menjadi ormas Islam pertama yang menerima asas tunggal.

Pada sidang komisi, sebagian peserta menginginkan NU kembali ke asas Islam seperti waktu NU pertama kali didirikan di Surabaya, 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926. Alasannya, K.H. Hasyim Asy'ari telah melakukan istikharah untuk menentukan asas NU. Tapi, pendapat itu tak diamini seluruh peserta. "Menggunakan asas Pancasila tak akan merugikan kepentingan Islam," kata seorang peserta. Akhirnya, dalam pleno sidang Komisi, gagasan itu pun ditolak. Keputusan ini akhirnya disahkan dalam sidang pleno. Jadi, Pancasila tetap sebagai asas NU.

DOK KH H M
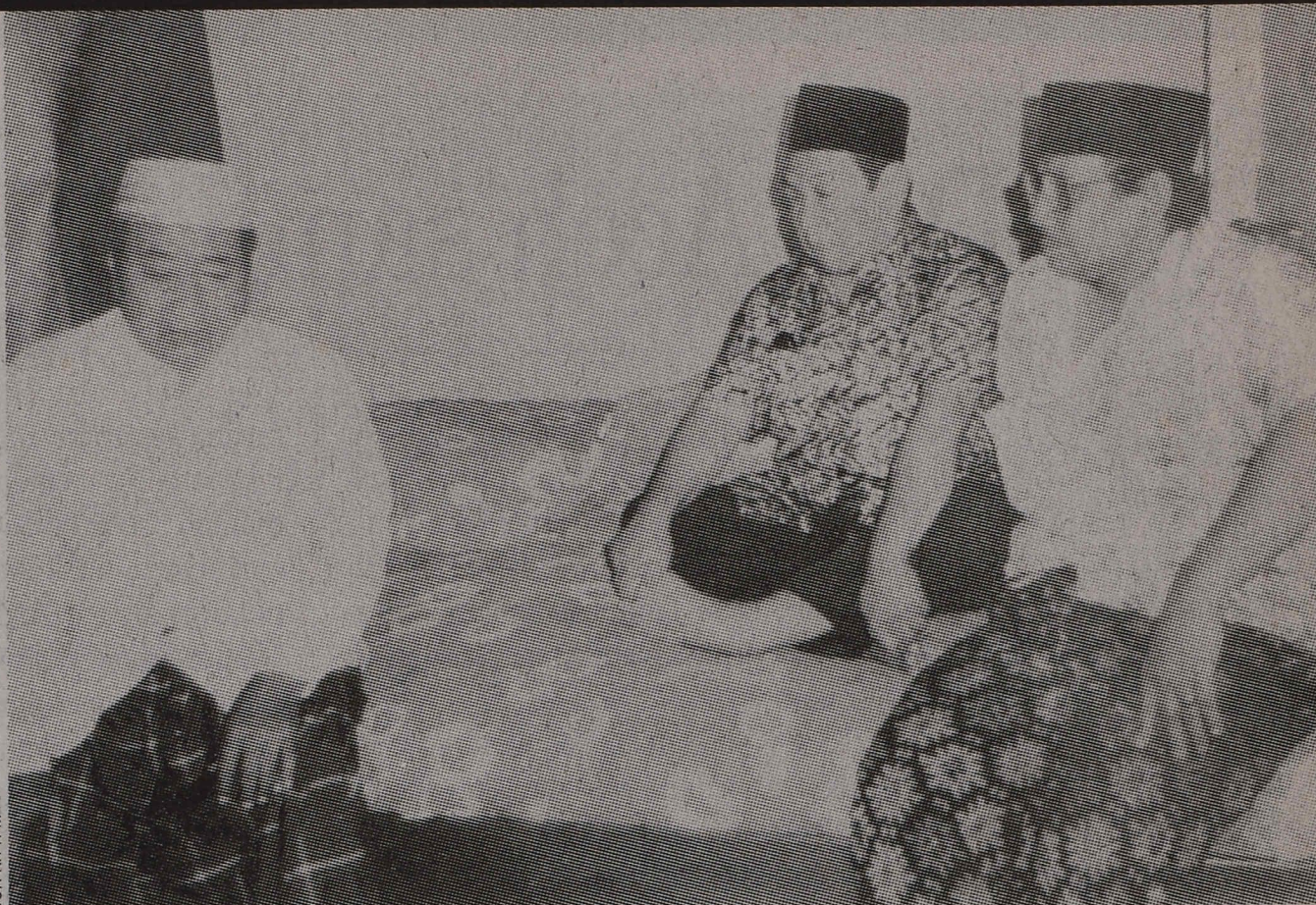
KIAI FAQIH, GUS DUR, DAN HASYIM MUZADI. *Sudah diplot sejak awal.*

ANNAS

PENDUKUNG HASYIM MUZADI. *Muncul selebaran menjelekkan calon lain.*

Tak urung keputusan itu mengundang protes. Para peserta berebut mikrofon untuk menyampaikan pendapatnya. Bahkan, banyak peserta yang teriak-teriak histeris minta muktamar mengembalikan NU ke prinsipnya semula, yaitu berasaskan Islam. Dan, menurut kabar, alotnya sikap NU mempertahankan Pancasila itu karena "titah" alias pesan Gus Dur Kiai Sahal menolak. "Enggak ada titah-titahan," ujar K.H. Sahal.

Untuk mengatasi perbedaan pendapat itu, para kiai sepuh pun berembuk. Mereka di antaranya, K.H. Abdullah Faqih, K.H. Turmudzi Badrudin, K.H. Imron Hamzah, K.H. Idris Marzuki, K.H. Subadar, K.H. Nurul Huda Jazuli, K.H. Sahal Mahfudz, dan K.H. Abdullah Abbas. Hasilnya, akhirnya NU mengganti asas organisasi dari Pancasila menjadi asas Islam, menurut Ahlussunnah wal jamaah dan menganut salah satu mazhab empat.

Walaupun begitu, dalam prinsip bernegara, mereka tetap memakai Pancasila. "Jadi, tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan," kata Kiai Sahal.

Begitulah, akhirnya berbagai ketegangan itu selesai bersama usainya muktamar kaum nahdliyin.

Hanibal W.Y. Wijayanta, M. Toha, dan Widiarsi Agustina (Kediri)

Dari Aceh sampai Soeharto

Selain soal siapa yang pengganti Gus Dur, sebetulnya ada lagi yang ditunggu masyarakat. Tak lain, apa saja rekomendasi yang dikeluarkan dalam Muktamar ke-30 NU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Sebab, dari situ, masyarakat bisa mengintip visi NU terhadap aneka masalah yang tengah berkembang di masyarakat.

Nah, pada Muktamar NU kali ini, sejumlah seruan penting telah dilontarkan. Rekomendasi itu mencakup beberapa masalah aktual. Di antaranya, soal permintaan referendum oleh rakyat Aceh, pengadilan mantan Presiden Soeharto, keberadaan Dwifungsi TNI/Polri, pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah. Bahkan, para tokoh NU juga menyoroti masalah peredaran dan penggunaan narkotik dan obat-obatan berbahaya (narkoba).

Masalah Aceh tampaknya menjadi sorotan utama. Itu terlihat dari banyaknya peserta (muktamirin) yang mendesak agar Muktamar membahas dengan serius masalah tersebut. Apalagi, para muktamirin dari Aceh sempat mengancam akan pulang lebih dulu jika soal referendum di Aceh tak ditelaah. Akhirnya, dalam sidang pleno komisi rekomendasi, Kamis pekan silam, para perserta sidang sepakat mengeluarkan rekomendasi tentang Aceh.

Isi rekomendasi itu, Muktamar menghargai tuntutan rakyat Aceh untuk melaksanakan referendum. Namun, Muktamar juga tetap menegaskan bahwa Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Indonesia. Karena itu, Muktamar mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dan cepat agar gejala disintegrasi bangsa tidak terus menjalar. Lalu, yang harus segera dipecahkan adalah masalah distribusi kekayaan pusat dan daerah yang selama ini dinilai tidak adil.

ANNAS

SUASANA MUKTAMAR. *Gejala disintegrasi harus segera diatasi.*

Tentu, diloloskannya rekomendasi tersebut bukan karena tekanan warga NU dari Aceh tadi. Melainkan karena warga nahdliyin menganggap kaum muslimin di provinsi itu sebagai saudara. Bahkan, seorang muktamirin dari Jawa Barat sempat mengusulkan agar ibu kota RI dipindahkan ke Aceh, asalkan Aceh tak melepaskan diri dari Indonesia.

Dalam masalah hukum, warga NU mengeluarkan beberapa keputusan yang menyangkut beberapa isu sensitif. Di antaranya, meminta pemerintah menegakkan supremasi hukum dengan mengadili mantan Presiden Soeharto. Muktamar juga merekomendasi perlunya segera dilakukan penelitian untuk menemukan para pelaku pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh, Lampung, Tanjungpriok, Haur Koneng, Banyuwangi, Ambon, dan sebagainya.

Yang agak menggembirakan, mereka juga menyerukan penghapusan konsep Dwifungsi TNI/Polri. Tampaknya, para muktamirin sepakat dengan para mahasiswa dan pejuang demokrasi yang selama ini menuntut pencabutan peran politik tentara.

Tak cuma menyorot masalah bangsa. Muktamar NU juga mengeluarkan rekomendasi untuk nahdliyin sendiri. Diantaranya, yang terpenting, pembentukan komisi politik di PBNU. Komisi itu diharapkan mampu menjaga kemurnian Khitah 1926, yang selama ini menjadi landasan utama NU. Selain itu, komisi politik itu juga berfungsi menampung aspirasi politik warga NU, khususnya untuk menghadapi pelaksanaan pemilu. Karena itu, "Komisi itu juga bisa mengeluarkan fatwa politik dalam situasi dan kondisi yang dibutuhkan," kata Kemas Madani, pemimpin sidang pleno Komisi Rekomendasi.

Sejak Pemilu 1999 lalu, orang-orang NU telah mendirikan beberapa partai politik. Tapi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terbesar dan yang saat itu direstui oleh Gus Dur. Nah, dalam kaitannya dengan penyaluran aspirasi, Muktamar tetap memberi warga NU kebebasan untuk menggunakan hak politiknya. Tapi, Muktamar menganjurkan agar warga nahdliyin mempertimbangkan hubungan historis dengan partai yang ada.

Para peserta Muktamar juga bersepakat ihwal posisi NU sendiri. Mereka menginginkan agar seluruh pengurus PBNU hingga tingkat ranting tetap menempatkan NU sebagai organisasi keagamaan, bukan organisasi politik. Karena itu, NU harus selalu bersikap kritis terhadap partai mana pun, termasuk partai yang dianggap sebagai penyalur aspirasi politik warganya.

Semua rekomendasi itu memang cukup merdu. Tapi, yang penting, tentu pelaksanaannya.

Munawar Chalil (Jakarta), Widiarsi Agustina, dan Mochamad Toha

K.H. Ahmad Hasyim Muzadi:

"Waktu Orde Baru, NU adalah Golkar Jilid Satu"

"TUGAS saya mengamankan agar NU jangan sampai terkoyak oleh tarik-menarik pihak yang berkepentingan di setiap pemilu." Tekad itu dilontarkan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi tiga tahun lalu, ketika terpilih menjadi ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur. Kini, per 26 November lalu, lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Malang, itu telah resmi menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menggantikan Abdurrahman Wahid. Tugas Hasyim Muzadi, seperti yang dilontarkannya dulu itu, akan lebih berat dilaksanakan. Sebagai figur puncak di NU, Hasyim pasti akan sering berinteraksi dengan kekuatan politik.

Kehidupan pria kelahiran 8 Agustus 1944 di Tuban, Jawa Timur, yang kini punya enam anak itu memang tidak pernah lepas dari dunia politik. Dia meninggalkan gelanggang politik praktis pada 1990 untuk menunjukkan bahwa dia serius mengamankan NU dari kepentingan kekuatan politik. Sejak itu pula, pria yang menikahi Muthammimah pada 1972 ini mendirikan Pesantren Al Hikam di Malang. Melalui pesantren tersebut, Hasyim bercita-cita mencetak santri-santri terbaik.

Perjalanan karir Hasyim Muzadi di NU bisa dibilang dari bawah. Ketika masih berstatus mahasiswa tahun 1964, dia terpilih sebagai ketua ranting Ansor Desa Bulu, Kecamatan Bululawang, Malang. Kemudian, dalam kurun waktu delapan tahun, dia naik menjadi ketua cabang NU Kodya Malang. Karena begitu banyak kegiatan politik yang dilakukannya, baru pada 1987, Hasyim berhasil menjadi wakil ketua PWNU Jawa Timur. Lima tahun kemudian, penulis buku bertajuk *Membangun NU Pasca Gus Dur: dari Sunan Bonang sampai Paman Sam* itu naik menjadi ketua untuk wilayah yang sama.

Dalam era kepemimpinan Hasyim itulah, NU Jawa Timur menghadapi realitas politik baru. Ketika rezim Soeharto tumbang dan digantikan rezim B.J. Habibie, koridor politik terbuka lebar dan orang pun bebas mendirikan partai. Eforia keterbukaan ini juga melanda kalangan nahdliyin. Partai-partai yang mengandalkan basis massa NU pun bermunculan. Kepemimpinan Hasyim diuji. Keinginan untuk menyatukan suara warga NU Jawa Timur membuat mantan ketua cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Malang itu mengimbau agar kaum nahdliyin mencoblos Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemilu meski dia sendiri tidak menjadi pengurus PKB.

ANNAS

HASYIM MUZADI DIKAWAL BANSER. *"Jangan sampai menjadi Golkar Jilid II."*

Imbauan itu bisa dibilang cukup berhasil. Mayoritas anggota DPR dari PKB, 25 orang, berasal dari Jawa Timur.

Hasyim juga dikenal pandai menjaga jarak dengan semua faksi di tubuh NU. Karena itu, resistensi kaum nahdliyin terhadap Hasyim Muzadi sebagai ketua umum PBNU hampir bisa dianggap nihil. Apalagi, Gus Dur sendiri secara terang-terangan menjagokan Hasyim. Tak aneh kalau sempat tersiar kabar, terpilihnya santri yang sering berpindah-pindah pondok pesantren itu akibat "intervensi" Gus Dur. Karena itu pula, ada kekhawatiran bahwa Hasyim yang pernah "nyantri" di Pondok Pesantren Gontor itu takut mengkritik Gus Dur.

Apa tanggapan Hasyim soal itu? Akan dibawa ke mana NU nantinya? Semua jawaban pertanyaan tersebut disampaikan Hasyim Muzadi kepada Widiarsi Agustina dan Mochamad Toha dari FORUM yang menemuinya sebelum dan sesudah pemilihan ketua umum PBNU. Berikut petikannya.

Bagaimana NU nanti mengkritisi Gus Dur dan memposisikan diri terhadap pemerintah?

Biasa saja dan proporsional. Bagaimana semestinya. Kalau memang pemerintah itu benar, harus dibantu dan didukung. Hal itu merupakan kewajiban setiap warga negara. Kalau dia salah, ya, diperingatkan. Kalau kurang, ditambahi. Kan begitu saja. Jadi, tidak

ada sifat apriori. Apriori menerima juga tidak, apriori menolak juga tidak. Itulah yang saya sebut kritis proporsional. Sebab, kalau NU jadi Golkar Jilid II, itu berarti pengembangan SDM dan LSM-nya macet."

Kalau begitu, di masa lalu NU bagian dari Golkar?

Ya, waktu Orde Baru, NU adalah Golkar Jilid I. Tapi, sekarang ini, jangan sampai jadi Golkar Jilid II. Golkar dulu kan selalu menggandol penuh sama kekuasaan.

Lantas, hubungan dengan partai-partai politik seperti PKB, PKU, dan PNU?

Ya, tetap independen saja. Jadi, menghitungnya dari ukuran sejauh mana kepedulian organisasi politik terhadap NU sehubungan dengan kontribusi yang diberikan. Bukan NU ikut partai politik yang mana. Tapi, partai politik mana yang secara nyata membela kepentingan dan aspirasi warga NU. Untuk saat ini, mungkin yang paling dekat hubungannya adalah PKB. Ya, mungkin karena PKB dapatnya paling banyak. Yang lain, seperti PKU, PNU, itu dibuat oleh perorangan. La, PKB itu diproses melalui pengurus (NU), sehingga hampir semua pengurus *nyoblos* PKB. Nah, kalau yang didirikan sendiri, dipersilakan coblos sendiri. Jadi, di sini tidak ada anak emas atau anak tiri, melainkan karena fakta proses kelahiran partai tersebut.

Mengapa tidak dibuat satu partai sendiri, sehingga tak jadi rebutan?

Iya kalau mereka mau. Memang sekarang kemungkinan itu terbuka. Ketika itu, terjadinya friksi antarpartai, baik secara langsung atau tidak, memang karena ada campur tangan pejabat. Soal kelahiran partai, antara dari struktur NU dan dari perorangan, berbeda. Kalau dari perorangan belum tentu bisa di-NU-kan. Apalagi kalau proses lahirnya ada konspirasi dengan orang luar NU. Seperti Pak Hamzah Haz yang orang NU, dia ketua PPP. Tapi, PPP kan bukan cuma NU. Apa mau PPP itu hanya memperhatikan NU, mungkin akan ditentang oleh kelompok lain.

Di masa mendatang, bagaimana bentuk hubungan NU dengan agama lain atau pihak lain?

NU kan punya visi kebangsaan. Jadi, wawasan keagamaan yang disatukan dengan masalah-masalah kebangsaan. Maka, ketika NU membawakan masalah-masalah keagamaan dan prinsip-prinsip nilai ini disajikan kepada seluruh bangsa. Semuanya itu saudara, ada prinsip *ukhuwah Islamiyah* dan *ukhuwah wathaniyah*, sehingga hubungan NU dengan seluruh komponen bangsa itu tetap menghargai Bhineka Tunggal Ika.

ANNAS

HASYIM MUZADI BERSAMA SAID AGIL SIRADJ USAI VOTING. *"Yang dititipi siapa?"*

Kalau NU dengan Muhammadiyah?

Hubungan saat ini merupakan proses yang menggembirakan. Sebab, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, yang akhir-akhir ini terjadi, lebih banyak pada perebutan strategis dan taktis daripada masalah substansi agama. Sebenarnya, perbedaan secara substansi soal agama tidak banyak. Dan lagi, jika Muhammadiyah dengan NU bisa bekerja sama, akan lebih banyak masalah yang bisa diselesaikan.

Kabarnya, Gus Dur yang menitipkan Anda agar terpilih...

Yang dititipi siapa? Yang benar saja. Jadi, saya jangan ditanya "katanya", deh. Sebab, ada "katanya" yang lain. Yang dititipi siapa, karena forum Muktamar juga bisa dikooptasi. Apakah ketua cabang juga bisa didikte. Yang benar saja. Seseorang menjadi ketua cabang, dia sudah diproses, dipilih sejak awal. Dia kan sudah matang, jadi dia sudah pemimpin. Ini bedanya di NU dengan di organisasi lain. Kalau yang lain kan untuk pemilihan ketua ditentukan oleh ketua wilayah. Wilayah sangat dikooptasi oleh ketua dari pusat. Kalau NU, tidak. Ketua cabang itu ditentukan oleh ranting. Wilayah itu ditentukan oleh cabang.

Benarkah, untuk menjadi ketua PBNU, seseorang harus mendapat restu dari kiai-kiai sepuh?

Oh, tidak benar. Yang penting dia dipilih dalam Muktamar. Kalau soal restu itu terlalu dibesarkan, akan tercipta pemimpin yang kerdil, yang menggandol kepada bayang-bayang kiai karismatik. Dan itu sangat merugikan masa depan NU di saat masalah-masalah sudah multidimensional. Kalau pemimpinnya seperti itu, bagaimana dia akan mampu mengatasi persoalan-persoalan? Jadi, dia harus berpijak kepada prestasi sendiri.

Jadi, Gus Dur sendiri tidak memberi restu, bukankah Anda dekat dengannya?

Tidak ada. Yang ada adalah saya sama Gus Dur, selama ini, secara makro ada kecocokan pemikiran. Sedangkan secara mikro, saya lebih intensif daripada Gus Dur sendiri. Sebab, Gus Dur tidak tertarik pada masalah-masalah yang bersifat implementatif. Dia lebih pada wacana, pada pemikiran, dan landasan strategis. Implementasi riil itu justru saya yang melakukan. Jadi, kalaupun kami dekat, itu sambungan pemikiran makro tadi. Bukan karena menggandol bayang-bayang kebesarannya. Kalau saya membela Gus Dur, sering ketika dia mau dijatuhkan orang. Tetapi, kalau dikatakan saya itu besar karena dukungan Gus Dur, sama sekali tidak. Saya masuk NU lebih dulu daripada Gus Dur yang masuk NU baru tahun 1979. Sedang saya sejak tahun 1964 sudah bergabung. Lima belas tahun saya lebih dulu dibandingkan Gus Dur. Dan saya menjadi NU sejak menjadi ketua ranting di daerah Bululawang, Malang. Dus Dur langsung di PB. Ini, ya, memang berbeda. Penting itu. Selain itu, Gus Dur yang baru datang dan memimpin NU dalam segi wacana dan strategis, belum tentu menguasai implementasi ke bawah. Nah, justru saya yang menolong dia di bidang itu. Bukan berarti saya menggandol sama Gus Dur. Yang menggandol itu kan yang *ngiterin* dia, tahu-tahu dapat jabatan. Silakan tulis yang sejujurnya. Di mana saya pernah satu tempat dengan Gus Dur? Tidak ada. Gus Dur ada di Jakarta, saya ada di Jawa Timur. □

K.H. Sahal Mahfudz: "Dari Dulu, Syuriah yang Memimpin"

ANNAS

SAHAL MAHFUDZ DI MUKTAMAR NU. *Sering menjadi rujukan.*

LEMBAGA Syuriah NU di era mendatang diramalkan akan lebih banyak berperan dibandingkan lembaga Tanfidziah yang sebelumnya dipimpin Gus Dur. Maklum, selama dipimpin Gus Dur, kiprah Tanfidziah, terutama kiprah Gus Dur sendiri, "menutup" peranan pengurus teras lainnya, termasuk pengurus Syuriah yang lebih banyak mengurusi masalah keagamaan. Apalagi, NU telah menyatakan kembali ke Khitah 1926, sebagai sebuah organisasi keagamaan. "Lembaga Syuriah atau Rais Am harus diberi peran yang besar dalam organisasi," kata pengamat politik, La Ode Ida.

Tugas sebagai Rais Am, pemimpin lembaga Syuriah, kini berada di pundak K.H. Sahal Mahfudz. Dalam Muktamar NU di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pekan silam, ulama senior itu mengungguli kandidat Rais Am lainnya. Pada pemilihan akhir, dari 305 suara yang masuk, 288 peserta Muktamar memilih ulama kelahiran Pati, 17 Desember 1937, itu. Tidak terlalu mengejutkan. Sebelum pemilihan, memang sudah santer terdengar kabar bahwa mantan wakil K.H. Ilyas Ruchiyat, Rais Am sebelumnya, itu akan menduduki jabatan Rais Am. Apalagi, K.H. Abdullah Faqih, kiai sepuh dari Pesantren Langitan, Tuban, menolak dicalonkan.

Sebelumnya, menurut pengakuan Sahal Mahfudz , saat bertemu Gus Dur, Oktober lalu, dia justru mengusulkan agar Gus Dur saja yang jadi Rais Am. "Dur, kelihatannya cabang-cabang ingin kamu jadi Rais Am," kata Sahal kepada Gus Dur. Namun, Gus Dur menyatakan, "Tidak. Ini karena Hadlaratus Syaikh mendirikan NU berdasarkan fikih. Dari pengalaman, Kiai Ahmad Shidiq, ahli fikih, kemudian Kiai Ilyas Ruchiyat juga tidak pernah melupakan fikih. Jadi, jangan saya, saya ini bangsa Baduy," kata Gus Dur kepada Sahal yang masih punya hubungan keluarga dengan dia. Lantas, Sahal balik bertanya kepada Gus Dur, "Terus, siapa yang akan mengajar fikih?"

"Ya, *sampeyan*, kayak enggak *ngerti* tradisi NU saja, biasanya yang *ngusulin* justru yang jadi," ujar Gus Dur.

Sahal Mahfudz memang orang yang tepat memimpin Syuriah. Pengalamannya berorganisasi bisa dikatakan lengkap. Ia pernah menduduki jabatan Khatib Syuriah PWNU (Pengurus Wilayah NU) Jawa Tengah (1980-1982). Setelah itu, Sahal menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah (1982-1985). Kemudian, melalui Muktamar ke-29 di Cipasung, Jawa Barat, dia terpilih menjadi wakil rais am NU.

Di luar organisasi NU, Sahal juga cukup aktif. Tercatat, dia pernah menjadi anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dan Rektor Institut Nahdlatul Ulama di Jepara. Selain itu, ia juga mengajar di Universitas Islam Malang.

Sekilas, melihat penampilan putra pendiri Pondok Pesantren Kajen, Pati, itu orang akan kecele dan mungkin cenderung meremehkan. Padahal, di balik wajah tirus dan tubuh kurusnya, tersimpan kecerdasan dan keluwesan berkomunikasi yang luar biasa. Orang yang berbicara dengan pengasuh Pesantren Maslakul Huda, Pati, akan mengagumi ketinggian intelektualnya.

Tidak hanya itu, dalam Forum Langitan, pandangan Sahal yang juga Direktur Perguruan Islam Mathaliul Huda, sering menjadi rujukan utama ulama sepuh. Kedalaman ilmu agama dan pemahaman kitab kuningnya diakui di kalangan ulama NU. Karena kedalaman ilmu agama dan kemampuan berkomunikasi itu pula, anak ketiga dari enam bersaudara tersebut sering diminta sebagai pembicara utama dalam berbagai pertemuan dan seminar. Bahkan, tidak terbatas di Indonesia saja, dalam forum seminar keagamaan bertaraf internasional pun Sahal sering diundang sebagai pembicara.

Dalam menyampaikan pendapat, suami

ANNAS
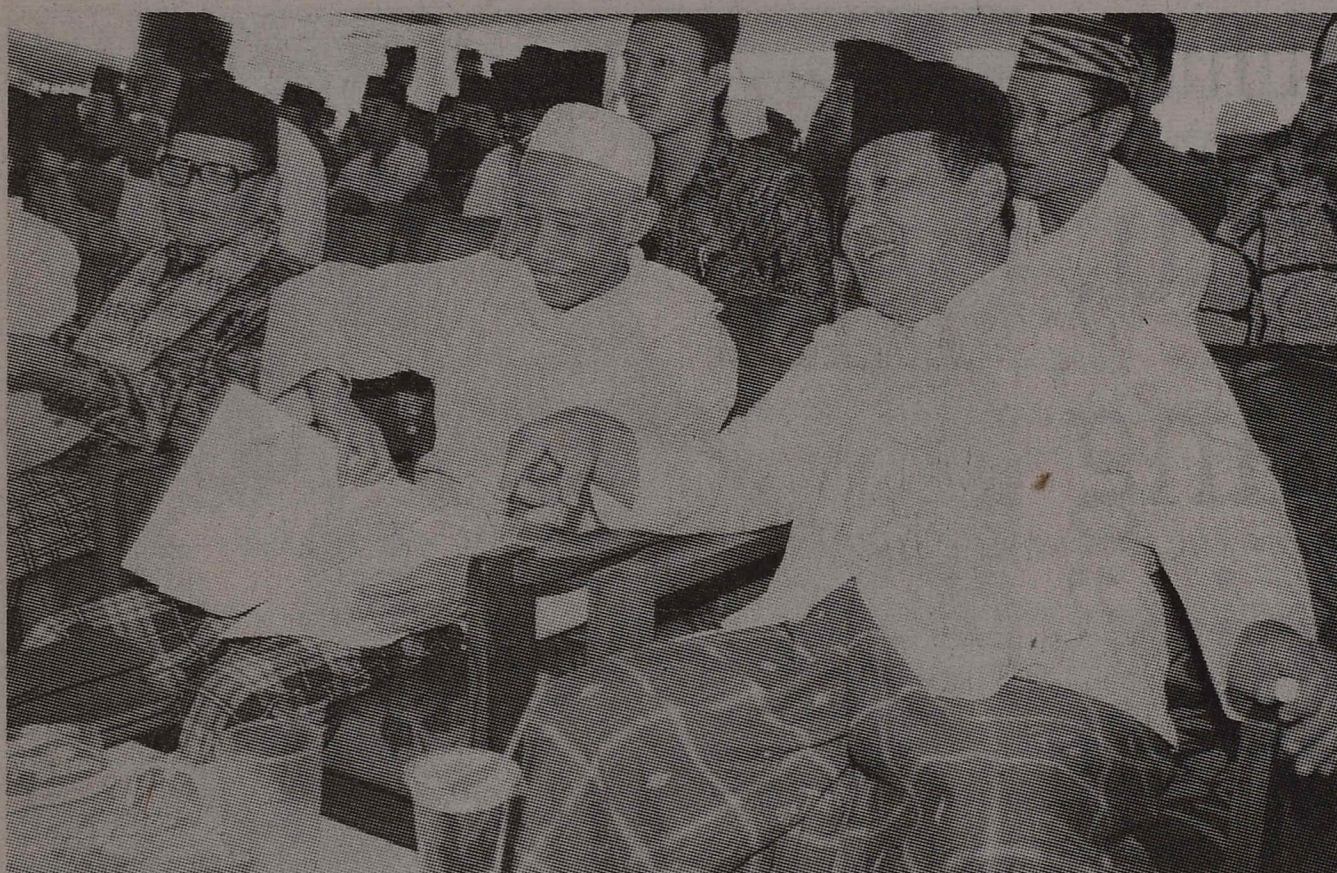
SAHAL BERSAMA ABD. FAQIH DAN ILYAS RUCHIYAT. *Kami tidak akan pakewuh.*

Mafisah ini sering bicara blak-blakan. Tak jarang, dalam mengeluarkan fatwa, pendapatnya berbeda dengan ulama, termasuk ulama NU sendiri. Misalnya, hukum mencoblos dalam pemilihan umum. Ketika sebagian ulama menyatakan wajib hukumnya, *fardlu ain*, Sahal justru punya pendapat lain. Hukum mencoblos, kata Sahal, *fardlu kifayah*. Artinya, kalau sebagian umat Islam sudah melakukan, yang lain boleh tidak mencoblos.

Contoh lain, ketika terjadi peristiwa pembakaran gereja di Situbondo, Oktober 1996, kiai karismatik ini menolak anggapan bahwa peristiwa itu akibat faktor agama. "Kejadian itu lebih kepada persoalan kultur dan sosial masyarakat setempat," katanya melawan arus opini kala itu.

Ketua Majelis Ulama Indonesia wilayah Jawa Tengah ini juga pernah mengimbau agar warga NU mengikuti Keluarga Berencana. Pemikiran-pemikiran tentang fikih wanita sering dikemukan Sahal melalui berbagai kajian di forum ilmiah ataupun media massa. Ketika Megawati dicalonkan menjadi presiden dan memicu penolakan di kalangan ulama, Sahal Mahfudz justru mengatakan bahwa urusan perempuan sebagai pemimpin masih diperdebatkan, belum final.

Tapi, Sahal tampak enggan bermain di ranah politik praktis. Hal itu ditunjukkannya dengan tidak melibatkan diri dalam partai-partai politik, termasuk partai yang berbasis massa NU. Anggota Pleno Pimpinan Pusat Rabithatul Ma'ahidil Islamiyah (RMI) itu bersikap begitu demi keutuhan NU. Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, ini memang lebih suka menekuni bidang pendidikan dan sosial. Sebagian hasil pemikirannya di bidang tersebut dia tuangkan dalam bentuk buku. Karya-karya juga lahir dari kegemarannya menulis di media massa. Buku *Nuansa Fikih Sosial*, terjemahan kitab *Mausu'ah al-Ijma* dan *Intifah al Wajadain* adalah hasil karyanya.

Kecemerlangan ide dan pendapat kiai yang gemar membaca buku apa saja itu, termasuk komik, tidak lepas dari tempaan sang ayah, K.H. Mahfudz. Sejak kecil, dia sudah diajari ilmu agama. Sebelum menetap di pesantren milik ayahnya, Sahal muda "ditugasi" bapaknya untuk menimba ilmu di berbagai pondok pesantren. Di antaranya adalah pesantren Brendo di Kediri dan pesantren Serang di Rembang.

Secara formal, pendidikan Sahal Mahfudz hanya sampai Tsanawiyah, setingkat SMP. Namun, berkat kegemaran menimba ilmu di pesantren dan kesukaannya pada buku, Sahal berhasil menjadi ulama yang disegani. Konsep pondok pesantren sebagai moderator pembangunan pedesaan lahir dari pemikiran penulis buku *Manfaat Gemar Membaca Cerita Detektif* itu. "Pesantren bukan milik pribadi melainkan punya umat, yang berfungsi ganda sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial," katanya suatu ketika.

Metode pendidikan yang dikembangkan Sahal juga terbilang maju. Ketika "kuliah" manajemen sosial menjadi perbincangan menarik di kalangan pondok pesantren akhir 1980-an, Sahal sudah memperkenalkan hal itu kepada para santrinya sejak 1963. Pesantren miliknya tidak hanya mengajarkan dakwah dengan bahasa Arab dan Inggris, tapi juga mengajarkan tata cara berorganisasi. Bahkan, para santri pun diberi Sahal pendidikan jurnalistik.

Seminggu sebelum terpilih menjadi Rais Am, wartawan FORUM, Khoirul Rosyadi, sempat mewawancarai Sahal Mahfudz. Di tengah kesibukan bermuktamar, dia menjawab beberapa pertanyaan FORUM.

Anda siap diberi amanat menjadi Rais Am?

Ya, saya akan lihat dulu seberapa besar amanat yang dibebankan. Tentu akan saya pertimbangkan mampu atau tidak dengan amanat yang dibebankan muktamirin. Itu menjadi ukuran penting.

Di masa mendatang, akan dibawa ke mana NU?

Itu semua terserah pada warga nahdliyin di Muktamar. Tapi, yang jelas, NU tetap kembali ke Khitah.

Bagaimana NU memposisikan diri dengan pemerintah, apa akan jadi alatnya Gus Dur?

Oh, tidak. Kami tetap kritis terhadap pemerintahan Saudara Abdurrahman Wahid. Kami tidak akan *pakewuh* untuk melontarkan kritik hanya karena presidennya dari NU. Apalagi sekarang proses demokrasi tengah berjalan. Fungsi NU itu akan tetap jalan, kenapa harus menjadi sulit?

Akan ada evaluasi kepemimpinan antara Rais Am dan Rais Tanfidziah?

Sebenarnya tidak ada. Dari dulu yang namanya Syuriah itu tetap yang di atas. Secara kelembagaan tidak ada perubahan. Banyak keputusan-keputusan Syuriah yang dilaksanakan oleh Tanfidziah. Hanya, selama ini orang-orang kan hanya melihatnya dari *statement-statement* perorangan, yaitu dari ketua Tanfidziah saja. Dari dulu Syuriah itu tetap yang memimpin.

Pasca kepemimpinan Gus Dur di NU, apa saja yang perlu diperbaiki?

Kalau soal perbaikan, semua organisasi perlu mengalami perbaikan. Di NU itu juga banyak yang perlu diperbaiki: dimensi kultural, dinamika di tubuh NU, dan dimensi organisasi, yaitu kemampuan dan manajemen organisasi. Perlu penataan-penataan.

Adakah kesepakatan, jika Rais Amnya dari Jawa Tengah, Rais Tanfidziahnya dari Jawa Timur?

Tidak ada kesepakatan seperti itu. Semua tergantung muktamirin. Pengalaman menunjukkan hal itu. Ketika K.H. Ahmad Shidiq jadi Rais Am, Saudara Abdurrahman Wahid menjadi ketua Tanfidziah. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari Jawa Timur. Jadi, tidak benar anggapan itu. □

Politik Akomodasi Gaya Kiai

Orang NU cukup kompromis. Di era Soekarno menyokong Nasakom, di masa Soeharto mendukung asas tunggal Pancasila. Sikap kritisnya baru muncul di ujung Orde Baru.

ANDAIKATA Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup, tentulah pendiri NU itu bangga melihat Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Sebab, bisa dibilang, kini komplet sudah prestasi organisasi keagamaan itu di dunia politik. Berbagai jabatan puncak, seperti ketua MPR atau DPR pernah mereka pegang. Dan, kini giliran Gus Dur, cucu Hasyim Asy'ari sendiri menjadi presiden keempat RI.

Gus Dur naik ke kursi presiden memang bukan semata karena dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan orang-orang NU. Malah, semula partai yang dipimpin oleh Matori Abdul Djalil itu terkesan meragukan keseriusan Gus Dur mencalonkan diri. Tapi, akhirnya, partai kaum nahdliyin itu menjadi pilar penting bagi Gus Dur. Dan yang jelas, terpilihnya mantan Ketua Umum PBNU itu menjadi presiden menunjukkan, ia seorang nahdliyin yang akomodatif. Ia bisa diterima oleh beragam kekuatan politik yang ada.

Yang menarik, keberhasilan Gus Dur justru diperoleh setelah 15 tahun NU kembali ke khitah. Sikap menarik diri dari dunia politik ini ditegaskan pada tahun 1984 dalam Muktamar di Situbondo. Konsekuensinya, NU sebagai organisasi tak terlibat secara langsung dalam politik. Rupanya, cara ini cukup efektif. Para tokoh NU leluasa bergabung ke Golkar, PPP, atau PDI. Dan, pada Sidang Umum MPR lalu, peran mereka tidak kecil. Seperti halnya PKB, tokoh NU di berbagai partai itu juga mempunyai andil menjadikan Gus Dur sebagai presiden.

Bila menengok sejarah, kisah sukses itu sebetulnya ujung liku-liku perjalanan panjang. Adakalanya NU tampil galak terhadap pemerintah. Tapi, organisasi yang beranggotakan 30 juta orang itu sering terlalu kompromistis. Mereka bersikap tak tegas terhadap penguasa. Bahkan, NU bisa secara habis-habisan mendukung keputusan pemerintah kendati melanggar akidah Islam.

Lihat saja, saat perahu NU berada dalam "gelombang" Orde Lama. Ketika pada 1960-an Bung Karno mendeklarasi konsep gabungan nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom), NU tak menolaknya. Ini berbeda dengan sejumlah partai Islam lainnya, seperti Masyumi. Partai modernis itu sejak awal mengkritik kedekatan Soekarno dengan PKI. Bagi Masyumi, tak mungkin orang beragama berkumpul dengan kaum ateis. Kritik Masyumi ini membuat Soekarno berang, lalu membubarkan partai itu. Sebaliknya, Partai NU saat itu, justru semakin lengket dengan pemerintah.

Sejak awal, NU memang pendukung *status quo*. Ini bukan dalam konteks kekuasaan, melainkan berkaitan dengan ajaran. Ketika didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari di Surabaya pada 31 Januari 1926, tujuan NU "hanyalah" membendung pengaruh kaum Wahabi di Mekah. Ajaran baru itu dibawa ke Indonesia oleh kaum reformis yang akhirnya mendirikan Muhammadiyah. Jadi, cikal bakal NU tak ada kaitannya dengan politik.

Walau demikian, karena situasi, dalam penggalan sejarah selanjutnya NU terseret ke pusaran politik. Pada 1937, bersama-sama Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Muhammadiyah, NU membentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Langkah ini sebagai reaksi terhadap sejumlah peraturan pemerintah Belanda yang dianggap merugikan umat Islam. Tapi, fungsi MIAI berubah setelah pada 3 November 1945 Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang menganjurkan berdirinya partai-partai baru. Wadah organisasi Islam melebur dan lahirlah Partai Masyumi.

ANNAS

POSTER GUS DUR DAN MEGA. *NU pernah menolong Soekarno.*

Namun, bergabung dengan kaum modernis di Masyumi lama-lama tak menguntungkan bagi ulama NU. Posisi mereka terpinggirkan. Dan, kekesalan orang-orang NU itu memuncak tahun 1952. Kala itu, mereka menuntut agar NU diberi jatah menteri agama

dalam kabinet Wilopo. Tapi, tuntutan itu tak digubris. Akhirnya, orang NU patah arang dan keluar dari Masyumi.

Setelah itu, bukan berarti orang NU surut dari politik. Dengan partainya sendiri, Partai NU, mereka justru bisa bermain secara leluasa. Di antaranya, mereka bisa berkoalisi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Ini sebagai manuver politik yang bagus. Sebab, pada Kabinet Ali Sastroamidjojo, tokoh NU, K.H. Masjkur bisa menjadi menteri agama.

DOK. SUARA PEMBARUAN

PRESIDEN DAN KIAI NU. *Akan sulit kritis terhadap pemerintah.*

Tak cuma dengan PNI orang NU bersekutu. Dengan Soekarno pun mereka bersahabat. Tak mengherankan bila saat Soekarno digoyang pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo, para tokoh NU menolongnya. Pada 1954, mereka memberi gelar Waliyul Amri Dharuri Bisyaukah (pemegang pemerintahan sementara dengan kekuasaan penuh) kepada Soekarno. Menurut ulama NU, gelar itu diberikan agar umat Islam tetap patuh kepada Soekarno.

Partai NU sempat "berulah" seusai Pemilu 1955. Saat itu, Partai NU mendapat suara terbesar setelah PNI dan Masyumi. Mereka sempat mengkritik konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno. Tapi, tak lama kemudian, kritikan NU itu mereda. Itu terjadi setelah tokoh-tokoh NU mendapat sejumlah jabatan penting, yakni menteri agama dan ketua DPR.

Lengketnya NU dengan pemerintah itu tak terusik walau ada konsep Nasakom. Padahal, konsep itu menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan ulama NU. Namun, K.H. Abdul Wahab Hasbullah, Rais Am kala itu, lebih memilih menerima konsep Nasakom ketimbang melihat NU mengalami nasib seperti Masyumi. Jadi, NU memakai kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat).

Sikap propemerintah itu berlanjut di era Orde Baru. Seiring dengan kehancuran PKI, NU langsung mengambil posisi baru: berada di barisan Orde Baru. Pemuda Ansor, "anak" NU, paling militan mengganyang PKI. Sikap ini mencerminkan NU sudah meninggalkan Soekarno. Sebab, saat itu Soekarno memang tak mau membubarkan PKI.

Kiprah politik NU terus berkibar di awal Orde Baru. Ketika pada 1973 terjadi fusi partai, NU melebur bersama partai Islam lainnya dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sejumlah posisi penting PPP langsung dipegang NU. K.H. Idham Chalid, misalnya, menjabat presiden partai, sementara dan K.H. Masjkur menjadi ketua umum Majelis Pertimbangan Partai.

Kemunculan tokoh NU di PPP, tak pelak, membuat pamor PPP bersinar terang. Di DPR, para ulama NU pun tampil "keras". Pada 1973, misalnya, mereka menolak RUU Perkawinan yang disodorkan pemerintah. Bahkan, pada saat MPR akan mengesahkan ketentuan tentang P4 dan masuknya aliran kepercayaan ke dalam GBHN, para ulama NU dalam PPP melancarkan aksi *walkout*.

Namun, peranan NU dalam PPP mulai merosot ketika H.J. Naro memimpin partai itu. Sejumlah tokoh karismatis NU, seperti K.H. Masjkur, K.H. Sjaifuddin Zuhri, dan Jusuf Hasjim disingkirkan. Itulah yang membuat NU berang. Dan, pada 1984, NU pun memilih kembali ke khitah. Sikap ini berdampak besar terhadap PPP. Sebab, pada Pemilu 1987 orang NU tak mau lagi mencoblos PPP. Dan, para ulama cenderung mengarahkan mereka untuk mencoblos Golkar. Tak pelak lagi, manuver itu membuat Golkar kian rimbun dan berjaya.

Jadi, pada pertengahan tahun 1980-an, hubungan NU dengan pemerintah Orde Baru boleh dibilang sangat mesra. Apalagi, dalam Muktamar Situbondo, NU terang-terangan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Padahal, saat itu, masalah tersebut masih menjadi pro-kontra, terutama di kalangan Islam. Terang saja, sikap NU itu sangat menguntungkan pemerintah. Terbukti, setelah NU menerima asas tunggal Pancasila, suara mereka yang menentang di kalangan NU agak berkurang.

Tapi, walaupun lengket dengan pemerintah Soeharto, sebetulnya tak banyak keuntungan politis yang dipetik NU. Jarang sekali orang NU mendapat kursi di kabinet. Ini pula yang mungkin membuat kemesraan itu tidak berlangsung lama. Hubungan NU-pemerintah mulai retak di awal tahun 1990-an. Saat itu, Gus Dur sering mengkritik pemerintah. Akibatnya, Soeharto pun mulai tidak menyukai Gus Dur. Dan, kabarnya, Soeharto tak menghendaki Gus Dur tampil lagi menjadi ketua umum PBNU dalam Muktamar Cipasung 1994 lalu. Tapi, upaya menjegal Gus Dur itu kandas.

Keinginan Soeharto itu baru terwujud sekarang. Kini, Gus Dur sudah tak lagi menjadi ketua umum. Bukan karena ia terdongkel, tapi justru karena ia telah menjadi presiden. Yang jadi soal, lantas bagaimana hubungan NU dengan pemerintah?

Yang jelas, tentu akan mesra. Sebab, orang NU sendirilah yang kini memimpin negeri. Seperti kata Arbi Sanit, NU akan sulit mengambil sikap kritis, apalagi oposisi. Tapi, alangkah indahnya sesekali NU mau berteriak kalau pemerintah memang salah.

L.R. Baskoro dan Mochammad Husni.

Arah Bandul Pasca Gus Dur

Pengurus NU pasca-Gus Dur akan memprioritaskan program pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi umat. Akan ada persoalan tentang konsistensi sikap kritis NU.

"SANTRI dan ulama sarungan", begitulah julukan yang diberikan oleh sebagian besar orang kepada para nahdliyin, anggota Nahdlatul Ulama. Gaya sarungan itu jelas mewarnai Muktamar ke-30 organisasi Islam terbesar itu di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pekan silam. Sebagian besar santri dan ulama memang datang dengan menggunakan sarung plus sandal jepit.

Selain bermakna harafiah, julukan itu pun sebenarnya mencerminkan sifat tradisional kaum nahdliyin. Setidaknya, jika NU dibandingkan dengan Muhammadiyah, yang lebih modern dalam segi organisasi dan kegiatannya. Hal itulah yang tampaknya disadari oleh Ketua Pengurus Besar (*Tanfidziah*) NU yang baru saja terpilih, K.H. Hasyim Muzadi. Dalam pidato pertama sebagai Ketua PBNU, dia menyebutkan pentingnya memberdayakan kaum nahdliyin, terutama yang berasal dari kalangan bawah. "Mereka adalah NU yang sesungguhnya, perhatian yang lebih besar harus ditujukan kepada mereka," katanya.

Pemberdayaan manusia NU seperti yang disebut Hasyim itu, menurut pandangan Direktur Pusat Pengembangan Pesantren Masyarakat (P3M), Masdar Farid Mas'udi sebagai sebuah keharusan dan ciri NU di masa datang. "Visi itu harus diinternalisasikan dan dibatinkan warga dan organisasi NU," katanya. Menurut dia, tak ada yang lebih rakyat dari kalangan umat Islam di Indonesia kecuali umat NU. "Berangkat dari realitas, basis NU itu adalah betul-betul rakyat," kata Masdar. Karena itu, menurut dia, sungguh aneh dan ironis jika NU tidak membangun visi kerakyatan.

Tak bisa tidak, Hasyim harus menempatkan pemberdayaan sumber daya manusia NU sebagai proyek pertamanya. Bagaimana tidak. NU yang didirikan pada 1926 itu kini memiliki tidak kurang dari 30 juta umat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sayangnya, dari sekian banyak umat NU itu, hanya sedikit cendekiawan dan ilmuwan yang mengenyam pendidikan di luar pesantren.

Kesadaran untuk mengirim para nahdliyin ke perguruan tinggi umum baru mulai berkembang di era 1980-an, terutama ketika roda organisasi ini dipimpin oleh K.H. Abdurrahman Wahid. "Di era itu, arus warga NU yang masuk ke perguruan umum cukup baik," kata pengamat NU, Mahrus Irsyam.

Sebagai konsekuensinya, telah mulai muncul para cendekiawan dan intelektual generasi baru. Dan, menurut Mahrus, pengurus NU kini harus jeli untuk mengindentifikasi SDM-nya. "Mulai banyak para nahdliyin yang memiliki pendidikan tinggi, seharusnya mereka segara ditarik untuk menjadi pengurus organisasi, tapi banyak dari mereka yang justru terlepas. Di sinilah dituntut kejelian para pengurus NU," ujarnya. Meski begitu, dia tidak mau memukul rata dengan menyatakan bahwa pengurus NU saat ini didominasi kalangan "orang tua". "Ada juga generasi muda NU yang mulai masuk dalam kepengurusan, macam Fajrul Falaakh dan Arifin Junaedi, "katanya.

Memang, angin perubahan telah masuk ke dalam pesantren-pesantren milik organisasi

ANNAS

PARA SANTRI BELAJAR DI ASRAMA. *Akan menjadi kelompok penekan.*

DOK. BANK SUMMA

KERJASAMA NU DENGAN BANK SUMMA. *Peluang cukup cerah.*

keagamaan itu. Tidak sedikit dari pesantren NU yang mulai menerapkan sistem kajian Islam yang tidak lagi hanya mengandalkan otoritas guru dan kiai. Kaum nahdliyin memang dikenal sebagai kalangan yang sangat taat terhadap ajaran yang disampaikan para kiainya sebagai otoritas yang tak terbantahkan. Banyak pesantren yang telah mendirikan lembaga kajian keagamaan modern, yang bersifat demokratis ketimbang dogmatis di dalam proses belajar mengajarnya.

Lembaga-lembaga kajian keagamaan yang bersifat dogmatis dalam membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan semakin berkurang. "Mau tidak mau, hal ini akan mengubah pola pikir dari dalam dan cara pandang dunia. Dan, pada saatnya nanti akan berpengaruh pada sistem dan kinerja mereka," kata Masdar Mas'udi pula.

Selain pemberdayaan manusia, soal pengembangan ekonomi umat pun tampaknya menjadi masalah yang harus diprioritaskan pengurus baru, paling tidak, dalam lima tahun mendatang. "Sektor ini memang harus dikembangkan, mereka memiliki potensi untuk itu," kata Mahrus Irsyam. Namun, untuk itu, potensi ekonomi masyarakat tentunya harus ditata terlebih dahulu, terutama dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. "Orang Islam kan posisinya di kelas menengah. Itu perlu dibangun dulu sebagai basis yang kuat," katanya.

Hal seperti ini sebenarnya pernah dicoba Gus Dur ketika NU melakukan kerja sama dengan Bank Summa, awal 1990-an. Mereka mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nama Nusumma, yang bertujuan memberdayakan ekonomi rakyat. Sayang, kongsi itu tidak berlangsung lama gara-gara Bank Summa keburu dilikuidasi pemerintah karena kesalahan manajemen pemiliknya.

Usaha serupa pun sempat dilakukan Gus Dur beberapa tahun kemudian, dengan mencoba mengambil alih Bank Papan Sejahtera (BPS). Namun, nasib sial lagi-lagi menyelimuti organisasi Islam itu. Sebelum kerja sama berjalan lancar, BPS keburu dinyatakan bangkrut oleh pemerintah. "Peluangnya sebenarnya cukup cerah. Bank Summa dan BPS jatuh karena persaingannya tidak sehat. Di masa itu tidak ada persaingan karena adanya praktek monopoli," ujar Mahrus. Jika NU menginginkan pemberdayaan ekonomi umat, kata Mahrus, sekarang adalah saat yang tepat. "Jadi, sekarang semuanya tergantung mereka," katanya.

Tugas berat lain yang harus dilakukan Pengurus NU adalah, pertama, menjaga agar organisasi ini tidak terbawa dalam pusaran sebuah partai. Yang kedua, menjadikan organisasi ini sebagai kelompok penekan yang tetap kritis terhadap pemerintah. Soalnya, saat ini, ada beberapa partai yang berbasis massa NU. Sebut saja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nahdlatul Ummat (PNU), dan Partai Kebangkitan Ummat (PKU).

Ada sisi positif dan negatif dengan berdirinya beberapa partai politik yang berbasis massa NU. "Kalau ulamanya mau otoriter, mereka bisa saja mengeluarkan fatwa agar umat NU memilih salah satu dari parpol itu. Untungnya hal itu tidak terjadi. Sedangkan sisi positifnya tentu saja hal itu bagus bagi perkembangan NU ke depan. Mereka mendapat ruang untuk menyatakan pendapatnya dan juga sebagai kelompok kepentingan," ujar Mahrus Irsyam. Meski begitu, Mahrus melihat kecil kemungkinan di masa datang partai-partai berbasis NU akan bergabung menjadi satu. "Karena semua itu sudah merupakan kepentingan masing-masing individu," katanya.

Dalam kaca mata Mahrus, hal yang harus dilakukan NU dalam waktu dekat ini adalah membenahi sisi organisasi dan sisi gerakan. Namun, untuk membenahinya mereka harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap etika. "Kalau itu dapat dikembangkan, dalam suasana apa pun NU dapat maju," katanya.

Selain harapan-harapan yang ditujukan kepada pengurus baru NU, ada kekhawatiran yang menyeruak. Apakah NU tetap akan bersikap kritis terhadap pemerintah yang kini dipimpin Gus Dur, tokoh utama NU itu? "Semua itu melihat sikonnya. Dalam artian, mana yang perlu diarahkan dan mana yang perlu ditegur," kata K.H. Maksum Djauhari, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Apalagi, menurut dia, Gus Dur juga telah meminta agar dirinya dikritik manakala perlu dikiritik. "Para kiai sepuh menganggap Gus Dur sebagai anaknya, jadi perlu dibimbing," katanya. Para kiai sepuh di sini adalah kelompok kiai yang disebut sebagai Poros Langitan.

Namun, pengamat politik Arbi Sanit menyangsikan NU akan konsisten bersikap kritis, apalagi memberi teguran kepada Gus Dur. Menurut Arbi, hal itu sangat sulit dilakukan. "Enggak mungkin, dong, NU sekarang akan berhadapan dengan Gus Dur. Sewaktu dia belum jadi presiden saja mereka enggak berani mengkritik Gus Dur," ujar Arbi.

Apalagi, menurut Arbi, Gus Dur memerlukan pendukung yang setia sebagai inti dari kekuatannya untuk melangsungkan negara. "Tidak mungkin kekuatan itu berasal dari unsur yang lain. Tentu dari NU dulu, toh sebagai basis dia," ucap Arbi. Selain itu, Arbi juga menganggap tidak masuk akal jika kelompok yang berasal dari kandang sendiri menjadi oposisi. "Meski dari NU ada, tapi mereka tidak akan dominan. Yang bakalan dominan tentu saja kelompok masyarakat yang berasal dari mahasiswa, pers, dan kaum intelektual," katanya.

Agaknya, sangat mungkin, bandul NU nanti memang akan lebih berat ke arah mendukung pemerintah. Ya, mengapa tidak?

Fahmi Imanullah, M. Husni (Jakarta), Widiarsi Agustina, dan M. Toha (Kediri)

Kiai Waskita Pengawas Presiden

JIKA ditanya siapakah yang "ditakuti" Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang karib dipanggil Gus Dur itu? Jawabannya belum tentu MPR atau DPR. Yang sangat mungkin ditakuti—paling tidak, diindahkan—Gus Dur adalah kumpulan ulama sepuh yang saat ini kerap disebut Forum Langitan. Ini bukan lembaga resmi yang ada dalam struktur organisasi NU, apalagi dalam struktur kenegaraan Republik Indonesia.

Nama Forum Langitan mulai terdengar ketika bursa calon Presiden RI mulai marak menjelang Sidang Umum MPR awal November lalu. Lebih-lebih, ketika Gus Dur pun berniat ikut dalam perebutan kursi presiden. Niat orang nomor satu dalam organisasi Islam terbesar di Indonesia itulah yang mencuatkan kehadiran kelompok Ulama Langitan. Kenapa? Di tubuh organisasi Nahdlatul Ulama, dikenal istilah ulama atau kiai-kiai utama (*khos*). Tentu saja, organisasi sebesar NU memiliki jumlah ulama *khos* yang tidak sedikit. Namun, dari sekian banyak kiai *khos* itu, hanya beberapa nama yang sering disebut-sebut. Mereka antara lain, K.H. Abdullah Faqih, K.H. Sahal Mahfuz, K.H. Musthafa Bisri, K.H. Abdullah Abbas, dan K.H. Muslim Imampuro atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Lim.

Ada syarat tertentu yang harus dimiliki seorang kiai sebelum masuk dalam kategori kiai *khos* itu. Meski tidak tertulis secara resmi, antara lain, mereka harus memiliki wawasan dan kemampuan ilmu agama yang luas, memiliki laku atau daya spiritual yang tinggi, mampu mengeluarkan kalimat hikmah atau anjuran moral yang dipatuhi, dan jauh dari keinginan-keinginan duniawi. Dengan kata lain, ulama-ulama itu telah memiliki kemampuan waskita. "Kemampuan mereka berada di atas manusia biasa," ujar seorang pengamat NU.

Ketika nama Ketua Umum PBNU, Abdurrahman Wahid, mulai masuk dalam bursa calon presiden keempat RI, diam-diam ulama *khos* mengadakan pertemuan rutin. Nah, tempat yang sering dijadikan arena pertemuan itu adalah Pondok Pesantren Langitan yang terletak di Tuban, Jawa Timur. Pemimpin pondok pesantren itu adalah Kiai Abdullah Faqih. Dalam setiap pertemuan, tidak kurang dari 40 kiai yang berembuk. Dari kongko-kongko para kiai waskita itulah, istilah Forum Langitan—bahkan belakangan Poros Langitan—mulai bergulir.

Pada pertemuan di Langitan, mereka khusus membahas soal pencalonan cucu pendiri NU, K.H. Hasyim Asy'ari, itu sebagai presiden. Bahkan, Gus Dur sempat beberapa kali *sowan* kepada para kiai *khos* itu untuk meminta restu. Dan, memang, para kiai Langitan akhirnya memberi lampu hijau kepada kiai yang gemar menonton sepak bola itu. Bubarkah Forum Langitan setelah Gus Dur tampil sebagai presiden? Tentu saja tidak. Mereka justru kini ikut berperan dalam mengawasi sepak terjang Gus Dur sebagai presiden.

Wujud pengawasan itu ditelurkan dalam *bithonah* atau masukan kepada presiden yang bersifat menekan alias teguran. Tercatat telah beberapa kali mereka memberikan hal itu kepada Gus Dur. Sebut saja soal rencana Gus Dur membuka hubungan dagang dengan Israel. Tidak hanya itu. Sikap Gus Dur yang masih suka *nyeleneh* pun menjadi bahan "teguran" untuk sang Presiden.

PARA KIAI DALAM PERTEMUAN DI LANGITAN. *Mengawasi sepak terjang Gus Dur.*

Menurut salah seorang ulama NU, K.H. Yusuf Muhammad, pengawasan yang dilakukan para kiai itu sebagai wujud dari tanggung jawab mereka yang telah merestui pencalonan diri Gus Dur sebagai presiden. "Oleh karena itu, kami perlu mengingatkan Gus Dur sebagai presiden," kata ulama yang akrab dipanggil Gus Yus itu.

Sedangkan K.H. Abdullah Faqih mengatakan, Presiden Gus Dur memang perlu mendapat *bithonah* dari para kiai agar sukses dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. "Tapi, para kiai tentunya tidak hanya membantu dalam bentuk *bithonah*," katanya.

Seruan para kiai *khos* selama ini memang sangat didengar Gus Dur. Sebut saja ketika K.H. Abdulah Faqih meminta Gus Dur mencium tangan pamannya, K.H. Yusuf Hasyim, beberapa saat sebelum dia secara resmi dicalonkan sebagai presiden periode mendatang. Ciuman tangan itu pun menandakan berakhirnya perseteruan antara dua bangsawan NU yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Tapi, apakah Gus Dur sebagai presiden akan mematuhi *bithonah* para kiai? Belum tentu juga. Pengamat NU. Prof. Azyumardi Azra, menyangsikan semua saran dari para sesepuh NU itu akan dilaksanakan Gus Dur. "Meskipun Gus Dur sangat menghormati para kiai itu, bukan berarti hal itu merupakan jaminan dia akan mengikutinya," kata Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Apalagi, sikap Gus Dur yang bak bola liar belum tampak akan berubah. ❑

NU Pasca-Lirboyo

Dari perspektif politik, Muktamar NU ke-30 di Lirboyo, Kediri, pekan lalu, merupakan peristiwa amat penting. Bukan hanya dalam konteks politik NU, tapi juga dalam kaitan dengan politik nasional secara keseluruhan. Ini terutama berkaitan dengan kenyataan bahwa Gus Dur, meski bukan lagi Ketua Umum Tanfidziyah (PB) NU, tapi Presiden RI, ia tetaplah tokoh NU *par excellence*. Karena itu, dengan *fair* dapat diasumsikan bahwa Gus Dur dan NU akan tetap saling berhubungan, baik secara terbuka maupun melalui lobi-lobi dan bahkan *hotline* khusus. Lebih tegas lagi, bayang-bayang Gus Dur akan tetap terefleksi pada NU; dan sebaliknya, bayang-bayang NU tetap akan memantul dalam pikiran dan gerak langkah Presiden Gus Dur.

Azyumardi Azra
Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Dengan demikian, pada hakikatnya tidak ada NU pasca-Gus Dur. Yang ada hanyalah NU pasca-Lirboyo. Dan, NU pasca-Lirboyo sangat boleh jadi akan lebih terlibat lagi dalam aktivisme politik, baik karena faktor-faktor internal NU sendiri maupun politik nasional. Dalam konteks internal NU, kecenderungan itu bahkan menemukan pijakan institusionalisasinya dalam Muktamar Lirboyo dengan rekomendasi kepada PBNU nanti untuk membentuk komisi politik dalam kepengurusannya sejak tingkat nasional sampai tingkat daerah. Dengan rekomendasi itu, aktivisme politik NU dikukuhkan secara formal.

Ada alasan cukup kuat bagi NU untuk membentuk komisi politik tersebut. Pada satu segi, komisi itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan membantu Presiden Gus Dur mewujudkan agenda-agenda besar yang dihadapinya. Sebab, bagaimanapun, merupakan kewajiban seluruh warga nahdliyin untuk memastikan bahwa Presiden pertama dari kalangan NU ini berjaya dalam tugasnya. Komisi ini dapat menggalang semua potensi yang ada untuk tujuan tersebut. Yang tidak kurang penting, komisi politik itu dapat sangat bermanfaat untuk aktualisasi politik NU secara lebih efektif. Jadi, komisi politik itu dapat merupakan mesin politik dalam konsolidasi peran politik NU, sehingga NU dalam tahun-tahun mendatang tidak lagi terpinggirkan dalam proses-proses dan kelembagaan politik yang ada.

Di sinilah persisnya letak salah satu dilema yang dihadapi NU. Pada satu pihak, NU tetap mencoba istikamah dengan karakter dan fungsinya sebagai *jam'iyyah*, organisasi sosial keagamaan, seperti ditegaskan dalam Khittah 1926. Tapi, pada sisi lain, NU hampir tidak mungkin—apalagi di saat Gus Dur sedang menduduki jabatan Presiden—untuk tidak terlibat dalam politik. Karena itu, bisa dipahami kenapa aroma politik cukup menonjol dalam muktamar di Lirboyo, yang muncul bukan hanya dalam rekomendasi pembentukan komisi politik, tapi juga dalam pertarungan calon-calon ketua umum tanfidziyah yang melibatkan penggunaan pamflet, stiker, bahkan penyebaran isu semacam *money politics*. Perkembangan yang berbeda dengan muktamar-muktamar sebelumnya ini bukan hanya menunjukkan dinamika demokrasi dalam NU, tapi juga sekaligus mengindikasikan bahwa jabatan ketua umum PBNU khususnya semakin penting secara politis.
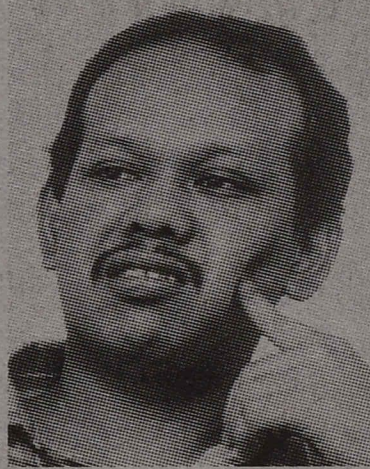
NOUFAL

Signifikansi politik tanfidziyah NU juga terlihat dari figur-figur calon ketua umum yang memunculkan diri atau dimunculkan para muktamirin. Ketiga calon terakhir yang terpilih pada pemilihan tahap pertama, K.H. Hasyim Muzadi, K.H. Dr. Agil Siradj, dan K.H. Salahuddin Wahid, tentu saja adalah ulama. Tapi, mereka juga memiliki aktivisme politik yang tinggi.

Ketua Umum terpilih K.H. Hasyim Muzadi diduga akan mengalami kesulitan dalam membawa NU ke arah orientasi yang lebih bertumpu pada peran sosial-keagamaan. Ia akan sulit sekali melakukan *political disengagement* NU. Jika ini terjadi, orang bisa membayangkan bahwa pola kecenderungan yang sudah cukup mapan dalam NU selama ini bisa terulang kembali, yakni terjadi tarik-menarik yang cukup kuat di antara kecenderungan aktivisme politik tanfidziyah dengan syuriah yang lebih bertumpu pada agenda-agenda keagamaan dan kemasyarakatan. Secara historis, tanfidziyah yang didominasi ulama-politisi lebih sering menguasai gerak langkah NU, sehingga syuriah terlihat tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, dalam kepemimpinan lalu, Gus Dur, yang mengembalikan NU ke Khittah 1926, tetap membuat tanfidziyah sangat dominan.

Tapi, Ketua Umum Tanfidziyah NU yang baru, K.H. Hasyim Muzadi, tentu saja tidak memiliki kapasitas yang sama dengan Gus Dur, sehingga *leverage*-nya *vis a vis* syuriah juga tidak sama. Sementara, dengan terpilihnya K.H. Sahal Mahfudz sebagai Rais Am Syuriah, terbuka peluang cukup lebar bagi syuriah untuk memainkan peran lebih besar dalam berbagai gerak langkah NU. Dengan keulamaan, intelektualitas, komitmen sosial kemasyarakatan yang tidak diragukan lagi, K.H. Sahal Mahfudz dapat menjadi figur yang sangat instrumental, setidaknya dalam menyeimbangkan antara fungsi sosial keagamaan *jam'iyyah* NU dan aktivisme politik tanfidziyyah, yang kelihatannya merupakan keniscayaan. Dan, lebih dari itu, dengan apresiasi yang sangat tinggi kepada modernitas dan segala gejala lainnya, K.H. Sahal Mahfudz dapat mengakselerasi proses intelektualisasi dan pengembangan wacana baru Islam yang tengah dikembangkan anak-anak muda NU di banyak tempat. Sentuhan kebijakan dan empati keulamaan K.H. Sahal pastilah sangat efektif dalam membawa anak-anak muda ini kepada intelektualisme yang lebih perenial bagi masa depan umat dan bangsa daripada aktivisme dan sekeping posisi politik yang sangat temporer. Dan, dengan cara seperti ini pula kita bisa lebih optimistis tentang akselerasi pengembangan SDM di lingkungan NU. □

Telenovela "Misteri Terbunuhnya Syafli"

Salah seorang tersangka pembunuh Ketua PP Riau menggugat polisi ke pengadilan. Ada upaya menjauhkan kasus itu dari motif persaingan bisnis judi?

Makin lama, pengungkapan kasus pembunuhan bekas Ketua Pemuda Pancasila (PP) Riau, Syafli Duyun Tanjung, kian mirip cerita telenovela: berliku dan nyaris tanpa akhir. Malah, sejak Senin 15 November silam, kisah pengungkapan kasus itu makin berkembang karena salah satu dari empat tersangka yang telah ditangkap polisi, yakni Arsadianto Rahman alias Anto, justru menggugat Menteri Pertahanan, Kapolri, dan Kapolda Riau ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.

Pengacara Anto, Agustinus Hutajulu, dalam gugatannya menyatakan polisi telah berlaku tak profesional dalam mengusut kasus pembunuhan tersebut. Menurut Agustinus, polisi telah melanggar hak kliennya untuk memperoleh pemeriksaan yang benar agar perkaranya cepat disidangkan. Buktinya, kata Agustinus, sejak ditahan pada 30 Agustus silam, polisi sudah tiga kali memperpanjang masa penahanan Anto. Bahkan, Kejaksaan juga sudah dua kali menolak dan mengembalikan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Anto yang dikirimkan polisi. Untuk menegakkan supremasi hukum, Agustinus menggugat polisi untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp 7.000 saja.

SINAR

AGUSTINUS HUTAJULU. *"Tak ada dalam KUHP"*

Sejak awal, Agustinus memang sudah keberatan ketika polisi menahan dan kemudian menjadikan Anto sebagai tersangka pembunuh Syafli. Soalnya, Anto yang dikenal sebagai pengusaha angkutan bus "Sinar Riau" itu ditangkap hanya berdasarkan keterangan seorang saksi, yakni Ricky Wulur Batubara, yang kini masih juga ditahan bersama Anto dan dua tersangka lainnya, Jufri Zabir dan Danny. Padahal, kata Agustinus, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan satu orang saksi saja tak cukup dijadikan alasan penahanan, apalagi untuk membuktikan dakwaan.

Memang, sejauh ini, yang membuat Anto terseret dalam kasus pembunuhan itu hanyalah "nyanyian" Ricky. Beberapa hari setelah Syafli Duyun Tanjung tewas ditembak pada 22 Agustus silam, polisi menangkap Ricky dan Danny di Jakarta. Kepada polisi, Ricky mengaku disuruh Anto untuk menghabisi Syafli. Lalu, masih menurut pengakuannya kepada polisi, Ricky kemudian meminta jasa dua preman Jakarta—ia sebut bernama Tommy dan Mono—untuk membunuh Syafli. Itu sebabnya, dalam BAP, polisi menempatkan Anto sebagai terdakwa karena menjadi penganjur bagi orang yang menganjurkan pembunuhan.

Yang jadi soal, kata Agustinus, sampai kini polisi tak mampu menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti untuk memperkuat keterangan Ricky itu. "Katanya, ada dua saksi yang mendengar percakapan Ricky dengan Anto. Tapi, apa isi kesaksian mereka, tak ada yang tahu. Di BAP juga tak jelas kapan dan di mana Anto menganjurkan Ricky agar membunuh Syafli," ujar Agustinus.

Bukan itu saja. Agustinus juga heran, bagaimana mungkin polisi menahan pelaku penganjur, sementara pelaku utamanya atau orang yang melaksanakan anjuran belum bisa ditangkap apalagi diperiksa.

Sebenarnya, bukan cuma Anto yang merasa resah dengan penyidikan kasus pembunuhan Syafli itu. Sebagian warga Pekanbaru pun hingga kini masih menganggap keterlibatan Anto dalam kasus tersebut sebagai teka-teki. Soalnya, semasa hidup, Syafli yang pernah menjadi preman paling disegani di Riau itu adalah sahabat dekat Anto. Keduanya, selain sama-sama mengurus PP Riau, juga aktif mengelola Persatuan Sepakbola Pekanbaru dan Sekitarnya (PSPS).

Bahkan, seorang perwira menengah di Mabes Polri yang mengenal keduanya juga meragukan bahwa Anto membunuh Syafli karena persaingan bisnis. Sebab, "Bisnis mereka memang sangat berbeda. Anto itu pengusaha angkutan, sedangkan Syafli pengusaha jasa perlindungan judi dan hiburan malam," kata perwira yang tak mau disebut namanya itu. Karena itu, banyak pihak justru menduga, Syafli dibunuh oleh para pesaing Dedi Handoko, bandar judi kupon Sie Jie yang selama ini mendapat "monopoli" perlindungan dari Syafli.

Toh, pihak Polri tampaknya tak terlalu terganggu dengan gugatan Anto Rahman itu. "Silakan saja. Itu kan hak mereka," kata Dankorserse Polri, Mayjen Da'i Bachtiar kepada Dedi Hermawan dari FORUM. Begitu pula sikap Polda Riau. "Mau dibilang tak profesional atau apa pun, terserah. Kami siap menghadapi gugatan itu. Mereka tampaknya cuma mau mempermalukan polisi," ujar Kadispen Polda Riau, Mayor S. Pandiangan. Tampaknya, "telenovela" misteri pembunuhan Syafli memang masih jauh dari akhir cerita.

Munawar Chalil, Yus Ariyanto (Jakarta), dan Wahyudi E.L. Panggabean (Pekanbaru)

PENYELUNDUPAN

Banjir Telur Bervirus di Riau

Riau kini dibanjiri telur dan anak ayam bibit selundupan dari Malaysia. Padahal, telur dan anak ayam itu membawa virus berbahaya. Dibekingi tentara?

Enam bulan terakhir ini, para peternak ayam di Riau tak bisa tidur nyenyak. Soalnya, telur dan anak ayam bibit (DOC, *day old chicks*) yang mereka hasilkan mulai tak dilirik konsumen setempat. Masyarakat tampaknya lebih suka membeli telur-telur dan anak ayam bibit yang masuk dari Malaysia karena harganya jauh lebih murah ketimbang telur dan DOC lokal. Akibatnya, awal November silam, 10 pedagang telur dan DOC lokal terpaksa mengadu ke DPRD Riau, memprotes peredaran telur dan anak ayam bibit yang masuk secara ilegal itu.

DOK. FORUM

SEKELOMPOK BIBIT AYAM. *Karena dibeking tentara?*

Jumlah telur dan anak ayam bibit asal Malaysia itu masuk ke wilayah Riau dengan cara haram. Jumlahnya juga tergolong gila-gilaan. "Bayangkan, setiap pekan ada 250 ribu butir telur dan 50 ribu DOC yang diselundupkan ke Riau," kata Kepala Dinas Peternakan Pekanbaru, Dokter Hewan Agustaruddin, kepada FORUM. Sementara, telur-telur dan DOC selundupan itu dipasarkan dengan harga obral. Jadi, cukup masuk akal jika para peternak dan pedagang telur lokal dibuat menjerit.

Menurut Agus, telur-telur dan DOC haram itu masuk ke Riau melalui jalur laut dan dibawa oleh para pengusaha bermata sipit. Nah, kata Agus, aksi penyelundupan itu sukses lantaran si penyelundup bekerja sama dengan oknum-oknum di Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) dan Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) setempat. "Tanpa dibekingi koperasi tentara, tak mungkin para penyelundup itu berani dan lolos membawa masuk telur dan DOC haram itu ke Riau," ujar Agus tanpa tedeng-aling-aling. Karena itulah, kata dia, pihak Bea dan Cukai serta kepolisian juga seakan tak berdaya mencegah aksi penyelundupan mereka.

Tapi, yang paling meresahkan Agus bukan semata-mata karena penyelundupan itu merugikan keuangan negara dan membunuh usaha para peternak dan pedagang telur lokal. Menurut Agus, telur-telur itu di negeri asalnya sudah diperintahkan untuk dimusnahkan. "Telur-telur dan DOC itu mengandung virus *japanese enchephalitis*, yang bisa menyebabkan radang otak bagi orang yang mengkonsumsinya," tutur Agus. Karena itu, kata Agus, pemerintah Malaysia sudah lama mengawasi peredaran dan bahkan berupaya memusnahkan telur-telur yang mengandung virus tersebut. Sementara, menurut Agus, telur-telur berbahaya itu kini justru bebas beredar di Riau, bahkan sudah merambah ke kawasan Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Namun, ahli virus dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Martin Malole, tampaknya kurang sependapat dengan Agus. Menurut Martin, hingga saat ini belum ada temuan-temuan baru yang membuktikan bahwa virus asal Jepang itu—sesuai dengan namanya—bisa ditularkan lewat telur ataupun unggas. "Sangat kecil kemungkinannnya *japanese enchephalitis* ditemukan pada telur," kata Martin kepada FORUM.

Meski begitu, Martin tak menafikan kemungkinan virus yang tergolong mematikan itu juga terkandung di dalam telur dan DOC asal Malaysia tadi. Sebab, "Yang namanya virus kan bisa berubah-ubah. Mungkin secara normal tidak ada di dalam telur-telur itu. Tapi, kemudian ada mutasi, ya, bisa saja," kata Martin. Contohnya, kata Martin, adalah virus flu burung di Hong Kong beberapa waktu lalu, yang bermutasi dari ayam ke manusia.

Sebelum ini, kata Martin, virus *japanese enchephalitis* hanya ditemukan dalam darah babi. Virus sejenis yang berasal dari Venezuela tersebar dalam darah kuda. Kedua jenis virus itu menyebar melalui nyamuk. Artinya, jika seseorang sampai mengidap virus *japanese enchephalitis*, hampir bisa dipastikan bahwa orang itu digigit nyamuk yang sebelumnya menggigit binatang yang mengandung virus itu.

Okelah, soal ada-tidaknya virus dalam telur dan DOC asal Malaysia itu tentu masih bisa terus diperdebatkan. Tapi, penyelundupan jelas tak bisa dibenarkan secara hukum. Karena itu, pihak Korem 031/Wirabima Riau kini tengah meneliti kebenaran cerita Agus bahwa para penyelundup telur dan DOC itu dibekingi anggota tentara. "Kami akan mengecek soal ini. Jika ada anggota (TNI) yang terlibat penyelundupan, pasti kami tindak," kata Danrem 031/Wirabima, Kolonel Mazni Harun, kepada FORUM. Benar, nih, Pak?

Munawar Chalil dan
Wahyudi El Panggabean (Pekanbaru)

BENTOEL
INTERNATIONAL
BIG CHALLENGE
4x4
CHAMPIONSHIP
FINAL NATIONAL SERIES
Congratulation
To All Winners of
"THE MOST SPECTACULAR
SPEED OFF ROAD"
BENTOEL
SERIES IV BIBC 4X4
Overall Champion:
Tosa & Dado
Team Champion:
Datransko
T3 Category:
Donny SQ & Lanang
T2 Category:
Tosa & Dado
T1 Category:
T. Yan Hacky & M. Taufik
Non Seeded Category:
Tosa & Dado
ALL SERIES BIBC 4X4
1. Donny SQ & Lanang
2. Tosa & Dado
3. Bobo & Max
4. Alex Pribangun & Bambang Gunawan
5. Aga Kartiwa & Widyaztama
WATCH IT!
SEE YOU IN YEAR 2000
BENTOEL'S EVENT
POKOKNYA PUAS

PEMBUNUHAN I

Main Tembak di Kebun Cokelat

Seorang bocah tewas ditembak anggota Brimob penjaga kebun cokelat. Haruskah peluru diobral untuk bocah yang mencuri buat dikudap sendiri?

Fajar subuh baru mulai naik ketika suara rentetan tembakan memecah keheningan Kampung Mandailing Pasar I Saentis, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatra Utara. Sontak, suara di pagi buta Rabu, 10 November lampau, itu membuat warga desa mengarahkan perhatiannya ke kawasan perkebunan cokelat milik PT Perkebunan Negara (PTPN) II Saentis. Beberapa warga lelaki menghambur ke pinggir kebun. Di sana, mereka melihat David Manurung, seorang anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri, yang bertugas menjaga kebun itu, tampak berjalan santai dengan senapan di tangan.

Saat ditanya warga, David mengaku baru saja melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau sekelompok orang yang tengah mencuri buah cokelat. Malah, David meminta warga kembali pulang dan tidak merisaukan soal tembakan tersebut. Warga patuh dan David kembali ke posnya di kantor PTPN II, tak jauh dari Kampung itu.

Tapi, baru saja rombongan warga hendak kembali masuk ke rumanya masing-masing, terdengar suara wanita menjerit-jerit histeris. Ternyata ia baru saja melihat sesosok tubuh anak terbujur berlumur darah di dalam parit di pinggir kebun. Rupanya, sebutir peluru telah menembus dan merobek lengan hingga dada si bocah, yang belakangan dikenali sebagai Nasrul Nasution, 12 tahun. Saat ditemukan, nadi anak keenam dari 11 bersaudara yang masih duduk di kelas IV SD itu tak berdenyut lagi.

Karuan ratusan warga Kampung marah. Mereka berarak ke kantor PTPN II Saentis seraya membopong mayat Nasrul. Tapi, kedatangan mereka tampaknya tak cukup ditanggapi oleh pihak administratur (pengelola) perkebunan milik negara itu. Padahal, "Kami hanya ingin menunjukkan kebiadaban polisi yang membunuh anak kecil," kata seorang warga kepada FORUM.

Walhasil, karena pihak PTPN II tak mau menyerahkan David yang diduga menembak Nasrul, massa pun melampiaskan amarahnya. Mereka mengobrak-abrik dan menghancurkan gedung kantor dan gudang penyimpanan buah cokelat.

Warga Kampung Mandailing memang pantas geram melihat Nasrul ditembak. "Masak gara-gara sebiji cokelat saja Brimob itu sudah main tembak. Di bentak saja anak-anak itu sudah lari," kata seorang warga, Syamsul Nasution. Betul, kata Syamsul, anak-anak petani yang tinggal di perkampungan sekitar perkebunan itu memang suka mencuri cokelat. Tapi, "Yang diambil cuma sebiji dua biji untuk dimakan sendiri," kata Syamsul. Sebaliknya, Syamsul malah mempertanyakan, mengapa pihak PTPN II tidak menembak mati para pencoleng "profesional" dan penadah yang bekerja sama dengan para petugas keamanan penjaga kebun dalam menjarah buah milik negara itu.

Boleh jadi, Nasrul Nasution memang bukan pencuri besar-besaran. Sebab, seperti diceritakan ibunya, Rasmaini Lubis, 38 tahun, pada saat ia tertembak itu, sesungguhnya Nasrul sedang menjalankan "tugas rutinnya". Yakni, mencari ranting kayu bakar yang ada di areal perkebunan. Tugas itu, kata Rasmaini, dilakukan Nasrul setiap pagi, sebelum ia berangkat ke sekolah. Maklum, "Kami ini cuma petani penggarap," kata Rasmaini dengan nada pasrah. Sedangkan ayah Nasrul, Rumpun Nasution, 40 tahun, malah tak mampu berkata-kata karena masih syok akibat kehilangan putranya.

Sikap pasrah kedua orang tua Nasrul tampaknya cocok dengan keinginan manajemen PTPN II. "Kami ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi, keluarganya juga sudah bisa menerima kenyataan," kata seorang staf administrasi PTPN II yang tak mau disebut namanya. Dan, memang, sewaktu melayat ke rumah Nasrul, pihak PTPN II sempat menyerahkan uang duka sebesar Rp 500 ribu berikut dua karung beras dan setengah karung gula bagi orang tua Nasrul.

Kapolsek Percut Sei Tuan, Kapten I.E. Parstiono, mengakui bahwa kasus penembakan bocah cilik itu kini sedang diperiksa pihak Provoost Polda Sumut. Sebab, kata dia, David Manurung adalah salah satu dari beberapa anggota Brimob yang diperbantukan Polda Sumut untuk menjaga kebun cokelat PTPN II Saentis, yang belakangan ini sering menjadi sasaran pencuri. Cuma, itu tadi, yang jadi sasaran malah pencuri iseng, bukan profesional.

Munawar Chalil (Jakarta)
dan Ade Nursaadah (Medan)

SELO SUMARSONO

PEMBUNUHAN II

Tewasnya Si Jago Balap

Seorang pemuda jago balap jalan raya ditemukan tewas mengenaskan. Polisi belum berhasil mencium jejak si pembunuh anak raja kayu itu.

Para remaja penggemar *road race* alias balap sepeda motor jalan raya di Padang, Sumatra Barat, kini kehilangan salah seorang jagoan kebanggaan mereka. Indra Gusnedi, 23 tahun, jago balap jalan raya setempat, Selasa pagi, 2 November silam, ditemukan telah menjadi mayat. Jasad sulung dari dua bersaudara itu terlihat mengapung di Sungai Banjir Kanal, dekat Jembatan Taman Siswa, Padang. Sedangkan mobil korban, sebuah minibus Toyota Kijang, ditemukan dekat Jembatan Purus, sekitar 1,5 kilometer dari areal penemuan mayat. Di dalam mobil berwarna merah hati itu, darah segar tampak memercik di jok dan lantai. Selain itu, di mobil korban juga tergeletak sepasang pakaian balap, sebuah kantong kertas bekas pembungkus uang berlogo Bank BNI, sebungkus rokok merek Pall Mall yang tak lagi penuh, dan seuntai kalung putih.

Mayat Indra ditemukan warga sekitar pukul 06.30 pagi, dalam kondisi telungkup di permukaan air sungai. Kedua tangannya terikat dan sekujur tubuhnya penuh dengan luka menganga akibat bacokan. Bahkan, di kepala Indra, paling tidak terdapat 13 luka bekas tetakan senjata tajam. Sedangkan dari saku celana pendek hitam yang ia kenakan, menyembul segepok uang kertas bergambar mantan Presiden Soeharto sebesar Rp 2 juta.

Semula, karena tak ada selembar pun kartu identitas di tubuhnya, tak ada orang yang bisa mengenali Indra. Tapi, seorang siswa SMU yang kebetulan melintas dan ikut melihat mayat pemuda itu merasa tak asing dengan wajah Indra. "Ini kan Indra Sangir, juara balap," katanya. Memang, di kalangan anak muda Padang, Indra populer dengan nama Indra Sangir karena ia berasal dari Kota Sangir, Solok, sekitar 175 kilometer dari Padang. Berbekal informasi itulah, polisi lalu mendatangi tempat indekos Indra di Jalan Dr. Sutomo. Dari sana, polisi mengajak adik korban satu-satunya, Iwan Afriandi, 18 tahun, serta induk semang mereka, Erion, untuk mengenali mayat Indra di Rumah Sakit Umum Dokter M. Djamil Padang.

Sayang, hingga akhir pekan silam, nyaris sebulan setelah mayatnya ditemukan, polisi belum berhasil mencium jejak si pembunuh sulung dua bersaudara putra pengusaha kaya di Solok itu. Tapi, sahabat dekat sekaligus pemilik bengkel tempat Indra menyetel motor-motor balapnya, Icai, mengaku sempat menerima telepon dari Indra sekitar pukul 02.00 Selasa dini hari, beberapa jam sebelum mayat Indra ditemukan. Hanya, kata Icai, saat itu ia tak sempat bicara. Sebab, ketika ia menjawab dering telepon, cuma terdengar, "Tolong Om Cai." Lalu, terdengar suara ribut dan hubungan pun terputus. Icai lantas mencoba menghubungi kembali telepon genggam Indra. Namun, "*Handphone*-nya sudah tak aktif," kata Icai.

Jika keterangan Icai dihubungkan dengan keterangan Iwan, adik Indra, boleh jadi pembunuhan Indra memang bermotifkan perampokan. Sebab, menurut Iwan, sehari sebelum Indra tewas, sang abang sempat memberi tahu bahwa ia akan membeli mobil Suzuki Escudo. "Da In akan membeli Escudo. Uang Uda (abang) ada Rp 23 juta di bank. jadi, besok kamu bisa pakai Kijang ini lagi," kata Iwan menirukan ucapan Indra. Menurut Iwan, setelah menjual Daihatsu Ferozanya, sang kakak memang selalu menggunakan Kijang miliknya.

Pada Senin siang, kata Iwan, usai mengambil uang dari bank, abangnya kembali ke rumah. Sewaktu mengganti ban mobil yang bocor, Indra sempat menjawab telepon genggamnya yang berdering. Setelah itu, dengan mengenakan celana pendek hitam dan kaus oblong abu-abu, Indra pamit hendak ke daerah Sawahan, Padang. Sejak itulah Indra menghilang hingga ditemukan tewas esok paginya.

Lantas, ke mana saja Indra sepanjang Senin sore dan malam itu? Menurut seorang sumber FORUM, Senin malam itu Indra sempat *nongkrong* di sebuah studio radio yang belakangan ini kerap menjadi panitia balap *road race*. Polisi pun telah memeriksa belasan teman dekat Indra di kalangan pembalap. Tapi, hasilnya sama saja: nol besar. Tampaknya, Agus harus memusatkan perhatian pada teman-teman dan kenalan Indra yang mengisap rokok Pall Mall dan memakai kalung putih yang ditemukan di mobil korban. Sebab, kata Iwan, abangnya tidak mengisap rokok merek itu dan tak pernah memakai kalung putih tersebut. Apalagi, jika polisi bisa mendapatkan *print-out* percakapan telepon genggam Indra, niscaya jalan untuk melacak si pembunuh akan semakin terang.

Munawar Chalil
dan Indra Sakti Nauli (Padang)

DOK. KELUARGA

INDRA GUSNEDI SEMASA HIDUP. *Mau membeli Suzuki Escudo.*

Tahanan Polisi Dijemput Paksa

MASIH soal ulah anggota TNI AD. Senin malam, 22 November silam, sepuluh anggota TNI AD yang berdinas di Kodim Kota Besar, Bandung, menyerbu markas Poltabes Bandung Tengah. Maksud kedatangan mereka ke markas polisi adalah menjemput paksa rekan mereka, Kopral Kepala Ujang Solihin, yang tengah diperiksa di sana. Sementara, para polisi yang markasnya "diserbu" tak bisa berbuat banyak melihat Ujang dibawa rekan-rekannya.

Beberapa jam sebelumnya, Ujang memang diserahkan warga dalam kondisi babak belur setelah dihajar massa. Ujang dituduh mencoba merampas sepeda motor milik seorang tukang ojek yang mangkal di dekat stasiun angkutan Kota Dago, Bandung. Melihat kelakuan itu, puluhan pengojek langsung mengejar dan kemudian menangkap Ujang. Tanpa banyak cincong, para pengojek langsung menggebuki serdadu malang itu hingga babak belur. Baru setelah tahu bahwa Ujang anggota TNI, mereka menyerahkannya ke polisi. ❑

Kasus Korupsi Liwa Mulai Disidangkan

SETELAH terkatung-katung selama beberapa tahun, Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung, akhirnya mulai menyidangkan kasus perkara korupsi dalam proyek rehabilitasi pascagempa di Liwa, Lampung Barat, pada 1994. Yang menjadi tersangka utama dalam persidangan pertama pada Selasa pekan lalu itu adalah Direktur Perencanaan Departemen Dalam Negeri, Dr. I. Siti Nurbaya, M.Sc.

Dalam dakwaannya, jaksa menuduh Siti, selaku Koordinator *Project Management Office* (PMO) dan *West Lampung Emergency Rehabilitation Project* (WLERP), melakukan korupsi dalam melaksanakan tugasnya untuk membangun kembali kawasan Liwa di Lampung Barat setelah dilanda gempa besar. Siti dituduh bekerja sama dengan mantan Wakil Gubernur Lampung, Man Hassan, dan mantan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Dahlan Ali. "Komplotan" itu diduga "mengimbau" para kontraktor yang mendapat pekerjaan dari PMO dan WLERP untuk menyisihkan 2,5 sampai empat persen dari nilai proyek yang mereka kerjakan ke kas Bappeda Lampung.

Alasannya, dana itu akan digunakan untuk membiayai operasional PMO dan WLERP. Padahal, kata jaksa, uang sebanyak lebih dari Rp 1 miliar itu digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. ❑

SCTV
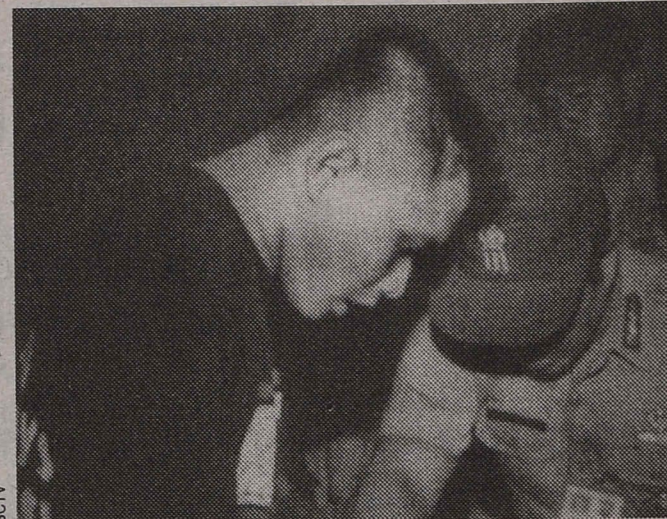
Anak KSAD Dihukum Disiplin

TEKA-TEKI tentang keterlibatan anggota Kopassus TNI AD, Letnan Dua Agus Isrok, dalam kasus narkoba akhirnya terkuak. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR Selasa pekan lalu, panglima TNI Laksamana Widodo A.S. mengakui bahwa Letnan Agus yang juga putra sulung KSAD Jenderal Subagyo H.S. itu telah diberi hukuman disiplin oleh atasannya, Danjen Kopassus, Mayjen Syahrir M.S. Agus mendapat sanksi indisipliner setelah ia tertangkap bersama barang bukti empat kilogram shabu-shabu, beberapa gram daun ganja, dan 7.000 butir pil ekstasi di sebuah kamar hotel di Jakarta, Agustus silam.

Menurut Widodo, hukuman disiplin itu diberikan untuk sementara, sambil menunggu aparat kepolisian menangkap saksi utama dalam kasus itu, yakni seorang laki-laki bernama Asiang, yang hingga kini masih buron. Memang, seperti disebutkan beberapa sumber FORUM, selama dalam pemeriksaan polisi, Agus mengaku barang-barang haram yang ada di kamar itu milik Asiang. Yang jelas, penegasan Widodo kepada para wakil rakyat tentang keterlibatan Agus Isrok telah membuka "kebohongan" beberapa petinggi Polri dan TNI yang sebelum ini mati-matian membantah kabar penangkapan Agus. ❑

Pak Sersan Bermain Granat

SERSAN SATU Kartono akhirnya ditangkap Detasemen Militer (Denpom) Salatiga, Jawa Tengah, Selasa pekan silam. Dua hari sebelumnya, Minggu pagi, 21 November lalu, Kartono yang berdinas di Batalion Infanteri 401/BR Semarang dicari Denpom karena melemparkan granat dan menembak sekelompok warga Desa Bandengan, Kendal, Jawa Tengah, yang diduga merusak rumah mertua Kartono. Akibatnya, dua warga langsung tewas di tempat dan puluhan lainnya luka berat.

Penggranatan dan penembakan itu bermula dari dari perang antarwarga Bandengan dan Desa Karangsari yang dipicu perselisihan antarpemuda kedua desa. Dalam pertikaian fisik yang berlangsung Ahad pagi itu, ratusan warga Bandengan menyerbu dan merusak beberapa rumah warga Karangsari, termasuk rumah Basuki, mertua Kartono. Mendengar rumah mertuanya diamuk massa, Kartono tak terima. Karena itu, dengan mengenakan seragam loreng serta membawa pistol dan granat, ia pun merangsek ke Bandengan. Bukan takut, akibat penggranatan itu, warga Bandengan justru kembali menyerbu Karangsari. ❑

SUARA MERDEKA

Menuai Koran Baru Setelah Protes

Karena mogok kerja dan memprotes manajemen, 67 karyawan *Lampung Post* terancam PHK. Diperlakukan tidak adil atau eksodus gaya baru?

Sri Agustina, wartawati harian *Lampung Post* yang biasa meliput di Gubernuran Lampung, bingung dan sedih. Senin, 8 November lalu, ia disodori lembaran kertas untuk diteken. Isinya, mosi tidak percaya terhadap Sabam Sinaga, Koordinator Reportase, yang notabene atasannya sendiri. Atas nama solidaritas, Sri diminta menandatangani mosi itu. "Saya tidak tahu apa salah Sabam," ujarnya.

Ketidakmengertian Sri beralasan. Pasalnya, peristiwa dramatis yang terjadi di tubuh koran terbesar di Lampung itu berjalan sangat cepat. Klimaksnya, 67 karyawan di bagian produksi koran itu memilih mogok bekerja dan menentang kebijakan manajemen perusahaan. Padahal, pemicunya tergolong sepele. Bukan soal kesejahteraan atau kebijakan redaksional yang lazimnya dipertengkarkan.

Ihwal kegoncangan bermula ketika terbetik kabar, tiga petinggi *Lampung Post* "diciduk" polisi di mes mereka karena berjudi, malam 4 November silam. Rupanya, setelah ditelepon seseorang, Serse Polresta Bandarlampung segera meluncur ke alamat yang dimaksud. Walhasil, mereka menemukan Jumades Sahery (Pelaksana Harian Pemimpin Perusahaan), M. Nasir (Koordinator Biro-Biro), dan Paul Petersz (Konsultan Pemasaran), tengah duduk di depan kartu remi dan uang Rp 31.500. Ketiganya pun dicokok ke Polresta.

Setelah mendekam tiga hari di Polresta, ketiganya dikeluarkan dengan jaminan Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi *Lampung Post*, Bambang Eka Wijaya. Untuk itu, ia mengutus Sabam, wartawan yang biasa mangkal di Polres, mengurus penangguhan penahanan tersebut.

Cuma, tidak semua jajaran *Lampung Post* senang mendengar teman kerja mereka dilepas polisi. Justru, jajaran redaktur di sana marah besar dan merasa dikhianati Sabam. Rupanya, tanpa sepengetahuan Pemimpin Redaksi, jajaran redaktur dan asistennya itu mengadakan rapat dan bersepakat tidak ikut campur dalam masalah tersebut. "Mereka sudah melanggar hukum pidana dan memalukan citra *Lampung Post* sebagai lembaga kontrol sosial," ujar Subur Wadyo, Wakil Redaktur Senior yang memimpin rapat.

Tak pelak, Sabam pun dianggap berkhianat. Akhirnya, rapat redaksi, lagi-lagi tanpa Bambang, memutuskan harus ada sanksi bagi Sabam, berupa mosi tidak percaya, sekaligus menolak kehadirannya di redaksi. Suasana pun memanas. Bambang merasa kewenangannya dilangkahi para redaktur dan asistennya yang berjumlah 19 orang itu. "Mereka tidak berhak menjatuhi sanksi bagi kawan sendiri," ujar Bambang. Selain itu, Sabam juga semata-mata menjalankan perintahnya.

SEN TJIAUW
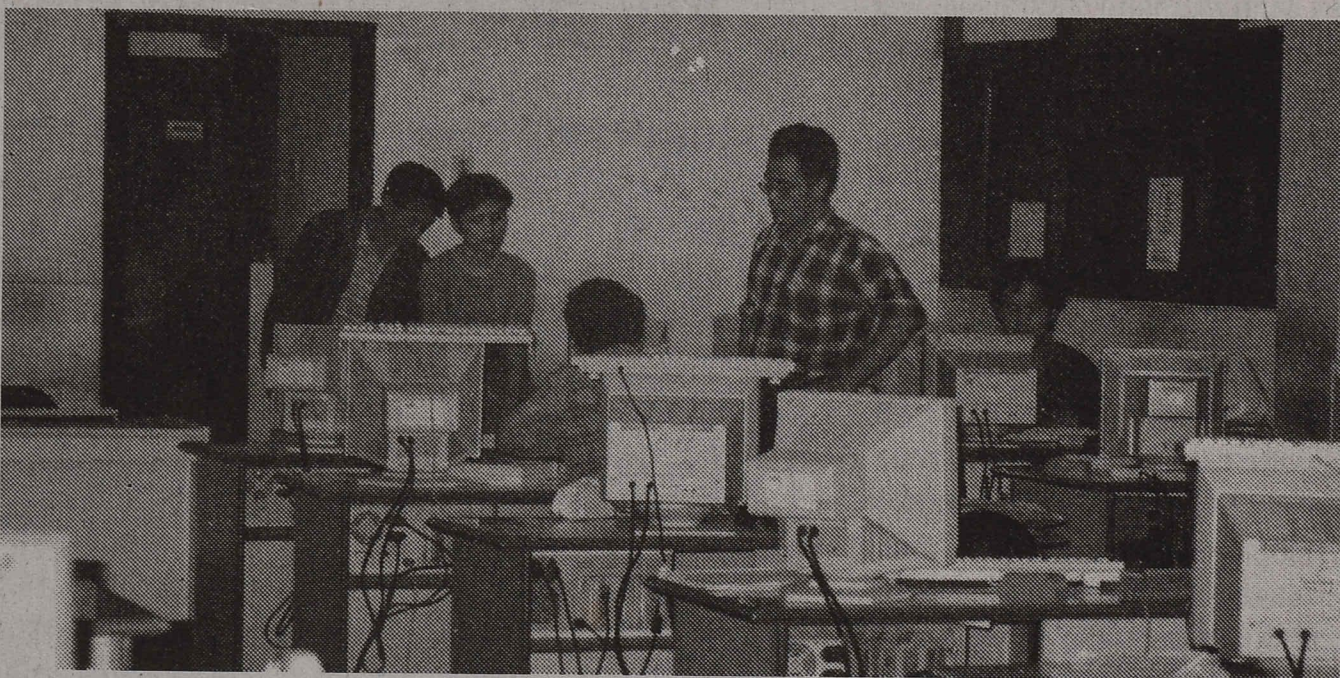
RUANGAN REDAKSI LAMPUNG POST. *Tinggal lima orang.*

Maka, orang nomor satu di *Lampung Post* ini pun meminta agar mosi itu dicabut. Tapi, bukan surut, mereka malah melayangkan mosi tidak percaya kedua. Kali ini ditujukan ke Bambang sendiri. Tak urung, sikap menentang itu pun berbuah skorsing. Kendati sempat menguasai kantor redaksi, jajaran redaktur yang didukung puluhan wartawan, kru pracetak, staf sekretariat, dan *office boy*, berjumlah 67 orang itu, meninggalkan kantor, setelah menolak meminta maaf, apalagi mencabut mosi tersebut.

Akibatnya, koran di bawah bendera Surya Presindo milik Surya Paloh itu nyaris lumpuh. Harian bertiras 28 ribu eksemplar ini sempat absen sehari karena semua berita yang siap dicetak tiba-tiba lenyap dari layar komputer. Keesokannya, dengan berita ala kadarnya, lima wartawan yang tinggal bersama koresponden dan eks wartawan *Lampung Post* yang bersimpati, menerbitkan lagi koran tersebut, kendati molor hingga siang hari.

Pekan ini, manajemen *Lampung Post* untuk keempat kalinya memanggil jajaran produksi agar kembali bekerja. Sayang, ajakan itu tidak ditanggapi. Mereka yang eksodus justru tengah bersiap menerbitkan koran baru bertajuk *Harian Sumatera*. Samsul B. Nasution, Redaktur Eksekutif (RE) *Lampung Post* yang kini dimutasi ke Biro Jakarta, disebut sebagai pencetus harian baru itu. Menurut kabar, konflik internal ini juga buntut penyingkiran Samsul dari posisi RE.

Sekalipun nekat "pisah ranjang", sengketa ini belum berakhir. "Kami tidak mangkir. Kami tidak masuk kerja karena ada masalah yang belum selesai. Untuk itu, kami siap di-PHK," ujar Agusta Hermawan, salah seorang di antaranya. Mereka telah meminta LBH Lampung melaporkan masalah ini ke Kanwil Departemen Tenaga Kerja, yang dalam waktu dekat akan memanggil kedua pihak untuk berdialog.

Upaya itu ditanggapi positif oleh Bambang dan Tim Mediasi dari Surya Presindo. Menurut Bambang, pihaknya siap berembuk dengan para karyawan. "Mereka yang membesarkan koran ini. Sayang kalau ditinggalkan," ujarnya seraya menyesalkan sikap keras tersebut. Ibarat pepatah, buruk rupa, jangan cermin dibelah.

Sen Tjiauw dan Aina R. Aziz (Lampung)

APBN dan Otonomi Daerah

Selama ini, Indonesia sesungguhnya belum memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam arti sebenarnya. Sebab, di luar pendapatan negara yang dikumpulkan dan diatur penggunaannya oleh pemerintah pusat, terdapat pendapatan negara lain yang dikumpulkan dan diatur pemakaiannya oleh pemerintah daerah yang disebut sebagai pendapatan asli daerah (PAD). PAD ini juga dipungut berdasarkan undang-undang.

Revrisond Baswir
Pengamat ekonomi-politik UGM dan Direktur IDEA, Yogyakarta

Secara nominal, volume PAD selama ini memang relatif kecil, rata-rata sekitar lima persen dari seluruh pendapatan negara. Namun, sebagai bagian yang sah dari pendapatan negara, PAD seharusnya turut diperhitungkan sebagai bagian dari pendapatan negara secara keseluruhan. Dengan kata lain, lantaran PAD belum tercakup sebagai komponen APBN, sesungguhnya APBN lebih tepat disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat (APBP).

Persoalannya kemudian, mulai tahun anggaran 2000/2001, Indonesia akan menghadapi perubahan besar-besaran dalam hubungan keuangan pusat-daerah. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 25/1999, secara keseluruhan kini terdapat tiga komponen dana perimbangan yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah. Pertama, bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penerimaan dari sumber daya alam. Yang kedua adalah dana alokasi umum. Dan, yang ketiga yaitu dana alokasi khusus.

Menurut UU No. 25/1999, jumlah yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah untuk setiap komponen dana perimbangan tersebut adalah sebagai berikut: PBB 100 persen; BPHTB 100 persen; sumber daya alam sektor kehutanan, pertambangan umum, dan sektor perikanan 80 persen; sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam masing-masing 15 persen dan 30 persen setelah dikurangi pajak; dana alokasi umum sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri; dan dana alokasi khusus, seperti dana reboisasi, sebesar 40 persen.

Pada sisi pendapatan, pengalokasian dana perimbangan tersebut memang tidak berpengaruh. Artinya, sebagaimana selama ini, sekitar 95 persen pendapatan negara akan tetap tercatat sebagai pendapatan pemerintah pusat. Yang merisaukan adalah implikasi alokasi dana perimbangan tersebut pada sisi belanja. Sekurang-kurangnya, sekitar 35 persen penerimaan dalam negeri harus dialokasikan kepada daerah. Berkaca pada APBN tahun berjalan, dengan penerimaan dalam negeri mencapai Rp 140,8 triliun, volume dana perimbangan yang harus disediakan pemerintah sekurang-kurangnya sekitar Rp 49 triliun. Padahal, dari belanja rutin APBN tahun berjalan sebesar Rp 134,5 triliun, pemerintah harus menyediakan dana untuk belanja pegawai sebesar Rp 32 triliun, belanja barang Rp 11 triliun, angsuran utang dan bunga Rp 44,8 triliun, serta untuk belanja rutin lainnya Rp 28,2 triliun. Artinya, dengan mengalokasikan penerimaan dalam negeri untuk dana perimbangan sebesar Rp 49 triliun, belanja rutin pemerintah akan mengalami defisit sebesar Rp 24,2 triliun (Rp 140,8 triliun-Rp 165 triliun).
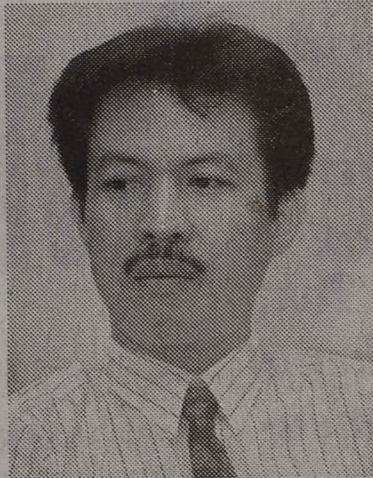
NOUFAL

Pemerintah tentu dapat menghindari kemungkinan defisit belanja rutin ini dengan mengalokasikan dana perimbangan tersebut menjadi bagian dari belanja pembangunan. Kendati demikian, dengan defisit belanja rutin sebesar Rp 24,2 triliun, di satu pihak pemerintah harus dapat memastikan bahwa tabungan pemerintah akan lebih besar dari defisit tersebut. Dalam APBN tahun berjalan, tabungan pemerintah setelah dikurangi belanja rutin daerah sebesar Rp 18,4 triliun hanya berjumlah sekitar Rp 6,3 triliun.

Di pihak lain, jika tabungan pemerintah tidak mampu menutup defisit belanja rutin tersebut, berarti pemerintah harus membelanjai alokasi dana perimbangan tersebut dengan membuat utang luar negeri baru dalam bentuk pinjaman program. Dengan perkiraan kurs sekitar Rp 7.000 per satu dolar AS, jumlah pinjaman program yang harus dibuat pemerintah untuk tahun anggaran mendatang sekurang-kurangnya sekitar US$ 4 miliar.

Dengan gambaran seperti itu, dapat diperkirakan betapa riskan kondisi APBN tahun mendatang. Seandainya pemerintah masih berencana memperoleh pinjaman proyek sebagaimana APBN tahun berjalan sebesar Rp 30 triliun, utang luar negeri baru yang harus dibuat tidak akan kurang dari US$ 8 miliar.

Sementara itu, tuntutan daerah penghasil minyak bumi dan gas alam kini cenderung bergerak ke arah permintaan bagian lebih besar dari 15 atau 30 persen. Sebagaimana dijanjikan Presiden Gus Dur kepada masyarakat Aceh dan Riau, bagian hasil eksplorasi sumber daya alam yang akan diserahkan kepada daerah akan ditingkatkan menjadi 75 persen. Bila ini benar-benar menjadi kenyataan, sulit dibayangkan apa yang terjadi bila pemerintah tidak menempuh langkah-langkah sebagai berikut: penjadwalan pembayaran utang luar negeri, peningkatan penerimaan dalam negeri, dan pengurangan subsidi BBM.

Langkah pertama, walaupun sekadar menunda masalah, mungkin relatif mudah untuk dilakukan. Tindakan ini setidak-tidaknya telah kita lakukan selama dua periode berturut-turut. Langkah kedua, selain tergolong cukup berat, juga harus dilihat implikasinya secara makro. Sebagaimana diketahui, pajak tidak hanya memiliki fungsi pengisi kas negara, tapi juga sebagai instrumen ekonomi makro. Demikian pula dengan langkah ketiga. Pencabutan subsidi BBM di tengah-tengah harapan masyarakat bahwa akan terjadi penurunan harga, tentu dapat menjadi pemicu kemarahan masyarakat. □

Orang Bersahaj Menyejahteraka
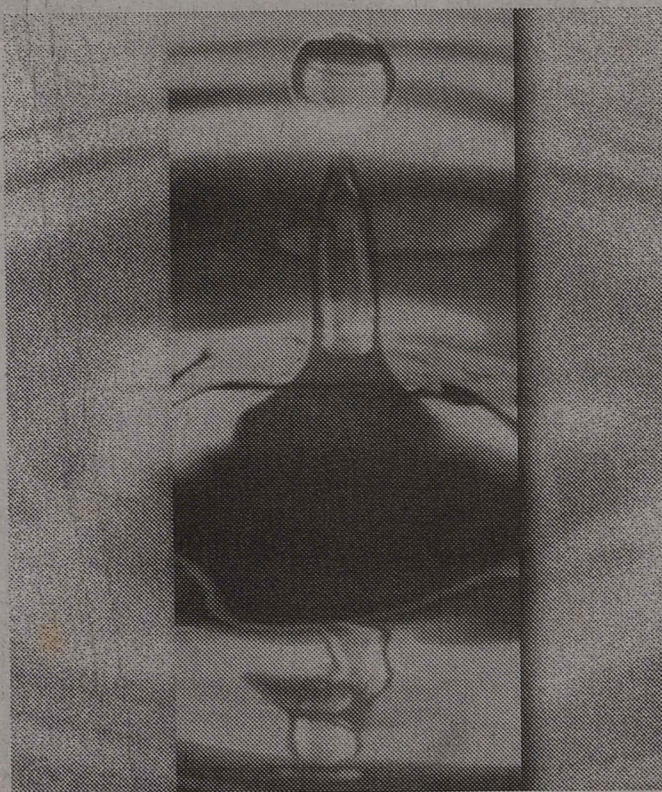
Saat belia, menjadi seorang guru dan tentara sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya. Ia mafhum benar, selain gajinya kerap dipotong, para guru tak lagi dihormati murid-muridnya. Bahkan, di mata masyarakat umum, profesi itu juga tak lagi sebergengsi di masa silam, ketika seorang guru bahkan disapa "Tuan Guru". Toh, takdir telah memanggil. Selain dikenal sebagai pengamat militer, ia juga menjadi dosen, yang notabene juga guru. Bahkan, puncaknya, kini jabatan Menteri Pendidikan digenggamnya. "Ndilallah kersaning Allah," ujarnya saat acara serah terima jabatan Menteri Pendidikan Nasional, awal November lalu.

Yahya Muhaimin, Menteri Pendidikan Nasional yang tak pernah bercita-cita jadi guru, apalagi menteri itu, disebut-sebut Gus Dur sebagai pilihan terbaiknya. "Saya memilih Yahya Muhaimin menjadi Menteri Pendidikan karena ia adalah orang Muhammadiyah yang mengerti NU," kata Gus Dur. Tentu saja, ucapan itu lebih merupakan sebuah seloroh ketimbang jawaban yang benar-benar jawaban. Sebab, selain alasan "politis" tadi, Yahya memang layak di jabatan tersebut. "Saya kan sudah lama berkecimpung di bidang pendidikan, semacam di Muhammadiyah dan Fisipol UGM. Di kampung, saya mengurus TK sampai SMA. Jadi, sewaktu disodori jabatan menteri pendidikan, bayangan saya, ya, akan mengurusi yang kayak-kayak begitu. Mungkin, ruang lingkupnya saja yang nasional," kata Yahya.

Selain mengajar di Fisipol UGM, almamaternya, ia juga pernah menjadi dekan. Sedangkan di kampungnya yang disebut-sebut tadi, Yahya juga tercatat sebagai salah seorang pengelola Yayasan Ta'alumul Huda yang didirikan ayahnya, Ahmad Muhaimin. Selain itu, seperti di sebuah SMA setempat, ia juga tercatat sebagai pengajar di lembaga pendidikan tersebut. Karena itulah, tak mengherankan jika ia menduduki jabatan Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. Dan, kita tahu, dibanding ormas-ormas Islam lainnya, pendidikan (modern) yang dikelola Muhammadiyah jauh lebih maju. Bahkan, bisa disebut, Muhammadiyahlah yang memelopori pendidikan modern di kalangan muslimin Indonesia. Maka, tak mengherankan pula bila kini mereka mengelola ribuan sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi.

Toh, seperti disebut tadi, kendati punya *track* di bidang pendidikan, termasuk menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan kita di Washington, yang dijabatnya sejak dua tahun lalu, ia tak pernah bermimpi jadi menteri pendidikan. Bahkan, ketika teman-temannya di Washington menyebut-nyebut ia bakal didaulat untuk jabatan tersebut, Yahya menanggapinya sebagai gurauan semata. "Ah, kamu kayak enggak tahu Jakarta saja. Kan, masih banyak orang yang berjuang jadi menteri. Masak, saya cuma ongkang-ongkang kaki di Washington, tiba-tiba jadi menteri?" kata Yahya.

Bahkan, saat dihubungi Gus Dur, Minggu, 24 November lalu, ia malah balik

DOK. KELUARGA

Lahir: Bumiayu, Purwokerto, Jawa Tengah, 17 Mei 1943
Pendidikan: Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, AS (1982)
Karir: Dosen Fisipol UGM (1972), Dekan Fisipol UGM (1984), Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM (1984), Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah (1995), Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk Amerika (1997), Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Persatuan Nasional (1999)

haja yang Ingin akan Guru

bertanya. "Apa enggak ada yang lebih baik?" katanya. "Saya memang sudah lama kenal Gus Dur, sejak saya mengambil doktor di sana. Waktu itu, Gus Dur berobat mata ke Boston. Kendati waktu itu ia belum jadi Ketua NU, ia kan sudah *ngetop*," katanya. Tapi, jadi menteri karena itu? Sama sekali jauh dari bayangannya.

Ia juga tak membayangkan jika gurauannya tempo hari bakal membawanya ke kursi tersebut. Kisahnya, "penunjukan" Amien Rais sebagai calon presiden oleh Permadi dalam sebuah diskusi di YLBHI, jadi guyonan di kalangan PP Muhammadiyah. Termasuk, oleh Amien sendiri. "Kalau saya jadi presiden, kamu *njaluk apa* (minta apa)?" ujar Amien, dalam sebuah rapat, kepada Yahya. "Aku *njaluk* Tapos *waelah* (Saya minta Tapos saja)," ujar Yahya tak mau kalah dengan gurauan kakak kelasnya di UGM itu.

Apa pun, Yahya resmi jadi Menteri Pendidikan Nasional. Sementara, setumpuk masalah siap mengadangnya. Mulai dari masalah laten, seperti gaji guru yang sering kena potongan tadi, sampai problem yang paling mutakhir, seperti kemerosotan etika anak didik. Apa yang bakal dilakukannya?

Yahya rupanya melihat pendidikan dasar dan menengah (SMP) sebagai agenda utamanya. "Saya punya determinasi, di tingkat dasar perlu perhatian khusus," katanya. "Kalau basisnya bobrok, rumahnya mudah goyah," ujarnya lagi beramsal-amsal. Dan, perbaikan di tingkat pendidikan dasar itu juga dilakukan seraya memperbaiki kurikulum. Jadi, pembentukan watak, moral, dan karakter—yang menjadi tujuan pokok pendidikan, tentu saja di samping aspek-aspek lain—bisa dilakukan.

Dalam hal kurikulum, ia melihat persoalannya ada pada penerapan hal-hal yang paling mendasar. Yahya bernostalgia ke masa SMA-nya, terutama ketika ia mengikuti program pertukaran pelajar Indonesia-Amerika, yang di dalamnya ia menempuh kelas III SMA-nya di Iowa. "Saat saya mengambil mata pelajaran aljabar, selama dua minggu pertama saya justru yang paling tahu tentang aljabar. Soalnya, di Indonesia saya sudah diajari," tutur Yahya. Tapi, setelah itu ia disalip murid-murid lainnya. "Rupanya, yang mereka ajarkan di bangku SD dan SMP sana adalah konsep-konsep mendasar dan bukan menghafalkan. Jadi, untuk menghadapi masalah tersebut, selanjutnya menjadi lebih mudah," kata Yahya.

Berdasarkan pengalaman itu pula, menurut Yahya, ia menerapkan cara yang sama di SMA di kampung halamannya, tempat ia mengajar bahasa Inggris. "Yang saya ajarkan adalah konsep dasarnya. Misalnya, 'Saya makan nasi'. Bahasa Inggrisnya, 'I eat

rice'. 'Ia makan nasi'. Bahasa Inggrisnya, 'He/She eat rice'. Jika itu sudah dilakukan, mereka akan terbiasa," kata Yahya yakin.

Tentu saja, Yahya tidak menafikan, pembenahan konsep pendidikan itu tak akan berjalan baik tanpa dibarengi peningkatan kesejahteraan para pengajarnya. Karena itulah, Yahya berjanji akan memperjuangkan kenaikan gaji guru lewat saluran-saluran resmi dan wakil-wakil rakyat di DPR. Ia juga berjanji akan merintis pendirian Badan Kesejahteraan Guru Nasional sebagai salah satu sarana perjuangan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Bagaimana dengan rencana pemerintah menaikkan gaji PNS sampai 50 persen? "Untuk guru, malah kalau bisa naik seribu persen. Asal uangnya ada," ujar Yahya setengah berseloroh.

Namun, di sisi lain, ia juga mengakui bahwa gaji tinggi semata tidak akan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Terutama, bila para guru tidak mempunyai dedikasi yang tinggi. "Lebih-lebih, jika gurunya masih suka membolos. Apalagi, kalau *nggragas* (rakus). Sebab, berapa pun besar gaji, tidak akan pernah cukup," kata Yahya kalem.

Ketika disinggung tentang konsep otonomi perguruan tinggi (PT), Yahya terlihat agak berhati-hati menanggapinya. "Saya ingin mempelajari lebih dulu dan saya masih mengumpulkan informasi dari staf. Ide otonomi PT itu untuk meringankan beban negara. Artinya, tujuannya kan baik. Tapi, sejauh mana potensinya, itu yang akan saya lihat dulu. Siapa tahu, dengan otonomi, biaya kuliah jadi lebih murah. Tapi, itu enggak mungkin," katanya sambil tertawa. Dan, ia setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa ada hal-hal dilematis dalam hal otonomi PT itu.

Bagi kolega-koleganya di "Kampus Biru" UGM, pembawaan kalem Yahya bukanlah sebuah sikap yang dibuat-buat. Dekan Fisipol UGM Dr. Sunyoto Usman, misalnya, mengakui bahwa sejak dulu sifat Yahya memang santai dan *easy going*. "Beliau memang tenang, kalem, tidak meledak-ledak dan berhati-hati," kata Sunyoto sambil menyebutkan sikap Yahya yang tetap tenang ketika dulu sempat ada masalah serius dengan Afan Gaffar saat pemilihan dekan Fisipol UGM. "Waktu itu dia bilang, 'Santai saja. Mungkin ini yang terbaik'," tutur Sunyoto.

Tapi, sebagaimana manusia biasa, tak urung kehati-hatian Yahya sempat juga membuatnya terpeleset jua. Itu ketika disertasi yang mengantarnya meraih gelar doktor dari MIT (Massachusetts Institute of Technology), 1982, terbit sebagai buku. Judulnya, *Bisnis dan Politik, Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, buku yang diterbitkan LP3ES di tahun 1991 itu sempat memicu kontroversi seputar kebebasan akademik.

Semula, pemaparan sekelumit riwayat bisnis Probosutedjo di halaman 252-254 buku tersebut. Di situ disebutkan, perusahaan milik Probo, PT Mercu Buana, memegang menopoli cengkeh sejak tahun 1968. Dan, itu tentu saja menyinggung martabat adik tiri Presiden kedua RI itu. "Bukan saja tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tapi juga telah amat mencemarkan nama baik beliau, baik selaku pribadi maupun sebagai pengusaha," kata R.O. Tambunan, pengacara Probo untuk kasus tersebut. Buntutnya, Yahya dan LP3ES disomasi Probo. Walaupun, akhirnya Yahya minta maaf. "Saya sangat menghargai *privacy* orang. Saya merasa enggak enak karena banyak nama tercantum. Kalau dalam disertasi, tidak apa-apa," kata Yahya ketika itu. "Istilah *ngono ya ngono ning aja ngono* itu memang benar," katanya lagi.

Lepas dari konflik dengan kroni Soeharto tadi, ada hal lain yang membuat Sunyoto terkesan kepada Yahya, yaitu saat dirinya menjabat Pembantu Dekan I Fisipol UGM, sementara Yahya masih menjabat Dekan. "Perhatiannya pada yang lemah dan terpinggirkan kuat sekali," kata Sunyoto sambil mencontohkan pesan mantan bosnya itu untuk jangan meninggalkan pegawai yang kecil. "Justru merekalah yang perlu diperhatikan," kata Sunyoto menirukan ucapan Yahya. Menurut dia, sikap kepedulian Yahya kepada mereka yang terpinggirkan itu juga termasuk dalam dunia pendidikan Indonesia. Dengan kata lain, para guru atau pendidik lainnya yang "tersingkir", insya Allah, akan diperhatikan Menteri Pendidikan baru ini.

DETAK

BERSAMA BAMBANG SUDIBYO USAI DILANTIK. *Tak akan menyalahkan siapa-siapa*

Sementara itu, dalam berinteraksi dengan anak buahnya, Yahya dikenal Sunyoto sebagai atasan yang tidak pernah berlaku sok formal—bahkan suka *guyonan*. "Kepada yuniornya, ia sering menempatkan dirinya sebagai seorang kakak. Jadi, tidak ada hubungan atasan dan bawahan. Tapi, seolah keluarga sendiri saja," kata Sunyoto. Saking akrabnya, kata Sunyoto, Yahya sering membicarakan problem yang menyangkut masalah pribadi dengan dirinya. Tapi, jangan sangka Yahya tidak bisa tegas. "Terlebih lagi bila menyangkut suatu permasalahan yang dirasa mengganjal. Beliau sulit meneng-gangnya," kata Sunyoto.

Sikap tegas Menteri Pendidikan Nasional baru ini sudah ditunjukkan saat menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan peng-

KEDAULATAN RAKYAT

MENGUNJUNGI SEKOLAH TAMAN SISWA DI YOGYAKARTA. *Ngono ya ngono ning aja ngono itu benar.*

ubahan kurikulum bersamaan dengan pengangkatan dirinya. Ia menegaskan tidak akan mengikuti kesalahkaprahan selama ini, ganti menteri ganti kebijakan, yang ujung-ujungnya membuat dunia pendidikan kian kehilangan arah. Di samping itu, Yahya tidak ingin membebani orang tua dengan keharusan membeli buku pelajaran baru seiring dengan perubahan kurikulum. "Saya akan meneruskan apa yang sudah diteruskan para menteri terdahulu," ujarnya.

Masalah kronis "ganti menteri-ganti buku pelajaran" tadi, menurut Yahya, merupakan salah satu persoalan beruntun yang selama ini menimpa dunia pendidikan nasional. Ia sendiri mengaku sempat bertengkar dengan sang istri gara-gara kurikulum. "Saya juga mengeluh, sewaktu anak-anak saya masih SD. Belum lagi beli bukunya," tutur Yahya. Tapi, bagaimanapun, ia tetap memandang bahwa kurikulum merupakan hal pokok yang menjadi acuan. Karena itu, ia menginginkan agar kurikulum bisa efektif.

Ia mencontohkan pengalamannya sewaktu dirinya masih berkuliah di Amerika. Suatu kali, ia harus pulang ke Indonesia selama sembilan bulan untuk melakukan penelitian. Yang jadi persoalan adalah kelanjutan sekolah anak-anaknya di Amerika. "Oleh kepala sekolahnya, saya diminta tidak usah khawatir dan dibekali buku-buku pelajaran untuk anak saya," kata Yahya. Kelanjutannya, saat ia kembali ke Amerika, anaknya bisa naik kelas. "Dari situ kan terlihat, tidak ada masalah dengan kejadian seperti itu," katanya. Lebih dari itu, termasuk dalam perkara gaji guru yang kerap disunat, ia tak akan mencari kambing hitam."Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tak akan mencari orang untuk disalahkan atau diberi pujian," ujar ayah empat orang anak ini.

Di awal masa kerjanya, menteri kelahiran Desa Dukuhturi Bumiayu, Jawa Tengah, 56 tahun lalu ini, juga menyoroti etika dan mental anak didik yang dirasanya merosot. Maklum, sudah umum diketahui, penghormatan murid terhadap guru sudah meluntur, tawuran merajalela, bahkan murid SD pun mulai mengenal narkoba. Sayang, ia tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana cara memperbaiki etika para siswa itu.

> *"Rupanya, yang mereka ajarkan di bangku SD dan SMP sana adalah konsep-konsep mendasar dan bukan menghafalkan. Jadi, untuk menghadapi masalah tersebut selanjutnya menjadi lebih mudah."*

Hanya, bagi Dewi Rosemary, anak bungsu Yahya, pendidikan etika dan mentalitas memang sudah ditanamkan ayahnya sejak dini. Menurut gadis yang kerap disapa Ucik itu, salah satu caranya adalah dengan selalu menomarsatukan ajaran dan dasar-dasar agama. "Kami semua rata-rata bersekolah di SD Islam," ujar Ucik. "Paling tidak, pagi sekolah di SD umum, siang sekolah di madrasah," tuturnya. Karena itulah, salat berjamaah, terutama magrib, menjadi hal sehari-hari di keluarga Yahya. "Selain dimotivasi untuk terus belajar dalam arti formal, kita juga diingatkan untuk mencari pengalaman dalam organisasi," kata Fais, pengurus Koperasi Mahasiswa UMY, yang juga kemenakan Yahya.

Di luar perkara nilai dan etika agama itu, Yahya nyaris lepas tangan. Artinya, ia seorang demokrat yang hirau dengan pendapat dan pemikiran anak-anaknya. Maka, bersamaan dengan itu, kemandirian dan tanggung jawab pun muncul dalam sanubari anak-anaknya. "Ketika kakak-kakak saya tinggal di luar kota, kuliah, atau bekerja, saya tetap tinggal di Yogyakarta. Mengurus rumah. Padahal, saya ini anak bungsu, lo," kata Ucik. Sementara, sang ibu, Chofifah, lebih banyak tinggal di Bumiayu, mengurusi Toko Emas Putri, milik Yahya sekeluarga.

Karena demokratis tadi, dari keempat anaknya, tak seorang pun yang mengikuti jejak Yahya sebagai ilmuwan politik. Si sulung Atrofi-

DOK KELUARGA

DENGAN KELUARGA SEWAKTU DI AMERIKA. *Tidak pernah dijodohkan.*

yati memilih psikologi di UGM. Anak kedua, Elfin Manfaluthi, tercatat sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Telkom-Bandung. Mely calon dokter dari Universitas Diponegoro, Semarang. Adapun Ucik, menekuni ilmu ekonomi di UGM. "Kami juga tidak pernah dijodohkan," kata Mely, anak ketiga, sambil tersipu.

Bila dihubungkan dengan "anjuran" Gus Dur agar para menterinya hidup sederhana, rasanya harapan Presiden itu tak akan sulit dilaksanakan Yahya. Aroma kesederhanaan mencuat ketika FORUM menyambangi rumahnya di Gang Arumsari No. 5, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Rumah yang ditempati sejak 1985 itu terlihat asri dengan beberapa kuntum bunga soka menyembul dari celah-celah pagar. Meski terletak di perkampungan, sebuah antena parabola tampak tegak berdiri untuk memonitor perkembangan mancanegara.

Melangkah memasuki ruang tamu, kesejukan menyapa. Ruang seluas 4 x 4 meter itu diisi seperangkat kursi tamu yang terkesan sudah tua. Sebuah bufet tampak memamerkan beberapa piring kenangan dan sejumlah hiasan lain. Di dinding, selain lukisan kereta api kuno, hanya ada kaligrafi Al-Fatihah berukuran 35 x 40 sentimeter. "Abah memang menyukai kaligrafi dan di dalam rumah masih ada tiga kaligrafi lagi," kata Mely tentang hobi sang ayah. "Mobil kami hanya Kijang, Mas. Kami ke kampus, kalau tidak jalan kaki, ya, naik motor," ucap Ucik.

"Orang-orang di Ditjen Kebudayaan memang sangat khawatir. Tapi, insya Allah tidak akan ada perubahan. Tapi, saya bukan mendahului Presiden, ya. Insya Allah, doa orang-orang di Ditjen Kebudayaan dikabulkan Allah."

Konon, dari kecil, Yahya sudah menggemari buku. Maka, pantas saja jika ia sempat menyabet gelar mahasiswa teladan, antara lain berkat skripsinya yang gemilang, yang lantas diterbitkan menjadi buku berjudul *Perkembangan Militer dalam Politik, 1945-1966.* Kegemaran membaca itulah, tampaknya, yang membuatnya didaulat sebagai seorang penyair dalam acara Semalam di Kampus Biru UGM, lima tahun lalu. Ketika itu, bersama penyair kawakan Emha Ainun Nadjib dan Neno Warisman, ia tampil membacakan puisi.

Nah, karena berminat pada sastra, Yahya juga punya perhatian terhadap kebudayaan pada umumnya. Artinya, kendati predikat kebudayaan sudah ditanggalkan dari departemen yang dipimpinnya, Yahya tak akan melupakan Ditjen Kebudayaan. "Orang-orang di Ditjen Kebudayaan memang sangat khawatir. Tapi, insya Allah, tidak akan ada perubahan. Tapi, saya bukan mendahului Presiden, ya. Insya Allah, doa orang-orang di Ditjen Kebudayaan dikabulkan Allah," kata Yahya menjelaskan sikapnya menyebutkan niatnya membahas masalah ini secara khusus dengan Presiden.

Jadi, kita tunggu kiprah orang bersahaja ini. Apa yang akan dilakukannya demi masa depan anak-anak bangsa.

Ronald Raditya, Gendur Sudarsono, Teguh S. Usis, dan Khoirul Rosyadi (Yogyakarta)

Patung-Patung Postmo yang Lain

Tidak harus selalu solid. Pilinan plastik pun bisa menghadirkan sosok sebuah patung. Terobosan berani Rudi Mantofani dan Yusra Martunus.

Jika Anda melongok ke Galeri Lontar sampai 5 Desember ini, jangan harap akan menjumpai patung dalam arti konvensional. Pasalnya, Rudi Mantofani dan Yusra Martunus, dua pematung asal Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, yang tengah punya hajat, menghadirkan serangkaian karyanya dengan mempergunakan bahan yang tidak lazim dalam seni patung Indonesia. Medium kayu, tanah liat, ataupun batu, yang selama ini seakan menjadi unsur wajib, seolah dikesampingkan. Sebagai gantinya, dipilihlah bahan-bahan "lebih lunak" macam ranting pohon, kaca, tali, bahkan plastik yang diolah sebagai unsur utama.

Tengok saja, karya Rudi, *Berharap*, yang menggunakan pilinan plastik transparan, lengkap dengan sedikit air di dalamnya. Penempatan karyanya—digantung—pun tergolong unik. Kecenderungan membebaskan karya dari gravitasi bumi juga dilakukan Yusra dalam *Kegelisahan*. Bahkan, dengan menggunakan medium kawat berduri dan besi, posisi menggantung itu seakan menegaskan kelabilan serta ketidakmasifan karyanya. Walhasil, kesan sebuah wadah yang tidak otonom pun mencuat.

Bagi Yusra, kawat berduri tampaknya merupakan bahan yang eksotis. Setidaknya, selain *Kegelisahan*, hal itu terlihat dalam *Untitled* sampai globe dunia yang dibentuk dari rangkaian kawat berduri. Mungkin, pemenang McDonald Award 1994 ini terilhami maraknya penggunaan benda itu sebagai buntut kerusuhan di Indonesia. Selain itu, karya laki-laki kelahiran Padangpanjang, Sumatra Barat, itu banyak menggunakan medium transparan atau pipih yang bisa digantung ataupun sekadar disenderkan di dinding. Dan, di tangan Yusra, medium kaca terasa menyentak: Menciptakan kesan kekosongan dan kefanaan. Sesuatu yang di luar pakem seni patung.

FAUZAN

YUSRA DAN RUDI DENGAN KARYA MEREKA. *Menafsirkan kembali batasan patung.*

Pemilihan materi yang tergolong aneh itu membuat Hendro Wiyanto, pengamat seni yang mengantar pameran ini, menilai kedua seniman 26 tahun tadi menawarkan karya-karya patung *"post-mo"*—bukan *postmodern*, melainkan *postmonument*—di belantara seni Indonesia. Menurut Hendro, karya-karya 1998 dan 1999 keduanya menghadirkan kepekaan lain di luar kerja mematung. Hal ini, "Kalaupun bukan membebaskan batas-batas yang pernah ada, memberikan efek untuk menafsirkan kembali batasan patung," kata Hendro.

Karena itu, wajar bila Asikin Hasan, kurator Lontar, terkesan ragu mengelompokkan karya keduanya sebagai karya patung. "Saya melihatnya dalam kerangka modern akademi: Memahat dan membentuk atau *modeling*," ujar Asikin. Lantaran ada paradigma baru dalam karya mereka, sulit menentukan di mana "patung-patung" itu harus ditempatkan. "Penggunaan medium yang tidak biasa dalam perkembangan konsepsi seni patung merupakan tradisi baru bagi kita," ujar Asikin.

Kecenderungan untuk terpeleset ke dalam kriteria seni instalasi juga menggejala dalam karya keduanya. Terutama Rudi, yang juga pelukis andal—lukisannya, *Fatamorgana*, pernah dilelang Sothteby's Singapura. Jejeran botol berisi tanah dengan beragam macam tutupnya, mulai dari bekas tutup botol *Coca-Cola* sampai sumpalan gulungan koran, dalam *Kita dan Kita*, mengentalkan keterpelesetan itu. "Patung seperti itu menghindari kemasifan dan cenderung menampilkan kandungan narasi," kata Hendro.

Meskipun, kata Asikin, "Kesan instalasi lebih sebagai akibat atau ekses karena mereka bekerja dalam format tiga dimensi." Ini lebih "maju" dibanding Anusapati, yang cenderung kembali ke tradisi. Artinya, etos anak muda sebagai pendobrak tradisi terus berlangsung. Artinya lagi, ya, hidup anak muda!

Ronald Raditya

Saat Nano Membayar Utang

Teater Koma menampilkan kembali *Sampek Engtay*. Diwarnai barongsai dan liong, lebih hidup dan sesuai dengan warna aslinya.

Dua barongsai itu bergerak tangkas dan lucu. Tak mengherankan bila Mei-mei, gadis manis yang mengaku tinggal di kawasan Sunter, tenggelam dalam keasyikan. Apalagi, selama setengah abad ini, sebagaimana kesenian lain yang kental warna Cinanya, barongsai menjadi pertunjukan haram.

HENRY LOLOPULAN/D&R

SAMPEK DAN ENGTAY DI TEATER TANAH AIRKU. *Berutang karena tidak semestinya.*

"Ini pertama kali saya melihat barongsai," kata Mei-mei. Padahal, memainkan boneka singa raksasa itu—perwujudan dari anjing Tibet, Sinchu, yang kerap mendampingi para biksu dalam upacara keagamaan—bukanlah hal mudah. Selain butuh tenaga, demi adegan-adegan akrobatik yang marak dalam "tarian" itu, si penari juga harus tangkas bermain kungfu.

Adapun N. Riantiarno, dramawan yang kerap "bermasalah" dengan rezim lama itu, tak hanya menyelipkan liong dan barongsai tadi dalam *Sampek Engtay*-nya kali ini. Tapi, dalam pementasan di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, yang berlangsung sampai 26 November silam, ia juga menampilkan kisah klasik ini sebagaimana aslinya. Kental dengan warna Cina. Termasuk, aksen dan dialek para pemerannya. "Selama ini saya selalu merasa berutang karena tidak bisa menampilkan *Sampek Engtay* sebagaimana mestinya," kata Nano. Busana para pemain, yang dulu terpaksa dimodifikasi agar tidak terlalu "Cina", benar-benar bercirikan Negeri Tirai Bambu, meski masih disisipi warna Indonesia, seperti kain batik dalam baju ibu Engtay. Sedangkan naskahnya, tetap sama dengan yang dulu: Penuh dialog mengundang tawa. Yang berbeda hanya soal celetukan, disesuaikan dengan keadaan sekarang ini.

Diadaptasi dari legenda Cina, *Sampek Engtay* berkisah tentang kasih duka sepasang manusia. Engtay (yang masih tetap dimainkan Sari Madjid dengan prima), putri tunggal saudagar emas di Serang, nekat menyamar jadi lelaki agar bisa sekolah di Sekolah Putra Bangsa di Betawi. Di sinilah ia bertemu dan sekamar dengan Sampek (Idries Pulungan), lelaki lugu yang berasal dari kelas yang lebih rendah. Setahun bersama, jenis kelamin Engtay yang sejati tak pernah diketahui. Sampai, suatu saat ia sendiri membuka tabir itu karena diam-diam perempuan ini menyimpan rasa kepada Sampek.

Sayang, kisah cinta mereka tak berjalan mulus. Engtay yang kadung dijodohkan dengan Manchu, anak Kapten Liong, harus kembali ke Serang dan melangsungkan pertunangan. Dan, karena salah menafsirkan tanda dari Engtay, Sampek terlambat pula mencegah pertunangan kekasihnya itu. Dirundung rindu, Sampek sakit dan akhirnya mati. Adapun Engtay, dalam perjalanan seusai melaksanakan upacara pernikahannya, melewati kuburan sang kekasih. Atas permintaannya, kuburan itu terbuka. Engtay masuk, dan akhirnya sejoli itu bersatu kembali dalam wujud kupu-kupu.

Nano benar-benar memanfaatkan teknologi pentas Tanah Airku demi menghidupkan kisah ini. Misalnya, kawat *(sling)* yang tak terlihat penonton membuat kupu-kupu jelmaan sejoli tadi terbang melayang di atas panggung. Atau, semburan *dry ice* yang membuat kuburan Sampek benar-benar misterius. Bahkan, perubahan latar pun cukup diturunkan dari atas atau dimunculkan dari bawah panggung.

Namun, yang mendapat sambutan hangat penonton adalah pertunjukan liong (naga) dalam pesta perkawinan Engtay. Maklum, pertunjukan semacam ini terbilang langka. Bahkan, di negara asalnya, liong hanya ditampilkan pada acara kerajaan. Dan, di malam itu, para penonton benar-benar dimanjakan permainan liong yang indah dari belasan anggota Grup Naga Barongsai dari Vihara Mahavira itu. Walhasil, Nano seperti meraih dua impian lamanya: Mendapatkan teknologi yang memadai bagi pentasnya, seperti *sling* tadi, dan menyajikan *Sampek* sebagaimana mestinya.

Sri Raharti H.

Sumpah Antisuap bagi Advokat

Dalam Munaslub Ikadin, ada usulan untuk merekomendasi sumpah antisuap bagi para advokat. Lantas, bagaimana dengan kode etik advokat?

Kamal Firdaus
Anggota Ikadin Yogyakarta

Dalam kode etik dan sumpah ketika diangkat menjadi advokat, memang ada janji untuk tidak memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat penegak hukum. Kode etiknya jelas: melarang praktek suap. Tapi, kenyataannya, selama ini suap masih jalan terus.

Mengapa? Dewan Kehormatan Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) tidak bisa menegakkan kode etik. Dewan tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Karena itu, dengan aturan saja tidak akan mampu memberantas praktek suap di kalangan advokat. Untuk itulah saya mengusulkan agar para advokat mengambil sumpah antisuap.

Pertimbangan lainnya, praktek suap itu sangat sulit dibuktikan. Mana ada orang yang melakukan praktek suap membuat perjanjian hitam di atas putih. Selama ini, saya banyak mendengar dari beberapa rekan advokat, mereka menyuap hakim atau jaksa. Meski sudah ada cerita seperti itu, toh, kita tidak bisa membuktikannya. Tapi, orang kan banyak yang tahu bahwa mafia peradilan di Indonesia memang ada.

Memang, tidak tertutup kemungkinan advokat sendiri yang meminta uang kepada kliennya untuk menyuap hakim. Kasus seperti itu dulu pernah terjadi. Jadi, tidak ada salahnya bila ke dalam redaksional sumpah antisuap dimasukkan bahwa advokat tidak akan menerima sesuatu [untuk menyuap jaksa, hakim, atau polisi] dari kliennya. Bahkan, kalau bisa tidak hanya sumpah antisuap, tapi juga sumpah pocong.

MUFRODI

Sayang, usulan tersebut tidak dijadikan memorandum ketika Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikadin pertengahan November lalu. Itu hanya dijadikan sebatas imbauan moral. Bagi saya, itu tidak cukup, tetap perlu diucapkan sumpah. Adapun isi sumpah itu antara lain mengakui bahwa selama ini terjadi praktek suap oleh advokat sehubungan dengan perkara yang ditanganinya. Terus, ada juga ucapan bahwa melakukan suap bukan saja pelanggaran berat terhadap kode etik, tapi juga terhadap norma agama, hukum, dan moral.

Melakukan sumpah antisuap itu, artinya, bukan setiap advokat mengangkat sumpah lagi. Dalam teks sumpah antisuap itu ada katakata: "Kami advokat Indonesia sejujurnya mengaku dan sekaligus bersumpah". Kalau ini diangkat dalam bentuk memorandum, itu kan lebih mengikat daripada sebatas imbauan moral. □

Hotma Sitompoel
Anggota Ikadin DKI Jakarta

Menurut saya, advokat tidak perlu melakukan sumpah antisuap. Mengapa? Sumpah itu kan keinginan pribadi. Tanpa bersumpah pun, kalau keinginan untuk tidak melakukan praktek suap bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh, tentu saja bisa. Iya, kan? Tapi, berapa kali pun melakukan sumpah antisuap, kalau memang advokatnya tidak konsisten dengan sumpah tersebut, ya, tetap saja praktek suap-menyuap itu terjadi.

Lagi pula, larangan melakukan suap kan sudah diatur dalam kode etik advokat. Jadi, perlu-tidaknya bersumpah antisiuap, sangat tergantung pada pribadi setiap advokat. Kalau memang dulu pernah melakukan praktek suap, mulai sekarang berjanjilah untuk tidak melakukan praktek itu lagi. Jadi, tidak perlu bersumpah segala.

Tapi, saya tidak melihat usulan sumpah antisuap itu karena mereka mempertanyakan moral para advokat. Sebab, tidak semua advokat itu bermoral bobrok. Selama ini, masyarakat menilai yang terjadi justru di peradilan itu sendiri yang sudah menjadi mafia. Namun, itu sulit dibuktikan. Mungkin ada teman-teman yang berpendapat bahwa tak ada jalan lain memberantas kebobrokan itu, sehingga keluarlah usulan sumpah antisuap itu.

Pertanyaannya, apakah dengan sumpah antisuap bisa efektif menghapus mafia peradilan? Belum tentu. Jadi tidak perlu sumpah antisuap. Cukup melalui imbauan moral. Nanti, terpulang kembali kepada kenyataan di lapangan. Apa benar kita tidak akan melakukan praktek suap lagi?

Jika ditanyakan apakah dalam berperkara pernah menyuap, tak mungkin saya jawab pernah. Pengalaman bekerja di Lembaga Bantuan Hukum yang ketat menerapkan aturan-aturan adalah jawabannya. Dan, secara pribadi saya tidak mau melakukan praktek suap.

Jadi, kesimpulannya, imbauan moral seperti yang direkomendasikan dalam Munaslub Ikadin saya anggap cukup. Para advokat itu punya etika. Itu saja yang dijalankan. Sedangkan soal suap bisa dipantau dan diawasi. Misalnya, jika ada pengacara-pengacara dalam suatu kasus berhubungan dengan hakimnya, itu sudah melanggar etika. Sebab, bisa dipertanyakan pertemuan antara pengacara yang membela terdakwa dan hakim yang memutus hukuman. □

KOLOM
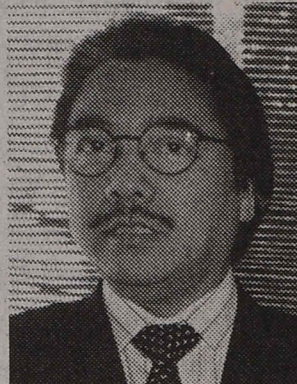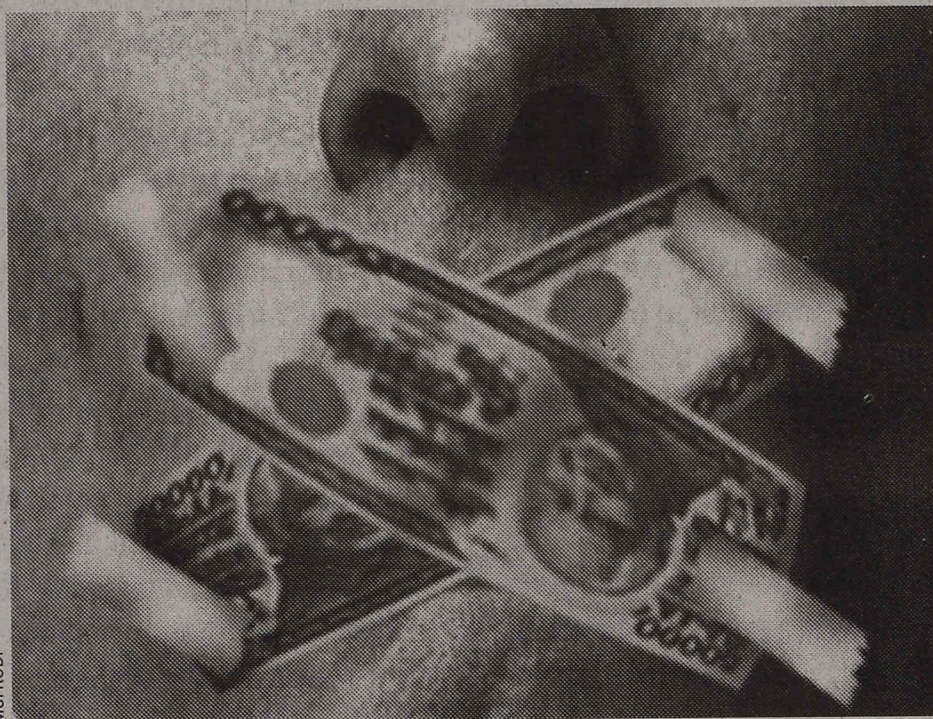
Mutiara yang Hilang

Sudah lama terasa ada sesuatu yang hilang dalam dunia hukum kita. Hukum kita kini seolah kehilangan jiwa dan semangatnya. Seolah ada pemikiran bahwa tingkat kemajuan di bidang hukum diukur dengan jumlah peraturan yang kita buat. Memang harus diakui beberapa tahun ini ada peningkatan jumlah undang-undang (UU) yang kita hasilkan. Jika UU Fidusia bisa dijadikan patokan sebagai produk legislatif terakhir yang kita hasilkan dalam tahun 1999 ini, jumlah UU yang dapat disusun pemerintah bersama DPR mencapai angka 42. Suatu prestasi besar jika dibandingkan dengan perkembangan dalam tahun-tahun sebelumnya.

Setiawan
Mantan Hakim

Tapi, apakah ini juga berarti kemajuan di bidang hukum telah tercapai? Tidak juga. Saya teringat pada sindiran pedas yang mengatakan bahwa semakin banyak jumlah peraturan di suatu negara justru menunjukkan negara (baca: masyarakat) itu sebenarnya sedang sakit. Semoga saja sindiran itu tidak berlaku bagi kita. Namun, jika kita mau jujur pada hati nurani, harus diakui kini terasa ada sesuatu yang hilang dalam dunia hukum kita. Aturan-aturan hukum yang dihasilkan seolah-olah kering, tidak sesuai dengan semangat dan rasa keadilan masyarakat. Hukum sekadar dipandang sebagai suatu alat, suatu mekanisme belaka. Lebih parah lagi aturan hukum tidak lagi ditetapkan sesuai dengan maksud, jiwa, dan semangat hukum itu sendiri.

Kemajuan memang menuntut penyusunan aturan hukum yang canggih dengan definisi yang ketat dan kata-kata yang pasti maksudnya. Tapi, hal itu tidak boleh sampai melupakan apa sebenarnya tujuan pembuatan aturan hukum. Tujuannya, sama halnya dengan semangat atau jiwa hukum itu sendiri, yakni mewujudkan keadilan.

Pelecehan—jika tidak hendak saya ungkapkan sebagai kurang penghargaan—terhadap dunia hukum dan terutama peradilan semakin meningkat. Penggunaan topeng oleh para mahasiswa dalam ruang sidang pengadilan beberapa waktu lalu bukanlah sekadar lelucon yang tidak lucu. Makna sebenarnya sungguh amat memedihkan. Demikian pula penggambaran seekor tikus yang menggunakan toga, terasa pedih di sanubari kita. Peristiwa-peristiwa itu menggambarkan sesungguhnya *there is something wrong* dalam dunia hukum dan peradilan kita.

Aturan hukum bukan sekadar rentetan kata-kata. Demikian pula penafsiran dan penerapannya. Namun, karena hukum diperlakukan sekadar alat atau mekanisme belaka, penafsiran dan penerapannya pun sekadar dianggap sebagai suatu "ilmu" yang memerlukan "kecanggihan" dan "silat lidah" belaka.

MUFRODI

Saya teringat cerita tentang seorang petani yang didakwa mencuri seekor sapi. Ketika ditanya hakim apakah benar ia melakukannya atau tidak, ia menjawab: tidak. Lalu, dengan tersipu-sipu ia bercerita bahwa sapi itu mengikuti berjalan di belakangnya. Tapi, ia lupa atau pura-pura lupa menjelaskan bahwa ketika ia tiba di halaman rumahnya dan sapi itu "tetap mengikutinya", ia menutup dan mengunci pintu pagarnya. Sudah barang tentu sapi tadi dengan "sukarela" menjadi milik sang petani.
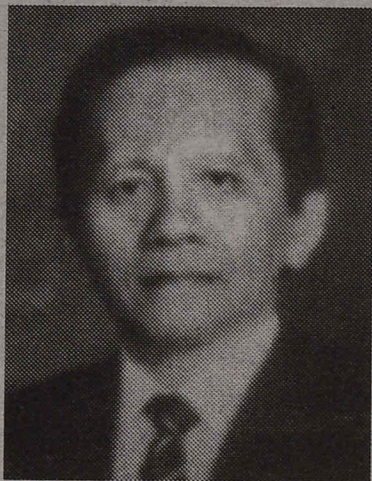
Ada juga cerita lain. Kali ini tentang papan pengumuman di halaman suatu kantor pemerintah. Pengumuman yang tertulis di atas papan itu berbunyi "Dilarang parkir kecuali mobil dinas", tanpa penjelasan apa pun maksud pengumuman itu.

Cerita pertama menggambarkan persepsi sebagian masyarakat kita bahwa aturan hukum bisa disiasati dengan kata-kata belaka. Sedangkan cerita kedua menggambarkan betapa kita dengan mudah melupakan apa sebenarnya tujuan aturan hukum (baca: larangan parkir) itu. Seolah-olah mobil berpelat merah, betapapun besar mobilnya, tidak menghalangi kelancaran arus gerak kendaraan di halaman itu. Bukankah tujuan larangan parkir sebenarnya menjaga kelancaran arus gerak kendaraan di suatu tempat?

Cerita pertama juga mengandung suatu ironi. Seolah-olah rakyat kecil bisa menjadi korban aturan hukum. Sedangkan cerita kedua juga menyiratkan perlakuan yang berbeda oleh hukum terhadap penguasa. Sudah barang tentu keduanya tidak dapat dibenarkan. Sebab, aturan hukum seharusnya diterapkan tanpa membeda-bedakan orang. Dan, penafsiran hukum bukanlah sekadar "permainan silat lidah".

Di balik redaksi aturan hukum, yang harus kita akui kadang-kadang memang ruwet, yang harus kita tangkap sebenarnya ialah semangat dan jiwa hukum. Aturan hukum diadakan untuk memelihara keadilan. Penerapannya juga harus didasarkan pada asas memelihara keadilan itu. Lalu, di mana sebenarnya letak tolok ukur terhadap rasa keadilan itu? Kita tidak perlu mencarinya jauh-jauh. Rasa keadilan, yang merupakan jiwa dan semangat hukum, sudah "dari sononya" tertanam dalam nurani kita. Semua penafsiran dan teori-teori ilmu hukum, apa pun namanya, hasil akhirnya harus diuji oleh nurani kita sendiri. Apakah adil dan bermanfaat? Jika tidak, *something must be wrong.* Kita tersesat dan karena itu harus kembali lagi pada jalan semula. Kemudian mencermati rambu-rambu yang kita lewati. Untuk akhirnya tiba di tempat yang kita tuju (baca: keadilan).

Kepala Negara kita yang baru sudah merintis kemunculan kembali semangat dan jiwa demokrasi sebenarnya, yang selama ini terlelap. Gayanya terasa ada "gregetnya". Suasananya terasa melegakan. Sekalipun mungkin dengan gaya berbeda, terobosan yang telah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid di bidang pemerintahan itu seharusnya juga diikuti para petinggi hukum kita. Sudah lama kita inginkan penerapan hukum yang sesuai dengan jiwa dan semangat hukum itu sendiri, yakni yang berkeadilan serta bermanfaat. Ini agar hukum kembali terasa ada gregetnya. Dan, agar mutiara yang hilang dapat kita temukan kembali. □

MAYJEN DJAJA SUPARMAN

SERAH TERIMA: Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) resmi dipimpin panglima baru, Mayjen **Djadja Suparman.** Acara serah terima jabatan dari pejabat lama, Letjen Djamari Chaniago, dilangsungkan di Markas Kostrad, Rabu 11 November lalu, dipimpin KSAD Jenderal Subagyo H.S. Sebelum menjabat posisi barunya, Djadja Suparman, kelahiran Sukabumi 11 Desember 1949, adalah Pangdam Jaya sejak 13 Juli 1998.

MEDIA INDONESIA

MAYJEN TNI SLAMET SUPRIYADI

SERAH TERIMA: Jabatan Pangdam III Siliwangi diserahterimakan dari Mayjen TNI Purwadi kepada Mayjen TNI **Slamet Supriyadi.** Upacara serah terima yang berlangsung di Stadion Siliwangi, Bandung, 23 November lalu itu, dipimpin oleh KSAD Jenderal Subagyo H.S. Sebelum menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, Mayjen Purwadi, mantan Kapuspen ABRI, sempat menduduki jabatan di Lemhannas. Sementara itu, Mayjen Purwadi selanjutnya dipercaya menjadi Asrenum Kasum TNI.

TOK SUKAMTO

MENINGGAL DUNIA: **Tok Sukamto,** tokoh olah raga Jawa Tengah, meninggal dunia di RS Tlogorejo, 23 November silam, karena serangan jantung. Almarhum yang meninggalkan seorang istri dan tiga anak itu dimakamkan di Pemakanan Bapi Puspanjolo. Semasa hidupnya, Tok banyak mengabdikan dirinya untuk kemajuan olah raga di Jawa Tengah, khususnya bola voli dan sepak bola. Bahkan, sampai sekarang, almarhum masih menjabat sebagai Komisi Galakarya Pengda PSSI Jawa Tengah. □

Trauma Pemberontakan

Sampai sekarang, belum ada kesepakatan antara masyarakat Sumatra Barat dan pemerintah pusat bahwa PRRI benar merupakan sebuah gerakan pemberontakan. Namun, apa pun makna kata itu, sepakat atau tidak dikatakan sebagai suatu pemberontakan, yang jelas, selama ini, lebih dari tigapuluh tahun masyarakat Sumatra Barat merasakan "harga dirinya" dirampas, diinjak-injak, bahkan dituduh sebagai manusia-manusia yang tidak dapat lagi dipercaya. Semua itu disebabkan ada sebuah aksi dari suatu jawaban terhadap ketidakpuasan masyarakat Sumatra Barat terhadap perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat yang lebih dikenal dengan julukan "orang-orang Jakarta". Orang Jakarta menjadi sangat berkuasa. Orang-orang di daerah, seperti dikatakan A.A. Navis kemudian, hanya menjadi sederetan angka-angka, bukan manusia yang punya hak bicara, menentukan sikap dan pilihan.

Wisran Hadi
Budayawan

Sampai Orde Baru tiba, trauma masyarakat yang tidak punya harga diri itu menajam, bahkan dipertajam. Sebagaimana lazimnya yang terjadi dalam sistem kekuasaan yang sentralistik, Sumatra Barat pun lebih memilih menjadi anak yang patuh. Kepatuhan itu dibuktikan dengan hadiah dan penghargaan yang diberikan pemerintah Orde Baru kepada masyarakat atau Pemda Sumatra Barat hampir setiap tahun. Menurut Taufiq Abdullah, orang Minang yang pengamat dari LIPI itu, hadiah dan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Sumatra Barat tidak dapat dijadikan ukuran dari keberhasilan pembangunan di daerah Sumatra Barat. Tanpa kepatuhan itu, Sumatra Barat dikhawatirkan semakin terpuruk dan terlunta. Akhirnya, para tokoh Minang waktu itu lebih memilih "biarlah tanduk berkubang asal dapat makan" ketimbang bertahan dengan prinsip dan hak-hak kedaerahan, tapi negeri tandus dan gersang dari siraman uang.

Apa yang dilakukan masyarakat Sumatra Barat sampai mencuat menjadi sebuah gerakan yang disebut PRRI tidaklah dimaksudkan untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan hal itu. Namun, karena orang Minang suka memakai bahasa yang keren, gerakan itu disebutnya sebagai sebuah "pemerintahan". Mungkin hanya untuk gagah-gagahan, sebagaimana lazimnya orang Minang yang suka berlagak. Ternyata, setelah gerakan itu padam (dengan paksa, tentunya), keinginan untuk memisahkan diri tidak pernah muncul ke permukaan, semiang pun. Hal ini berarti bahwa dari dulu bahkan sampai sekarang masyarakat Sumatra Barat tetap di dalam kerangka negara kesatuan. Sekalipun Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, tidak ada keinginan rakyat Sumatra Barat tidak menjadi manusia Indonesia. Bahkan, sampai saat ini, kendati tak seorang Minang pun yang dipercaya lagi menduduki kursi menteri dalam kabinet sekarang, mereka tetap setia mempertahankan negara kesatuan.
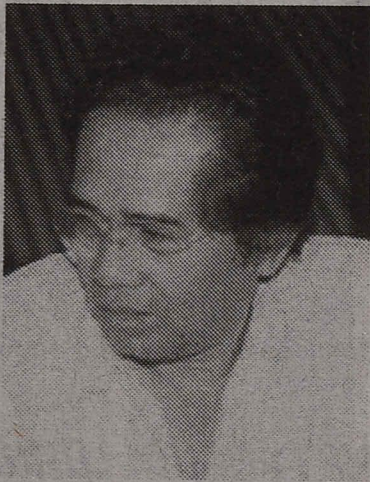
MUFRODI

Boleh jadi, masyarakat Minangkabau yang tidak bereaksi atas ketiadaan para tokohnya mencuat menjadi wakil presiden atau menteri merupakan perpanjangan dari trauma masa lalu yang takut disebut atau dituduh kembali sebagai pemberontak. Tapi, boleh jadi sebagai akibat dari "perontokan" tokoh-tokoh masyarakat Minang oleh sistem pemerintahan Orde Baru. Sebab, pemerintah Orde Baru dalam kenyataannnya tidak memunculkan tokoh, tapi menobatkan pamong sebagai tokoh. Pamong-pamong yang patuh inilah yang dianggap sebagai tokoh. Setelah kekuasaan Orde Baru berakhir, berakhir pulalah ketokohan pamong-pamong model seperti itu.

Pemberontakan, sebagaimana yang dituduhkan "orang Jakarta" kepada masyarakat yang menuntut otonomi untuk Sumatra Barat, menyebabkan kerugian yang mahadahsyat. Rumah-rumah adat terbakar dan dibakar; perempuan-perempuan Minang, yang selama ini dimitoskan sebagai "perempuan mahasuci", diperkosa; tokoh-tokoh adat dan agama yang beribawa direnggut dan diganti dengan pamong-pamong yang tidak berakhlak; struktur adat dan *nagari* porak-poranda diganti dengan organisasi baru yang jauh panggang dari api dengan adat dan budayanya. Masyarakat semakin menjadi rendah diri, patuh tanpa melawan. Mereka lebih suka menadahkan tangan minta belas kasihan "orang Jakarta". Pemilihan gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat juga diatur dari Jakarta. Agama Islam yang diagung-agungkan ajaran dan nilainya diobrak-abrik dengan berbagai pelecehan dan kemunafikan. Boleh dikatakan, "pemberontakan" itu merupakan gerbang dari sebuah malapetaka besar di ranah Minang. Menurut sosiolog Muchtar Naim, pemberontakan itu pulalah sebagai salah satu sebab lagi kenapa orang Minang semakin ramai meninggalkan kampung halamannya.

Ketika para mahasiswa di Makassar menuntut kemerdekaan setelah B.J. Habibie tidak dicalonkan menjadi calon presiden, kengerian akan akibat yang dialami masyarakat Sumatra Barat di masa lalu itu segera membuat bulu roma kita berdiri. Akankah "orang Jakarta" tetap sangar seperti yang pernah dilakukan pada masyarakat Sumatra Barat? Atau, lupakah para mahasiswa di Makassar, yang memiliki lontar terbesar di dunia, *I La Galigo*, akan nasib yang sama dengan rakyat Sumatra Barat ketika di sana muncul gerakan yang disebut Permesta?

Kita boleh lupa kain dan baju, seperti kata orang Betawi. Tapi, jangan lupa dengan sejarah dan masa lalu. ❑

www.allianz.com
Risk.

CORNELIA AGATHA

"Sebelum Mati, Harus Main Opera"

DI BALIK wajah melankolis Cornelia Agatha ternyata tersimpan dua obsesi yang belum juga terwujud: jadi pemain opera dan memerankan tokoh pelacur dalam sinetron. Karena kedua obsesi tadi, rupanya, gadis belasteran Jawa-Menado-Belanda berusia 26 tahun ini langsung oke ketika diminta memerankan tokoh nenek dalam Bayi di Aliran Sungai, drama yang akan dipentaskan Teater Tetas. "Saya juga sedang menulis cerita sinetron," kata Lia, sapaan artis yang melejit lewat Si Doel Anak Sekolahan itu.

Tapi, kenapa pelacur?
Selain demi kepuasan akting, tema-tema tentang pelacur jalanan menarik untuk diangkat.
Sudah ada tawaran untuk peran itu?
Itulah. Sampai kini belum juga ada yang *nawarin.*
Lalu?
Saya nekat bikin cerita sendiri. Saya turun langsung ke jalan, observasi. Saya ingin sinetron ini natural, bukan dibuat-buat.
Kaitannya dengan pementasan teater ini?
Sebenarnya, saya sudah sering ditawari teman-teman di Fakultas Teater IKJ untuk ikut main teater. Cuma, dulu saya belum tertarik karena cita-cita saya ingin jadi pemain opera. Saya sampai punya prinsip: sebelum mati, saya harus bisa manggung opera. Saya enggak mau cuma menunggu. Saya banyak belajar opera sendiri, lewat buku dan CD. Di samping itu, saya juga punya bakat menari yang pasti dipakai dalam sebuah opera. Eh, enggak tahunya, sekarang saya sadar, kalau mau main opera, harus punya dasar teater juga. Jadi, ketika ditawari ikut main dalam pementasan ini, saya senang, ya, lalu ikut main.
Sebenarnya, apa, sih beda main teater dengan main sinetron itu?
Kalau di teater, karakter lebih dominan. Kemudian, tantangannya, dialognya enggak putus-putus. Sedangkan di sinetron, kalau lupa dialog masih bisa diulang. Di sini, saya enggak boleh lupa dialog selama dua jam. ❑

M. RIZAL

DOK. DETAK

Dewi Fortuna Anwar

Habibie Center

SETELAH B.J. Habibie tak lagi jadi presiden, ke mana perginya Dewi Fortuna Anwar? "Saya sekarang membantu di Habibie Center," ujar Dewi kepada FORUM. Menilik namanya, orang segera mafhum lembaga itu milik "bos"-nya. "Tapi, ini bukan ajang untuk mempersiapkan Pak Habibie ke panggung politik karena ini memang bukan lembaga politik," ujar Dewi, serius. Di lembaga yang bergerak di bidang penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia itu, selain Dewi, terlibat pula orang dekat Habibie lainnya, seperti Jimly Asshiddiqie dan A. Watik Praktiknya. "*Chairman*-nya Pak Habibie sendiri," ujar Dewi.

Ide pembentukan Habibie Center, cerita Dewi, memang tak lepas dari lembaga serupa milik mantan Presiden AS, Jimmy Carter. "Habibie dan Jimmy Carter kan berteman," ujar Dewi. Nah, lantaran lembaga itu bergerak di bidang kemasyarakatan, menurut Dewi, kegiatan dasar Habibie Center adalah mengembangkan masyarakat Madani. "Tapi, saya enggak bisa banyak cerita, soalnya ini kan baru, akte notarisnya saja baru disahkan," ujar perempuan yang namanya sampai kini masih tercatat sebagai karyawan LIPI dengan "pangkat" ahli peneliti utama tersebut. ❑

Laetitia Casta Dada

PRANCIS memang terkenal dengan wanita cantiknya. Bahkan, sejak 1792, simbol republik pun mereka wujudkan dalam sosok perempuan, yang kerap disebut Marriane. Dan sejak 1970-an, para wali kota memilih perempuan cantik setempat sebagai model Marrianne tadi. Brigitte Bardot dan Chaterine Deneuve "mewakili" dekade 70 dan 80, sementara untuk dekade pertama millenium nanti, mereka memilih model belia asal Pulau Korsika, Laetitia Casta.

LAETITIA CASTA IS SEXY

Tentu saja, tahu dirinya terpilih, dara berusia 21 tahun itu langsung berteriak kegirangan. "Asyik!" katanya. Yang "puyeng" justru para ahli sejarah. "Pilihan itu mengabaikan nilai sejarah. Hanya memikirkan dada yang membusung," teriak mereka. Padahal, dibandingkan Bardot, ukuran Casta tak seberapa. "Saya hanya 36-C," katanya, enteng. ❑

Bill Saragih

Big Band

BILL SARAGIH, lelaki gaek 67 tahun yang tak letih meniru langgam Louis Amstrong itu, rupanya, masih menyimpan obsesi. "Saya ingin, tiap-tiap provinsi punya satu big band," ujar si Oom. Ia tak hanya siap jadi dosen terbang untuk urusan ini. Tapi, juga sudah menyiapkan empat buku pelajaran musik yang, sayang, belum juga terbit. "Kata penerbitnya, terlalu tipis," ucap Bill.

"Saya dikasih Tuhan talenta dan umur panjang, saya harus melakukan sesuatu untuk negeri ini," ujar pria pemegang Bintang Gerilya ini. Tapi, untuk urusan big band tadi, dari mana dananya Oom? "Aduh, ini bangsa Indonesia. Dana sebenarnya ada, cuma dimakan bajingan-bajingan itu," kata Bill, yang Februari nanti akan berpidato di hadapan American World Institute, San Fransisco, berkenaan dengan doktor kehormatan yang diberikan lembaga tersebut. "Begini-begini, di luar negeri, saya dihargai, lo," kata si Oom tanpa menjelaskan siapa "bajingan-bajingan" yang dimaksudnya. ❑

FIRMAN W./ DOK. FORUM
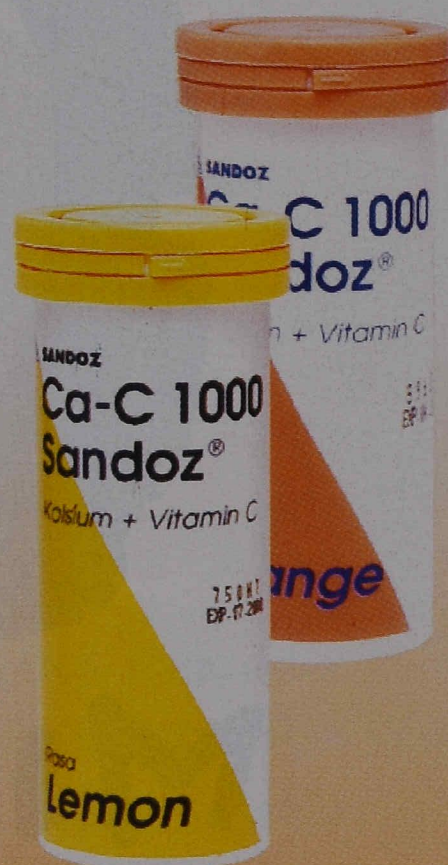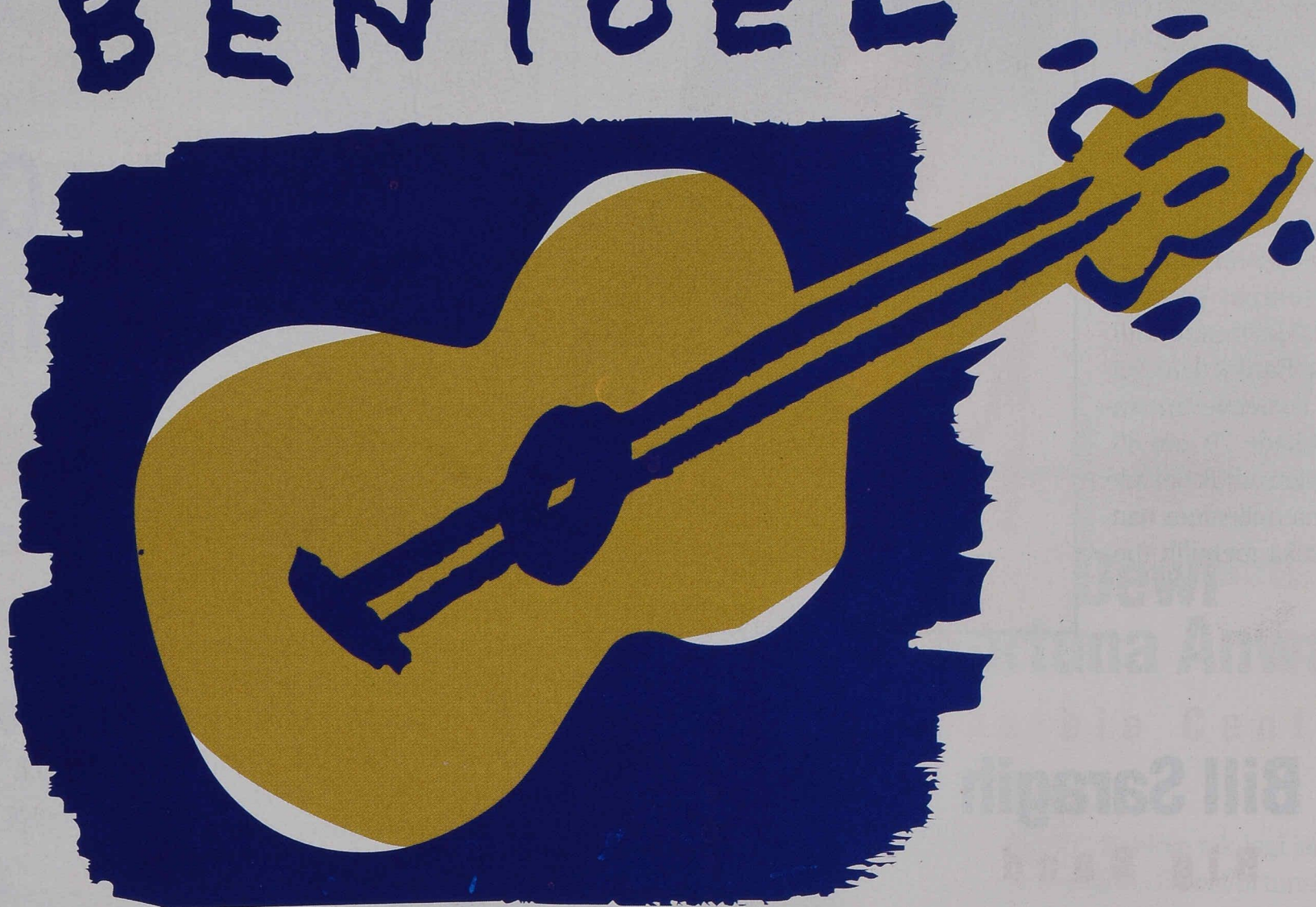
FESTIVAL

Jakarta

Kafe Pasir Putih
Jumat, 19 November '99
- AHMAD BAND

New York Cafe
Sabtu, 20 November '99
- SHAKILA
- TOHPATI & FRIENDS

Gondola Resto & Bar
Jumat, 26 November '99
- NUGIE & ALV BAND

Cafe Automobili Lamborghini
Jumat, 3 Desember '99
- RIDA - SITA - DEWI

Acara Puncak:

Panggung Prisma
dan cafe-cafe di Taman Ria Senayan
Sabtu, 4 Desember '99
- HARRY ROESLI & DKSB
- RIDA - SITA - DEWI
- DONNIE SOEHENDRA & BIG CITY BAND
- TOHPATI & FRIENDS

Seluruh acara
dimulai pkl. 20.00 - selesai

Bandung

Fame Station: Senin, 29 November '99
- /RIF
- JADUG FERIANTO & QUA ETHNICA

Spec's Music Lounge: Selasa, 30 November '99
- GILANG RAMADHAN
- ZITHER ORCHESTRA

JB's Fun Pub: Rabu, 1 Desember '99
- KIBOUD MAULANA
- BILL SARAGIH
- BENNY LIKUMAHUA
- SYAHARANI
- TIME BOMB BLUES

Arden Pub & Karaoke: Kamis, 2 Desember '99
- INDRA LESMANA & FRIENDS

Sabuga: Jumat, 3 Desember '99
- CHRISYE DAN KAWAN-KAWAN

Ubud: Sabtu, 4 Desember '99
- GIGI
- BANDUNG PERCUSSION SOCIETY

Acara dimulai pkl. 21.00 - selesai

Acara Puncak:

Sabuga - Selasa, 7 Desember '99
- GIGI
- /RIF
- GILANG RAMADHAN
- KOMPOSER
- ZITHER ORCHESTRA
- KIBOUD MAULANA
- BILL SARAGIH
- BENNY LIKUMAHUA
- SYAHARANI
- TIME BOMB BLUES
- KRAKATAU
- BANDUNG PERCUSSION SOCIETY
- HIPPY
- INDRA LESMANA & FRIENDS
- MC: ANTA PADHYANGAN

Acara dimulai pkl. 15.00 - 23.00

JANGAN ANGGAP ENTENG

MACS909/BA/0482/11/99

Dede dan Etos Kemasan

Dede selalu berada dalam prinsip rupa yang selalu dipertahankannya: horizontal dan vertikal. Dari dulu hingga sekarang.

Akhirnya, terbit juga sebuah buku album yang mengumpulkan lebih dari seratus reproduksi lukisan Dede Eri Supria, sejak awal 80-an hingga akhir 1999. Kemampuan menggambar realis dan kepekaan artistik. Itulah salah satu kunci yang dari dulu hingga sekarang dipegang pelukis kelahiran Jakarta, 29 Januari 1956, ini. Maka, dengan itu ia mudah saja masuk ke relung-relung paling detail dari sebuah obyek yang diamatinya. Kecermatan mata dan tangannya membuat karyanya bisa melebihi pesona fotografi. Berbagai obyek sehari-hari yang sebenarnya biasa-biasa saja menjadi luar biasa begitu dipindahkan ke kanvasnya. Kita sering seperti terhipnotis oleh karyanya itu.

Sudah menjadi merek pelukis jebolan SMSR (Sekolah Menengah Seni Rupa) Yogyakarta ini, bahwa ia banyak menggunakan idiom yang berhubungan dengan pembangunan kota metropolitan, dalam hal ini Jakarta. Di antaranya, gambar konstruksi baja, pekerja bangunan, penyapu jalan, tanda lalu lintas, *billboard* lengkap dengan macam-macam teks yang bertautan dengan industri, gambar yang dipungut dari iklan dan digubah kembali, yang nyaris tak ada beda dengan aslinya. Budayawan Goenawan Mohamad pernah menyebut kecenderungan itu sebagai sesuatu yang lahir dari "Etos Kemasan ". Papan-papan iklan yang menyerbu bagai air bah mengepung pemandangan di perkotaan.

Dede Eri Supria. Elegi Kota Besar (Elegy on Megacities)
Penyusun: Agus Dermawan T.
Penerbit: Yayasan Seni Rupa AiA, Jakarta, 1999, 197 hlm.

YANG TERSISA, SEBUAH PANORAMA (125 X 125 SENTIMETER, 1997). *Menyiasati palang baja.*

Di situlah memang minat seni rupa Dede sepanjang hampir tiga dekade ini, dan boleh dikatakan hampir tanpa putus. Kita lihat sepanjang masa itu Dede menyiasati palang baja yang berseliweran melintang, diagonal, atau posisi sosok manusia terlentang, berdiri, melangkah, duduk termenung, sebagai sesuatu yang selalu berada dalam prinsip rupa yang selalu dipertahankannya: horizontal dan vertikal. Dengan demikian, sekalipun yang digambarkannya hanyalah palang baja, atau obyek sederhana apa pun yang ditemukannya dipinggir jalan, menjadi sesuatu yang mempesona, ditambah dengan kemampuannya menggambar detail obyek tersebut. Kekuatan macam itu hampir terlihat pada semua karya Dede, dari dulu hingga sekarang.

Buku ini agaknya memang hendak memberi porsi yang lebih besar pada gambar dan sedikit sekali pada teks. Dari keseluruhan buku, hampir 80 persen berisi repro lukisan. Bagi mereka yang biasa dengan wacana pemikiran, atau bergulat pada teori-teori yang berhubungan dengan karya seni rupa, tentu akan kecele. Buku ini memang tak dirancang ke arah itu. Seperti dikatakan penulisnya dalam pengantar bahwa ia tidak berpretensi ilmiah. Mungkin, penulisnya berpretensi lain. Wallahualam.

Asikin Hasan. *Penulis adalah kurator seni*

SUNAT DUA KALI BAGI POLISI LUWU

MAUNYA sih mendamaikan masyarakat yang bertikai. Maka, digelarlah pertemuan antara masyarakat Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dan Muspida setempat. Mungkin, karena panas tenda di siang hari yang begitu terik, mulut Pak Bupati tiba-tiba lepas kendali. Bukan menasihati agar masyarakat tidak lagi tawuran dengan sesamanya, Pak Bupati malah menyerang polisi. "Sebaiknya polisi di daerah ini [Luwu Utara] disunat dua kali. Polisi tidak boleh dipercaya lagi karena ia memfungsikan pasal 300 ribu. Kalau ada masalah, diselesaikan dengan uang Rp 300 ribu," kata Bupati. Pernyataan Luthfi A. Mutty, Bupati Luwu Utara, itu tak pelak membuat jajaran polisi daerah setempat bagaikan tersambar petir di siang bolong.

Kepolres Luwu, Letkol Tatang Soemantri, merasa tidak bisa menerima hinaan itu. Ia lantas mengadukan Luthfi ke Polwil Parepare. Berdasar pengaduan tersebut, Kapolwil Kolonel Mardjito memanggil Luthfi untuk diperiksa. Toh, Luthfi ogah diperiksa. Alasannya, seorang pejabat tidak bisa semudah itu dipanggil polisi. "Harus seizin Presiden," tutur Luthfi kepada M.S. Genda dari FORUM.

Tentu saja, polisi tidak bisa digertak begitu saja. Kapolwil dengan tegas akan mengirim surat panggilan kedua. Bahkan, jika perlu, menurut Kapolwil, tidak tertutup kemungkinan memanggil paksa Pak Bupati.

Rupanya, tekad polisi itu membuat sang Bupati keder juga. Karena itulah, 16 November lalu, diam-diam Luthfi mengutus tokoh adat dan wakil rakyat dari daerah itu untuk bertemu Kapolwil. Maksudnya, agar proses penyidikan terhadap Bupati dihentikan. Sayang, pak polisi tetap teguh dengan pendiriannya. "Kami akan tetap melanjutkan proses penyidikan," ujar Kapolwil.

Nah, makanya hati-hati kalau bicara. ❑

NIKMAT DUIT PANAS MEMBAWA SENGSARA

BANYAK uang memang membuat gelisah. Madison dan Zuhirman, penduduk Jalan Maga, Pekanbaru, pun mengalami hal serupa ketika di kantongnya tersimpan beberapa lembar 50 ribuan. "Mau ke mana kita malam ini?" kata Zuhirman yang kelihatan gelisah kepada Madison yang duduk di sampingnya.

"Ke mana lagi kalau tidak ke Taleju," ujar Madison bersemangat '45 menyambut kegelisahan temannya. Setuju! Mereka pun segera meninggalkan kedai kopi. Dengan ojek, mereka menuju ke Taleju, lokalisasi kelas bawah yang letaknya cukup terpencil di Pekanbaru. Tepat pukul 19.30, kedua laki-laki yang sedang "naik tensi" itu tiba di sana. Berhubung nafsu sudah sampai ke ubun-ubun, tanpa membuang waktu, keduanya segera minta disediakan dua "hidangan" bertarif Rp 50 ribuan untuk kencan *short time*.

Tak perlu diceritakan apa yang dilakukan dua sekawan itu di dalam kamar. Yang jelas, usai berenang di lautan kenikmatan, selain membayar kedua pelacur masing-masing Rp 50 ribu, dua sekawan itu tak segan menambah tip sebesar Rp 50 ribu. Transaksi selesai. Madison dan Zuhirman pun meninggalkan Taleju dengan perasaan puas.

Beres? Rupanya, justru itulah awal malapetaka bagi Madison dan Zuhirman. Kedua pelacur Taleju yang baru selesai melayani para pelanggan baru itu rupanya merasa ada yang tak beres dengan duit yang mereka terima. "Rasanya kasar. Tidak seperti uang asli," kata Een, salah seorang pelacur. Mereka segera melapor ke petugas satpam. Tanpa membuang waktu, satpam langsung meneruskan laporan itu ke Korem Wira Bima.

Madison pun tak berkutik ketika digerebek petugas keamanan. Apalagi, dalam penggerebekan itu petugas menemukan 19 lembar uang palsu. Kepada polisi, Madison mengaku memang menyimpan dan mengedarkan uang palsu yang diperoleh dari Zuhirman. "Termasuk, yang saya gunakan melacur itu," katanya. Menurut Madison, Zuhirman membawa Rp 6 juta uang palsu dari Batam.

Atas kelakuannya itu, awal November lalu Madison dituntut dua tahun penjara. Bagaimana dengan Zuhirman? "Ia diadili di PN Batam," ujar Jaksa D. Sitepu. ❑

KOLOM
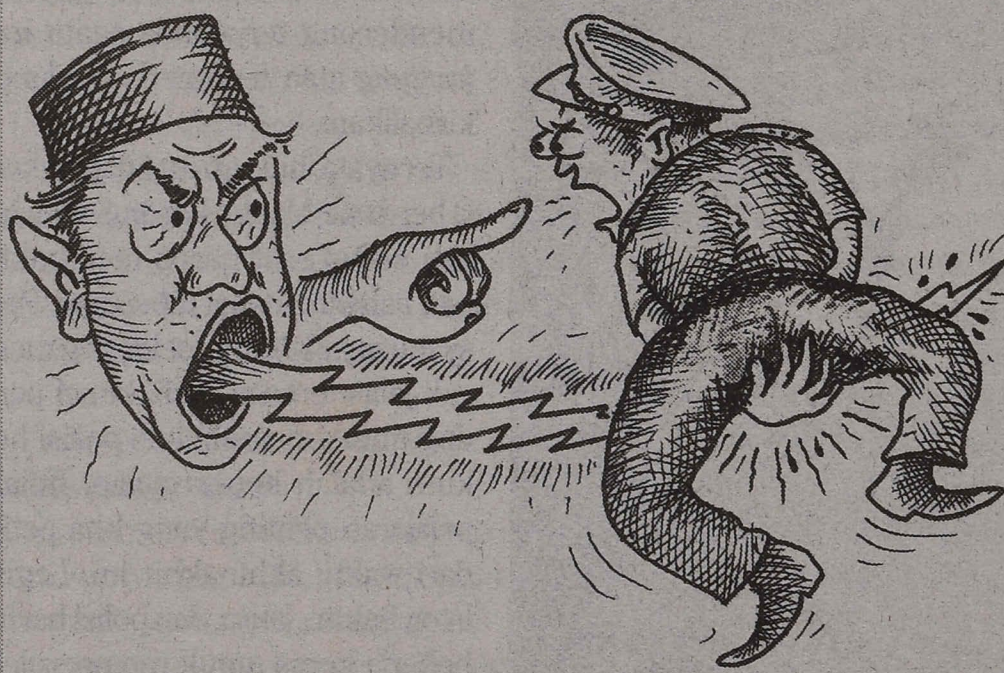
Blangko Kosong Hukum

Statistik kekacauan dan kerusuhan sejak pemerintahan Soeharto berakhir tidak menurun, tetapi malah menunjukkan grafik yang menaik. Ini fenomena yang sangat menarik. Sebab, pada awal reformasi, kita menyimpan harapan besar bahwa dengan berakhirnya masa kekuasaan Soeharto yang otoritarian itu kita akan memasuki suatu kehidupan yang lebih baik.

Di tengah penantian terwujudnya harapan tersebut, kerusuhan justru semakin marak. Di sana-sini kita bahkan menjadi kaget dengan perilaku bangsa sendiri yang mampu bertindak begitu keras dan kejam terhadap saudara sebangsanya. Hampir-hampir kita tidak dapat mempercayainya. Pada waktu kita mencoba berpaling kepada hukum, institusi yang diharap menjaga keamanan dan ketertiban itu pun seolah-olah sudah lumpuh. Hukum bukan menunjukkan otoritas dan kemampuannya untuk menyelesaikan kekacauan, tetapi di sana-sini ia malah menjadi bulan-bulanan rakyat. Berita kantor polisi yang dirusak dan dibakar sudah tidak terlalu mengejutkan lagi. Begitu juga dengan bupati yang ditodong oleh rakyatnya untuk mengubah keputusan yang telah dibuat dan akhirnya menyerah kepada tuntutan rakyat.

Satjipto Rahardjo
Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang

Mengamati dan mencatat berbagai peristiwa yang luar biasa tersebut, penulis berpendapat bahwa masalah yang kita hadapi memang tidak dapat lagi dimasukkan ke dalam kategori biasa, tetapi benar-benar luar biasa. Dalam suasana yang luar biasa tersebut, tentunya kita juga tidak dapat berpikir "secara biasa", misalnya dengan mempertanyakan peranan hukum dan badan-badan yang harus menegakkan hukum tersebut. Dalam keadaan yang sudah hampir menjungkirbalikkan segalanya itu, tentunya diperlukan peninjauan yang lebih menukik dan mendasar. Cara-cara berpikir dan bertindak yang "normal" akan sulit menghadapi masalah bangsa kita dewasa ini. Mempertanyakan peranan hukum yang adalah lumrah dalam keadaan biasa, sekarang menjadi terdengar naif karena hampir segalanya sudah dijungkirbalikkan. Kita memerlukan pemahaman dan penyadaran yang lebih komprehensif dan mendasar.

Menarik sekali untuk mengamati Indonesia sekarang ini dari "Tesis Disrupsi" yang diajukan oleh Francis Fukuyama (1999). Bangsa-bangsa mengalami gangguan dalam perjalanan sejarahnya manakala terjadi kemerosotan kepercayaan terhadap nilai-nilai dan institusi-institusi sosial yang penting di situ. Apa yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini mendekati tesis Fukuyama tentang bangsa yang mengalami gangguan besar dalam perjalanan sejarahnya.

Sejak dini hari kemerdekaan, lebih dari lima puluh tahun yang lalu sampai sekarang, negeri kita belum pernah benar-benar menunjukkan ketenangan dan ketenteraman, apalagi kemapanan. Pernah dalam waktu beberapa puluh tahun kita merasa seperti sudah melampaui masa-masa kehidupan bergejolak dan memasuki suatu masa yang penuh dengan ketenteraman dan kemajuan. Sekalipun sudah terdengar peringatan-peringatan yang agak menyangsikan keberhasilan pembangunan di waktu itu, baru dengan krisis sekarang ini keadaannya menjadi terkuak dengan jelas bahwa ternyata keberhasilan pembangunan di waktu lalu berdiri di atas landasan yang rapuh. Banyak kesalahan ditutupi dengan kebohongan, ketenteraman dipelihara dengan menggunakan tekanan kekerasan. Hampir segalanya menjadi tidak otentik lagi. Hal ini sangat menyedihkan karena hal-hal positif yang dilakukan juga ikut dihancurkan oleh banjir kesalahan tersebut.

Kita sekarang berada pada posisi hampir nol, sehingga kita perlu merancang pembangunan kembali institusi-institusi kita dari posisi yang demikian itu. Membangun dari titik nol memberi kesempatan kepada kita untuk mempertanyakan apa yang sesungguhnya menjadi tuntutan legitimasi bagi institusi publik dalam masyarakat, seperti hukum, pemerintahan, dan sebagainya. Apa pula yang salah pada rakyat yang memberontak terhadap tatanan yang ada dan apa pula kesalahan dari mereka yang harus menegakkan hukum?

Pelan-pelan kita menjadi mengerti bahwa hukum, pemerintah, kekuasaan, dan lain-lain, sebetulnya tidak pernah sepi dari pertanggungjawaban. Kekuasaan untuk memerintah ternyata tidak gratis, melainkan setiap kali diuji oleh rakyat atau selalu mengalami referendum. Di waktu yang lalu, referendum tersebut hampir tidak terlihat disebabkan oleh kuat dan efektifnya cengkeraman pemerintah dan alat-alat kekuasaannya, termasuk militer. Tetapi, sejak terjadi perubahan besar pada bulan Mei 1998 yang lalu, cengkeraman tersebut sangat mengendur dan terjadilah ledakan luar biasa yang sering disebut euforia kebebasan. Tekanan yang kuat menimbulkan reaksi yang kuat pula dan itulah yang terjadi di negeri kita sekarang, yang mendorong terjadinya suatu *unwertung* atau fenomena penjungkirbalikan.

Ternyata, hukum itu tidak bekerja berdasar blanko kosong, melainkan setiap saat harus membuktikan bahwa ia dapat dipercaya. Persyaratan inilah yang sekarang menjadi jelas terbaca. Jadi, kunci penting untuk memulihkan posisi hukum adalah kepercayaan. Inilah pelajaran penting yang kita petik dari waktu akhir-akhir ini. Legislator, hakim, jaksa, dan polisi harus bekerja keras untuk memperoleh kepercayaan dari rakyat. ❑
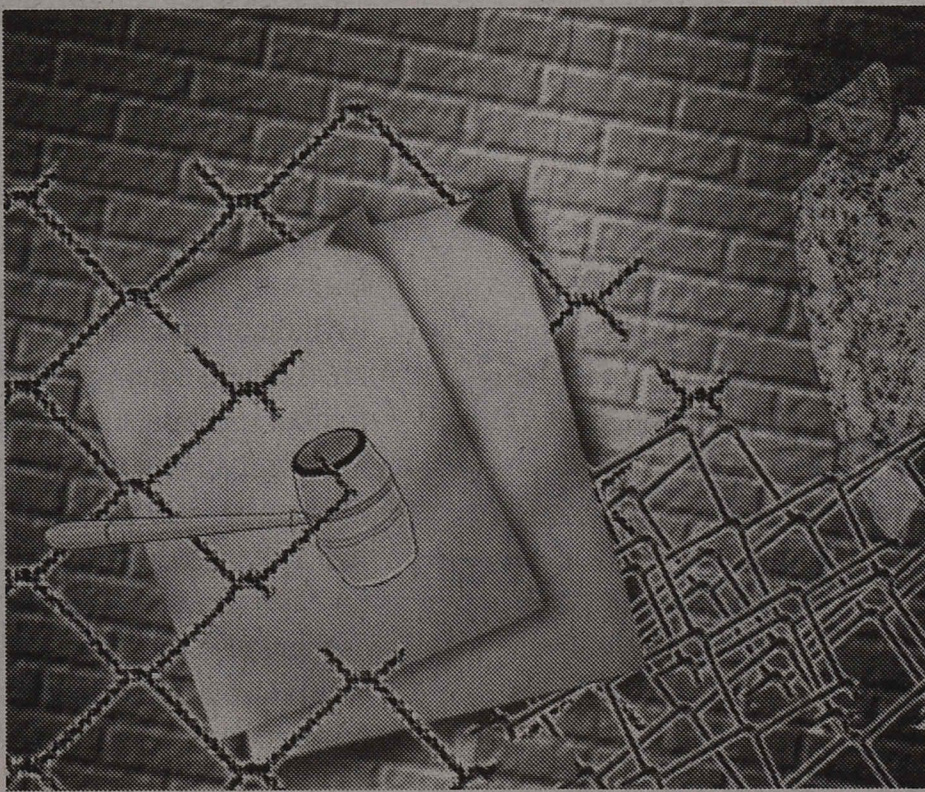
Sonny Keraf: "Yang Protes, Teman Saya Semua"
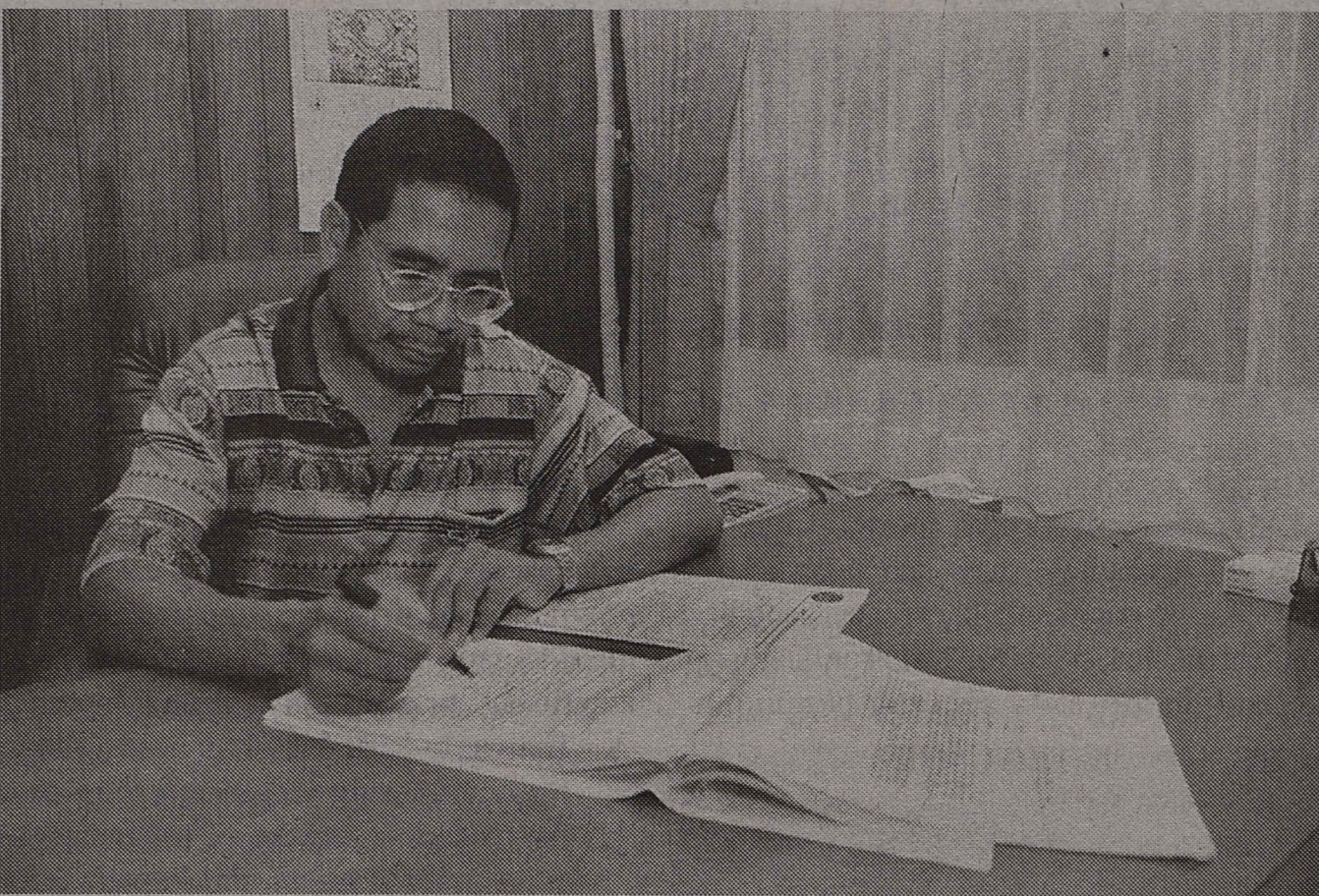
M. RIZAL

Banyak orang terperangah ketika Sonny Keraf ditunjuk Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sebagai menteri negara lingkungan hidup. Sejumlah tokoh LSM bidang lingkungan bahkan langsung bereaksi. Mereka, meski mengakui ia sosok yang "bersih", memandang Sonny bukanlah orang yang cocok duduk di posisi itu. Suaranya dalam persoalan lingkungan selama ini tak terdengar. Ia "hanyalah" dosen mata kuliah etika di Universitas Atmajaya, Jakarta, dan anggota Dewan Etik Indonesian Corruption Watch.

Benarkah ia tak pantas sebagai menteri lingkungan hidup? Berikut ini petikan wawancara wartawan FORUM, Teguh. S. Usis, dengan pria kelahiran Lamalera, Nusa Tenggara Timur, pada 1958 itu, pekan silam.

Apa saja pokok kebijakan Anda dalam masalah lingkungan?

Saya coba merevitalisasi dan merestrukturisasi kantor Meneg LH untuk membangkitkan kembali semangat para staf. Ini untuk membangun *team work* yang baik agar bisa menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan lingkungan. Sebab, betapapun hebatnya program yang disusun, tapi tidak didukung *team work* yang baik, tentu akan sulit.

Secara spesifik, apa kebijakan Anda tentang lingkungan?

Saya setuju dengan berbagai pihak yang menekankan agar kewenangan lembaga yang menangani masalah lingkungan diperbesar. Termasuk usul pembentukan Dewan Pembangunan Berkelanjutan di bawah payung wakil presiden. Tapi, karena lembaga ini belum terwujud, saat ini saya melakukan koordinasi dengan departemen lain agar bisa menarik perhatian mereka betapa pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Saya tidak mau lagi lingkungan hanya menerima getah akibat berbagai kebijakan lainnya.

Satu *standing point* yang sekarang saya tekankan, lingkungan harus mendapatkan perhatian sejak awal. Persyaratan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) tidak boleh lagi hanya menjadi persyaratan formal semata. Tapi, betul-betul menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun sebuah industri.

Bagaimana dengan sisa pekerjaan menteri lingkungan sebelumnya, misalnya, soal impor limbah berbahaya?

Saya sudah membentuk sebuah tim kerja untuk menangani berbagai kasus yang mendapat perhatian dan sorotan publik. Tidak hanya kasus impor limbah B3 (Barang Beracun dan Berbahaya). Tapi, kasus Indorayon, Freeport, lahan gambut sejuta hektare, Newmont, dan beberapa kasus lain. Kalau pengkajian awal itu sudah dilakukan, baru kemudian kami akan melakukan koordinasi dengan sektor-sektor terkait lainnya. Sebagian besar kasus masalah lingkungan ini kan bukan menjadi wewenang kami, tapi wewenang menteri yang lain.

Apakah cara itu punya daya desak?

Begini. Kami kan tidak bisa mengatakan kepada menteri lain, "Terserah Anda mau diapakan rekomendasi dari kami." Kami akan mem-*push* sedemikian rupa. Jadi, rekomendasi itu punya daya desak. Kami tidak ingin lagi lingkungan dibiarkan menjadi korban. Tidak boleh lagi hanya ekonomi yang diutamakan, atau investasi yang harus diselamatkan. Oke. Investasi memang kita butuhkan. Tapi, caranya bukan dengan mengorbankan lingkungan.

Bagaimana dengan suara-suara miring di awal penunjukan Anda?

Mereka yang protes itu kan teman saya semua. Emmy Hafild dan Walhi itu sudah lama berteman dengan saya. Saya bisa diskusi dengan teman-teman Walhi sampai larut malam. Dalam konteks itu, saya melihat, protes mereka itu dalam dua perspektif. Pertama, dalam rangka komitmen mereka terhadap lingkungan. Mereka sangat peduli dengan permasalahan lingkungan dan tidak mau lingkungan hanya menjadi isu marginal. Mereka menggugat saya, supaya lingkungan jangan hanya menjadi masalah sampingan. Kedua, itu sebagai bentuk kepedulian dari teman agar saya lebih waspada, hati-hati, dan peduli dengan kegundahan mereka.

Apakah Anda akan menjalin hubungan dengan LSM yang ada?

Saya akan membuka pintu selebar-lebarnya merangkul semua *stakeholders* (pemegang saham) untuk bersama-sama memikirkan penanganan dan pengelolaan lingkungan. Jadi, itu bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab menteri lingkungan. Kalau memang LSM dan masyarakat lokal bisa lebih efektif menangani masalah lingkungan, kami mendorongnya. Kalau pemerintah dibutuhkan, kami akan maju bersama masyarakat, termasuk dengan pers. Kontrol sosial perlu dilakukan. ❑

Soemargono:

"Mereka Telah Memanipulasi Peraturan Pensiun"

Sebanyak 158 mantan karyawan PT Kertas Basuki Rachmat, Banyuwangi, Jawa Timur, menggugat pemimpin perusahaan. Mereka merasa diperlakukan sewenang-wenang dalam penghitungan uang pensiun. Sayang, gugatan itu kandas di meja pengadilan. Salah alamat, begitu alasan hakim. Kepada FORUM, Soemargono, 56 tahun, salah seorang mantan karyawan yang ikut menggugat, menuturkan perjalanan keputusan yang tidak menguntungkan itu.

Masih jelas dalam ingatan ketika saya ikut "membangun" pabrik kertas PT Kertas Basuki Rahmat (KBR), 34 tahun silam. Saat itu, saya menjadi tenaga kontrak untuk memasang mesin-mesin pabrik. Itu bukanlah pekerjaan yang enteng. Selain teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, karena banyak mengandalkan tenaga manusia, peristiwa G30S memaksa kami menghentikan pekerjaan selama enam bulan. Kami baru dapat menyelesaikannya setelah bekerja habis-habisan selama lima tahun.

Toh, baru pada 1971, secara resmi kami diterima sebagai karyawan. Kendati perusahaan hanya memberi kami status sebagai tenaga kerja harian, hampir semua "karyawan baru" merasa gembira atas pengeluaran keputusan itu. Pasalnya, apalagi kalau bukan kesulitan situasi saat itu untuk memperoleh pekerjaan. Padahal, rata-rata gaji yang diterima tidak lebih dari Rp 90 per bulan. Meskipun relatif kecil, dedikasi dan pengabdian kami kepada perusahaan tetap tinggi. Tak ada satu pun niat mengecewakan perusahaan. Pengangkatan kami sebagai karyawan tetap baru terjadi pada 1985.

Sayang, kebahagiaan itu hanya kami kecap sekitar sepuluh tahun. Direksi KBR lantas mengeluarkan keputusan untuk mempercepat pensiun 158 karyawan perusahaan, termasuk saya. Padahal, sebagian besar dari kami baru akan memasuki masa pensiun sekitar lima tahun ke depan.

Pada dasarnya kami tidak kecewa atas keputusan itu. Apalagi, alasannya karena perusahaan terancam bangkrut. Ibarat kapal yang kelebihan muatan, kelebihan itu harus dilempar ke laut, begitu kata seorang pemimpin perusahaan kepada karyawan.

M. TOHA

SOEMARGONO. *Merintis pembangunan pabrik.*

Namun, yang membuat kami kecewa adalah tata cara mereka dalam mensosialisasikan program pensiun dini. Pemimpin perusahaan mengancam, siapa saja yang menentang keputusan itu akan berhubungan dengan Komando Distrik Militer Banyuwangi. Sembari mengancam, mereka pun menyodorkan surat kesediaan mengikuti program pensiun dini kepada para karyawan untuk segera ditandatangani. Kami tidak diberi waktu berpikir untuk membaca surat tersebut.

Dalam kondisi seperti itu, terpaksalah kami menerima keputusan direksi berikut pemberian "pesangon". Dengan masa kerja 25 tahun, saya mendapat pesangon Rp 5,2 juta. Selain itu, diberi uang "pensiun" sebesar Rp 4,9 juta dengan hitungan 20 tahun (sampai usia 70 tahun).

Bila dihitung-hitung, sebenarnya uang pensiun saya cuma sekitar Rp 34 ribu per bulan. Berarti ada manipulasi terhadap SK Direksi No. 050/Kpts/A/87. Menurut SK tersebut, hak pensiun karyawan adalah dua persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja. Dengan begitu, jumlah uang pensiun yang harus diterima karyawan adalah dua persen x masa kerja x DPP (Dasar Penghitungan Pensiun). DPP sendiri adalah gaji bulanan (terakhir) peserta menurut peraturan gaji.

Jika dihitung berdasarkan rumus tersebut, seharusnya pensiun saya menjadi:

M. TOHA

DEMO MANTAN KARYAWAN PT KERTAS BASUKI RACHMAT. *Direksi memanipulasi SK Pensiun.*

dua persen x 25 tahun (masa kerja) x Rp 200 ribu (gaji terakhir pada 1993) = Rp 100 ribu per bulan. Toh, pensiun yang saya terima dari Direksi, melalui Yayasan Dana Pensiun (YDP) KBR yang waktu itu ketuanya masih dijabat Afandi, hanya Rp 34 ribu per bulan.

Kami menganggap tindakan KBR itu tidak benar dan merugikan para mantan karyawan. Kami merasa diperlakukan tidak adil. Karena itulah, saya dan 157 rekan senasib menggugat Direksi KBR ke Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Setelah bersidang beberapa bulan, gugatan itu diputus pada 10 September 1997. Sayang, majelis hakim yang diketuai I Made Antara memutuskan bahwa pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada 30 Juli 1998 juga hampir senada. Permohonan banding kami tidak dapat diterima karena gugatan ganti rugi Rp 25 juta per orang tidak dirinci. Hakim juga mempertanyakan gugatan kami, apakah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi. Sayang, ketika kami melengkapi surat gugatan itu, mereka menolak melanjutkan perkara tersebut.

Dari pengalaman itulah, kami mencoba mengajukan gugatan lagi ke PN Banyuwangi. Kali ini dengan materi gugatan yang telah diperbaiki, termasuk beberapa pihak yang menjadi tergugat. Dalam gugatan yang diajukan pada 24 Mei lalu, kami menggugat Direksi KBR (Tergugat I), YDP KBR (Tergugat II), dan Afandi, eks Ketua YDP KBR. Anehnya, begitu gugatan kami layangkan, selang beberapa hari, tepatnya pada 31 Mei, YDP membubarkan diri.

Dengan pembubaran YDP, gugatan kami itu dianggap salah alamat. Padahal, yayasan itu masih ada ketika gugatan diajukan. Selain itu, gugatan pun tidak dapat diterima dengan alasan surat kuasanya cacat. Sebab, ada dua orang pemberi kuasa yang sudah meninggal dunia. Karena surat kuasa itu merupakan satu kesatuan, hakim menganggap bahwa dengan kematian dua orang itu bisa membatalkan keseluruhan surat kuasa. Surat kuasa yang seharusnya bisa dipakai menggugat terus-menerus, dianggap surat kuasa khusus yang hanya berlaku dalam satu kali gugatan saja.

Selain itu, Hakim juga mempersoalkan perincian penghitungan pensiun setiap penggugat. Padahal, yang kami persoalkan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat karena memanipulasi SK Direksi yang mengatur uang pensiun karyawan. Karena itulah, dalam gugatan kali ini kami menuntut ganti rugi kepada para tergugat sebesar Rp 50 juta per orang.

Menurut kami, jumlah sebesar itu wajar dikenakan karena para tergugat dengan semena-mena telah mengeluarkan keputusan yang sangat merugikan. Tidak sedikit dari kami yang hanya menerima uang pensiun kurang dari Rp 20 ribu setiap bulannya. Padahal, mereka telah mengabdi lebih dari dua puluh tahun. Akibatnya, banyak dari mantan karyawan yang mengalami depresi berat hingga ada yang meninggal dunia dengan keputusan itu.

Kami menuntut hak yang seharusnya diterima jika KBR memang menginginkan pensiun kami dipercepat. Bukankah kami ini pula yang dulu sangat banyak membantu membangun KBR? Janganlah kami dibuat seperti "habis manis sepah dibuang". Kalau kami diperlakukan seperti itu, ya, jelas sekali kami tidak terima. Kami akan tetap menuntut hak-hak kami selama ini.

Fahmi Imanullah dan Mochamad Toha (Surabaya)

Syahriel Achmad:

"Kami Tidak Pernah Memaksa Mereka"

Syahriel Achmad, kuasa hukum PT KBR, mengakui ada gugatan mantan karyawan yang diajukan untuk kedua kalinya. Alasan gugatan adalah kekurangan uang pensiun yang mereka terima. Menurut dia, para penggugat itu hanya mengacu pada satu SK. Padahal, ada keterkaitan dengan SK-SK lainnya.

Lalu, kata Syahriel, mereka meminta tambahan uang pesangon meskipun yang mereka terima itu jauh lebih besar daripada yang semestinya. Karena itu, ada karyawan yang lantas ingin ikut mengajukan pensiun dipercepat. "Kami punya bukti berupa surat permohonan mereka sendiri. Jadi, kami tidak pernah memaksa mereka membuat surat itu," ujarnya.

Karena pembuktian itulah, kata Syahriel, eksepsi KBR diterima majelis hakim. Gugatan para penggugat pun cacat hukum. Sebab, ada pemberi kuasa yang sudah meninggal dunia, tapi tetap menggunakan kuasa yang lama. Tuntutan global per orang Rp 50 juta, kata Syahriel, juga dianggap tidak sesuai dengan peraturan karena tuntutan global tidak bisa diterima. "Lagi pula, mereka sudah menerima pesangon dan uang pensiunnya secara keseluruhan," katanya.

FI dan M. Toha (Surabaya)

MEREKA PENG[...] DENGAN LUK[...]

Arus pengungsi dari Aceh membanjiri Medan dan kota-kota sekitarnya. Sejak tuntutan referendum mengental di "Bumi Rencong", para warga pendatang langsung merasa tak aman. Apalagi, teror dan ancaman memang terjadi di mana-mana. Ketakutan menyergap ribuan transmigran yang sejak 1975 sudah membangun kehidupan baru di Aceh. Sementara, di Manado, kisah serupa terjadi. Ibu Kota ujung utara Sulawesi itu juga didatangi para pengungsi asal Ternate. Inilah sepenggal kisah mereka.

Dua puluh lima tahun jelas bukan waktu yang singkat bagi Syahril. Selama seperempat abad, ia menetap di Lhoksukon, Aceh Utara, dan menjadi tetangga yang baik. Apalagi, pekerjaannya—Kepala Kantor Pos setempat—membuka peluang untuk bergaul. Sesekali, jika ia pulang ke tanah kelahirannya di Padang, ia membawa oleh-oleh buat para jiran yang nyaris semuanya adalah penduduk Aceh Asli.

Namun, pekan silam, ia harus menerima kenyataan ini: tak ada pilihan lain, ia harus segera meninggalkan Aceh. Keputusan itu ia ambil setelah berkali-kali menerima telepon dan surat ancaman. Isinya, minta disediakan uang sebesar Rp 20 juta demi perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Jika tidak, silakan hengkang dari Aceh atau ia dan keluarganya bakal dihabisi.

Syahril panik. Bukan saja karena ia tak memiliki uang sebesar itu. Tapi, ia teringat peristiwa yang menimpanya beberapa bulan silam. Waktu itu, mobilnya dibakar entah oleh siapa di tengah malam buta. Beruntung, para tetang-

MURIZAL HAMZAH

ganya menolong memadamkannya. Sejak saat itu ia mafhum: Aceh tak aman lagi bagi dia.

Karena itu, pekan silam, Syahril pun memutuskan untuk kembali ke Padang. "Sejujurnya sebenarnya saya senang tinggal di Aceh," ujarnya, di tengah acara perpisahan kecil dengan para tetangga.

Nasib serupa dialami Tono, karyawan perusahaan penambangan gas bumi, PT Arun. Setelah 15 tahun menetap di Buloh Ara, Aceh Utara, pekan silam, pria asal Jawa Timur ini membawa keluarganya hengkang ke Medan. Keputusan itu ia ambil setelah pintu rumahnya disemprot cat merah bergambar tanda silang. Artinya jelas, Tono sebagai pendatang harus segera angkat kaki dari "Serambi Mekah".

Kendati ia yakin itu ulah sekelompok orang yang hanya ingin memeras dirinya, Tono tak mau ambil risiko. Ia pun memindahkan istri dan anaknya yang semata wayang ke rumah saudaranya di Medan. Beberapa jam setelah truk pengangkut barangnya berangkat, tiba-tiba seorang pemuda anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mengaku baru pulang dari Malaysia mendatanginya. Ia menyatakan GAM tak pernah mengusir para pendatang. "Asal mereka tidak mengkhianati Aceh," ujarnya.

Pemuda itu lalu menunjukkan dua pucuk pistol. Salah satunya disorongkan kepada Tono. "Silakan dipakai, untuk menjaga diri," katanya. Tapi, Tono menolak. "Terlambat. Kalau datang dari dulu, saya masih bisa meyakinkan istri saya," ujarnya.

Pekan-pekan ini, arus pengungsi seperti Syahril dan Tono hampir tiap hari keluar dari Aceh. Mereka menumpang puluhan bus dan truk. Sejumlah perabotan rumah tangga hingga antena parabola, tersembul di antara tumpukan kasur, lemari, dan tumpukan kardus. "Aceh tak aman lagi buat pendatang, teror dan ancaman lewat selebaran ada di mana-mana," ujar seorang transmigran yang kini mengungsi ke Medan.

Medan adalah tujuan utama mereka. Belum ada angka resmi tentang jumlah pengungsi asal Aceh saat ini. Yang jelas, menurut perkiraan Bupati Pidie, M. Djafar Ismail, sedikitnya sudah 12 ribu orang kini sudah pergi dari Aceh.

Tak semua pengungsi menempuh jalur darat. Sebagian meninggalkan Aceh melalui laut. Kapal Motor Sangiang yang berkapasitas 500 penumpang dua hari sekali berangkat meninggalkan Pelabuhan Malahayati. Sebagian besar penumpangnya adalah pengungsi.

Kendati kapal yang mengangkut mereka belum merapat di Pelabuhan Malahayati, lantaran khawatir tak dapat kapal, ratusan pengungsi jauh hari sudah menginap di seputar pelabuhan. Jumlah itu makin bertambah menjelang HUT GAM 4 November 1999. "Ada kabar, menjelang hari itu, tak ada lagi angkutan untuk keluar dari Aceh," ujar seorang pengungsi.

Para pengungsi Aceh bukan cuma bekas transmigran. Melainkan juga pegawai negeri, karyawan BUMN, dan pelajar. Tapi, para transmigran termasuk golongan pengungsi yang pertama kali berangkat. Sejak sekitar April lalu, ribuan transmigran secara bergelombang meninggalkan Aceh. Padahal, jumlah transmigran di provinsi itu tak kurang dari 30 ribu jiwa. Kebanyakan mereka sudah menikah dengan penduduk Aceh dan beranak-pinak.

Tapi, apa boleh buat, teror membuat mereka takut untuk terus menetap di Aceh. Gatot, salah seorang dari 171 ke-

MURIZAL HAMZAH
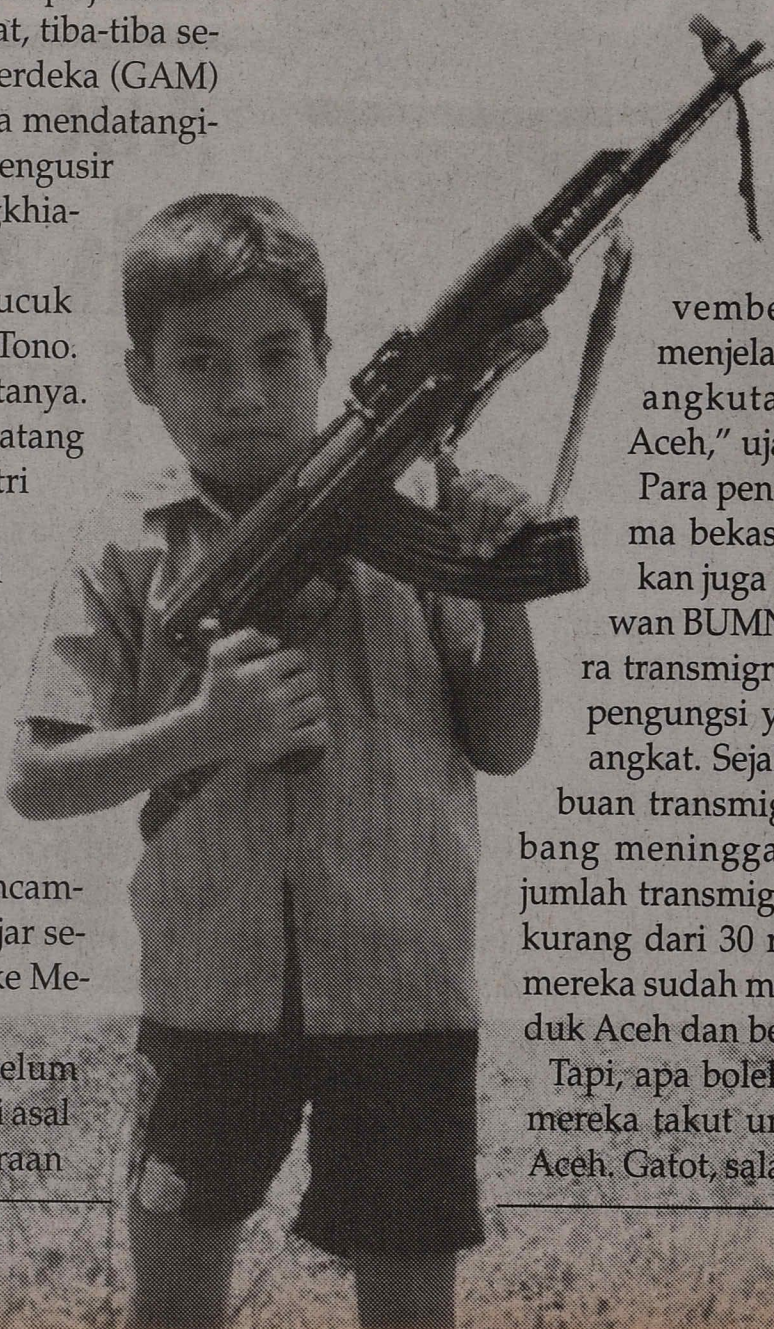
MURIZAL HAMZAH

pala keluarga transmigran yang kini ditampung di lokasi Transito Kantor Wilayah Transmigrasi Sumatra Utara, misalnya, menceritakan kisahnya kepada rombongan Gubernur Sumatra Utara, Tengku Rizal Nurdin.

Sebelumnya, menurut bapak empat anak itu, silaturahmi dengan tetangganya di Unit Pemukiman Transmigran (UPT)h uang sebelum 4 Desember 1999. Jika tidak, ia harus segera angkat kaki dari Aceh atau keselamatan keluarganya bakal terancam. Bukan itu saja. Rumah Syukri pun tiba-tiba ditandai coretan cat merah bergambar palang.

Namun, Syukri tak memenuhi permintaan itu. Bukan lantaran ia sayang membuang uang buat sesuatu yang tak jelas, melainkan ia yakin ini hanya pekerjaan para "preman". Kendati demikian, bukan berarti ia tak mengacuhkan ancaman tersebut. Pekan lalu, ia memboyong keluarganya pindah ke Medan.

Cerita telkan lokasi transmigrasi yang telah menghasilkan dan mulai memakmurkan kehidupan kami," ujar pemilik kebun jeruk itu.

Selain ladang-ladang transmigrasi yang kini ditinggal pemiliknya, sejumlah posisi level menengah ke atas dalam berbagai perusahaan besar di Aceh—PT Arun, pabrik pupuk PT Iskandar Muda, PT Kertas Kraf Aceh, PT Asean Aceh Fertilizer, dan kilang Aromatics Humpuss—pun kosong. Para pejabatnya sejak beberapa bulan lalu meninggalkan Aceh.. Diperkirakan, tindakan mereka bakal diikuti ratusan karyawannya.

Kebanyakan pejabat perusahaan itu sebelumnya sempat dimintai uang "untuk perjuangan GAM". Permintaan itu bisa terang-terangan, dengan cara mendatangi pejabat tersebut, bisa pula lewat surat atau telepon. Besarnya, dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.

Ancaman serupa tidak cuma dialami pejabat. Tapi juga, misalnya, Syukri, karyawan sebuah perusahaan di Lhokseumawe. Suatu hari, sekitar tiga pekan lalu, ia mendapat selebaran dari seseorang. Isinya, pengirim surat minta segera disediakan sejumlah uang sebelum 4 Desember 1999. Jika tidak, ia harus segera angkat kaki dari Aceh atau keselamatan keluarganya bakal terancam. Bukan itu saja. Rumah Syukri pun tiba-tiba ditandai coretan cat merah bergambar palang.

Namun, Syukri tak memenuhi permintaan itu. Bukan lantaran ia sayang membuang uang buat sesuatu yang tak jelas, melainkan ia yakin ini hanya pekerjaan para "preman". Kendati demikian, bukan berarti ia tak mengacuhkan ancaman tersebut. Pekan lalu, ia memboyong keluarganya pindah ke Medan.

Cerita teror dari mulut para pengungsi itu ternyata dibantah pihak GAM. Menurut Juru Bicara GAM Wilayah Passe, Abu Sabar, yang melakukan teror terhadap para pendatang itu adalah para preman yang dibayar aparat

MURIZAL HAMZAH

ABU SABAR. *Setelah Aceh merdeka, mereka kami persilakan kembali.*

ABU SABAR: "KAMI MEMAN[G] MENGELUARKA[N]...

Benarkah kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka meneror dan mengusir warga non-Aceh dari "Serambi Mekah"? Berikut petikan wawancara wartawan FORUM, Murizal Hamzah, dengan Juru Bicara GAM Wilayah IV Passe, Abu Sabar.

Benarkah GAM mengusir warga non-Aceh?

Kami sama sekali tidak mengusir bangsa lain. Kami tidak mengusir bangsa Jawa, bangsa Pasundan, bangsa Minang, atau bangsa apa saja yang tingga di bumi Aceh

Bukankah GAM mengeluarkan maklumat kepada warga non-Aceh agar meninggalkan Aceh?

Benar. Kami mengeluarkan maklumat *amaran* (seruan) itu untuk kebaikan mereka juga. Agar warga non-Aceh tidak menjadi korban provokasi rezim Indonesia yang sedang kami perangi secara politik.

Apa bedanya seruan itu dengan pengusiran?

Namanya saja seruan, tidak ada paksaan. Kami hanya mengingatkan. Sebab, setelah Aceh merdeka, mereka kami persilakan kembali ke Aceh. Masalahnya, kini, kami kan masih berperang dengan Indonesia.

Bagaimana jika mereka tidak mau meninggalkan Aceh?

Terserah. Risiko diprovokasi ditanggung sendiri. Sebab, pihak Indonesia kelak mempropagandakan bahwa GAM-lah yang menembak pendatang. Kami tidak berperang dengan orang Jawa atau Batak. Kami melawan kezaliman Indo-

keamanan Indonesia. "Kami pernah menangkap para preman yang melakukan provokasi itu," ujarnya.

Benarkah bantahan itu? Tak jelas. Yang pasti, situasi tak aman di Aceh selama dua bulan terakhir juga membuat sekitar 400 siswa dan 20 guru SLTP dan SMU di Aceh ikut-ikutan mengundurkan diri sebagai penduduk Aceh. Mereka memilih pulang ke kampung halamannya atau pindah ke kota lain.

KRUS HARYANTO

PARA PENGUNGSI DI KAWASAN PT ARUN. *Pilih pulang ke kampung halaman atau pindah ke kota lain.*

Bahkan, ketakutan itu menghinggapi pula para keluarga aparat keamanan di Aceh. Sekitar dua pekan lalu, misalnya, puluhan anggota polisi Aceh ramai-ramai memboyong keluarga mereka ke Medan. Alasannya, ya, sama saja. Selain itu, bagi mereka juga semakin tak jelas siapa kawan, siapa musuh, sementara mereka sendiri sangat mudah dikenali oleh pasukan GAM.

Itu sebabnya mereka cabut walaupun sebenarnya biaya untuk mengungsi tak murah. Untuk menyewa satu truk jenis tronton, dengan trayek Lhokseumawe-Medan, misalnya, kini ongkosnya bisa mencapai Rp 1 juta sekali jalan. Tak mengherankan bila kebanyakan pengungsi tak membawa semua barangnya. Sebagian, jika memungkinkan, mereka lego dengan harga murah.

Yang paling mengenaskan, tentu saja nasib para pengungsi transmigran. Sebab umumnya mereka tak punya lagi tanah atau rumah di daerah asalnya. "Satu-satunya tanah dan harta kami itu ya di Aceh," ujar seorang transmigran.

Pemda Sumatra Utara tampaknya berupaya semaksimal mungkin agar penderitaan para pengungsi tak bertambah. Rizal Nurdin, misalnya, mempersilakan mereka mencari nafkah di Medan. Bahkan, sang gubernur menyuruh anak-anak transmigran yang terpaksa putus sekolah untuk masuk sekolah yang ada di sekitar tempat penampungan. "Tak perlu membayar dan memakai seragam," ujar Rizal Nurdin. Ia pun berjanji akan meminta bantuan kapal TNI AL untuk mengangkut mereka yang ingin pulang ke Jawa.

L.R. Baskoro dan Murizal Hamzah (Aceh)

SERUAN"

nesia-Jawa. Pengertian Jawa di sini bukan orangnya, namun rezim Indonesia yang didominasi budaya Jawa. Orang Aceh yang mendukung penjajahan terhadap bangsa Aceh juga musuh kami.

Kapan warga pendatang yang eksodus itu boleh kembali ke Aceh?

Kalau mereka merasakan sudah aman, silakan saja. Yang patut dicatat, GAM tidak mengusir pendatang. Mereka adalah saudara kami selama belum mengkhianati perjuangan rakyat Aceh.

Kalau bukan GAM, jadi siapa pelaku pengusiran itu?

Para provokator di luar kendali GAM. Kami terus memburu mereka.

Apakah GAM pernah menangkap mereka?

Pernah dan kami beri nasihat. Kalau masih melanggar dan tertangkap, kami mempunyai pengadilan khusus. Kini, semakin banyak provokator yang diterjunkan ke sini. Tujuannya untuk menggelar kembali operasi militer.

Bagaimana caranya membedakan GAM asli dan pencatut?

Anggota GAM memiliki kartu anggota yang diberikan oleh negara Aceh. Kalau tidak memiliki, berarti preman atau provokator.

Apakah GAM menempatkan pasukan di tempat transmigrasi atau penduduk dari provokator?

Tidak. Kami menjaga secara umum masyarakat Aceh. GAM ikut menjaga harta Aceh untuk tidak dikuras dan dilarikan ke luar Aceh. Misalnya, seperti kayu atau pasir hitam.

Menjelang HUT GAM pada 4 Desember, benarkah akan ada pemogokan total?

Tidak benar. Itu sama saja dengan membunuh ekonomi rakyat Aceh sendiri. Mengenai pengibaran bendera GAM, terserah rakyat. Kalau terancam jangan. GAM tidak memaksa rakyat Aceh. Jangan gara-gara bendera, rakyat jadi korban

Ada kabar, pada saat itu nanti GAM akan menyerang instalasi militer?

Tidak. Kami tidak melakukan penyerangan. Malah, kami mengharapkan acara itu berlangsung damai. Jangan sampai ada yang memperkeruh suasana acara ini. □

Hasballah M. Saad: "Jangan Menambah Lagi Jumlah Mayat"

Arus pengungsi keluar Aceh membuat situasi di "Tanah Rencong" makin panas. Namun, sejauh ini, belum tampak tindakan konkret pemerintah. Untuk mengetahui apa latar belakang sikap itu, Anton Bahtiar Rifa'i dan Andrianto Soekarnaen dari FORUM mewawancarai Menteri Negara Urusan HAM, Hasballah M. Saad, dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya:

Para pengungsi dari Aceh semakin banyak. Apa antisipasi pemerintah?

Akan diurus. Sekarang masalah ini sedang dirapatkan. Kalau sudah dirapatkan, baru ada yang konkret.

Bagaimana sikap pemerintah terhadap rencana peringatan HUT GAM mendatang?

Kita harus menghargai seluruh aspirasi yang ada dalam masyarakat. Katakanlah GAM adalah kelompok perlawanan yang riil ada di Aceh. Soal mereka berbeda pendapat dengan pemerintah, itulah yang menyebabkan terjadinya konflik. Menyangkut HUT GAM, sejauh kegiatan itu tidak mengganggu dan mengancam yang lain, mengapa kita harus risau? Jangan pula kita menggunakan momen itu sebagai alasan untuk memukul, padahal mereka damai. Saat Sidang Umum MPR kemarin, sejuta orang lebih turun ke jalan, tapi kan damai. Yang saya tidak mengerti, mengapa orang-orang takut dan eksodus. Seolah-olah orang nonmuslim tidak bisa lagi tinggal di Aceh.

Siapa kira-kira yang mendorong eksodus dari Aceh?

Saya tidak tahu.

Kepala Kepolisian Sumatra Utara menyatakan dua satuan setingkat kompi tambahan kini telah dikirim ke Aceh. Apa tanggapan Anda?

Begini. Sebagai menteri negara, saya tidak bisa bertanya langsung kepada Kapolda. Saya juga tidak punya orang di tingkat provinsi. Jadi, kami hanya bisa melakukan koordinasi dengan panglima TNI atau Kapolri. Kalau informasi yang Anda sampaikan itu betul, saya akan cek dan dalam sidang kabinet akan saya tanyakan langsung. Kalau betul itu terjadi dan alasannya tidak terlalu kuat, saya akan mengimbau agar pengiriman itu tak perlu dilakukan.

Bagaimana dengan kemungkinan keadaan darurat militer diterapkan di Aceh?

Saya sangat terenyuh dan bersimpati mendengar banyak anggota Polri yang menjadi korban kekerasan di sana. Tapi, saya juga lebih terenyuh lagi terhadap korban orang Aceh yang selama sepuluh tahun lebih hidup dalam kondisi sangat mengenaskan ketika DOM diterapkan. Itu pula yang membuat hati saya tergetar ketika mendengar akan ada pendekatan kekerasan lagi di Aceh. Yang sudah terjadi saja belum sepenuhnya kita selesaikan. Masih banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di hutan dan di lembah gunung yang belum selesai kita kebumikan. Janganlah kita menambah jumlah mayat-mayat itu lagi.

HASBALLAH. *Mengapa orang -orang takut dan eksodus?.*

Apa rekomendasi Anda untuk Aceh?

Belum selesai disusun. Setelah ini, masih akan ada informasi yang akan masuk dari kunjungan tambahan. Kalau sudah lengkap, akan ada rekomendasi dalam bentuk, pertama, laporan fakta-fakta yang saya lihat. Kedua, semacam analisis untuk menghasilkan rekomendasi dalam rangka menemukan suatu penyelesaian yang tepat.

Siapa yang akan ditemui Gus Dur kalau berkunjung ke Aceh?

Saya sedang membuat pemetaan. Di Aceh itu kan ada empat juta orang yang terdiri dari berbagai kelompok. Ada ulama, mahasiswa, GAM, Taliban, LSM, dan macam-macam. Saya ingin mencoba membuat sebuah gambaran yang agak holistik sehingga kita tahu komponen masyarakat mana saja yang menuntut referendum. Kalau representasi dari kelompok itu diajak dialog saya kira itu tepat. Soal apa yang akan dilakukan, akan dibicarakan dengan mereka. □

KISAH SERUPA DARI MANADO

MURIZAL HAMZAH

PENDUDUK AMBON YANG MENGUNGSI. *Tak kurang lima ratus ribu rupiah per hari.*

Tidak hanya Medan yang diserbu pengungsi. Manado pun begitu. Ibu Kota Sulawesi itu kini menjadi tujuan pengungsi asal Ternate. Terutama setelah bentrokan antara kaum muslim dan nonmuslim di wilayah Maluku Utara itu terjadi beberapa waktu silam. Tak kurang dari 10 ribu pengungsi tiba di Manado dan Bitung setelah menyeberangi laut.

Sebagian besar pengungsi menumpang kapal TNI AL. Mereka ditampung pemerintah daerah setempat di Asrama Secata B, Gereja Sentru, dan Gedung PPD I. "Bagi saya, yang penting jiwa selamat. Harta masih bisa dicari," ujar Benyamin Rahasia, 44 tahun.

Sebelumnya, Benyamin tinggal di kawasan Tanah Tinggi, Ternate. Suatu malam, saat ia dan keluarganya tengah tertidur lelap, rumahnya dibakar. Benyamin dan keluarga keluar kalang kabut. Tapi, bukannya ditolong, ia pun sempat diburu-buru sejumlah orang yang ingin menghabisi nyawanya. "Saya dan keluarga pasrah saja dan ternyata Tuhan masih melindungi saya," ujar bapak empat anak itu. Sesampainya di Manado, ia bertekad untuk tak kembali ke Ternate.

Saat ini, Pemda Sulawesi Utara berencana mentransmigrasikan sekitar 5.000 pengungsi yang terdampar di Manado dan Bitung. Sekitar 1.500 orang di antara mereka telah menyatakan kesediaannya. Menurut Gubernur E.F. Mangindaan, ada sejumlah wilayah di Sulut yang akan dijadikan areal transmigrasi bagi para pengungsi. Yakni, di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Sangir Talaud.

Untuk mengurusi para pengungsi tersebut, Pemda Sulut bekerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk sejumlah perusahaan swasta. Minimal, mereka bersedia menyediakan tempat untuk lokasi penampungan para pengungsi. Pemda Sulut sendiri menggunakan pos anggaran dana APBD dan juga dana JPS (Jaring Pengaman Sosial) untuk memenuhi kebutuhan hidup para pengungsi. Yang terpokok, tentu saja, kebutuhan itu berupa makanan dan obat-obatan. "Tapi, dana JPS yang dipakai itu sebagian saja. Sebab, rakyat Sulut pun masih membutuhkan," kata Mangindaan.

Setiap hari, Pemda Sulut mengeluarkan dana tak kurang Rp 500 ribu untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Selain itu, mereka juga menyalurkan ratusan anak para pengungsi yang selama ini putus sekolah ke sejumlah sekolah. Menurut Wali Kota Manado, Lucky Korah, kini tak ada lagi masalah dengan kelanjutan pendidikan anak-anak para pengungsi. Bahkan, sejumlah pengungsi yang berstatus guru pun kini tengah diproses untuk bisa mengajar di sejumlah sekolah di Sulut. Tampaknya, ini bisa disebut hikmah lain di balik banjir pengungsi. Soalnya, kebetulan, sampai kini Sulut masih kekurangan tenaga guru.

Seperti pengungsi asal Aceh yang membanjiri kota Medan, pengungsi dari Ternate ini pun berasal dari berbagai kalangan. Tidak hanya PNS atau guru, tapi juga 48 anggota Polri dan keluarganya. Khusus bagi ke-48 anggota Polri itu, Kepala Kepolisian Daerah Sulut, Brigadir Jenderal Juharnus, berjanji akan menempatkan mereka di jajaran Polda Sulut. "Tak ada kesulitan untuk soal itu," ujarnya.

Sambutan Pemda Sulut itu tak urung membuat para pengungsi lega. "Saya merasa sangat berterima kasih," ujar Mieke Rompis, 25 tahun, salah seorang pengungsi. Begitu pula dengan Henny Hadi. Pengungsi kelahiran Pulau Halmahera itu pun tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. "Apa pun yang diberikan Pemda Manado, saya bersyukur. Di Ternate saya merasa tidak aman. Semuanya sudah berubah," ujar ibu tiga anak tersebut.

Seperti pengungsi lainnya, Henny bertekad akan membangun kehidupannya kembali dari nol. "Sekarang, yang saya pikirkan hanya pendidikan anak-anak saya," ujarnya.

LRB dan Mustopa (Manado)

AP PHOTO

ABDEL KADER HACHANI. *Menolak didampingi bodyguard.*

Dua Peluru untuk Hachani

Salah seorang tokoh FIS Aljazair tewas ditembak pemuda tak dikenal. Peristiwa itu menyemai konflik baru di kalangan gerakan Islam di negara itu.

Pembunuhan Abdel Kader Hachani, salah seorang pemimpin teras Front Islamique du Salut (FIS), pekan silam, menggemparkan seluruh Aljazair. Bukan saja lantaran ketokohan Hachani, tapi juga karena motif politis di belakang pembunuhan sang pemimpin itu.

Hachani selama ini dikenal sebagai pemimpin FIS yang lumayan moderat dan selalu berusaha memadamkan terorisme, kendati tidak membuatnya berpihak kepada pemerintah. Belakangan, ia juga mendukung peluncuran undang-undang *Civil Accord* sebagai upaya membangun kembali masyarakat Aljazair yang carut marut.

Pagi itu, Hachani meninggalkan rumahnya menuju ke klinik dokter gigi yang berjarak satu setengah kilometer. Pukul setengah sebelas, dokter masih juga belum datang. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk mengobrol dengan pasien lainnya.

Tak lama kemudian, datang seorang pemuda berumur sekitar tiga puluh tahun dengan pakaian necis ke klinik tersebut. Pemuda yang baru datang bertanya kepada pasien yang sempat diajak mengobrol Hachani. "Siapa orang itu?" kata pemuda tersebut. "Abdel Kader Hachani, pemimpin FIS," kata seorang pasien.

Dua puluh lima menit kemudian, Hachani keluar dari klinik diikuti pemuda tadi. Sesampai di luar, pemuda itu bertanya kepada Hachani dalam bahasa Prancis, "Anda Tuan Hachani?" Begitu dijawab dengan anggukan, pemuda itu melepaskan dua kali tembakan dari pistol berperedam suara ke arah pelipis dan perut Hachani. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit, dokter tak sanggup menyelamatkan nyawanya.

Begitu terdengar kabar penembakan Hachani, beberapa tokoh nasional dan FIS tampak di rumah sakit. Di antara pemimpin FIS yang datang adalah Ali Jady dan Abdel Kader Bomakhmakh. Terlihat pula Menteri Kesehatan Yehia Fadum. Selain itu, hadir juga istri Hachani, Umm Salama, dan anaknya, Muadz, yang baru pulang dari sekolah.

Aljazair pun bereaksi. Semua setuju, pembunuhan Hachani itu bermotif politik. "Ia dibunuh karena sikap politiknya selama ini," ujar Bomakhmakh di rumah sakit. Pemerintah Aljazair menganggap bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh para penentang *Civil Accord* dan konsolidasi nasional, di mana pun mereka berada, di dalam ataupun di luar negeri.

Hal yang sama juga tertulis dalam keterangan resmi yang dikeluarkan FIS, "Pembunuhan ini sudah direncanakan dengan amat teliti dan bertujuan memberikan pukulan keras ke arah konsolidasi nasional dan *Civil Accord*".

FIS menduga pembunuhan ini dilakukan "musuh umat dan konsolidasi nasional". Walaupun tak menyebutkan nama, semua orang maklum bahwa kelompok radikal Islam berada di balik pembunuhan ini. "Sayap radikal dalam gerakan Islam yang menolak akur dengan pemerintahlah yang berdiri di belakang pembunuhan ini," ujar Hashmi Cherif, Ketua Gerakan Sosial Demokrat, yang selama ini menjadi penentang keras FIS.

Cherif tidak salah. Sebab, keluarga korban ternyata menerima surat dengan tulisan tangan yang ditandatangani delapan orang pemimpin Gerakan Islam Bersenjata (GIA), bekas sayap militer FIS yang memisahkan diri. Dalam surat itu mereka menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

Sehari setelah penembakan itu, ribuan pendukung FIS mengantarkan jenazah Hachani menuju ke Masjid An-Nur tempat ia disalatkan. Para tokoh FIS, termasuk Abbasi Madani yang berstatus tahanan rumah, hadir dalam penguburan. Sambil menitikkan air mata ia mengatakan, "Mereka ingin membunuh Aljazair. Tapi, ia akan tetap hidup, insya Allah." Selain Madani, tampak pula tiga kandidat presiden dalam pemilu bulan lalu, Talib Ibrahimi, Maulud Hamrush, dan Jaballa. Hadir juga Ben Yusuf Ben Khoda, Perdana Menteri sementara negeri itu.

Perjuangan Hachani memang belum selesai. *Civil Accord* yang didukungnya ternyata sampai saat ini belum mampu menciptakan perdamaian di sana. Hachani termasuk satu di antara 500 orang yang terbunuh sejak *Civil Accord* direferendumkan dan disetujui rakyat Aljazair.

Hachani bergabung dengan FIS sejak organisasi ini didirikan pada Maret 1989 dan dianggap sebagai "perancang kemenangan" FIS pa-

da pemilu 1991. Sejak pelaksanaan demokratisasi di Aljazair, ia bergabung sebagai anggota parlemen biasa dari wilayah Sekikada, utara Aljazair. Karirnya cepat meroket sejak musim panas 1991, ketika ia menjadi salah seorang pemimpin FIS. Bahkan, ia dinobatkan sebagai orang nomor tiga di FIS setelah Abbasi Madani dan Ali Benhaj.

Peran Hachani semakin besar setelah terjadi huru-hara dan bentrokan antarpihak keamanan (militer) dan FIS di Aljazair pada Juni 1991, yang mengakibatkan penangkapan pemimpin teras terdepan FIS, termasuk Madani, Belhaj, Ali Jadi, dan Bomakhmakh. Setelah peristiwa itu, FIS berada di persimpangan jalan: Memilih jihad bersenjata untuk membalas perlakuan militer atau tetap memakai jalan damai, dengan menjalin hubungan mesra dengan pemerintah dan militer.

Kendati demikian, Hachani tidak menyetujui keduanya. Ia mengadakan konsolidasi dengan para pemimpin FIS yang masih berada di luar penjara. Ia pun dipilih sebagai ketua sementara FIS. Keputusan itu ditentang oleh GIA.

Namun, Hachani yakin bahwa langkahnya benar. Ia berhasil membangun kembali FIS yang terkoyak-koyak dan menawarkan solusi yang amat cerdas dan cantik: Meminta pemerintah mengadakan pemilu yang jurdil pada Desember 1991. Ia pun memaksa pemerintah melepaskan para pemimpin FIS yang berada dalam tahanan. Jika itu tidak dilakukan, FIS tak akan ikut pemilu, dan itu berarti pemilu tidak mendapatkan legitimasi yang kuat.

Terbukti langkah Hachani amat tepat. Dalam putaran pertama, FIS berhasil menang dengan 188 kursi di parlemen. Tapi, Hachani tidak mendapatkan kursi pada putaran pertama. Ia harus menunggu hasil pemilu putaran kedua. Namun, tanpa putaran kedua pun FIS mendapatkan mayoritas mutlak.

Sayang, Presiden (ketika itu) Shazli Benjadid mengundurkan diri akibat tekanan dari militer dan hasil pemilu pun dibatalkan. Dan, itu menjadi awal dari krisis dan bencana yang menimpa Aljazair. Ribuan pendukung FIS turun ke jalan, terutama setelah melakukan salat Jumat, dan mengadakan protes terhadap militer.

Di saat seperti itu Hachani mengeluarkan imbauan kepada pasukan militer untuk tidak mematuhi perintah dari para petinggi militer yang memerintahkan melontarkan timah panas ke arah penduduk sipil. Tapi, koran-koran Aljazair, atas tekanan militer, enggan menyiarkan imbauan Hachani itu. Militer malah menangkap Hachani dengan tuduhan subversif. Ia pun dipenjara tanpa pengadilan hingga Juli 1997.

Di dalam penjara, kharisma Hachani tetap diakui. Hal ini terbukti ketika terjadi huruhara di penjara Aljazair, Februari 1995. Ia menjadi salah seorang juru bicara para tahanan.

Namun, Hachani dan Abdel Haq Iyaida, Komandan GIA, gagal bernegosiasi. Akibatnya, lebih dari seratus orang terbunuh, termasuk di antaranya para pemimpin FIS.

Hachani dikeluarkan dari penjara pada Juli 1997. Namun, hal itu justru membuat hubungannya dengan GIA memburuk. Soalnya, Hachani berpendirian bahwa negosiasi tidak akan membuahkan hasil jika hanya dilakukan dengan sayap militer FIS. Negosiasi pemerintah harus diprioritaskan dengan "kalangan sipil FIS" dan menyelesaikan masalah politik, bukan hanya keamanan.

Hachani pun melakukan gerakan politik untuk menghimpun kembali pendukung-pendukung FIS. Hachani juga mendukung peluncuran undang-undang *Civil Accord* yang digagas oleh Presiden A. Azis Bouteflika. Ia menganggap undang-undang baru ini mampu mengembalikan bangunan masyarakat Aljazair yang berantakan. Namun, tentu langkah ini tidak disetujui oleh kalangan FIS garis keras.

Sebenarnya, sejak ia keluar dari penjara, pihak keamanan sudah menawarinya untuk memberikan perlindungan keamanan. Bahkan, Abbasi Madani juga mendesaknya untuk menerima tawaran itu. Tapi, ia menolak. Hachani menganggap bahwa bantuan keamanan justru akan menciptakan jarak dengan tokoh-tokoh FIS yang masih trauma dengan militer. Ia juga merasa tidak bebas jika selalu didampingi *bodyguard*.

Ternyata, Madani benar. Hachani akhirnya terbunuh dengan dua pelor di tubuhnya. Padahal, beberapa hari sebelum penembakan, penguasa Aljazair telah mencabut pencekalan atas dirinya untuk kembali beraktivitas politik.

Fahmi Imanullah
dan Qaris Tadjuddin
(Mesir)

AP PHOTO

JENAZAH HACHANI DI USUNG PENDUKUNGNYA. *Memilih aksi bersenjata atau jalan damai.*

PALESTINA

Hamas Terusir dari Yordania

Empat pemimpin Hamas yang berbasis di Yordania dibebaskan dari penjara di Amman. Tapi, pembebasan itu justru langkah awal pengusiran mereka.

Hamas (Harakah Muqawamah Islamiyah), gerakan rakyat Palestina yang berhaluan keras, makin terpojok. Pasalnya, Raja Abdullah II menolak negaranya, Yordania, jadi basis kegiatan politik Hamas melawan Israel. Bahkan, Minggu pekan silam, putra almarhum Raja Hussein itu "mengusir" empat pemimpin sayap politik Hamas: Khaled Meshal (Ketua Sayap Politik Hamas) dan Ibrahim Ghosheh (Juru Bicara Hamas di Yordania), serta dua anggota sayap politik lainnya, Izzat Arrashaq dan Sami Khatr. Keempatnya langsung terbang meninggalkan Amman menuju ke Doha, ibu kota Qatar.

Memang, sejak September lalu, pengurus teras Hamas di Yordania itu berstatus tahanan dan mendekam di penjara Amman. Tuduhan kepada mereka adalah melanggar konstitusi dan terlibat dalam organisasi terlarang. Namun, setelah diajukan ke Mahkamah Keamanan Negara, Raja Abdullah II justru memberi pengampunan. Bahkan, mereka dibebaskan bersama sekitar 20 pengikut lainnya. Tapi, di balik pembebasan itu, terselip rencana lain: "mengusir" empat pemimpin tadi dari Yordania.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Yordania untuk memberangus kegiatan dan kehadiran Hamas di negeri itu. Sebelumnya, akhir Agustus lalu, pemerintah menutup beberapa kantor sayap politik Hamas. Alasannya, gerakan perlawanan Islam ini dianggap melakukan kegiatan inkonstitusional dan melanggar undang-undang. Selain itu, menurut versi pemerintah Yordania, di kediaman Khaled yang juga sekaligus berfungsi sebagai kantor ditemukan tiga pucuk pistol. Senjata ringan itu disebut-sebut sebagai milik anggota sayap politik Hamas.

AP PHOTO

MEREKA YANG DIBEBASKAN DI YORDANIA. *Karena tekanan Israel dan Amerika Serikat?*

Terhadap perlakuan sewenang-wenang itu, melalui pembelanya, Sholeh Armuthi, mereka mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung. "Itu inskonstitusional dan melanggar hak asasi manusia," kata Armuthi. Meshal sendiri juga membantah bahwa penangkapan dan pengusiran dirinya itu lantaran melanggar konstitusi. Tapi, lebih kepada persoalan politis. "Langkah itu karena tekanan Amerika dan Israel guna mewujudkan dan memuluskan pembicaraan tahap akhir (Israel-Palestina)," katanya. Meski begitu, Khaled menolak pihaknya punya masalah dengan pemerintah.

Di dalam negeri Yordania sendiri tidak semua kalangan partai politik setuju dengan penangkapan dan pengusiran tersebut. Misalnya, beberapa anggota Ikhwanul Muslimin mencoba mengkritik kebijakan tersebut. Bahkan, Ikhwan yang mencoba menjembatani dan bertindak sebagai negosiator justru dituduh membela Hamas. Akibatnya, hubungan partai politik Islam dan pemerintah itu retak. Tidak mustahil, Ikhwan akan mengambek dan memboikot pemilu mendatang. Tindakan tersebut juga pernah dilakukan Ikhwan pada 1997.

Reaksi keras juga datang dari jalur Gaza, Palestina. Sheik Ahmed Yassin, pendiri dan tokoh spiritual Hamas, dengan suara lantang mengecam tindakan itu. "Kami berharap pemerintah Yordania tidak mengusir karena hal itu bertentangan dengan undang-undang Yordania dan hukum internasional," katanya. Sebaliknya, pujian justru datang dari Ehud Barak. Perdana Menteri Israel itu ketika berkunjung ke Berlin, Jerman, mengatakan, "Tindakan Raja Abdullah terhadap Hamas merupakan contoh dari kesadaran keamanan dan upaya untuk memberantas terorisme. Ini merupakan tindakan berani terhadap suatu organisasi yang amat berbahaya."

Wajar jika pernyataan seperti itu terlontar dari mulut Ehud Barak. Selama ini, Hamas adalah batu sandungan utama bagi negeri Yahudi itu untuk menguasai lebih banyak wilayah Palestina. Secara konsisten, Hamas terus menekan agar Palestina tidak mengalah dalam setiap perundingan. Apalagi, perundingan tahap akhir yang dijadwalkan awal Desember ini akan membicarakan poin-poin penting, seperti status Yerusalem, batas negara, pasukan militer, kedaulatan, serta hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah airnya.

Yang jelas, langkah Yordania mengusir tokoh Hamas itu bukan menjawab persoalan, justru menambah problem baru bagi negeri yang baru saja dikunjungi oleh Presiden Abdurrahman Wahid itu. Terbukti, sehari setelah prosesi pengusiran itu, suasana politik di Yordania justru memanas. "Kegaduhan" politik itu tak hanya terjadi di kalangan elite politik, tapi merasuk juga di kalangan rakyat bawah. Seperti, penyerangan terhadap kedutaan besar Israel di Amman.

Surutkah perlawanan Hamas? "Hamas tetap akan menempuh jalannya dan halangan seperti ini tidak akan menghentikan perjuangan kami melawan penjajahan Zionisme," kata Meshal.

Johan Budi SP dan Qaris Tadjudin (Mesir)

KOLOM

Hukum buat Bajak Laut

Berita mengenai pembajakan kapal di laut muncul di media massa minggu lalu. Berita ini menarik karena diduga pelaku pembajakan itu adalah orang-orang berkewarganegaraan Indonesia. Pembajakan yang terjadi di perairan Selat Malaka itu menimpa kapal MV. Alondra Rainbow yang berbendera Panama dan tengah dicarter oleh perusahaan Jepang, Tokyo Senpaku Kaisha. Kapal tersebut dalam perjalanan membawa alumunium sebanyak 7.700 metrik ton dari Bandar Kualatanjung, Sumatra Utara, ke Jepang.

Melda Kamil Ariadno
Staf Pengajar Hukum Internasional dan Hukum Laut FHUI

Para bajak laut dan kapal yang mereka bajak telah ditangkap di lepas pantai Goa oleh operasi gabungan patroli pantai dan Angkatan Laut India (16 November 1999). Pemerintah India merasa berwenang menangkap dan mengadili para pembajak ini karena mereka ditangkap di wilayah perairan India. Argumentasi India ini dapat dibenarkan. Bahkan, pada dasarnya negara mana pun yang mengetahui terjadinya suatu pembajakan di laut dapat menangkap para bajak laut tersebut untuk kemudian mengadilinya.

Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (KHL 1982) telah mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai pembajakan (*piracy*) tidak hanya yang dilakukan di laut tetapi juga di udara di kawasan laut bebas (Bagian VII, Pasal 100-107). Pengaturan ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa pada dasarnya tidak ada yurisdiksi satu negara terhadap kapal yang sedang berlayar (pesawat yang sedang melintas) di laut lepas, kecuali yurisdiksi negara-negara benderanya (bendera kapal atau pesawat). Untuk itu maka dalam pasal-pasal mengenai laut bebas (*high seas*) ditentukan bahwa setiap tindak pembajakan terhadap kapal (pesawat) di laut bebas atau di daerah yang berada di luar yurisdiksi suatu negara dapat ditindak oleh negara mana pun, bukan hanya oleh negara benderanya saja, bahkan semua negara harus bekerja sama untuk menindaknya (Pasal 100) karena pembajakan dianggap sebagai kejahatan universal (*universal crime*). Dengan demikian, setiap negara dapat menangkap kapal (pesawat) pembajak atau yang dibajak, menyeretnya ke pelabuhan negaranya, mengadilinya di pengadilan setempat, dan menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil sehubungan dengan kapal (pesawat) dan muatannya dengan mengindahkan hak-hak pihak ketiga (Pasal 105). Penangkapan ini harus dilakukan oleh kapal perang atau kapal dinas dari negara bersangkutan (Pasal 107). Dapat disimpulkan, jika di laut bebas saja penangkapan itu dapat dilakukan, hal yang sama tentunya berlaku di wilayah perairan suatu negara, seperti yang didalilkan India.

Praktek pembajakan di laut bukanlah hal baru dan *modus operandi*-nya pun dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Dulu, lazimnya diawali penyerangan kapal bajak laut terhadap kapal korbannya, kemudian menaikinya, merampok barang-barang berharga, lalu meninggalkannya (tak jarang setelah kapalnya dibakar lebih dahulu). Sekarang pembajakan dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya seperti yang dilakukan para bajak laut terhadap MV Alondra Rainbow, yaitu dengan mengambil alih (*take over*) kapal. Jika para pembajak memang bukan awak kapal tersebut, berarti ada kapal lain yang membantu terjadinya pembajakan (dengan mengangkut para pembajak) ketika kapal MV Alondra Rainbow diambil alih. Lalu, jika benar sebagian muatannya telah "dijual" di tengah laut (tentunya ke kapal lain), sepertinya ada "penadah terencana" yang memang berkepentingan dengan muatan alumunium dalam kapal tersebut. Menurut KHL 1982 baik kapal yang membantu terjadinya pembajakan maupun kapal yang membeli muatan curian itu dapat dianggap telah memfasilitasi terjadinya pembajakan, sehingga menurut hukum laut internasional dapat dikategorikan telah melakukan tindakan pembajakan juga.

SELO SUMARSONO

Saat ini ada 15 orang yang diduga berkewarganegaraan Indonesia yang ditahan di India karena didakwa telah melakukan pembajakan di laut. Meskipun Indonesia dalam hukum internasional mempunyai yurisdiksi nasional terhadap warga negaranya (kalau memang terbukti mereka berkewarganegaraan Indonesia), akan tetapi menurut KHL 1982 (di mana Indonesia dengan UU No. 17 tahun 1985 telah lebih dahulu menjadi peserta daripada India), India tetap berhak menangkap dan mengadili para pembajak itu. Dalam hal ini tentunya Tokyo Senpaku Kaisha dan pemilik kapal MV Alondra Rainbow dapat mengklaim haknya sebagai pihak ketiga terhadap kapal maupun sisa muatan tersebut (sesuai ketentuan Pasal 105 KHL 1982).

Adanya kecurigaan bahwa mereka merupakan bagian dari sindikat bajak laut internasional merupakan hal yang perlu dipikirkan Indonesia. Sudah saatnya Indonesia turut memperhatikan hal-hal yang dilakukan warga negaranya di luar wilayah Indonesia, jika tidak mau dianggap sebagai negara yang tidak bertanggung jawab terhadap kejahatan universal yang dilakukan oleh warga negaranya. Bukan itu saja, angkatan laut (AL) kita pun harus turut berperan serta aktif dalam menangani hal tersebut, termasuk berhubungan aktif dengan IMB karena rasa aman dunia pelayaran internasional dalam membawa muatan dari Indonesia perlu dijaga. Apalagi kalau terjadi pembajakan seperti yang menimpa MV Alondra Rainbow di Selat Malaka itu, yang merupakan yurisdiksi tiga negara (Malaysia, Singapura, dan Indonesia).

Jika saja saran saya dapat didengar bahwa hendaknya Menteri Eksplorasi Laut bukan hanya menangani masalah pemanfaatan laut, tetapi juga menangani semua masalah kelautan, peristiwa pembajakan di laut atas kapal MV Alondra Rainbow pun bisa menjadi salah satu agenda yang harus diselesaikannya berkoordinasi dengan menteri luar negeri RI. ❑
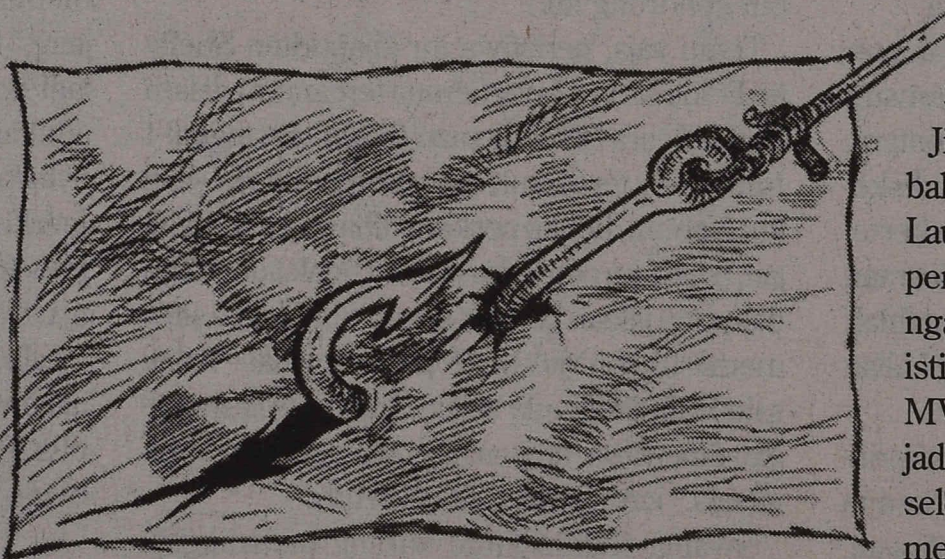
Cuma Satu Saksi, Lolosiah Ommy

Pengadilan Negeri Jakarta Utara cuma menjatuhkan hukuman percobaan bagi Ommy. Padahal, geger kasus itu karena tindak pemerkosaan. Rekayasa?

Susanto Widjaya alias Ommy, 47 tahun, tampak semringah selepas vonis terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pekan silam. Betapa tidak, majelis hakim yang diketuai Jantokartono Moelyo cuma menjatuhkan hukuman lima bulan penjara dengan masa percobaan sepuluh bulan. Berarti, ia masih bisa menghirup udara bebas asalkan selama sepuluh bulan itu tidak berbuat melawan hukum seperti dakwaan.

Tak hanya itu yang membuat Ommy riang. Laki-laki yang disebut-sebut sebagai raja judi di kawasan Kota, Jakarta Barat, itu juga "hanya" dinyatakan bersalah menganiaya Herdony Muchlis alias Donny dan Muhammad Syah. Peristiwa naas itu berlangsung di pelataran parkir Diskotek Stadium Jakarta Pusat, medio Oktober 1998. Bahkan, Ommy dan belasan anak buahnya itu membawa paksa kedua laki-laki malang itu ke rumahnya di Sunter, Jakarta Utara.

Padahal, ada satu orang lagi yang ikut dibawa serta, yaitu Shelly Khairunnisa. Perempuan berkulit kuning langsat ini dikenal sebagai kawan dekat Dony. Saat itu, ia dan kawan-kawannya tengah melewatkan akhir pekan di diskotek tersebut. Tiba-tiba saja, beberapa anak buah Ommy menghampiri Dony dan Syah. "Anda ditunggu Ommy di pelataran parkir," ujar salah seorang dari mereka.

Tanpa ada rasa curiga, Dony dan Syah pun bergegas ke sana. Kedua orang ini memang bukan orang asing bagi Ommy. Sementara, Shelly dibiarkan menunggu di dalam diskotek. Namun, apa lacur, ketika keduanya bertemu bos bermata sipit itu, bukan pembicaraan bisnis yang didapat, justru bogem mentahlah yang mereka terima. "Pokoknya utang kalian harus segera dibayar," ujar Ommy.

Tidak cukup dengan itu, Ommy memerintahkan anak buahnya memasukkan kedua korban ke dalam mobil yang telah disiapkan. Nah, ketika itulah Shelly muncul. Tanpa banyak membuang waktu, ia pun ikut dibawa. Dari situlah malapetaka bagi perempuan berparas ayu itu dimulai.

Para terculik itu rupanya diboyong ke rumah Ommy yang luas di kawasan Sunter. Setengah diseret, Donny dan Syah dibawa ke sebuah ruangan. Sementara, Shelly dibawa Ommy ke ruangan lain. Lalu, adegan berikutnya, perempuan itu pun diperkosa laki-laki berambut gondrong itu.

SUARA PEMBARUAN

PERSIDANGAN SHELLY. *Terjadi penyunatan sangkaan.*

Tentu saja, peristiwa itu dilaporkan Shelly ke Polda Metro Jaya. Semua tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 4 Juni 1999, termasuk peristiwa pemerkosaan itu. Namun, ketika perkara dibawa ke meja hijau, peristiwa pemerkosaan itu tidak ada dalam dakwaan jaksa. Lo, kok bisa? "Untuk apa saya memasukkan dakwaan pemerkosaan, kalau saksi lain tidak ada selain Shelly yang mengaku diperkosa. Itu kan membuang-buang waktu saja," kata Jaksa Eddy Effendy.

Sayang, Hakim Janto kurang menanggapi "penghilangan" satu sangkaan dalam BAP yang dibuat polisi itu. "Mereka hanya menerima apa yang diajukan jaksa," ujar Ferry Firman, pengacara Shelly, usai menanyakan hal tersebut kepada majelis hakim. Alasannya, sesuai dengan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berhak mengubah dakwaan.

Toh, Ferry tetap mencium kejanggalan. Hal ini terasa sejak ditangani aparat kepolisian. "Yang dilaporkan itu kan ada perbuatan asusilanya. Tapi, mereka tidak memanggil saksi tentang itu," kata Ferry. Dan, ketika berkas disampaikan ke kejaksaan, penuntut umum pun tidak menggunakan wewenangnya untuk mengatakan berkas tersebut tidak sempurna. "Kalau ia jaksa yang baik, seharusnya mengembalikan berkas yang tidak sempurna itu kepada polisi," katanya lagi.

Rekayasa itu sendiri, menurut Ferry, tidak lepas dari campur tangan bekas orang penting di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. "Ia sempat menyarankan agar Shelly menerima sejumlah uang yang ditawarkan Ommy dan memintanya agar kasus ini tidak diperpanjang," tutur Ferry. Kini, setelah perwira itu tak lagi duduk di posnya, Ferry kembali mengadukan kasus perkosaan yang dialami kliennya itu. "Saya akan laporkan lagi perbuatan pemerkosaan itu. Saya ingin lihat, bagaimana profesionalisme polisi setelah reformasi ini," ujarnya.

Lalu, bagaimana halnya dengan Ommy? "Kalau orang tanya saya ini bagaimana, saya pasti bilang saya orang baik. Kesabaran itu buahnya begini," katanya dingin.

Fahmi Imanullah dan Fenty Effendy.

PRAPERADILAN
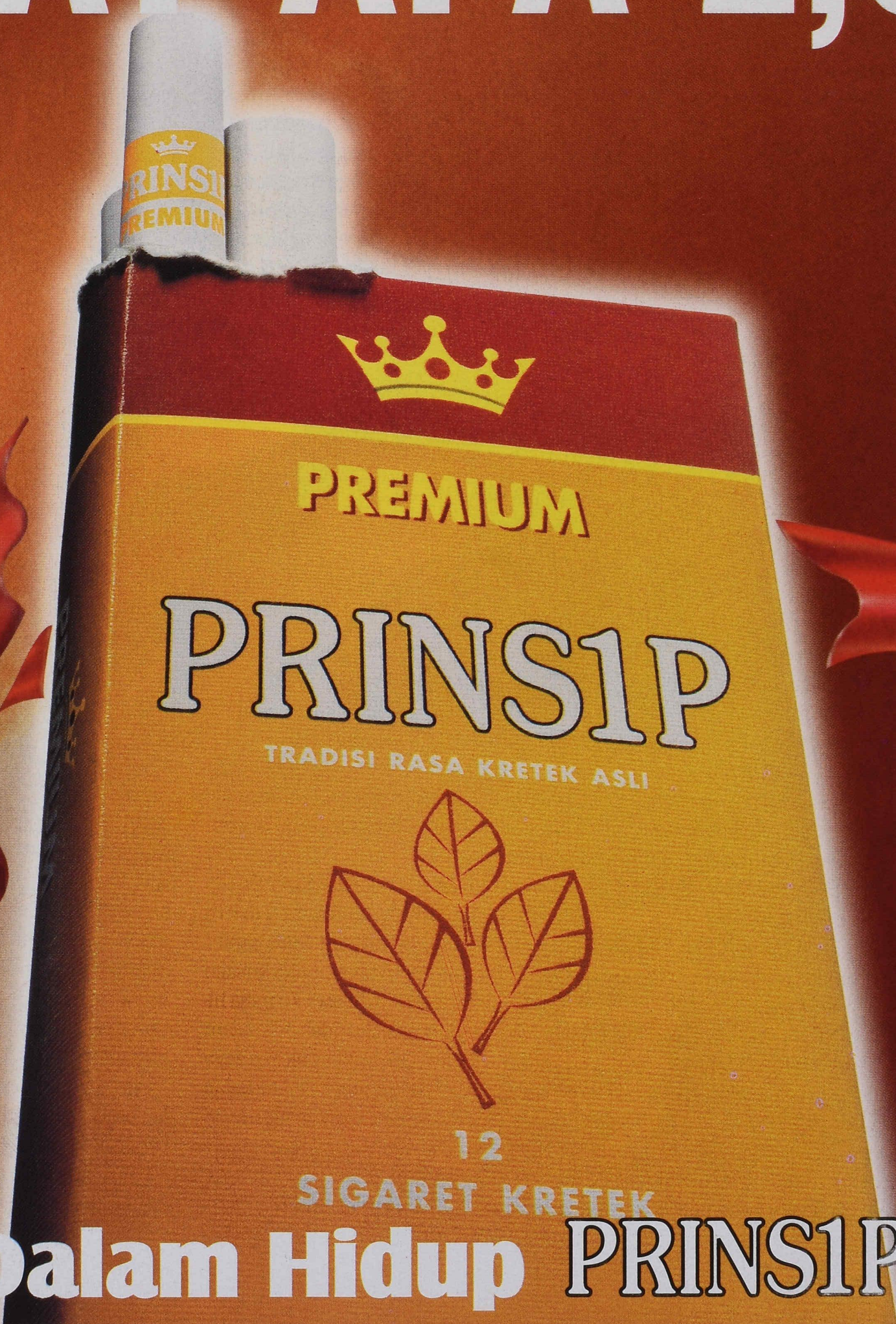
Babak Kedua "Zarima Terpenjara"

Zarima meringkuk kembali di balik jeruji besi karena keputusan bebas bersyaratnya dicabut. Praperadilan yang ia ajukan pun gugur.

Rabu malam pekan lalu, Zarima Mirafsur digelandang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang. Tentu, itu bukanlah akting, seperti pernah ditawarkan seorang produser kepada bintang sinetron yang kejeblos di penjara akibat kasus ekstasi pada 1996. Kali ini, ia memang harus meringkuk lagi dalam kepengapan LP. Maklumlah, Zarima melanggar pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Menteri Kehakiman yang berlaku hingga Oktober 2001.

Semua itu akibat ulah Zarima sendiri yang kepergok berduaan dengan Ahian Santosa di sebuah apartemen, 11 November silam. Bukan soal berduaan itu yang menjadi masalah. Tapi, di kamar kedua insan berlainan jenis itu ditemukan sejumlah shabu-shabu dan ekstasi. Meski setelah dilakukan tes urine, bintang iklan program perampingan tubuh itu dinyatakan negatif, menurut Kaditserse Polda Metro Jaya Kolonel Alex Bambang Riatmodjo, "Dari pemeriksaan, narkotik yang kami sita itu milik Zarima."

Karena itulah, polisi beralasan menangkap dan menahan si "ratu ekstasi" tersebut. Apalagi, sebelumnya, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra menyatakan status bebas bersyarat Zarima dicabut sementara. "Bila terbukti melanggar tindak pidana, baru kita cabut secara tetap," katanya kepada FORUM. Sebaliknya, kata Yusril, jika dalam persidangan ternyata tidak terbukti, status bebas bersyarat itu akan diberlakukan kembali.

Namun, bagi polisi, tampaknya, masuknya Zarima ke penjara adalah target utama mereka. Sebab, jauh hari sebelum persidangan digelar, "Dakwaan terhadapnya sudah kami susun berlapis-lapis. Kecil kemungkinan ia bisa bebas," kata Alex. Kalaupun hakim kelak memutuskan Zarima bukan pemilik barang setan tersebut, Alex masih punya kartu truf untuk menyeret pesakitan kasus narkoba yang pernah "melarikan diri" ke Amerika Serikat itu. "Zarima dianggap lalai tidak melaporkan keberadaan kejahatan, pemakai, dan pengedar narkotik kepada polisi," ujar mantan Kapolres Bekasi itu.

Optimismenya memang tidak terlalu salah. Jika melihat Surat Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No E.06-PK tahun 1992 tentang bebas bersyarat, kecil kemungkinan Zarima lolos dari jerat penjara. Pasal 13 ayat (1)-nya antara lain menyebutkan, tahanan akan dicabut pemberian bebas bersyaratnya jika bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, hidup tidak teratur, sampai malas bekerja. Sekecil apa pun, jelas ketentuan itu ditabrak Zarima.

ANNAS

ZARIMA KETIKA DI LP. *Kecil kemungkinan bebas kembali.*

Ada juga "dosa" lain Zarima yang makin mengecilkan peluangnya menerima kembali ketentuan bebas bersyarat. "Wajib lapor sebulan sekali ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tidak ia lakukan," kata Dirjen Pemasyarakatan, Hasanudin. Menurut catatan kejaksaan, terakhir kali kewajiban tersebut dipenuhi pada 10 Juli silam. Padahal, ia telah berulang kali dipanggil.

Lantas, bagaimana pengakuan Zarima? "Saya terjebak. Saya bukan pemakai dan pemilik narkoba itu," katanya kepada FORUM beberapa waktu yang lalu. Bahkan, bagi mantan atlet bulu tangkis itu, perlakuan polisi jelas melanggar aturan. Melalui pengacaranya, Ali Mazi dan Petrus Bala Pattyona, ia mengajukan gugatan praperadilan atas penangkapan dan penahanan tidak sah yang dilakukan polisi.

Sayang, permohonan praperadilan itu dinyatakan gugur oleh Hakim Maulida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat lalu. Dalam pertimbangan hukumnya, Maulida menganggap Zarima selaku pemohon tidak serius dalam mengajukan gugatannya. Ini terbukti dari ketidakhadirannya di sidang. Sementara, surat kuasa yang dikantongi pengacaranya menyatakan bahwa mereka "mendampingi", bukan "mewakili" pemohon. Karena itu, kehadiran pemohon sangat penting.

Mendengar alasan tersebut, Ali dan Petrus cuma bisa tersenyum kecut. Menurut Ali, ada upaya pihak tertentu yang mempersulit kehadiran Zarima. Siapa? "Ya aparat," ujarnya singkat. Logikanya sederhana: keputusan untuk "mengeluarkan" Zarima yang pesakitan tentunya di tangan aparat. Karena itulah, ia berencana mempraperadilankan kembali Kapolda Metro Jaya, pekan ini. "Kami masih bisa menggugat lagi karena materinya kan belum dibahas," kata Ali.

Bagaimana peluang Zarima? Kita tunggu saja babak lanjutan lakon "Zarima Terpenjara" itu.

Johan Budi SP dan Dedi Hermawan

GUGATAN

Tanah Metal nan Terus Membara

Tanah di Jalan Metal, Medan, menyimpan segudang perkara. Lalu, siapa yang paling berhak atas tanah bekas pengungsi Aceh keturunan Cina itu?

Kalau ada perkara hukum yang paling *njelimet,* maka, sengketa tanah seluas 10 hektare di Jalan Metal, Kelurahan Tanjung Mulia, Medan Deli, pasti masuk nominasi. Bukan karena obyek sengketanya yang besar, tapi lantaran jumlah pihak yang berperkara kian hari kian banyak. Sekarang saja, Pengadilan Negeri Medan tengah menangani dua perkara dengan obyek yang sama.

Tak mengherankan jika persidangan menyangkut tanah Metal—begitu biasanya disebut—mengundang perhatian khalayak penghuni areal yang menjelma menjadi permukiman itu. Bahkan, 3 November lalu, sempat terjadi kericuhan di Pengadilan, gara-gara 200-an warga Jalan Metal tidak puas dengan sikap majelis hakim. Sebab, kasus gugatan ahli waris Tan Hong Seng melawan Soh Pek Sui itu ditunda untuk kelima kalinya. "Tiap hari ditunda. Ditunda sampai kapan? Mana keadilan?" ujar puluhan warga bersahut-sahutan.

Dalam perkara ini, ahli waris Tan—didukung mayoritas warga—mempertanyakan keabsahan jual-beli tanah yang diklaim Soh Pek Sui sebagai miliknya. Menurut Soh, ia membeli dari ahli waris Sultan Deli, pada 1983. Padahal, sejak 1961, tanah yang didiami para bekas pengungsi Aceh, yang mayoritas keturunan Cina itu, diakui sebagai milik warga bernama Tan Hong Seng.

Bahkan, izin pemakaian tanah itu sebagai lokasi penampungan 404 kepala keluarga pengungsi pada 1970-an oleh Pemda Sumatra Utara datang dari Tan. Hal itu yang dibuat di depan notaris. Karena itu, ketika bermunculan gugatan banyak pihak terhadap areal itu, warga mulai waswas sekaligus marah.

Dalam sidang yang akan dilanjutkan awal Desember ini, ahli waris Tan juga menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan. Sebab, instansi ini telah mengeluarkan edaran tentang kepemilikan tanah oleh Soh Pek Sui. Menurut hakim, penundaan sidang tersebut lantaran BPN Medan tak kunjung hadir untuk menyampaikan kesimpulan.

Alasan itu tampaknya tidak membuat warga Metal puas. Pasalnya, majelis hakim yang dipimpin Ketua PN Medan Syamsubril Manan justru mengabulkan gugatan Soh untuk mengeksekusi serta-merta rumah milik Tjin Tjun Mauw. Tjin adalah satu dari empat warga yang digugat Soh karena enggan membayar ganti-rugi tanah rumahnya kepada Soh. "Dulu, tanah itu dipinjam secara kolektif. Mengapa eksekusinya sendiri-sendiri?" kata Tjin.

Menurut Tjin, ia dan warga yang tinggal di

REDYANTO

LAHAN YANG DISENGKETAKAN. *Klaim yang beranak-pinak.*

areal sengketa punya alasan untuk tidak membayar ganti rugi yang diminta. "Kami khawatir mau bertransaksi. Soalnya, pemilik tanah itu belum jelas," ujarnya. Kekhawatiran Tjin cukup beralasan. Soalnya, jika dirunut ke belakang, silang sengketa menyangkut tanah ini memang melelahkan.

Bermula pada 1979, ketika gugatan pertama dilayangkan ahli waris Tan terhadap Aman Daulat, yang menjual tanah tersebut kepada Tan, pada 1961. Akta jual-beli dibuat di hadapan notaris Ong Kim Lian. Rupanya, kendati sudah dijual, akta tanah masih atas nama Aman. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sumatra Utara menetapkan sita jaminan atas tanah tersebut. Artinya, tidak boleh ada transaksi jual-beli. Tapi, di luar sidang, ahli waris Tan tetap bernegosiasi dengan Aman. Hasilnya, untuk pengakuan hak milik itu, para ahli waris harus membayar ganti rugi Rp 36 juta kepada Aman. Lalu, kedua pihak sama sekali tidak menyinggung soal status sita jaminan tersebut.

Pada 1981, muncul gugatan baru dari ahli waris Sultan Deli Tengku Harun Al Rasyid, yang diwakili Tengku M. Jufri Rasyid dan Siti Munadjad. Mereka menggugat Aman dan Tan karena dianggap melakukan jual-beli tidak sah. Padahal, menurut Jufri, tanah tersebut bagian dari tanah Grand Sultan (GS) No. 265 tahun 1926. Upaya ini kandas, ketika 1985, MA menyatakan sertifikat tanah atas nama Aman itu sah.

Bersamaan dengan turunnya putusan MA, ahli waris Sultan Deli yang lain, Tengku Muhammad Danil, turut menggugat Aman. Selain mempertanyakan keabsahan transaksi antara tergugat dan Tan, ia juga mengklaim sebagai orang yang berhak atas tanah itu, berdasarkan alas hak GS No. 265 tahun 1916. Atas gugatan itu, giliran ahli waris Tan yang tidak mau tinggal diam. Bagaimanapun, dari tanah seluas 70 hektare yang diklaim Danil, 10 hektare di antaranya telah dibeli Tan dari Aman. Mereka pun mengajukan gugatan intervensi. Akhirnya, gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh MA.

Tak pelak, sengketa bertambah rumit. Pasalnya, putusan MA yang turun pada 1988 itu menetapkan ahli waris Sultan Deli sebagai pemilik sah atas tanah seluas 70 hektare di Jalan Metal. Anehnya, ketika akta GS itu dicek ke BPN, alas hak yang dimaksud tidak tercatat dalam register.

Sementara status tanah menggantung, sejak 1992, Soh terus bergerilya meminta warga untuk membeli lahan yang mereka tempati darinya. "Kami diminta membuat pernyataan bahwa selama ini kami meminjam pakai lahan tersebut," tutur Tjin. Sementara itu, ahli waris Sultan Deli pun mengajukan permohonan eksekusi tanah Metal. Pada 1994, mereka mengeksekusi lahan di Kantor Lurah Tanjungmulia.

Anehnya, belakangan, kedua pihak yang saling berebut itu membuat perjanjian baru. Intinya, ahli waris Sultan Deli mengakui kepemilikan Soh atas tanah tersebut. Disusul kemudian dengan SK Menteri Agraria pada 1994 yang menyebutkan, tanah tersebut tanah negara. Tapi, untuk mendapatkan sertifikat dari Ibin Yahya yang menerima kuasa substitusi dari Tengku Ramli, salah seorang ahli waris Sultan Deli. "Saat transaksi berlangsung, kuasa substitusi selama tiga bulan itu sudah habis," ujar Madjid.

Masing-masing pihak boleh-boleh saja berkilah dan punya argumentasi. Tapi, warga yang bermukim di Jalan Metal sendiri dirundung kecemasan. Masalahnya, selain melancarkan intimidasi langsung, pihak Soh dinilai warga sengaja mengancam mereka untuk segera membeli tanah yang ditempatinya. Soh pun sempat memasang pengumuman di koran

WARGA METAL DI PENGADILAN. *Bingung siapa yang benar.*

hak milik, warga harus lebih dulu membayar ganti rugi kepada Soh.

Begitulah, sampai kini, ratusan warga yang menempati tanah di Jalan Metal tidak yakin, siapa yang berhak atas tanah itu. "Jangan-jangan, kami membayar ke sini, yang di sana balik menggugat," ujar Tjin. Kuasa hukum ahli waris Tan, Mardjoko, pun ikut pusing. "Sebaiknya, majelis hakim kembali menegaskan sita jaminan atas areal sengketa itu. Supaya tidak ada yang memperjualbelikannya selama perkara masih berjalan," kata Mardjoko.

Adapun kuasa hukum Soh, A. Madjid Hutagaol, tetap yakin bahwa kliennyalah pemilik lahan tersebut. Sebab, ada akta pelepasan hak atas tanah No. 22 tahun 1983 di depan notaris. Selain itu, kata Madjid, kendati ada ahli waris Sultan Deli lain yang mencoba mengugat, akhirnya mereka bisa berdamai.

Madjid juga menuding perjanjian jual-beli antara Tan dan Aman tidak sah. Sebab, Aman sendiri membeli tanah itu secara tidak sah lokal, yang memberi tenggat bagi para warga untuk membeli tanah itu.

Bagi yang berkeras menolak, Soh mengambil langkah hukum dengan menggugat mereka ke pengadilan. Dari empat warga yang digugat, baru perkara Tjin saja yang diputus belum lama ini. "Putusan eksekusi atas rumah saya itu hanya untuk menakut-nakuti warga Metal," ujar Tjin. Tapi, Madjid membantah bila kliennya telah mengintimidasi warga. "Mereka hanya mencari-cari alasan untuk tidak membayar ganti rugi. Hanya mau enak-enak di atas tanah itu," katanya.

Apa pun, perkara ini agaknya tidak akan cepat selesai. Karena itu, sedikitnya 200 warga Metal telah pula mengadukan masalahnya ke DPRD Sumatra Utara, pertengahan bulan ini. Belum jelas bagaimana hasilnya. Yang pasti, tergantung pada kebijaksanaan hakim untuk menelusuri kembali, siapa yang berhak atas tanah dengan segudang masalah itu.

Sen Tjiauw dan Emil W. Aulia (Medan)

KEDOKTERAN

Peradilan bagi Si Baju Putih

Ide peradilan profesi disambut sumbang beberapa praktisi hukum. Semangat melindungi korps bisa dihindari jika diselesaikan di peradilan umum.
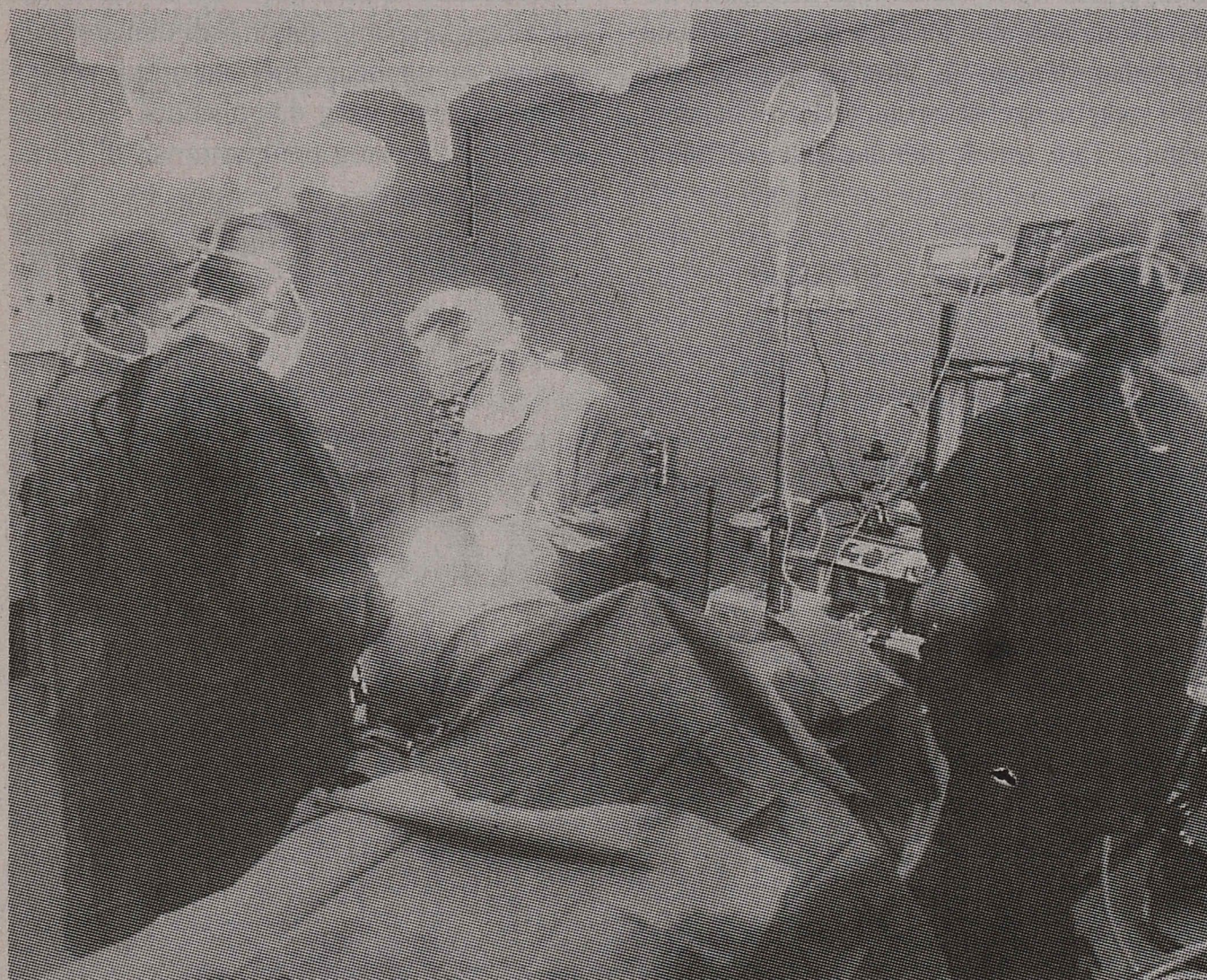
DOK. FORUM

DOKTER SEDANG MELAKUKAN OOPERASI. *Agar nyaman bekerja.*

Sebuah usul kontroversial datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pekan lalu, atas nama profesionalisme dan perkembangan serta risiko yang dihadapi di bidang kedokteran, Ketua Umum IDI Merdias Almatsier melontarkan gagasan pembentukan peradilan profesi di bidang ini. "Praktek dokter bisa menyebabkan manusia menjadi cacat, bahkan mati," ujarnya.

Karena itu, kata Merdias, pihaknya kini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Praktek Kedokteran, yang salah satu bagiannya mengatur soal Peradilan Profesi. Tujuannya, memberi kenyamanan bekerja bagi dokter dan mendorong mereka bekerja sesuai dengan standar yang dituntut. "Kalau sedikit-sedikit ada masalah lalu masuk ke peradilan umum, ketenangan bekerja menjadi terganggu. Maka, terjadilah yang disebut *defensive medicine*," ujar Merdias. Maksudnya, dokter akan cenderung bersikap defensif, sehingga menolak menangani pasien yang gawat karena takut gagal.

Merdias mengakui, selama ini memang ada Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) yang menjalankan fungsi pengawasan praktek kedokteran. Tapi, karena MKEK hanya asosiasi profesi dari lembaga swasta, mereka tidak memiliki kekuatan hukum dan imunitas dalam putusannya. Menurut Merdias, berbeda dengan di Belanda, Inggris, dan Singapura yang memiliki *medical council* tersendiri.

Dengan kehadiran peradilan itu, kata Merdias, kalangan dokter tidak perlu lagi dihantui kekhawatiran bakal dituntut secara pidana. "Jika ada masalah, peradilan inilah yang menangani dan menjatuhkan sanksi, baik administratif maupun denda," ujarnya. Secara konsep, peradilan khusus ini akan ditangani oleh hakim-hakim yang mengerti hukum kedokteran. Karena itu, pasien yang merasa dirugikan tidak perlu lagi menuntut di pengadilan umum, kecuali jika ada indikasi kesengajaan. Merdias merujuk pada peradilan khusus, seperti peradilan militer, agama, ataupun niaga.

Perihal rujukan itulah yang kemudian mengundang pertanyaan kalangan praktisi hukum. Menurut Ketua YLBHI Bambang Widjojanto, suatu RUU ataupun lembaga peradilan profesi haruslah dibentuk karena alasan mendasar. "Rujukan dasarnya apa? Jangan sampai nanti semua profesi membentuk peradilan sendiri, yang alih-alihnya melindungi kepentingan korps," ujarnya.

Bambang melihat, sebagai sebuah gagasan yang sifatnya untuk kepentingan internal organisasi, peradilan profesi sah-sah saja. Tapi, jika peradilan ini dicantolkan dalam kekuasaan kehakiman, seperti peradilan militer atau niaga, gagasan ini agak aneh. Apalagi, jika mereka hanya menjatuhkan putusan administratif. "Bisa saja ujung perkaranya berdalih kesalahan administratif," kata Bambang. Padahal, jamaknya kasus kedokteran bisa berakibat fatal, misalnya kehilangan nyawa.

Pendapat senada datang dari Benyamin Mangkoedilaga, anggota Komnas HAM yang juga mantan hakim. Menurut dia, persoalan menyangkut praktek kedokteran juga bisa diatasi di peradilan umum. "Buat apa ada peradilan baru. Nanti insinyur minta, notaris juga begitu," ujarnya beralasan.

Bagi guru besar Universitas Pakuan Bogor, Paulus E. Lotulung, gagasan peradilan profesi itu sebenarnya bukan barang baru. Di beberapa negara maju, seperti Prancis atau Belanda, memang ada institusi sejenis itu. L'ordre des Medecins di Prancis, misalnya, berwenang menangani berbagai keluhan atau kasus malpraktek. Hanya, kata Paulus, putusan final tetap di tangan peradilan umum tertinggi, semacam lembaga kasasi di Indonesia.

Karena itu, Paulus mengingatkan agar peradilan profesi jangan sampai mengambil kewenangan peradilan umum yang sudah ada. Artinya, jika seorang dokter terbukti melakukan malpraktek, ia bisa saja dibawa ke perkara perdata atau pidana sesuai dengan jenis kesalahannya. Pendek kata, peradilan ini idealnya tetap berada di bawah IDI atau MKEK. "Dengan pengajuan RUU Praktek Kesehatan, keberadaan IDI akan punya dasar hukum lebih tegas," kata Paulus yang juga hakim agung.

Bagaimanapun, kata Paulus, putusan peradilan medis justru bisa menjadi acuan bagi hakim peradilan umum untuk menjatuhkan vonis bagi yang bersangkutan. "Dalam hal ini, tidak ada *nebis in idem*," ujarnya. Seperti kata Bambang, kenyamanan bekerja tidak tergantung pada ancaman sanksi. Profesionalismelah kuncinya.

Sen Tjiauw, Anton B., dan Anas Syahirul (Purwokerto)

POLITIK PANGAN DAN TEKANAN IMF

DIDIK J. RACHBINI
Pengamat Ekonomi

Krisis ekonomi yang meluas menyebabkan sektor pertanian tradisional menghadapi beban berat akibat tekanan limpahan tenaga kerja dari kota dan pinggiran kota dan tekanan inefisiensi industri hulu yang mendukung sektor pertanian (pupuk, pestisida, dan lainnya). Ancaman itu akan terjadi pada sistem produksi dan perdagangan pangan, terutama beras, sebagai bagian dari kesempatan kerja yang luas bagi rakyat sekaligus sumber bahan makanan pokok.

Tetapi, sistem produksi dan perdagangan komoditas beras itu kini nasibnya berada di tangan IMF karena tidak ada satu sektor pun yang bisa lepas dari obyek perundingan dengan IMF. Begitu juga nasib sektor pertanian pada umumnya, yang digiring ke arah liberalisasi tanpa arah dan tanpa kepastian bagi petani, terutama menyangkut risiko-risiko yang akan dihadapi. Jadi, nasib petani dan sistem distribusinya betul-betul sangat tergantung pada lembaga multilateral ini.

Saya sendiri berpendirian bahwa ekonomi pasar merupakan jalan terbaik untuk memperkuat struktur dan sistem ekonomi nasional. Tetapi, pasar yang sangat liberal dan proses ke arah persaingan bebas yang tidak terukur akan menyebabkan berbagai implikasi internal, yang mungkin tidak bisa dihindari pelaku-pelaku ekonomi tradisional yang tidak sepenuhnya siap. Artinya, pemerintah tetap harus memberikan perlindungan jika proses liberalisasi yang ekstrem ala IMF tersebut akan berakibat fatal. Tetapi, proteksi yang diberikan juga harus terhindar dari perburuan rente ekonomi oleh sekelompok pengusaha atau industri tertentu saja.

Proteksi tidak bisa dilakukan seperti yang diberikan kepada industri gandum, dengan alasan untuk kebutuhan pangan rakyat atau industri gula atas nama petani. Tetapi, pasar bebas tidak bisa dibuka secara naif untuk petani beras yang posisinya subsisten dan sarat dengan beban-beban ekonomi pendukungnya. Selain itu, sistem produksi beras juga bersifat sangat tradisional, yang tidak bisa digiring begitu saja ke dalam pasar bebas.

Letter of intent RI-IMF yang lalu menggeneralisasi seluruh komoditas pertanian dengan memaksakan semuanya harus bersaing dengan luar tanpa perhitungan risiko dan kemampuan internal dari sistem pertanian Indonesia yang tidak sepenuhnya siap. IMF dengan visi *mainstream* menyederhanakan persoalan bahwa pertanian subsisten di sektor pangan menjadi efisien jika diliberalisasi secara ekstrem. Proteksi bagi petani ditiadakan dan tarif yang dipatok IMF dalam *letter of intent* untuk berbagai produk pertanian maksimal hanya 5 persen. Desain kebijakan seperti ini betul-betul konyol karena di AS sendiri proteksi terhadap sektor pertanian begitu tinggi dan beragam. Hal yang sama dilakukan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Sementara itu, Jepang gila-gilaan memproteksi petaninya, sehingga harga beras di dalam negeri sangat tinggi. Lalu, apakah adil petani didorong ke pasar liberal sementara lainnya diproteksi demikian ketat ? Dan, angka proteksi 5 persen di atas adalah angka naif, yang membuktikan keperkasaan IMF mendikte banyak hal sekaligus terasa tekanan IMF betul-betul tak dapat dibendung untuk mengarahkan sistem ekonomi ke dalam bentuk paling liberal.

> *"Sistem produksi dan perdagangan komoditas beras itu kini nasibnya berada di tangan IMF karena tidak ada satu sektor pun yang bisa lepas dari obyek perundingan dengan IMF"*

Sistem produksi pangan di Indonesia jangan disamakan dengan sistem industri normal, seperti yang terjadi di negara-negara maju. Sistem pertanian pangan yang subsisten pada sebagian besar golongan masyarakat tidak bisa diangkat sebagai bagian dari institusi ekonomi yang harus bersaing secara bebas. Sistem ini tidak bisa mengikuti logika pasar normal. Dimensi-dimensi sosial dan budaya serta aspek historisnya tetap harus dipertimbangkan sebagai bagian dari masalah nonpasar, yang melekat di dalam sistem masyarakat. Jika persaingan dengan luar negeri dibuka tanpa mempertimbangkan aspek-aspek nonpasar itu, harapan akan terwujudnya efisiensi tidak akan tercapai. Yang terjadi justru sebaliknya, yakni kehancuran sistem distribusi secara cepat atau perlahan-lahan.

Masalahnya, pada tahap sebelum terjadi proses pasarisasi secara internasional adalah bagaimana mentransformasi sistem pertanian subsisten tersebut ke arah yang lebih modern. Posisi subsisten seperti ini harus dipertimbangkan secara matang karena petani tidak bisa begitu saja langsung disorongkan ke pasar persaingan internasional dengan risiko kalah.

Selain itu, volume perdagangan internasional untuk beras hanya sedikit, sehingga di pasar internasional pun terjadi sistem pasar yang tidak sempurna. Suplai beras paling tidak hanya dikontribusi oleh beberapa negara, seperti Thailand, Vietnam, AS, dan sesekali RRC. Jika Indonesia kekurangan beras karena sistem produksinya hancur, pasar internasional juga bermasalah karena pasok akan hilang sama sekali dan harga beras akan melambung. Kebutuhan devisa untuk mengimpor beras akan menjadi sangat besar.

Di dalam negeri kita, sistem produksi pun tidak sempurna dan tingkat harga lebih banyak ditentukan oleh intervensi pemerintah melalui penetapan harga dasar dan keterlibatan pemerintah—melalui Bulog—dalam penyerapan dan pasokan pangan. Nah, bagaimana mungkin sistem produksi yang subsisten dan dengan intervensi pemerintah yang besar itu dapat digiring ke arah persaingan internasional dengan penetapan tarif sampai nol persen ?

Kita menginginkan perdagangan yang *fair*, bukan sekadar bebas sebebas-bebasnya dengan risiko yang ditanggung oleh masyarakat banyak, khususnya petani. Tetapi, saya sendiri tidak setuju dengan sikap proteksionis dan posisi liberalis naif. ❑

Menterinya Gus Dur Akhirnya Mundur

Hamzah Haz diumumkan mengundurkan diri sebagai menteri. Benarkah dia diberhentikan?

Gus Dur memang dikenal sebagai kiai yang gemar bicara ceplas-ceplos. Gaya ini tak berubah meski dia telah menjadi presiden. Ucapannya sering membuat "ger" dan tak jarang pula membuat gerah orang lain. Beberapa waktu lalu, ceplosan Gus Dur di hadapan warga Indonesia dan Amerika di Washington DC membuat gerah para menterinya. Pernyataannya tentang tiga orang menteri yang diduga terlibat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) menggumpal menjadi bola api gunjingan liar.

Beberapa menteri yang dikait-kaitkan dengan pernyataan Gus Dur itu, antara lain, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin) Hamzah Haz, Menaker Bomer Pasaribu, Menperindag Yusuf Kalla, dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra. Para menteri itu berusaha membantah. Namun, sejauh ini, hanya nama Yusril Ihza Mahendra yang telah diklarifikasi Gus Dur.

Sementara, Hamzah Haz, 59 tahun, yang diisukan menerima uang Rp 14 miliar dari skandal Bank Bali, bereaksi dengan menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Terakhir, pada 20 November lalu, Hamzah pernah melontarkan hal serupa di hadapan para wartawan seusai pelantikan wakil panglima TNI, KSAD, dan Kabakin di Istana Negara. Pria kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat ini menegaskan keinginan pribadinya untuk lebih aktif berkiprah di PPP, partai yang membesarkannya.

Teka-teki Hamzah Haz ini akhirnya terjawab dalam konferensi pers Gus Dur yang digelar di Hotel Indonesia pada Jumat sore, 26 November, seusai membuka Kongres Ikatan Notaris Seluruh Indonesia. Gus Dur menegaskan, Hamzah Haz mengundurkan diri sebagai Menko Kesra dan Taskin. "Beliau *ndak* sempat *ngurusin* partai karena repot dengan kerjaan sebagai menteri," kata Gus Dur.

Basri Hasanuddin, 50 tahun, pun ditunjuk menggantikan Hamzah. Pria asal Sulawesi Selatan ini benar-benar tak menyangka ketika mendengar tawaran Gus Dur melalui telepon ke rumahnya. "Kalau Bapak percaya, saya siap saja," jawab mantan Rektor Universitas Hasanuddin itu, yang namanya diusulkan oleh Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dengan percaya diri.

Di lain pihak, mundurnya Hamzah Haz membuat heran banyak kalangan. "Sebelum berangkat ke Lirboyo, Kediri, Pak Hamzah sudah menyatakan tidak akan mengundurkan diri, ini mengejutkan saya", kata Suharso Monoarfa, salah seorang tokoh PPP yang dikenal dekat dengan Hamzah.

Sebelumnya, rencana pengunduran diri Hamzah sempat dibahas di DPP PPP. "Memang, kami pernah membicarakan pengunduran dirinya," kata Faisal Basyir, salah seorang petinggi DPP PPP yang namanya bersama Tosari Widjaya sempat disebut sebagai pengganti Hamzah. Menurut Faisal, Hamzah menyadari ada kendala bagi partai untuk melancarkan sikap kritis terhadap pemerintah jika ia tetap menjabat menteri. Tapi, kepastian Hamzah mengundurkan diri belum ada waktu itu. "Saya dan beberapa teman malah menyarankan untuk tidak mundur," kata Tosari, salah seorang ketua DPP.

Seorang tokoh "Poros Tengah" dari Partai Amanat Nasional, A.M. Fatwa, menyatakan, menurut yang diketahuinya, Hamzah tidak pernah mengajukan permohonan mundur secara tertulis kepada Gus Dur. Jadi, kata tokoh Tanjungpriok ini, pengumuman Gus Dur di Hotel Indonesia itu belum menjelaskan pengunduran diri Hamzah sebagai pengabulan permohonan atau pemberhentian. "Sekalipun Gus Dur menyatakan bahwa Hamzahlah yang memilih mengundurkan diri dari jabatan menteri demi partainya," ujar Fatwa.

Hamzah sendiri enggan menjelaskan latar belakang pengunduran dirinya. Sampai berita ini ditulis, Hamzah tidak mau menjawab pertanyaan FORUM yang menyambangi rumahnya di kawasan Tegalan, Matraman, 26 November malam.

Tapi, seorang sumber FORUM mengatakan, Jumat pagi, Hamzah menemui Gus Dur untuk meminta klarifikasi tuduhan KKN atas dirinya. Hamzah benar-benar kaget ketika sore harinya Gus Dur mengumumkan Hamzah mengundurkan diri karena hal itu tidak dibicarakan dalam pertemuan mereka.

Dalam penilaian pengamat politik Fachry Ali, mundurnya Hamzah Haz tak lebih akibat gaya manajemen Gus Dur ketimbang dugaan KKN. Menurut Fachry, Gus Dur merasa ditantang dengan berbagai isu seputar mundurnya Hamzah dan menggunakan Hamzah untuk merebut loyalitas dari seluruh pembantunya di kabinet. "Kelihatannya, Gus Dur ingin memberi pelajaran kepada para menteri yang berani menantangnya," kata Fachri. Benarkah demikian? Wallahualam.

Victoria Sidjabat, Teguh S. Usis, Yus Ariyanto, Fenty Effendy, dan Moch. Husni.

FAUZAN
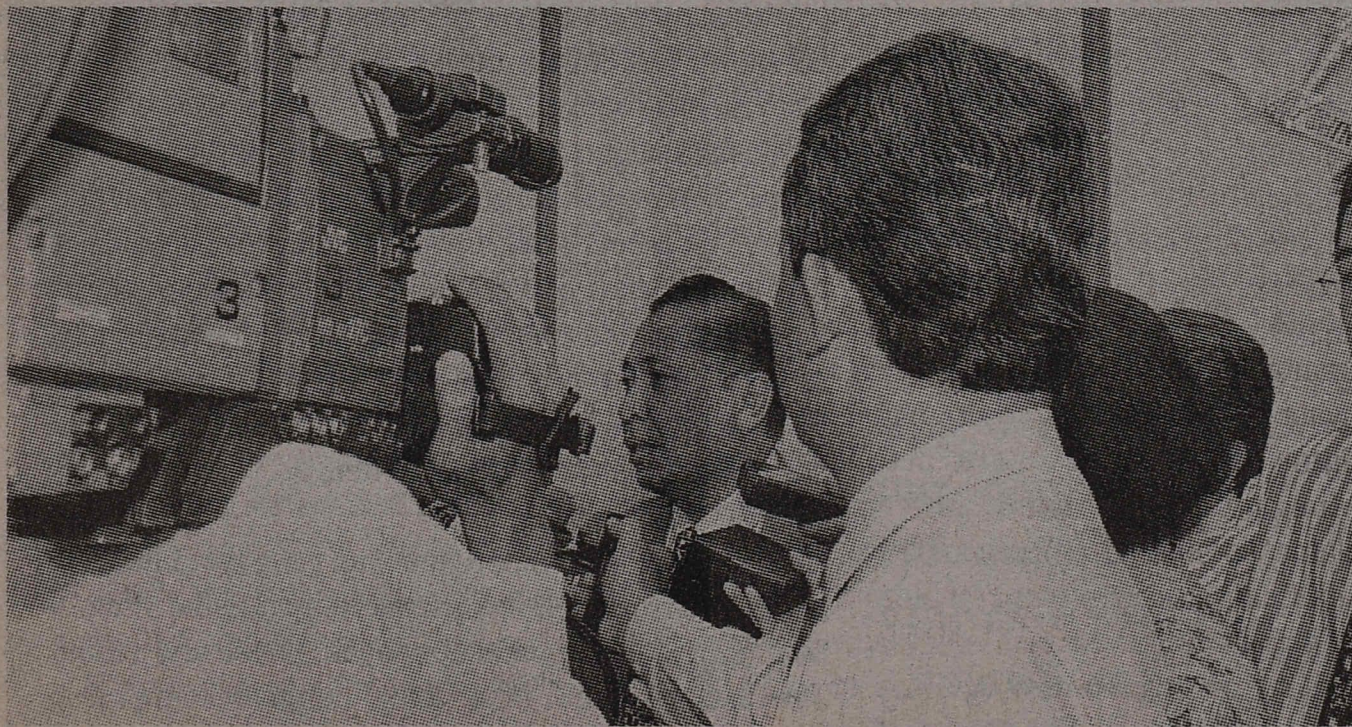
HAMZAH BERSAMA WARTAWAN. *Enggak sempat mengurusi partai.*

Tosari Widjaya: "PPP Diobok-Obok"

Akhirnya, Hamzah Haz jadi juga mundur dari jabatan Menko Kesra dan Taskin. Pengunduran diri Hamzah itu, yang sampai saat ini masih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengundang banyak spekulasi di masyarakat. Apalagi, sebelumnya ia diisukan sebagai menteri yang terlibat masalah KKN. Tapi, apakah pengunduran Hamzah terkait dengan rumor tersebut? Jumat, 26 November lalu, Anton Bahtiar Rifa'i dari FORUM mewawancarai Tosari Widjaya, salah seorang ketua DPP PPP. Berikut petikannya.

Apakah Hamzah Haz pernah membicarakan dengan DPP PPP tentang keinginannya untuk mundur?

Memang, dia pernah menyampaikan keinginan itu. Alasannya, ingin konsentrasi di partai. Tetapi, saya dan beberapa teman menyarankan untuk tidak mundur. Ya, sampai di situ. Berikutnya, saya tidak ada komunikasi lagi.

Kapan Hamzah menyampaikan keinginannya itu?

Yang pernah disampaikan kepada saya itu sekitar tanggal 8 November lalu. Tetapi, saya mengatakan agar dipertimbangkan sungguh-sungguh. Tapi, sebaiknya tidak dilakukan.

Apakah pihak DPP pernah meminta Hamzah untuk terus jadi menteri?

Tidak ada pembicaraan resmi di DPP. Tapi, orang per orang kan tetap menyampaikan keberatan kalau Pak Hamzah mengundurkan diri. Tapi, kalau itu pilihan seseorang, kan itu hak asasi juga. Sebagai kolega di partai, saya sudah memberi saran dan berbagai pertimbangan. Termasuk saya kemukakan, apakah *timing*-nya tepat dalam kondisi seperti sekarang di mana sementara pers sedang mengejar-ngejar Hamzah yang katanya terlibat dengan menteri KKN dan sebagainya? Kalau dilakukan sekarang, kan nanti lalu menjadi pembenar. Kan begitu. Dia mengatakan, "Kalau ada bukti-bukti, silakan saja serahkan kepada kejaksaan."

Tapi pengunduran dirinya ini terkesan aneh...

Kok, Anda yang menganggap aneh? Saya tidak menganggap aneh. Sebab, sejak awal, sebelum sidang umum itu, kan memang pernah disampaikan keinginannya untuk tidak duduk di kabinet karena ingin konsentrasi di partai saja. Karena dia pernah menjadi menteri dan ternyata sibuk, tidak bisa mengurus partai. Itu dulu, sebelum sidang umum. Tetapi, setelah sidang umum, ternyata dia dapat kepercayaan dari presiden untuk duduk pada jabatan menko kesra. Mungkin, setelah dijalani barangkali pengalamannya yang dulu itu terulang lagi, menjadi tidak bisa membagi waktu dengan tugas-tugas yang di partai. Barangkali begitu. Sebab, ketika menyampaikan kepada saya tanggal 8 November itu, dia memang mengatakan, "Saya ingin konsentrasi di partai." Selebihnya saya tidak tahu.

FAUZAN

Bukankah dengan dengan pengunduran diri Hamzah ini, orang kembali mengaitkannya dengan isu menteri yang KKN itu?

Boleh saja. Tetapi, kan Pak Hamzah merasa tidak punya kaitan dengan itu. Ini kepentingan intern partai. Biasa, kan, kalau orang sudah tidak senang, berjalan menunduk pun dibilang penakut. Kalau berjalan kepalanya mendongak sedikit, dibilang sombong. Nah, orang tidak senang kan begitu. Tapi, Pak Hamzah mengatakan, "Biarkan saja. Kalau memang saya punya kaitan dengan itu dan Jaksa Agung bisa membuktikan, silakan saja." Tetapi, menurut Pak Hamzah, ini untuk kepentingan partai.

Apakah isu mengenai KKN tiga menteri itu merupakan upaya menggoyang "Poros Tengah"?

Kalau mengatakan Poros Tengah di dalamnya juga ada PPP, kan? Itu mungkin saja. Umpamanya, Pak Hamzah mulai dituduh sebagai terlibat dengan Bank Bali. Ternyata, di *long form* itu tidak ada. Kemudian, ketika ada tuduhan tiga menteri yang KKN, pers rupanya mengarah kepada Pak Hamzah. Enggak ada cerita lagi. Lalu, sesudah itu, PPP diobok-obok. Macam-macamlah. Itu kan salah satu cara untuk merusak prestasi yang dimiliki "Poros Tengah".

Siapa kelompok yang ingin merusak itu?

Kalau untuk menduga, itu kan dilakukan orang atau kelompok yang sebenarnya tidak puas terhadap hasil Sidang Umum. Sebab, mereka menganggap strateginya selama Sidang Umum diporakporandakan oleh "Poros Tengah".

Apakah Hamzah sendiri pernah mengemukakan kepada DPP PPP mengenai konspirasi itu?

Enggak. Saya juga baca di koran pandangan Pak Hamzah seperti itu juga. Dan, saya pribadi melihat seperti itu juga. Buktinya, kan, itu dilakukan secara sistematis. ▫

ACEH

Perang Mengintip Serambi Mekkah

Menjelang HUT GAM, keinginan masyarakat Aceh untuk merdeka kian berkobar. TNI pun bersiap mengirim pasukan. Adakah solusi selain perang?

M. RIZAL

DEMONSTRAN ACEH DI DPR. *Gairah merdeka memuncak.*

Panas kemelut Aceh sudah terasa di Jakarta. Lihat saja, di Gedung DPR/MPR, 25 November lalu. Sekitar 3.000 orang Aceh dari berbagai kota di Jawa tumplek di sana. Mereka meneriakkan tuntutan yang sama dengan isi spanduk yang mereka usung: "Referendum". Aksi selama tiga jam itu berlangsung damai. Dan, Ketua Fraksi Reformasi DPR, Hatta Rajasa, bersedia menerima 25 wakil mereka. Di antaranya, Gazali Abbas, Tengku Abdurrachman, Shalahuddin Alfatah, dan Tengku M. Daud Mahmud.

Tuntutan orang Aceh sangat gamblang, yakni referendum dengan pilihan merdeka atau tetap bergabung dengan negara Indonesia. Ini ditegaskan Shalahuddin saat berdialog dengan Ketua Fraksi Reformasi. Shalahuddin yang juga Ketua Umum Forum Perjuangan dan Keadilan Rakyat Aceh tersebut mengatakan, tidak ada jalan lain memecahkan konflik di Serambi Mekkah kecuali referendum. Mereka juga meminta agar DPR menolak rencana pemerintah memberlakukan keadaan darurat militer. Jika pemerintah nekat, kata Gazali Abbas, orang Aceh siap berperang. "Jihad adalah pilihan terakhir," ujarnya.

Ucapan Gazali itu bukan gertak sambal. Hampir seluruh masyarakat Aceh, terutama kelas menengah ke bawah, telah bertekad merdeka. Soalnya, mereka sudah bosan terhadap janji-janji pemerintah yang tak kunjung terwujud. "Kepercayaan orang Aceh terhadap pemerintah di Jakarta semakin rendah," ujar Menteri Negara Urusan HAM, Hasballah M. Saad.

Gairah untuk merdeka itu memuncak menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Gerakan Aceh Merdeka (GAM), 4 Desember mendatang. Menurut kabar, mereka bakal mengibarkan bendera Aceh Merdeka di kota-kota sampai desa-desa. Tak mengherankan jika bendera bergambar bulan bintang diapit garis-garis hitam itu kini laris dijual.

Menurut Teungku Ilyas Pasee, sudah lama orang Aceh menginginkan merdeka. Tepatnya, sejak 4 Desember 1974, saat Wali Negara Aceh Teungku Muhammad Hasan di Tiro mengibarkan GAM. "Itu tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi," ujar Panglima Muda GAM wilayah IV Pasee tersebut.

Kini, GAM memang leluasa bergerak. Sebab, Aceh seakan telah menjadi daerah yang tak bertuan. Roda pemerintahan praktis macet total dalam beberapa bulan terakhir. Di daerah-daerah yang rawan, kantor kelurahan dan kecamatan tutup. Ini terjadi lantaran para pegawai negeri ketakutan. Memang, tidak ada jaminan keamanan di negeri paling barat Pulau Sumatra itu. Apalagi, operasi militer sudah lama dihentikan. Hanya polisi yang menjaga keamanan. Itu pun mereka pasif. Tidak ada lagi patroli. Maklum, jika sedikit saja "bergerak", polisi bakal diteror, bahkan dibunuh. Tak mengherankan pula bila Kapolda Aceh Brigjen Bachrumsyah menyerukan agar anggotanya bertahan saja di markas. "Kalau tidak, anak buah saya akan habis," ujarnya kepada FORUM.

Yang berperan sekarang justru "Brigade Kucing Hitam". Tapi, ini bukan tentara. Mereka adalah "pasukan" mahasiswa yang dibentuk Koalisi Reformasi untuk Aceh. Kepada merekalah para warga melapor bila menemukan mayat bergelimpangan di jalan. Barisan mahasiswa itu bertugas menangani para provokator sampai maling biasa. Bila provokator atau maling tertangkap, mereka langsung diinterogasi Brigade Kucing Hitam sebelum diserahkan ke polisi.

Kendati ada polisi swasta, suasana di Aceh tetap tak aman, terutama bagi para pendatang dan transmigran. Nasib yang sama juga dialami para pegawai BUMN. Pintu rumah mereka telah diberi tanda silang sebagai isyarat bahwa mereka harus meninggalkan Aceh. Sampai sekarang, tak kurang dari 10.000 para pendatang yang hengkang dari Aceh. Sebagian memilih pulang ke daerah asal, tapi banyak pula yang mengungsi ke lokasi Transito, Kanwil Transmigrasi, di Sumatra Utara.

Kepergian para pendatang itu, kata Gubernur Aceh, Sjamsuddin Mahmud, sebenarnya tidak dikehendaki. Apalagi, para pengungsi itu umumnya juga muslim. "Kami tidak pernah berkeinginan mengusir tamu," katanya.

Tapi, kenyataan tak seperti ucapan Gubernur. Situasi Aceh mulai mirip Timor Timur. Anehnya, sampai saat ini Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masih santai saja. Bahkan, sebelumnya, Gus Dur malah terkesan memberi angin. Ia seakan menyokong referendum. "Kalau boleh ada referendum di Timor Timur, kenapa enggak boleh di Aceh. Itu kan enggak adil," ujarnya, awal November lalu.

Ucapan Gus Dur itu dicatat benar oleh masyarakat Aceh. Bahkan, kata-kata itu dipampang dalam sebuah spanduk yang dipasang di pojok jalan di Banda Aceh. Celakanya, referendum versi Gus Dur bisa berbeda dengan keinginan rakyat Aceh. Dan, itu terbukti dengan pernyataan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono baru-baru ini. Kata Juwono, referendum tidak berarti pilihan untuk merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Tapi, referendum untuk menjalankan syariat Islam. "Yang saya tahu, itulah rumusan Presiden," katanya.

Tapi, yang cukup melegakan, akhirnya pemerintah membatalkan rencana penerapan keadaan darurat militer. Sebagai ganti, "Pemerintah menempuh jalan rekonsiliasi dan memberikan waktu tujuh bulan kepada rakyat Aceh untuk menyusun pemikiran," ujar Juwono.

Upaya rekonsiliasi mungkin bisa dilakukan melalui pengadilan para tokoh di balik pelanggaran HAM di Aceh. Selama ini, berbagai perlakuan tidak manusiawi, seperti penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan semasa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) telah diungkap. Toh, tidak ada tindak lanjutnya. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk kasus Aceh akan memanggil enam mantan petinggi TNI yang bertanggung jawab saat itu, di antaranya Benny Moerdani dan Try Sutrisno. "Pemanggilan itu dilakukan secara bersamaan agar tidak saling melempar tanggung jawab," ujar Ketua Pansus Tengku Syaiful Achmad.

Tak urung, manuver itu membuat para mantan petinggi TNI ketar-ketir. Misalnya saja, Syarwan Hamid. Mantan Mendagri tersebut, di masa DOM, pernah menjabat sebagai Danrem 011 Lilawangsa, Aceh. "Jangan karena sulit menemukan siapa yang bersalah, lalu semua pemimpin TNI dihukum," ujarnya. Kendati begitu, Syarwan mengaku siap diadili kalau memang dilakukan secara *fair.*

Tapi, masyarakat Aceh sendiri menyambut dingin upaya pemerintah mengadili para jenderal itu. "Silakan saja kalau berani mengadili mereka, terutama Soeharto. Tapi, saya tidak yakin," ujar Alfian, salah seorang aktivis HAM di Aceh. Sebenarnya, menurut Alfian, masalah itu bisa dilupakan saja asal ada pilihan merdeka dalam referendum.

Begitulah. Masalah Aceh itu kian rumit karena bercampur baur dengan permainan politik di Jakarta. Tuntutan untuk mengadili para tokoh militer itu, dari sisi lain, bisa dilihat sebagai upaya untuk menggangsir kekuasaan Gus Dur. Maklum saja, tuntutan itu bakal sulit diwujudkan karena selama ini Gus Dur cukup dekat dengan Benny ataupun Try Sutrisno. Di sisi lain, upaya itu tetap diperlukan untuk menarik lagi simpati orang Aceh. Bagaimanapun, para jenderal yang bertanggung jawab atas kematian banyak orang Aceh tak bisa bebas melenggang begitu saja tanpa dihukum.

Jalan lain bukan tidak ada. Usulan Nurcholish Madjid mungkin bisa dipertimbangkan. Tokoh intelektual Islam itu menganjurkan agar Aceh dijadikan modal membentuk negara federasi. Jadi, "Sebaiknya Gus Dur segera mengumumkan Aceh sebagai negara bagian," katanya.

Sejauh ini, Badan Pekerja MPR memang tengah menggodok kemungkinan perubahan bentuk negara. Tapi, perubahan ini tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena mesti meminta persetujuan rakyat Indonesia lewat referendum. Padahal, kobaran api di Serambi Mekkah sudah di depan mata.

Peringatan HUT GAM, 4 Desember, mungkin akan menempatkan Aceh pada situasi yang lebih kritis. Sebab, bila GAM menurunkan bendera merah putih dan mengibarkan bendera Aceh Merdeka, Jakarta pasti akan bereaksi keras. Situasi itu akan menjadi "pintu" bagi TNI untuk masuk kembali ke Aceh. Kapuspen TNI Brigjen Sudrajat pun sudah memberi ultimatum. Bila penurunan Merah Putih terjadi, kata Sudrajat, TNI akan diberangkatkan ke sana untuk menaikkan lagi dwiwarna. Dan, "Berhadapan dengan TNI, pilihannya cuma dua. TNI yang mati atau GAM," ujarnya. Gawat memang.

Karena itulah, Hasballah M. Saad berharap agar peringatan HUT GAM berlangsung damai. Ia juga ingin acara itu dipahami sebagai perhelatan biasa, seperti halnya organisasi lain melakukan HUT. "Sejauh tidak mengganggu, kenapa risau," ujar Menteri HAM itu. "Janganlah kita menggunakan kesempatan itu untuk memukul mereka," katanya lagi.

Memang, jika langkah itu yang diambil, perang yang terjadi. Dan, upaya rekonsiliasi pun tiada arti.

Gendur Sudarsono, Anton Bahtiar, dan Muhrizal Hamzah (Banda Aceh)

M. CHALIL
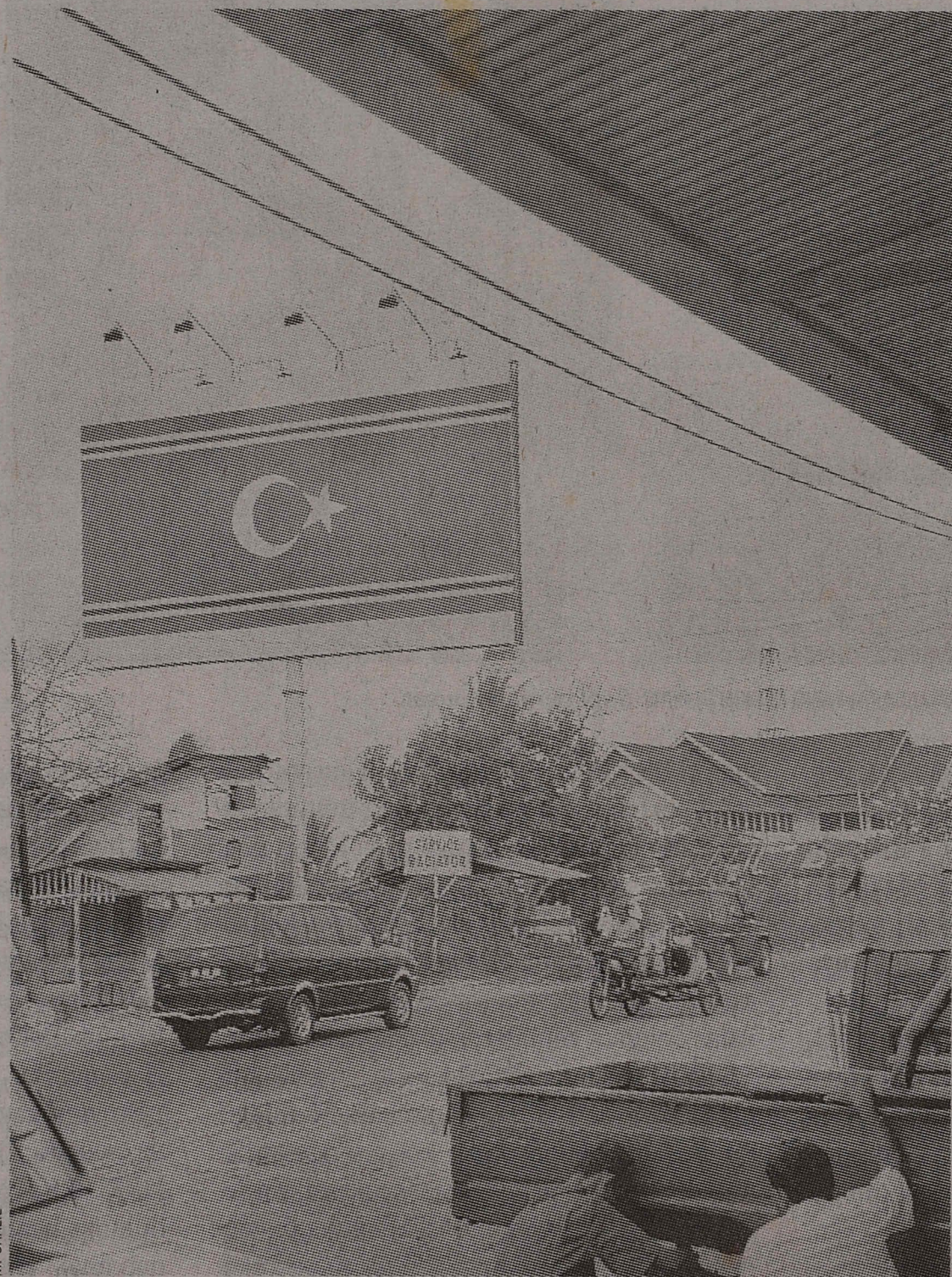
BENDERA GAM DI ACEH. *TNI yang mati atau GAM.*

DISINTEGRASI

Yang Bosan Bersatu dalam Merah Putih

Beberapa daerah "sapi perahan" meminta merdeka atau menjadi negara federal. Ada yang hanya minta status provinsi tersendiri. Bagaimana sikap pemerintah?

Ibu Pertiwi sedang meriang. Betapa tidak, Indonesia saat ini sedang berada di ambang jurang disintegrasi. Tuntutan merdeka bergaung dari Sabang sampai Merauke.

Pertengahan November lalu, dua tokoh Irianjaya, Theys Eluay dan Yorrys Raweyai, menyerukan pengibaran bendera Bintang Kejora (bendera nasional Papua Barat) pada 1 Desember bertepatan dengan "peringatan" Hari Kemerdekaan Papua, 38 tahun lalu. Seruan yang dikenal dengan Deklarasi 12 November itu merupakan hasil rapat akbar yang melibatkan 20 ribu massa di Sentani. Mereka yang ikut rapat itu menginginkan Irianjaya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Toh, tidak semua tokoh Irian sepakat dengan "Deklarasi 12" itu. Di antaranya, Tom Beanal, tokoh masyarakat adat Irian. "Jika terjadi bentrokan, korbannya rakyat juga," ujarnya mengemukakan alasan.

Tapi, Theys tetap *ngotot* akan melaksanakan Deklarasi 12 November. "Kalau bendera tidak berkibar, saya siap digantung rakyat," kata Theys yang mengklaim dirinya sebagai Pemimpin Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka (OPM) memang mengancam akan berperang dengan kekuatan penuh jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Gubernur Irianjaya, Freddy Numberi, mengimbau agar rencana pengibaran bendera tidak usah dilakukan. "Perjuangan saya untuk otonomi khusus daerah ini terus berlangsung dan marilah memanfaatkan saluran demokrasi yang ada," kata Freddy. Di sisi lain, Freddy tetap menolak rencana pemekaran Irianjaya menjadi tiga provinsi.

Penolakan pemekaran itu membuat bingung Menteri Negara Otonomi Daerah, Ryaas Rasyid. Sebab, menurut Ryaas, dulu ide pemekaran yang bertujuan menguntungkan masyarakat Irian sudah disetujui DPRD setempat. "Pemerintah tidak membatalkan pemekaran, hanya menunda," ucap Ryaas.

Gejolak menuntut kemerdekaan juga bergaung dari Riau. Adalah Prof. Tabrani Rab yang pertama kali mencetuskan tuntutan lepas dari negara RI, tepatnya pada Maret lalu. Ia menilai selama ini Riau hanya diperlakukan sebagai sapi perahan pusat. Pasalnya, kontribusi bumi Lancang Kuning dalam produksi minyak nasional, sebesar 60 persen, cuma dibalas dengan "remah-remah" kemakmuran.

WAHYUDI

SUKU SAKAI YANG MISKIN DI RIAU. *Sapi perahan pusat.*

Selain tuntutan merdeka, ternyata ada alternatif lain. Syarwan Hamid, mantan Mendagri itu, misalnya, menyetujui konsep negara federasi. Sedangkan kalangan birokrasi dan sebagian besar anggota DPRD Riau lebih condong pada otonomi luas. Untuk menjembatani tiga pendapat tentang masa depan Riau, sebuah Kongres Rakyat Riau telah diagendakan terselenggara pada 4-5 Desember ini.

Agaknya, kongres tak akan berjalan mulus. Sebab, ada kecurigaan kongres sudah disetel untuk mendukung otonomi luas saja. "Untuk itu, kami segera keluar dari rencana kongres," ujar Viator Butar Butar, ekonom dari Universitas Riau yang semula duduk di kepanitiaan. Tabrani yang guru besar Fakultas Perikanan Universitas Riau pun menyiapkan kongres tandingan.

Toh, DPRD Tingkat I Riau hanya menganggap upaya Tabrani sebagai angin lalu. "Jadi atau tidak kongres dan apa pun hasilnya, kami bersepakat tetap mengajukan tuntutan otonomi luas kepada Presiden," kata Djouharman Arifin, Wakil Ketua DPRD.

Yang menarik, daerah sumber minyak utama Provinsi Riau, yaitu Riau Kepulauan, malah tak menyuarakan federalisme atau merdeka. Tokoh-tokoh setempat hanya meminta daerahnya menjadi provinsi tersendiri dan menolak nasibnya disangkutkan dengan wilayah lain di Riau.

Perbedaan pendapat yang menajam juga terjadi di Sulawesi Selatan. Pihak-pihak yang gencar menuntut kemerdekaan sebagai buntut "kekalahan" Habibie saat Sidang Umum MPR lalu, kini "merevisi" pikirannya dan cenderung mendukung federalisme. Para mahasiswa Makassar pun lantas mengundang Ketua MPR Amien Rais untuk berdialog dan menandatangani "kontrak politik" pada 22 November lalu. Isinya, mantan Ketua Umum PAN itu diberi waktu enam bulan untuk mewujudkan negara federasi.

Dialog dengan para mahasiswa itu ternyata berbuntut rusuh akibat pertentangan pendapat antarmahasiswa sendiri. Akibatnya, pertemuan itu gagal total dan "kontrak politik" pun urung ditandatangani. Bahkan, Amien harus dievakuasi dengan kendaraan taktis lapis baja Brimob Polda Sulawesi Selatan ke Bandara Hassanudin.

Provinsi kaya lainnya, Kalimantan Timur, juga mengikuti jejak Sulawesi Selatan. Kalangan DPRD I Kalimantan Timur bersepakat mendukung bentuk federasi. "Keputusan ini sudah final," kata Ketua DPRD Sukardi Jarwo.

Madura tak mau kalah. Melalui K.H.

Nuruddin Rahman, Sekretaris Badan Silaturahmi Ulama Madura, pulau garam itu juga meminta status sebagai provinsi. Sontak, usulan ini tidak disetujui pengamat politik asal Madura, Ichlasul Amal. Menurut Rektor UGM Yogyakarta itu, usul tersebut malah akan merugikan Madura. "Mereka hanya latah," ujarnya.

Dari serangkaian tuntutan tadi, tampaknya hanya permintaan menjadi provinsi tersendiri yang akan dikabulkan pemerintah. "Pemerintah sedang mempertimbangkan Riau Kepulauan, Banten, dan Madura menjadi provinsi tersendiri," kata Ryaas Rasyid.

Sedangkan tuntutan federasi, menurut Ryaas, tidak pernah dibicarakan Gus Dur. "Itu tuntutan yang tidak realistis," katanya pula.

MURIZAL HAMZAH

AMIEN RAIS *Sudah melebihi suasana pasar.*

Ryaas juga mengingatkan bahwa prosedur menuju negara federasi tidak mudah, bahkan harus membubarkan MPR dulu. "Sebenarnya, ide tentang independensi provinsi-provinsi sudah terkandung dalam konsep otonomi," katanya lagi. Kalaupun tetap dipaksakan, ia balik bertanya, "Berapa orang harus mati?"

Ichlasul Amal lalu menawarkan jalan keluar untuk memupus ketakutan terhadap terminologi federal. "Cukup disebut Republik Indonesia, tidak usah diembel-embeli kesatuan dan federasi. Asalkan, setiap provinsi memiliki kebebasan yang cukup besar," katanya.

Ronald Raditya dan Tim FORUM

Amien Rais: "Federasi Adalah Obat Paling Bagus"

Ancaman disintegrasi terbentang mulai dari Aceh sampai Irianjaya. Menghadapi permasalahan ini, setahun lalu, sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais, pernah menawarkan ide pembentukan negara federasi sebagai solusi untuk mencegah disintegrasi. Idenya itu dulu sempat dikecam banyak pihak. Kini, ide federasi diyakini sebagai resep ampuh untuk meredam disintegrasi bangsa. Berikut penuturan Ketua MPR Amien Rais kepada Yus Arianto dari FORUM tentang idenya itu, termasuk pengalamannya menghadiri dialog dengan mahasiswa Makassar yang berakhir ricuh.

Bagaimana sebenarnya kejadian di Makassar ketika Anda didesak menandatangani kontrak politik?

Acara saya di Makassar semula berjalan sangat mulus. Tapi, saat giliran penanya terakhir pada sesi kedua, ada sebagian mahasiswa yang sudah tidak sabar. Pokoknya, mereka ingin saya secepatnya menandatangani kontrak politik. Ada pula yang berteriak-teriak supaya tidak usah mendengarkan jawaban saya lagi, yang menyebabkan sebagian mahasiswa lain menjadi marah.

Ternyata, di kalangan mahasiswa Makassar ada tiga opini. Pertama, setuju dengan konsep otonomi yang diperluas. Kedua, memilih sistem federal. Ketiga, menginginkan merdeka sepenuhnya. Pada saat itu, mereka saling hujat dan saling gebrak meja.

Apakah tiga opini itu bisa mewakili pendapat masyarakat Makassar secara lebih luas?

Saya tidak tahu karena yang datang juga tidak berjubel. Mungkin ada sekitar 50 orang yang berada di dalam gedung DPR dan paling banyak 200 orang lagi di luar.

Benarkah Anda memang sudah berniat menandatangani kontrak politik itu?

Saya belum sempat membacanya karena situasi sudah semrawut sekali dan sudah melebihi suasana pasar yang tidak ada aturannya. Lantas, saya berpikir bahwa mereka adalah manusia dewasa. Kalau bisa belajar dari pengalaman sendiri, barangkali akan lebih bagus. Tetapi, peristiwa di Makassar itu saya nilai tidak perlu dikhawatirkan karena para mahasiswa sedang menikmati era keterbukaan dan kebebasan.

Berkaitan dengan referendum di Aceh, bukankah sebelumnya diperlukan referendum nasional terlebih dahulu?

Memang. Sesungguhnya, referendum tidak tepat untuk memecahkan masalah hubungan pusat dengan daerah yang tidak harmonis. Ada tiga persoalan mendasar di sini, yaitu pelanggaran HAM yang sudah akumulatif, sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat yang menghilangkan hak daerah untuk melakukan partisipasi politiknya secara penuh, dan terjadi pengisapan sumber daya alam daerah oleh pemerintah pusat. Nah, hubungan yang tidak harmonis ini mestinya dibenahi dengan cepat dan adil. Referendum yang memberi pilihan otonomi atau merdeka, sama sekali tidak pas jika kita mau berpikir secara rasional. Saya masih berharap dapat dilakukan diskusi atau musyawarah yang betul-betul produktif antara pusat dan daerah dalam waktu yang tersisa ini.

Dan, federasi adalah solusi terbaik...

Itu adalah obat yang paling bagus. □

■ PELARIAN POLITIK

Dibuka Boleh, Waspada pun Perlu

Pintu kepulangan para pelarian politik telah dibuka. Mantan Dubes RI di Kuba, A.M. Hanafi, pun pulang. Komunisme tak perlu ditakuti lagi?

Seorang lelaki tua dengan rambut putih yang mulai menipis keluar dari jalur kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Ia memakai jas warna krem. Sementara, di tangan kanannya tergenggam sebuah tongkat. Dialah Anak Marhaen Hanafi, lelaki berusia 82 tahun yang selama ini bermukim di Prancis sebagai pelarian politik. Di usia senja, ia masih tampak gagah. Nada bicaranya pun masih meledak-ledak.

Namun, keharuan segera menyeruak ketika ia dan istrinya yang duduk di kursi roda disambut para kerabat. Peluk-cium dan linangan air mata pun tumpah. Tampak pula di antara para penjemput mantan Gubernur DKI Jakarta Letjen KKO (Purn.) Ali Sadikin. "Kita harus berterima kasih kepada Bang Ali. Dialah yang mengurus saya hingga saya dapat kembali," kata bekas Dubes RI di Kuba itu, akhir November lalu.

Perjalanan pulang Hanafi memang memakan waktu dan berliku. Kalau mau, sebenarnya mantan Wakil Ketua Pengurus Pusat Partai Indonesia (Partindo) itu sudah pulang di bulan Mei 1966. Saat itu, sebagai Dubes RI di Havana, Kuba, ia mendapat kawat dari Departemen Luar Negeri yang memerintahkannya segera pulang. Tapi, rupanya, pemanggilan tersebut bisa bermakna lain. Sebab, saat itu kekuasaan Soekarno telah habis. Malah, berbekal Supersemar, Soeharto tengah menangkapi beberapa menteri dan tokoh yang dianggapnya terlibat dalam G30S di Jakarta.

Karena itu, Hanafi tak mengindahkannya. "Ia dulu tidak mau kembali sendiri. Padahal, saat itu tidak ada yang melarangnya kembali," kata mantan Ketua G V KOTI, Hankam, Mayjen (Purn.) Soenarso. Lembaga inilah yang dulu menangani orang-orang eks-PKI. Akibatnya, pertengahan Juni 1966 Departemen Luar Negeri mencabut paspor diplomatik Hanafi. Tapi, pemerintah Kuba masih memperlakukannya sebagai diplomat. Hanafi sendiri merasa bahwa yang berhak mencabut jabatannya hanyalah Soekarno.

Begitu Soekarno meninggal dunia tahun 1970, barulah ia merasa tugasnya selesai. "Tugas yang diletakkan Presiden ke bahu saya sebagai Dubes RI untuk Kuba telah saya laksanakan sebaik-baiknya," ujarnya. Rasa hormat Hanafi terhadap Soekarno memang besar. Maklumlah, ia memang salah seorang "anak emas" Soekarno. Bahkan, Soekarno pula yang memberinya nama Anak Marhaen itu.

Tak lama kemudian, tahun 1972, Hanafi terbang ke Prancis bersama keluarganya. Di sana ia meminta suaka politik. Negara itu memang terkenal sangat menghormati pelarian politik. Hanafi pun memulai hidup baru. Ia mengaku sempat menjadi penjaga malam dan guru bahasa Indonesia. Tapi, setelah mendapat kredit dari bank, Hanafi akhirnya mendirikan restoran Djakarta Bali di Paris Châtelet.

Kendati sudah cukup "mapan" di perantauan, Hanafi tetap rindu Tanah Air. Ketika bertemu Adam Malik saat masih menjadi Wapres di Brussel, tahun 1979, ia sudah menyatakan keinginannya untuk pulang. Adam pun menyetujui. "Bahkan, ia segera memerintahkan Sekretaris Wapresnya, Ali Alatas (yang kemudian menjadi Menlu), untuk mengurus kepulangan saya," ujar Hanafi.

Tapi, rupanya, pemerintah Soeharto sangat berhati-hati terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam G30S. Ia dan para pelarian politik lainnya boleh pulang setelah diperiksa dulu. Saat itu, aturan mainnya memang begitu. Hal ini juga dilakukan terhadap Brigjen Suharyo Padmodiwiryo yang pulang pada tahun 1977 setelah 12 tahun bermukim di Moskwa.

Begitu datang, mantan Pangdam Mulawarman itu langsung diperiksa. Ia akhirnya diklasifikasikan sebagai anggota PKI golongan B. "Mereka tak bisa langsung ke masyarakat," kata Kapuspen TNI waktu itu, Brigjen Nurhadi Purwoseputro. Menurut Nurhadi, mereka yang pulang harus dilitsus (penelitian khusus) terlebih dahulu untuk menakar kadar ideologinya.

Hanafi sebenarnya sudah pernah dilitsus.

M. RIZAL

HANAFI DI BANDARA. *Yang lain akan menyusul.*

Pertama, ketika L.B. Moerdani menjadi Pangab. Kedua, ketika Mayjen (Purn.) Syamsir Siregar menjadi Kepala BIA. Ia mengaku disodori bermacam-macam formulir. "Entah apa isinya, yang penting saya *teken* saja," ujarnya. Tapi, semua itu tak membantu kepulangannya. Mungkin pemerintah masih khawatir. Soalnya, "Menurut kebanyakan orang, saat itu ia komunis," kata Soenarso.

Walaupun begitu, ia tak putus asa. Ia terus meminta bantuan kawan-kawannya, di antaranya Ali Sadikin. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah berusaha mengatur kepulangannya sejak 15 tahun silam. Bahkan, menurut Hanafi, Letjen (Purn.) AM Hendropriyono saat masih bertugas di Bais pernah membantu pula. "Itu atas permintaan bapaknya," kata Hanafi yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda Menteng 31 di masa pergerakan.

Nah, sebulan sebelum mantan Dubes RI untuk Prancis Billy Joedono pulang tahun lalu,
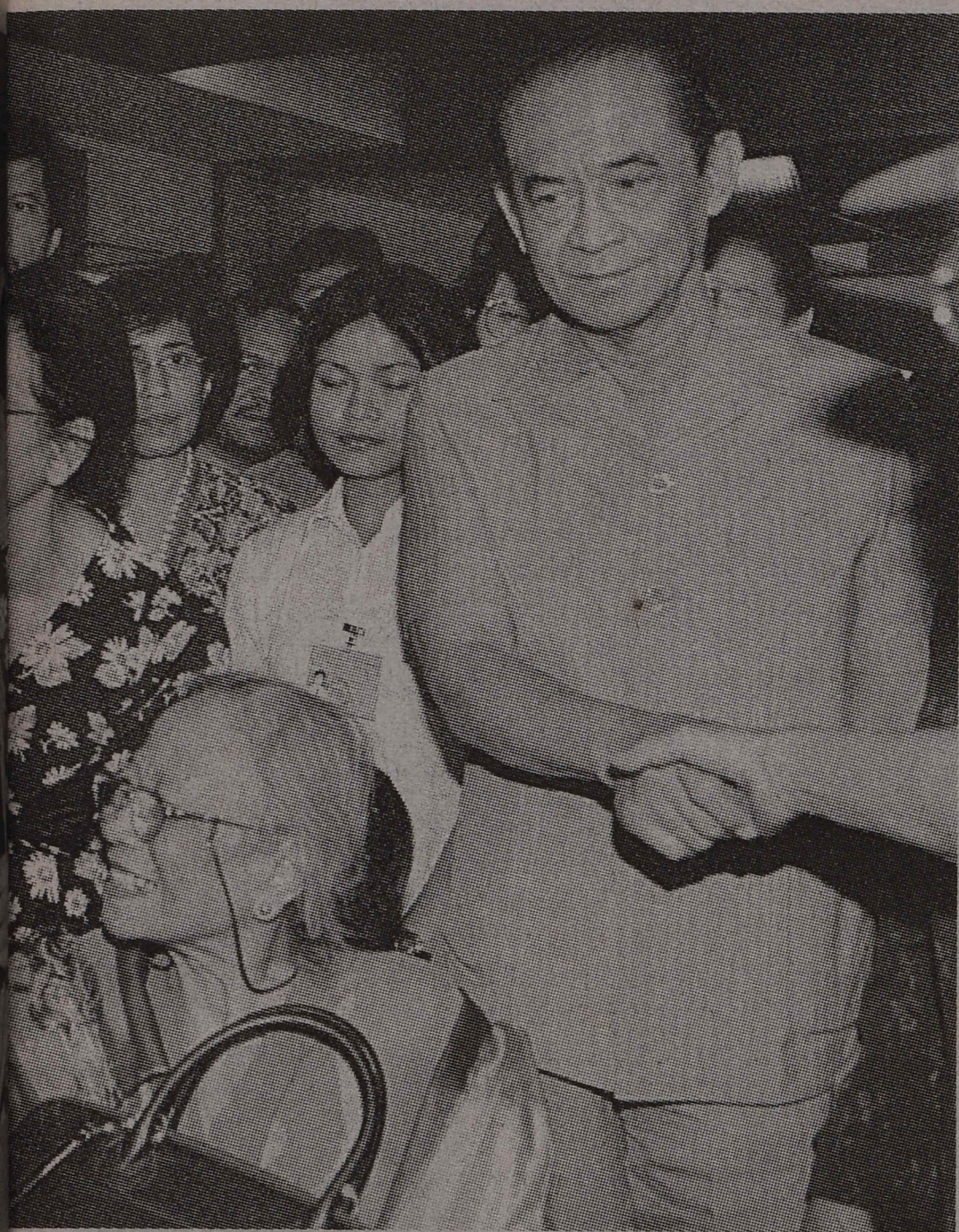
barulah ia mendapat kabar gembira. "Isinya, saya boleh pulang," ujarnya. Tapi, lagi-lagi jaring litsus menghantuinya. Lewat Kol. Heriyadi, Atase Pertahanan di KBRI Paris, ia diberi tahu akan dilitsus. "Tentu saja saya tolak. Saya bilang, saya ini sudah bolak-balik dilitsus. Hasilnya nol!" ujarnya pula.

Titik terang mulai tampak November lalu. Pemerintah Habibie sudah memberi lampu hijau. Karena itu, ia segera menyuruh Adityo, anaknya, pulang ke Indonesia untuk mengurus rumahnya di Jalan Madura 5, Jakarta. Tapi, celakanya, Adityo justru tersandung Komunike Bersama di Hotel Sahid. Karena ikut menandatangani komunike tersebut, ia diciduk. Namun, karena ia masih memegang paspor Prancis, pihak kedutaan campur tangan. Walaupun akhirnya anaknya dilepas, "kecelakan politik" itu membuat kepulangannya Hanafi tertunda.

Setelah Gus Dur menjadi Presiden, harapan Hanafi tumbuh lagi. Sebab, pintu pengampunan bagi para tapol yang sudah dibuka Habibie diperlebar lagi. Tak mengherankan bila Ali Sadikin tak kesulitan menyakinkan Gus Dur. Tokoh Petisi 50 itu menjelaskan kepada Gus Dur bahwa Hanafi bukan komunis. Tanggapan Gus Dur justru sangat mencengangkan. "Walaupun beliau komunis, silakan datang," ujar Gus Dur seperti ditirukan Bang Ali.

Rupanya, masalah pelarian politik memang menjadi perhatian Gus Dur. Ia telah memerintah Menlu Alwi Shihab memberi tahu seluruh KBRI agar memudahkan proses pemulangan mereka. Keputusan itu tertuang dalam Keppres B 15/PRES/11/1999. "Kepulangan Hanafi ini menjadi buktinya," kata Ali.

Tentu saja, kepulangan Hanafi menjadi kejutan besar bagi para pelarian politik. Bahkan, Sobron Aidit, adik Ketua CC PKI D.N. Aidit, yang tinggal di Paris pun kaget. "Saya tidak tahu kalau ia pulang hari ini," ujarnya. Yang jelas, ini kabar yang menggembirakan bagi Sobron dan para pelarian politik lainnya.

Menurut catatan Kementerian Luar Negeri Prancis, di awal tahun 1994 masih ada 29 pelarian politik asal Indonesia. Selain Hanafi dan Sobron, ada pula mantan pemimpin redaksi koran kiri Ekonomi Nasional Oemar Said, Iba Aidit, Emil Kusni, Margono, Yono, Aji, Djoko dan beberapa nama lagi. Para eks PKI ini mendirikan Restoran Indonesia di dekat Universitas Sorbonne. "Orang Indonesia sering keliru. Mereka menyebut restoran saya restoran milik orang PKI," kata Hanafi yang mengaku bukan PKI itu.

Sementara itu, di Belanda, ada pelukis Lekra Basuki Resobowo, mantan Dubes RI untuk Cina, Djawoto, dan lain-lain. Nah, selama ini, setiap akhir tahun, orang-orang yang dituduh PKI dan para Soekarnois yang bermukim di Eropa selalu berkumpul di Belanda.

Pelarian politik asal Indonesia bertebaran di Eropa Timur. Di Cina pun ada, seperti mantan anggota CC PKI Jusuf Adjitorop. Nah, lantaran pintu gerbang kepulangan telah dibuka Gus Dur, mereka tentu akan menyusul. "Siapa sih yang tidak ingin pulang. Indonesia kan tanah air kami juga," kata Sobron.

Bagi sebagian orang, kepulangan Hanafi memang tak begitu dipermasalahkan. Bahkan, menurut mantan Pangkostrad Kemal Idris, hal ini merupakan pertanda baik. "Saya tidak yakin bahwa Hanafi orang PKI. Ia pendukung Soekarno yang kental," ujarnya. Sementara itu, menurut sejarawan Asvi Warman Adam, hal ini bisa menjadi pemacu rekonsiliasi dan merekonstruksi sejarah. "Rekonsiliasi penting untuk kita," ujarnya.

Tapi, sejauh ini TNI tetap berhati-hati. Sebab, bukan tak mungkin mereka (para pelarian politik) masih memegang teguh ideologi komunis-marxis. Bagaimanapun, menurut Kapuspen TNI Mayjen Sudrajat, trauma masyarakat terhadap pemberontakan komunis 1948 dan G30S/1965 begitu besar. "Rekonsiliasi politik memang perlu. Tapi, bangsa ini kan tetap antikomunis," ujar Kapuspen kepada Victoria Sidjabat dari FORUM.

Jadi, "Meski zaman reformasi tengah berjalan, kita harus tetap waspada," ujar Ahmad Sumargono kepada Tegus S. Usis dari FORUM. Ucapan anggota DPR dari Partai Bulan Bintang ini perlu disimak. Kendati, mungkin saja benar mereka pulang karena rindu keluarga. Tapi, kata Soenarso, "Bukankah ideologi itu tak pernah mati."

Hanibal W .Y. Wijayanta, Muhammad Husni, dan Gunawan Antara (Paris)

"Saya Orang Soekarno"

M. RIZAL
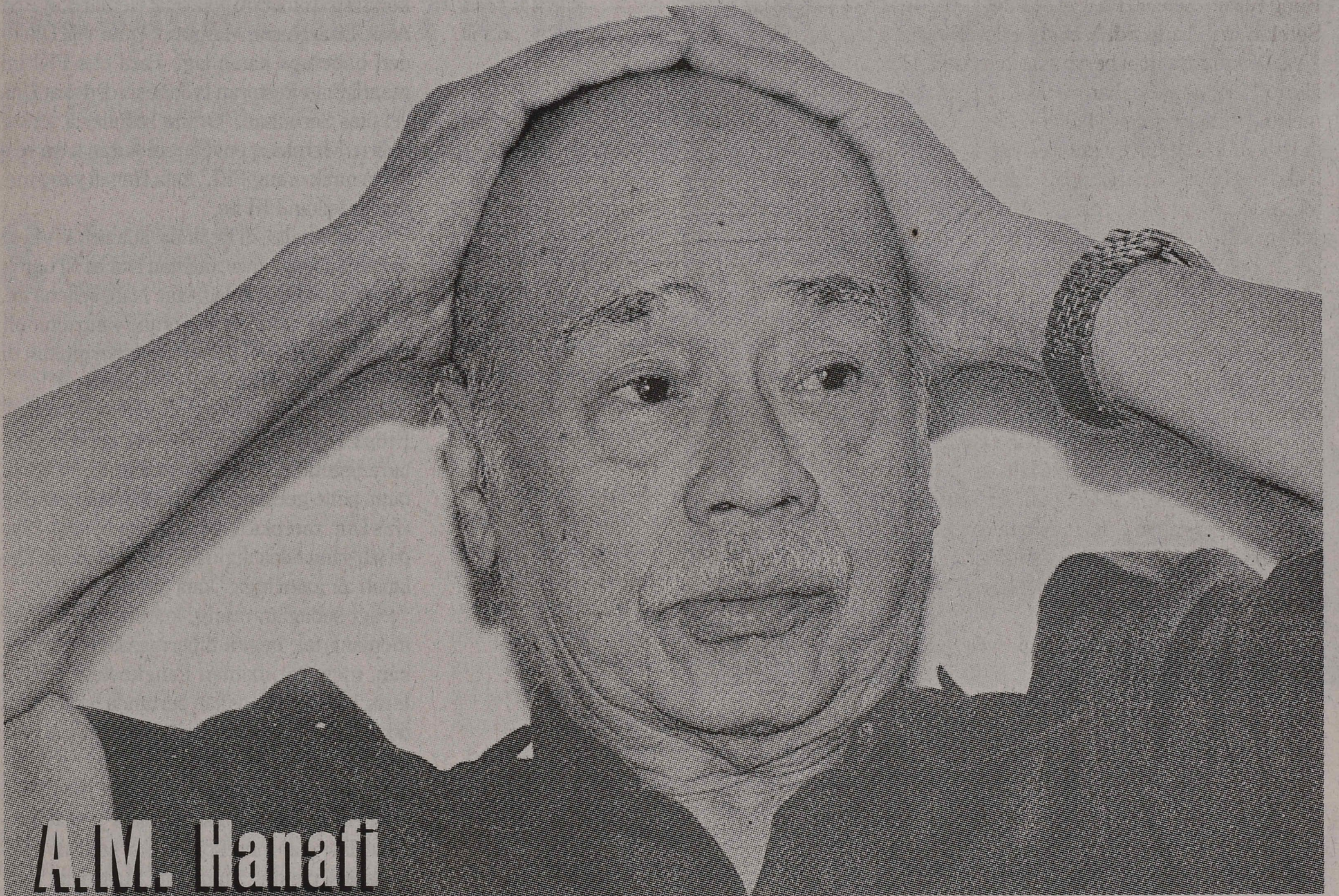
Siapa sebenarnya A.M. Hanafi? Mengapa Duta Besar RI di Kuba itu tidak bisa kembali lagi ke Indonesia setelah terjadi peralihan kekuasaan dari Ir. Soekarno ke Jenderal Soeharto di tahun 1966? Banyak misteri yang belum terungkap di balik "pencekalan" orang dekat Bung Karno itu. Jumat, 26 November lalu, dua hari setelah Hanafi kembali ke Indonesia, wartawan FORUM Syatrya Utama dan Mochamad Husni mewawancarainya. Wawancara berlangsung di kediaman Abihasan Said, kawan dekat Hanafi, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Sejak 1966, Anda tidak bisa kembali ke Indonesia. Apa latar belakangnya?

Sewaktu di Kuba, tanggal 1 Oktober 1965, saya diberi tahu seorang kawan. "Apa duta besar sudah tahu ada kudeta dari Dewan Jenderal?" Saya bilang, "Enggak mungkin. Mana bisa? Saya kenal Yani. Dan, Yani itu orang yang setia kepada Bung Karno. Mana pesannya?" Lalu, kawan saya menunjukkan kawat dari kantor berita Kuba, menyatakan bahwa terjadi kudeta di Indonesia yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Pengertian saya, Dewan Jenderal itu, ya, Yani panglimanya. Tidak mungkin yang lain. Tapi, saya kenal benar dengan dia. Sekitar Januari 1965, saya datang ke Indonesia untuk berkonsultasi dengan Presiden. Waktu itu kami bertemu bertiga. Saya, Bung Karno, dan Yani. Di situlah ada cerita tentang "singkong marhaen" yang menunjukkan bahwa Bung Karno dan Yani tidak akan mungkin saling bermusuhan. Dalam pertemuan itu saya disuguhi singkong oleh Pak Hardo Wardoyo, Kepala Rumah Tangga Istana. Saya ambil, kan. "Yani, ini singkong tanaman rakyat marhaen, sekarang naik di Istana. Saya berikan lebih dulu kepada panglima rakyat marhaen," kata saya. Singkong itu diambil Yani. Lalu, ia bilang, "Ya. Tapi, kepada Bapak Marhaen dulu, dong." Begitulah.

Jadi, jika mereka berdua berjibaku, saya akan sangsi. Karena itu, saya tidak percaya bakal ada kudeta dari Dewan Jenderal. Lalu, kawan saya itu bilang, akan mencari informasi yang lebih tegas lagi. Dan, akan memberi tahu saya lagi. Pada saat itu saya tidak bisa melakukan kontak langsung karena peralatan kedutaan saya itu begitu minim. Pada tanggal 19 Desember 1965, saya kembali ke Indonesia untuk menemui Bung Karno. Setelah itu, pada Maret 1966, saya kembali lagi ke Kuba.

Setelah itu, Anda tidak bisa kembali lagi ke Indonesia?

Ya. Waktu saya mau berangkat kembali ke Kuba, saya pamit kepada Harto [waktu itu Soeharto sudah diangkat menjadi Pangkopkamtib melalui Surat Perintah 11 Maret 1966]. Saya bilang, "Pak Harto, saya diperintah Bung Karno kembali lagi ke pos saya." "Oh begitu, ya, selamat jalan. Kalau ada apa-apa, langsung hubungan sama saya." Setelah itu saya bertugas kembali di Kuba. Akhir Mei 1966, saya menerima panggilan pulang melalui kawat sandi Departemen Luar Negeri. Saya heran. Belum dua bulan saya kembali ke Kuba, kok, ada panggilan lagi. Saya yakin itu bukan Bung Karno yang memanggil. Saya yakin juga bukan Adam Malik (Menteri Luar Negeri) yang memerintahkan saya pulang. Beberapa hari setelah menerima kawat itu, datang kawat berikutnya. Tertulis, "Kepada Yang Mulia Duta Besar supaya menemui delegasi pemerintah di Meksiko." Nah, ini ada apa? Satu kawat saya dipanggil pulang, tapi yang kedua saya diminta menemui delegasi di Meksiko. Lalu, saya pergi ke Meksiko. Di sana ada Brigjen Soedirgo, bekas Kepala CPM, dan Kolonel Hertasning. Lantas, saya diberi tugas menginal persiapan Conefo (Conference of The New Emerging Forces). Soedirgo mengatakan, "Apakah bisa tugas itu dilaksanakan?" Saya bilang, "Bisa. Kalau Bung Karno menghendaki konferensi itu dilaksanakan, akan saya jalankan."

Apakah Anda sempat mengkonfirmasikan kepada Soedirgo mengenai kawat itu?

Ya. Saya bertanya kepada Soedirgo. "Apa benar saya diperintahkan pulang?" Ia mengatakan, "Lo, kami tidak tahu. Kami tidak dapat perintah begitu." Jadi, kedua kawat itu bertentangan. Lalu, saya mengambil kesimpulan bahwa ini pasti sudah kacau. Sesudah itu, ada kawat lagi yang mengatakan bahwa kepada seluruh perwakilan di seluruh dunia, paspor nomor-nomor tertentu, tidak berlaku lagi. Salah satunya saya.

Disebutkan alasannya...

Tidak ada keterangan apa-apa. Yang pasti, paspor saya dicabut. Tindakan itu inkonstitusional. Penghapusan paspor itu perampasan hak kewarganegaraan saya dan tindakan yang sewenang-wenang terhadap saya sebagai kepala perwakilan Indonesia di Kuba. Karena itu, saya menganggap bahwa saya tidak diberhentikan Soekarno. Dan, sampai 32 tahun Soeharto jadi Presiden, tidak pernah saya dapat surat pemberhentian dari dia. Apakah ia lupa atau bagaimana. Atau, diisukan bahwa saya tidak mau pulang, saya tidak tahu. Atau, mungkin juga diisukan Hanafi itu komunis. Karena itu tidak mau pulang. Bisa saja, kan. Waktu itu, siapa saja kan dilabelkan komunis. Nah, siapa yang ada di belakang semua itu, kalian mesti cari. Saya punya dugaan-dugaan, tapi lebih para wartawan yang mencari. Apakah itu Ali Murtopo, apakah itu Soepardjo Roestam?

Mungkin mereka menganggap Anda sebagai Soekarnois, atau mungkin komunis...

Enggak tahu. Pokoknya, terang bahwa saya orang Soekarno. Mereka juga punya intel yang banyak, kan. Nah, carilah keterangan dari mereka. Tanya itu Cosmas Batubara, Akbar Tandjung, Abdul Gafur. Bicaralah dengan Akbar Tandjung yang sekarang sudah menjadi Ketua DPR itu. Lalu, tanya semua komplotan-komplotan itu. Saya bilang, Angkatan 66 itu angkatan konyol. Tapi, maafkanlah mereka. Mereka itu anak-anak yang tidak mengerti politik. Semua itu dibuat antikomunis, kan. Jadilah fanatisme terhadap pihak-pihak tertentu.

Tapi, banyak yang menyatakan Anda PKI. Apa benar?

Oh.... Saya tahu orang-orang PKI. Tapi, saya bukan PKI. Mereka, kan, menimbulkan kesan saja. Siapa saja bisa kan diberi label begitu. Memang, Aidit itu dulu anak buah saya. Ia anggota Pemuda Gerindo. Saya kan Sekretaris Jenderal Pimpinan Barisan Pemuda Gerindo itu. Ia anggota Gerindo cabang Jakarta. Namanya bukan Aidit. Kami yang mengubah nama itu. Sebab, nama yang sama dalam anggota kami itu terlalu banyak. Datang anggota baru bernama Amat. Datang lagi yang baru namanya juga Amat. Akhirnya, ada Amat tukang sayur, Amat tukang sate, Amat pentul, dan lain-lain. Nah, suatu hari, datang seorang lagi yang bernama Amat. Bagaimana ini? Ia bilang sekolahnya enggak lulus karena enggak dapat sokongan lagi dari bapaknya. Setelah jadi anggota, kita ganti namanya menjadi Aidit. Itu nama bapaknya. Lalu, karena memang sudah ada ambisi hero individual dari anak ini, ia menambah namanya sendiri dengan DN. Katanya, singkatan dari Dipa Nusantara. Karena sudah ada Diponegoro, ia pakai Dipa Nusantara, ha... ha... ha.... Jadi, ia mau lebih tinggi dari Negoro. Jadi, nama Aidit itu dulunya Amat. Nah, mungkin ia dulu anak buah saya, lantas orang *mikir*, jangan-jangan Hanafi ini dedengkotnya PKI. Ha... ha... ha.... Padahal, itu enggak benar. Cuma, untuk memukul orang, apa saja memang bisa digunakan, misalnya dengan memberi label PKI. Kenapa? Karena Amerika enggak senang PKI. Kalau enggak membabat orang PKI, enggak dapat utang, enggak dapat duit. Sederhana sekali masalahnya.

IPPHOS

SOEKARNO DAN DN AIDIT.
"Saya orang Soekarno".

IDAYU

A. YANI SEBAGAI KSAD.
"Nggak Mungkin ada kudeta Dewan Jenderal".

Jadi, Anda bukan PKI?

Saya tidak bisa jadi PKI karena saya bukan mereka. Jika komunismenya itu sebagai idealisme, itu manusiawi. Tapi, karena caranya dihubungkan dengan kepentingan politik, akhirnya ia tegakkan perjuangan kelas. Ya, enggak bisa. Dunia ini tidak bisa begitu. Bung Karno sudah bilang, "Hanafi, sampaikan kepada Aidit, jangan dipertajam itu perjuangan kelas." Sebab, itu ada evolusinya sendiri.

Sewaktu Anda kembali ke Indonesia pada Desember 1966, Anda kan sudah tahu kondisi sangat genting. Mengapa setelah itu Anda berangkat lagi ke Kuba?

Karena Bung Karno yang menyuruh saya pergi kembali ke Kuba. Kepentingannya kan untuk kepentingan Conefo. Saya masih percaya, jika Bung Karno tidak diturunkan, masih bisa diselamatkan. Tapi, yang terjadi,

MUSEUM SASMITA LOKA

SOEHARTO DI LOBANGBUAYA.
"Dia cuma kurcaci saja".

Surat Perintah 11 Maret itu ternyata disalahgunakan oleh Soeharto. Supersemar itu kan bukan penyerahan kekuasaan. Tapi, surat perintah untuk melaksanakan keamanan. Dan, ia harus melapor ke Bung Karno setiap menjalankan tugas itu.

Dalam buku yang Anda tulis, "Menteng 31. Membangun Jembatan Dua Angkatan", Anda mengatakan peran Soeharto sangat besar dalam peristiwa 30 September 1965 itu. Maksudnya?

Peran Soeharto memang paling besar. Tapi, saya yakin itu bukan Pak Harto sendiri. Momentum yang ia manfaatkan. Beberapa keadaan saling bertemu pada saat itu. Baik kepentingan ekstern dan kepentingan dalam negeri. Karena CIA kan sudah bekerja begitu lama. Bahkan, sejak Repubik berdiri. Dari semula kita merdeka, tidak ada faktor luar yang tidak mencampuri. Jadi, peristiwa 30 September-1 Oktober itu adalah bertemunya beragam keadaan pada satu *moment*. Banyak pihak yang bermain. Dan, Soeharto ditumbuhkan oleh keadaan itu. Oleh keadaan yang menumbuhkan itu pula, Soeharto diambil dan ditempatkan pada posisi tersebut.

M. RIZAL

Seorang pakar bernama W.F. Wertheim punya tesis bahwa Soeharto tahu semua rencana mengenai peristiwa 30 September 1965 itu. Bagaimana menurut Anda?

Terlalu besar jika Pak Harto itu dikatakan sebagai dalang. Ia itu diper-"dalang"-kan orang. Menurut saya, ia hanya alat dari berbagai kepentingan itu. Ia itu cuma kurcaci.

Tapi, mengapa ia bisa berada pada posisi yang amat tepat dan kemudian bisa memegang kendali politik begitu lama di negeri ini?

Ya, itu terjadi karena bangsa ini cuma bangsa yang mau asal *warek* (kenyang). Jika direnungkan, intuisi politik Soeharto itu sudah lama tumbuh.

"Saya tahu orang-orang PKI. Tapi, saya bukan PKI. Mereka, kan, menimbulkan kesan saja."

Saat ini, Anda masih tetap segar bugar. Ada resepnya?

Karena saya senang saja, kan, ha... ha... ha.... Karena itu saya bisa bertahan. Saya percaya bahwa saya cinta rakyat Indonesia. Kecintaan itu ada dua. Kebencian dan kesayangannya. Itu cinta. Selalu aspeknya dua itu. Kalau kau cinta istri, kau juga marah kepadanya, kan? Itu satu kesatuan. Filsafatnya begitu.

Katanya, di Prancis Anda membuka restoran...

Iya, buat cari makan. Yang memberi nama restoran itu Bardi Halim, kawan saya anggota Angkatan 45.

Bagaimana kehidupan Anda selama di Prancis?

Semua keluarga saya tidak berani berhubungan dengan saya. Semua keluarga istri saya tidak berani kontak dengan dia. Saya tidak kecewa dan tidak sakit hati kepada mereka. Saya tahu itu mereka lakukan demi keselamatan mereka. Itulah garis nasib hidup saya. Orang-orang Jakarta banyak yang mau bertemu dengan saya, misalnya Bu Hartini. Ia juga pernah mau bertemu dengan saya. Lalu, dibawalah ia ke sebuah restoran entah di mana, saya tidak tahu. Tapi, ia tidak bertemu saya. Pokoknya, saya itu di sana diisolasi. Tapi, sekali saya mencintai negeri ini, seperti saya mencintai istri saya. Cinta sampai ke liang kubur.

Apa Anda menjalin kontak dengan komunitas orang buangan di Prancis?

Oh, di sana itu. Dengan orang pemerintah saya diisolasi. Dengan orang-orang yang katanya komunis, saya juga diisolasi. Pokoknya saya sendirian di sana bersama istri. Kadang ada anak.

Apa ada kontak dengan Sobron Aidit?

Oh, Sobron di sana. Saya tahu dia. Dia enggak pernah menelepon saya. Kalau saya butuh, saya menelepon dia. Itu saja. Tapi, kita tahu sama tahu. Ia tahu saya siapa. Saya pun tahu siapa mereka. Tapi, saya lebih banyak tahu daripada mereka.

Bagaimana ceritanya Anda bisa dekat dengan Bung Karno...

Pada hari Bung Karno datang ke Bengkulu karena dihukum pada 1937 (oleh pemerintah Belanda), saya diberi tahu kakak saya, Nawawi. "Hanafi, lihat tuh ada orang pakai dasi, pakai topi, itu namanya Soekarno. Sekarang lagi diterima Sekretaris Residen Bengkulu." Nawawi nama lain dari kakak saya, yang bernama asli Abdul Hadi. Tapi, waktu ia masuk ke dalam lingkungan pujangga baru, namanya diganti jadi Asmara Hadi. "Nah, yang membantu kakak kau, ya, yang namanya Soekarno itu. Apa tidak sebaiknya kamu temui." Nah, sorenya, saya datang menemui orang yang bernama Soekarno itu untuk memberi tahu bahwa saya adiknya Asmara Hadi. Ia senang. "Oh, ini adiknya si trondol ini." Orang Bengkulu itu, kalau kepalanya botak disebut trondol. Rambut Asmara Hadi waktu itu dicukur karena kena cacar. Begitulah kontak pertama kali saya dengan Bung Karno.

Bagaimana hubungan Anda dengan Ibu Fatmawati?

Ya, karena itulah Megawati saya bilang kemenakan saya. Bagaimana? Fatma itu kan orang Bengkulu. Kawin dengan Bung Karno. Saya kenal dengan Hasan Din, ayah Bu Fatma. Karena itulah, saya dekat sekali dengan Bung Karno.

Megawati kini menjadi Wakil Presiden. Bagaimana menurut Anda?

Mega itu saya anggap kemenakan saya karena ia anaknya Bung Karno.

Komunikasi Anda dengan Megawati selama ini bagaimana?

Tadi saya sudah bilang bahwa semua famili saya enggak berani mengontak saya, demi keselamatan mereka. Biar sajalah. Satu waktu, jika Tuhan mau, bisa bertemu kembali. Benar, kan. Tentu saja, saya ingin bertemu dengan kemenakan saya itu. Kangenlah.

Apa yang akan Anda lakukan dalam waktu dekat ini?

Saya belum bisa berpikir untuk sekarang. Tentang soal politik, saya mesti bertemu dulu dengan Bapak kita Gus Dur.

Apa Anda akan meluruskan sejarah?

Yang akan meluruskan bukan saya sendiri. Kalian juga. Semua. ❑

Kebangkitan Hisbul Wathan

KEPANDUAN: Mulai 18 November lalu, kegiatan kepanduan bukan lagi monopoli pramuka. Pasalnya, sejak hari itu, Persyarikatan Muhammadiyah kembali mendeklarasikan organisasi kepanduan Hisbul Wathan. Dalam acara yang digelar di Stadion Kridosono, Yogyakarta, itu hadir antara

SUARA PEMBARUAN
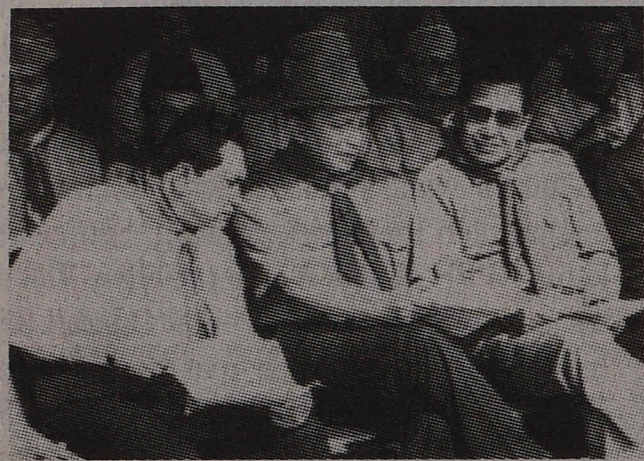
lain Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua MPR Hari Sabarno, Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin, dan Letjen Hendropriyono.

Hisbul Wathan sendiri merupakan organisasi kepanduan Indonesia tertua yang "tertidur" selama 38 tahun akibat Keppres No. 238/1961 yang menyatukan kepanduan Indonesia dalam satu wadah, yaitu Pramuka. Menurut Pj. Ketua Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif, pendeklarasian kembali Hisbul Wathan bertujuan untuk membuka ruang publik yang lebih luas. "Selain itu, juga memberi alternatif untuk pembinaan rakyat," ujarnya sambil menyebutkan Jenderal Sudirman sebagai salah seorang kader Hisbul Wathan.

Syafii menginginkan Hisbul Wathan, yang berarti pembela tanah air, mampu memberi sumbangan agar kehidupan demokrasi berjalan dengan seharusnya. Sedangkan Yahya Muhaimin berharap kebangkitan Hisbul Wathan akan membangkitkan kepanduan lain, seperti Pandu Rakyat dan Pandu Ansor. ❑

Lawatan Berbuah Hibah

GUS DUR: Lawatan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ke Timur Tengah pekan silam terbukti membuahkan hasil memuaskan. Dari Kuwait, misalnya, datang kabar gembira. Sebab, negara kaya minyak itu menyetujui pemutihan pinjaman-pinjaman Indonesia yang ada di Kuwait Fund.

Komitmen Kuwait untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia juga ditegaskan Emir Kuwait, Sheik Jaber Al Ahmad Al Sabah, kepada Gus Dur. Sebagai tindak lanjut komitmen itu, Kuwait dan Indonesia akan membentuk komisi bersama guna membahas secara terperinci masalah investasi, pemutihan utang, dan bantuan dana lainnya. "Kuwait menyatakan akan menanamkan modal di Indonesia yang makin lama jumlahnya makin besar," kata Gus Dur.

Sementara, saat bertemu dengan Presiden Palestina Yasser Arafat, Presiden menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina melawan Israel. Menurut Menlu Alwi Shihab, Indonesia akan menunjukkan dukungan itu dengan membuka perwakilan dagang di Jalur Gaza. ❑

Merecoki Penguasa dari PAN

GUBERNUR: Pemilihan Zulkifli Nurdin Hamzah sebagai Gubernur Jambi periode 1999-2004 ternyata berbuntut kerusuhan. Tanda-tanda kericuhan sebenarnya mulai tampak seusai Sidang Paripurna DPRD I Jambi yang memutuskan memilih Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Jambi itu sebagai Gubernur, 23 November lalu.

Saat ia terpilih, di luar gedung, sekelompok pemuda dan mahasiswa, yang sebagian berkostum satgas PDI Perjuangan, mencaci maki Ketua DPRD I Jambi Nasrun H.R. Arbain, yang berasal dari PDIP. Nasrun dituding sebagai sutradara di balik terpilihnya Zulkifli. Para pengunjuk rasa mencium ada praktek suap politik dalam pemilihan gubernur. Karena Nasrun tidak melayani tuntutan berdialog, massa lalu berang dan mengancam akan membakar rumah Ketua DPRD itu.

Sehari kemudian, giliran pendukung Hasip Kalimiddin Syam, seorang kandidat gubernur dari Partai Golkar yang keok saat pemilihan, menyambangi Gedung DPRD I Jambi. Mereka juga menuduh anggota Dewan telah menerima suap. Massa sebanyak tujuh truk ini lantas berubah beringas dan merusak fasilitas umum, sehingga aparat keamanan pun bertindak keras untuk mengatasinya. Akibat bentrokan itu, 30 warga luka-luka dan delapan orang aparat harus dirawat di rumah sakit. ❑

Perompak Melayu Tertangkap

BAJAK LAUT: Pertengahan November lalu, lima belas perompak asal Indonesia yang membajak Kapal MV Alondra Rainbow diringkus Angkatan Laut India di lepas pantai Goa. Kapal yang dicarter sebuah perusahaan pelayaran Jepang itu bertolak dari Kualatanjung, Sumatra Utara, 22 Oktober silam, dan dijadwalkan merapat di Jepang sepuluh hari kemudian. Tapi, 26 Oktober lalu, keberadaan kapal berbendera Panama itu tidak terpantau lagi, sampai akhirnya datang berita dari Thailand, pada 9 November, yang mengabarkan bahwa kapal Alondra telah dibajak saat berada di Kepulauan Andaman. International Maritim Board, yang bertugas memonitor perompakan di laut, langsung menyebarkan berita pembajakan tersebut. Kapal Alondra kemudian diketahui sudah berganti nama menjadi Mega Rama.

Ketika mendapat kabar bahwa kapal yang dibajak itu sedang berada di perairannya, pihak Angkatan Laut India segera melakukan pengejaran. Tanpa banyak perlawanan, para perompak dapat segera diringkus. Tapi, muatan kapal, 7.700 metrik ton alumunim, ternyata telah raib. Kini, para perompak yang diduga berasal dari Indonesia itu, karena berbicara dalam bahasa Melayu, ditahan di Mumbai sembari menunggu proses peradilan. ❑

Ganjalan Cacuk Menuju BPPN

Kalangan DPR menentang pencalonan Cacuk Sudarijanto sebagai wakil ketua BPPN. Karena berkaitan dengan isu redistribusi aset?

CACUK SUDARIJANTO.
Diturunkan dari langit.

KRIS HARYANTO

"Bung Glenn ini mirip Zarima (si Ratu Ekstasi), selalu lolos dari aparat," ujar anggota Komisi XI DPR, Usman Eruman. Tak pelak, guyonan yang dilontarkan anggota Fraksi Partai Golkar itu membuat suasana rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glenn M.S. Yusuf, pekan silam, menjadi riuh oleh tawa mereka. Glenn hanya tersenyum mendengar lelucon itu.

Joke itu agaknya bukan tanpa arti. Glenn selama ini selalu lolos dari "lubang jarum" meski posisinya sebagai ketua BPPN berkali-kali digoyang. Toh, kursi orang nomor satu di badan tersebut tak tergoyahkan. Bahkan, terakhir, perebutan posisi antarpartai pada lembaga yang mengontrol aset sekitar Rp 533 triliun itu beralih ke posisi wakil ketua.

Adalah Cacuk Sudarijanto, bekas Direktur Utama PT Telkom, sebagai kandidat yang mengisi "lowongan" orang kedua di BPPN. Berbeda dengan sebelumnya, wewenang wakil ketua itu lebih besar. Sebab, dalam PP No. 95 Tahun 1999 tentang BPPN yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid, 22 November lalu, terjadi perubahan struktur organisasi badan itu yang sebelumnya diatur dalam PP No. 17 Tahun 1999.

Maka, jika semula BPPN dipimpin seorang ketua dan dibantu sebanyak-banyaknya empat wakil ketua yang membawahkan bidang masing-masing, kini ketua didampingi seorang wakil ketua yang mengawasi maksimal lima deputi. Pembagian tugasnya: ketua BPPN mengurusi hubungan eksternal, termasuk dengan Bank Indonesia, investor, dan konsultan asing, sedangkan wakil ketua lebih banyak mengawasi kegiatan internal.

Kemunculan nama Cacuk bermula dari pertemuan Glenn dengan Presiden Gus Dur, 17 November lalu, di Istana Merdeka, Jakarta. Cacuk juga hadir dalam pertemuan itu. Presiden, kata Glenn, sangat prihatin dengan masalah yang dihadapi BPPN, termasuk kritikan dari berbagai pihak. Karena itulah, Presiden meminta BPPN melakukan konsolidasi manajerial. "Lantas, Bapak Presiden mengatakan, bagaimana kalau Bapak Cacuk ini menjadi wakil ketua, membantu Saudara Glenn," ujar Glenn.

Ide mengusulkan nama Cacuk, menurut Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, tak lain merupakan pilihannya sendiri. "Sebab, orangnya *very good entrepreneurship, gentlement, strongly physics,* dan *capable,*" kata Bambang, pekan silam. Itu pun tak menyalahi aturan karena wakil ketua ke bawah memang diangkat oleh menteri keuangan. Sementara, ketua BPPN diangkat oleh presiden. Tak pelak, penunjukan bekas Direktur Operasi IBM Indonesia itu menambah kuat dugaan bahwa hubungan antara Glenn dan Bambang Sudibyo tidak semesra dengan menteri sebelumnya, Bambang Subijanto.

Maka, tidak mengherankan jika hal itu menimbulkan dugaan bahwa Cacuk dipasang untuk memangkas wewenang Glenn. Tapi, dugaan itu ditepis Menteri Keuangan. "Tidak benar itu. Kehadiran Cacuk justru untuk memperkuat BPPN," kata Bambang. "Duet mereka sangat pas," kata Setyanto P. Santosa, juga bekas Direktur Utama PT Telkom. Selain mempunyai integritas, menurut Setyanto, Cacuk mempunyai *leadearship* dan berani mengambil keputusan dengan transparan. Sementara, Glenn mempunyai jaringan yang sangat kuat di kalangan investor internasional dan lingkungan pergaulannya bagus.

Cacuk sendiri belum mau berkomentar soal pencalonannya sebagai wakil ketua BPPN meski SK pengangkatannya sudah turun. "Jangan sekarang, deh, saya belum bisa. Nanti kalau sudah ada pelantikan, saya bersedia," kata bekas Direktur Operasi PT Indosat itu.

Tapi, pencalonan Cacuk ditanggapi sinis oleh anggota Komisi IX DPR, terutama dari kalangan Fraksi Golkar dan PDIP. Theo F. Toemion dari PDIP, misalnya, menganggap pengangkatan itu hanya membuang-buang waktu. "Yang saya idealkan itu orang muda yang profesional. Kalau Cacuk, aduh..., saya ragu. Seharusnya orang itu dari sektor riil, bukan bekas birokrat," kata pengamat pasar uang itu seraya menambahkan, seharusnya

HUMAS DEPKOP

CACUK DAN ADI SASONO DALAM ACARA PER. *Duet yang pas.*

T.P. Rachmat dari Grup Astra itu yang menempati posisi wakil ketua BPPN.

Selain masalah profesionalisme, Theo dan anggota DPR lain dari Golkar dan PDIP juga mempertanyakan integritas Cacuk lantaran ia dianggap pernah menjadi partisan Partai Daulat Rakyat (PDR). "Cacuk itu ibarat diturunkan dari langit," kata Usman. Maksudnya, tak mungkin masuk ke BPPN jika bukan "titipan" salah satu partai. Bahkan, disebut-sebut, Cacuk didukung penuh oleh Poros Tengah. Karena itulah, Paskah Suzeta, dari Fraksi Golkar, meminta Menteri Keuangan dan Ketua BPPN menunda pelantikan Cacuk sampai ada klarifikasi kepartisannya. "Ia harus lolos *fit and proper test* dulu," katanya.

Memang, pada Februari silam, Cacuk terpilih menjadi ketua umum ormas Persatuan Daulat Rakyat (PDR). Tapi, dalam wawancaranya dengan FORUM beberapa waktu lalu, ia mengaku tidak terlibat di dalam PDR. "Kalau ternyata ada sekelompok orang mendaftarkan diri sebagai PDR (partai), saya tak ikut campur," kata Cacuk seraya menambahkan, kedua organisasi itu (ormas PDR dan partai PDR) jelas terpisah meski logonya sama.

Kala itu, sebagai Dirjen Bina Pengusaha Kecil dan Menengah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, ia juga disebut-sebut menjadi "operator" Adi Sasono (bekas Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil-Menengah) yang diisukan antipengusaha nonpribumi. Dan, partai yang dipimpinnya diduga memanfaatkan dana jaring pengaman sosial (JPS) untuk kepentingan kampanye. Toh, semua dibantah Cacuk. "Sebagai pencetus PER (Pos Ekonomi Rakyat) dan Dirjen Bina Pengusaha Kecil dan Menengah, saya enggak mengurusi JPS. Hubungan saya dengan Pak Adi hanya kolega," kata Cacuk.

Meski begitu, kedekatannya dengan Adi itulah yang kemudian menimbulkan kecurigaan: kehadiran Cacuk tak lepas dari kepentingan orang-orang dekat mantan Presiden Habibie. Sedangkan dengan Poros Tengah, Cacuk dikabarkan "bermain" dengan bekas Fuad Bawazier yang juga salah seorang "pentolan" Poros Tengah. Konon, hubungan mereka berkaitan dengan kehadiran Chairul Tanjung, pemilik Bank Mega, yang sekarang menjadi salah seorang pemegang saham majalah *Panji*. Fuad, kata sumber FORUM, semula mau menggeser Glenn dengan memasukkan Rini Suwandi (Dirut Astra Internasional). Tapi, upaya itu gagal. "Kesempatan datang di posisi wakil ketua," kata sumber FORUM.

Tapi, ada dugaan, ide mengusulkan Cacuk di BPPN murni dari Gus Dur. Sebab, Kepala Negara melihat posisi Cacuk yang rela meninggalkan jabatannya sebagai Dirut Bank Mega menjadi Dirjen itu lebih mampu menjangkau pengusaha menengah dan bawah ketimbang petinggi lain di BPPN. Tapi, versi lain mengatakan, kehadiran Cacuk di BPPN untuk mengawasi Glenn yang selama ini dianggap mendapat "dukungan" dari AS. "Bahkan, Glenn dicurigai sebagai agen Barat yang mengobral aset," kata sumber FORUM.

Toh, isu itu ditepis. "Justru tugas Ketua BPPN akan terbantu," kata Franklin Richard, Humas BPPN. Glenn sendiri mengakui, kehadiran Cacuk akan meringankan tugasnya. Cacuk memiliki kelebihan-kelebihan sebagai "alumni" Telkom, Indosat, dan IBM. "Mungkin tak ada satu pun pemimpin BPPN berkemampuan seperti Cacuk," kata Glenn.

Tak salah memang. Bila dilihat *track record*-nya selama ini, Cacuk bisa dibilang sukses. Walaupun ia harus terguling dari kursi Dirut Telkom karena ada dugaan manipulasi prosedur tender proyek di Nusa Tenggara Timur antara dua perusahaan Prancis-Alcatel dan TRT Philip. Alcatel menggandeng Elektrindo Nusantara (Bimantara) dan TRT Philip join dengan perusahaan Belanda. Waktu itu Cacuk memenangkan TRT Philip. Tapi, ia harus kehilangan jabatannya. Bahkan, diisukan korupsi Rp 34 miliar.

Terlepas dari kasus itu, Cacuk berhasil mengangkat Telkom dari perusahaan "sakit" menjadi sehat dan mendapat predikat wajar tanpa syarat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain sukses mengurus Telkom, alumni ITB itu juga dianggap sukses mengantarkan Bank Mega, milik Chairul Tanjung (Grup Para), menjadi salah satu bank yang sekarang tergolong sehat. Di bank itu, Cacuk pernah menjadi dirut.

Pengamat hukum ekonomi Dr. Hamid Awaluddin tak meragukan integritas Cacuk. Ia pun setuju dari segi hukum positif tak ada keharusan Presiden memenuhi permintaan DPR. "Tapi, aspirasi DPR sebaiknya didengar. Bagaimanapun, jika ingin membangun citra BPPN, baik personel, apalagi pemimpinnya, harus benar-benar *accountable*," katanya. Artinya, DPR ikut serta dalam proses pengangkatan, termasuk melalui *fit and proper test*.

Tapi, Hamid menyayangkan anggota DPR mengaitkan Cacuk sebagai partisan suatu partai. Sebab, menjadi anggota partai adalah hak Cacuk. Atau, isu itu sengaja ditiupkan karena kelahiran ormas PDR tak lepas dari peran Adi Sasono yang sering melontarkan ide redistribusi aset. Padahal, sebagian besar kekayaan yang dikontrol BPPN berasal dari bos konglomerat keturunan Cina, yang dianggap "kurang beres" mengelola perusahaan atau banknya. Kehadiran Cacuk bisa menyulitkan mereka untuk menggaet kembali aset itu.

Irawati, Fenty Effendy, dan Anne L. Handayani

■ BPPN

Vitalnya Menyehatkan Perbankan Nasional

Keberhasilan menstabilkan sektor perbankan, restrukturisasi perbankan, dan utang perusahaan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

ANNAS
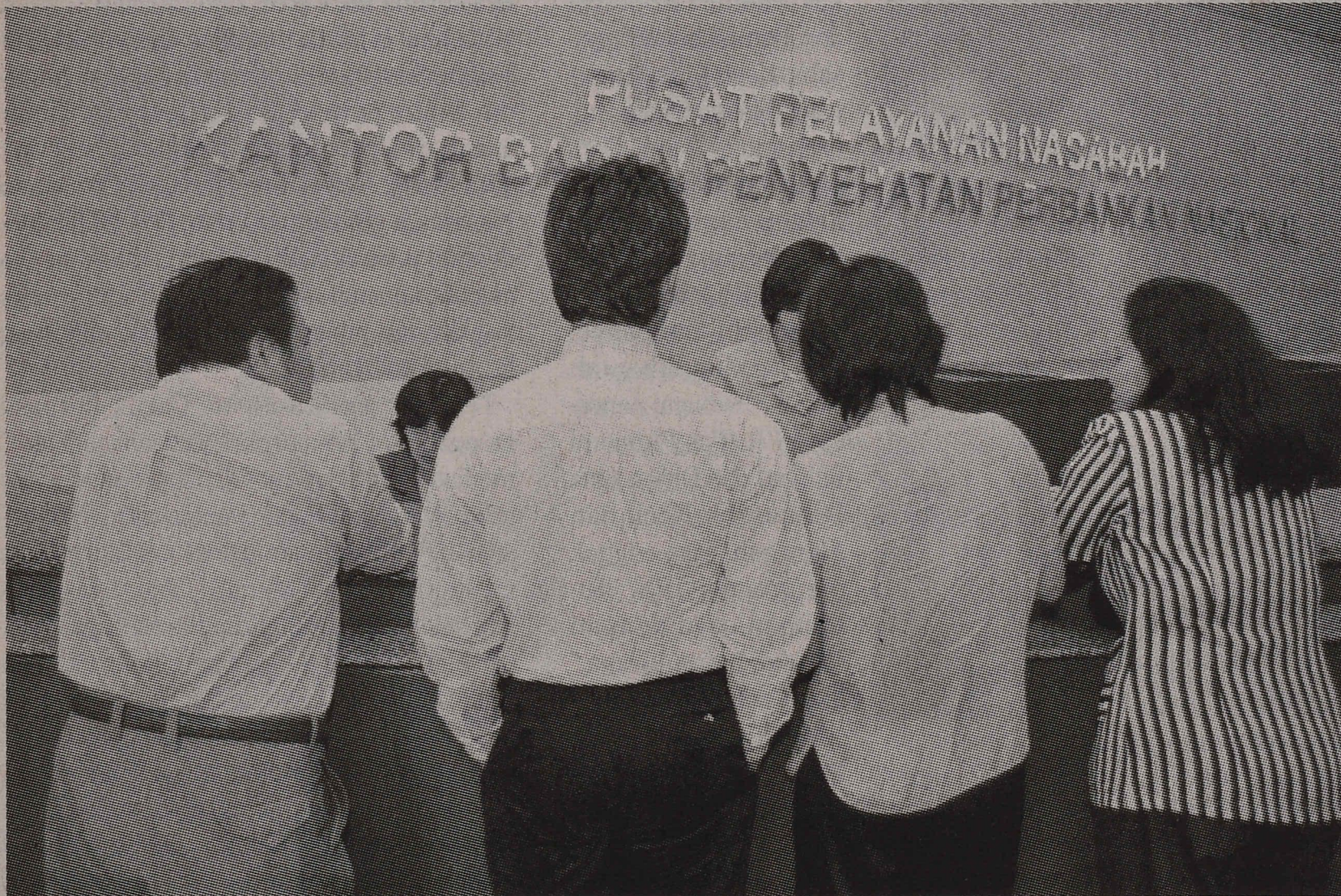
KANTOR PELAYANAN BPPN JAKARTA. *Mengurangi beban APBN.*

Kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjalar menjadi krisis keuangan dan ekonomi yang berkepanjangan. Peristiwa yang dimulai pertengahan 1997 itu membuat sektor perbankan Indonesia hancur. Padahal, selain sebagai tempat menyimpan uang, bank berperan melancarkan arus barang dan jasa dengan menyalurkan kredit dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Karena itu, bank merupakan lembaga keuangan yang vital dalam kegiatan perekonomian.

Selain sektor perbankan, sektor riil (perusahaan manufaktur) juga terpukul gara-gara krisis nilai tukar. Terutama, perusahaan-perusahaan yang mengandalkan pendapatan dalam rupiah, sementara kandungan impor dan pinjaman luar negerinya cukup tinggi. Sebab, rupiah yang diperlukan untuk membayar cicilan utang pokok dan bunganya menggelembung. Sektor riil semakin limbung dengan kerontokan perbankan nasional. Karena kesulitan mendapatkan suntikan modal, banyak perusahaan manufaktur yang menghentikan produksinya. Jangan heran jika kemudian jumlah penganggur melangit.

Ibarat mata uang, antara sektor keuangan dan sektor riil memang saling mengait. Pada masa krisis, hampir semua bank bermasalah, termasuk bank yang sehat sekalipun. Bank yang sehat tentu menyalurkan kredit kepada sektor riil, yang juga tertohok krisis. Bank yang sehat juga melakukan transaksi dengan bank-bank atau lembaga keuangan lainnya yang cukup sulit bertahan pada masa krisis. Akibatnya, terjadi penjalaran penyakit dua arah antara sektor riil dan perbankan, atau satu arah dalam sektor perbankan. Jika penularan ini tak diatasi, bukan mustahil perekonomian Indonesia menjadi lumpuh.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) merupakan salah satu dokter yang dapat mencekal penularan itu. Menurut Ketua BPPN Glenn M.S. Yusuf, badan yang dibentuk 26 Januari 1998 itu berfungsi menjamin kewajiban bank umum, merestrukturisasi dan menyehatkan perbankan, merestrukturisasi utang swasta dan aset bank, menyelesaikan kewajiban pemegang saham bank, serta menjual aset dan mengembalikan uang negara.

Dalam melaksanakan program penjaminan atas simpanan nasabah ataupun kreditor bank, BPPN bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan para konsultan. Setidaknya, untuk mengganti bantuan likuiditas BI (BLBI) yang dikucurkan ke perbankan ketika terjadi *rush* (penarikan dana besar-besaran oleh nasabah gara-gara tingkat kepercayaan terhadap perbankan nasional melorot), pemerintah menerbitkan obligasi sekitar Rp 114 triliun. Surat utang ini akan dilunasi para pemegang saham bank yang mendapat kucuran BLBI.

Kemudian, dalam melaksanakan program penyehatan perbankan, bersama dengan BI, BPPN mengevaluasi sejumlah bank. Bank yang masih berpotensi dikembangkan diambil alih pemerintah (*bank take over*/BTO) yang jumlahnya 13 bank. Bank yang tidak berpotensi dibekuoperasikan (bank beku operasi/BBO) dan dibekukan kegiatan usahanya (bank beku kegiatan usaha/BBKU) yang jumlahnya mencapai 48 bank. Sedangkan tujuh bank yang sehat diikutsertakan dalam program rekapitalisasi (penambahan modal). Untuk penyuntikan modal ini, pemerintah sudah menerbitkan obligasi sekitar Rp 113,5 triliun.

Selain itu, bank peserta program rekapitalisasi dan BTO diwajibkan mengalihkan kredit kategori lima (macet) ke BPPN. Sedangkan BBKU dan BBO wajib mengalihkan seluruh portofolio kreditnya ke badan tersebut, termasuk *non-core assets* (bukan aset utama), seper-

ti mobil dan lukisan. Ditambah kredit kategori lima dari bank BUMN, jumlah portofolio kredit yang sudah dialihkan ke BPPN diperkirakan mencapai sekitar Rp 235 triliun. Tapi, sayang, semua aset yang dikelola Aset Manajemen Kredit (AMK) itu tergolong "busuk", sehingga nilai pasarnya menyusut menjadi 33 persen atau sekitar Rp 77,9 triliun.

Dalam pengelolaannya, AMK melakukan empat alternatif dalam menyelesaikan aset kredit itu, yaitu restrukturisasi, pengambilalihan agunan, penjualan kredit atau hak tagihan, dan penyelesaian secara hukum. Restrukturisasi antara lain dilakukan melalui penjadwalan kembali pembayaran kewajiban, perpanjangan jangka waktu pinjaman, keringanan denda atau tunggakan bunga, penambahan modal baru (dari pemodal lama atau baru), pembayaran sebagian utang pokok untuk mengurangi posisi utang, *debt to equity swap* (konversi utang jadi ekuitas), penerbitan obligasi konversi, dan sebagainya.

Ditinjau dari itikad baik debitor dan prospek usahanya, ternyata bukan pekerjaan mudah untuk menyelesaikan kredit tersebut. Sebab, banyak debitor yang sebagian besar pengusaha kakap belum bersedia menandatangani surat komitmen untuk menyelesaikan utangnya. Baru sekitar 63 debitor yang bersedia menyelesaikan kreditnya dengan menandatangani surat komitmen. Dan, pihak BPPN baru berhasil menagih utang itu sekitar Rp 2,8 triliun.

Selain menangani portofolio kredit, BPPN juga mengelola aset yang diserahkan bekas pemegang saham pengendali BTO, BBO, dan BBKU melalui program penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS). Kekayaan yang dikelola Aset Manajemen Investasi (AMI) ini adalah kewajiban pemegang saham untuk menyelesaikan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Nilai sekitar 140 perusahaan yang dikelompokkan ke dalam *holding company* ini diperkirakan sekitar Rp 137 triliun. Di samping itu, AMI juga mengelola penyertaan modal pemerintah pada bank peserta rekapitalisasi.

Nah, untuk memaksimalkan potensi pengembalian uang negara dan mengurangi beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), BPPN akan melakukan program divestasi (penjualan saham di beberapa perusahaan manufaktur dan bank) dan penjualan aset yang dikuasainya. Hasil penjualan aset tersebut digunakan untuk membayar obligasi dan bunganya. Dengan memperkecil pokok obligasi, beban bunga obligasi yang ditimpakan kepada APBN akan mengecil. Pada APBN 1999/2000, beban bunga obligasi itu sekitar Rp 34 triliun. Sekitar Rp 17 triliun di antaranya menjadi kewajiban BPPN untuk memasok dananya. Selebihnya, menjadi tugas Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (kini Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN) dengan menjual saham BUMN. Hingga Oktober lalu, BPPN sudah melego asetnya sekitar Rp 9,1 triliun.

Jadi, keberhasilan BPPN melakukan stabilisasi pada sektor perbankan, restrukturisasi perbankan, dan pemberlakuan restrukturisasi utang perusahaan, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku pasar yang sebelumnya memborong dolar Amerika Serikat dan mengirimkannya ke luar negeri akan memasukkan kembali dananya ke perbankan nasional dalam bentuk simpanan rupiah. Dengan demikian, itu akan menurunkan tingkat bunga simpanan dan biaya pendanaan bank. Selain itu, akan menstabilkan rupiah yang terlihat dari kecilnya gejolak kurs rupiah.

ANNAS

GLENN M.S. YUSUF DAN REKANNYA DI DPR. *Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar.*

Dampak lainnya, dengan membaiknya kurs rupiah dan penurunan suku bunga, akan menurunkan biaya produksi. Atau, akan mendorong perusahaan-perusahaan yang semula berhenti berproduksi, kembali menggelinding. Dengan demikian, inflasi yang selama ini diakibatkan pembengkakan biaya produksi akan menurun. Hal ini terlihat dari deflasi (penurunan harga-harga) yang terjadi dari Maret 1999 hingga Agustus 1999.

Beban APBN juga akan ringan dengan keberhasilan BPPN menjual pelbagai aset yang dikuasainya. Hasil penjualan itu dapat digunakan untuk mengurangi obligasi pemerintah dan menurunkan beban bunganya. Sektor riil yang mulai menggelinding karena keberhasilan restrukturisasi perusahaan juga akan meningkatkan pembayaran pajak oleh perusahaan. Sebab, dengan penjadwalan utang ataupun konversi utang menjadi ekuitas akan mengurangi beban cicilan utang pokok dan bunga perusahaan. Padahal, pajak ini merupakan pos penerimaan APBN yang sangat diandalkan. Selain itu, yang tak kalah penting, keberhasilan restrukturisasi perusahaan juga memperbesar kesempatan kerja.

Selain itu, keberhasilan BPPN melaksanakan tugasnya akan meningkatkan kepercayaan bank-bank di luar negeri terhadap perbankan nasional. Ini akan mempermudah penerbitan *letter of credit* (L/C) untuk mendukung ekspor dan impor. Para investor asing juga akan menanamkan modalnya kembali ke Indonesia, dengan syarat stabilitas politik terkendali. Selain investasi, konsumsi juga akan meningkat. Akibatnya, secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jadi, BPPN merupakan lembaga yang cukup penting dalam memulihkan perekonomian Indonesia setelah dihantam badai krisis. Kegagalan BPPN di dalam menjalankan tugasnya akan menyuramkan perekonomian nasional. Dan, masyarakatlah yang akhirnya merasakan getahnya.

Syatrya Utama

■ RAPBN

Anggaran Tahun Pertama Abad Baru

RAPBN 2000 dirancang lebih transparan agar DPR lebih mudah mengawasi utang luar negeri. Gaji pegawai negeri diperkirakan naik minimal 25 persen.

Ada yang baru dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Selain mengubah tahun anggaran menjadi tahun takwim, format RAPBN 2000 memakai anggaran defisit, bukan berimbang. Meski penerimaan dalam negeri bisa digenjot, pemerintah harus memangkas beberapa subsidi agar defisit tidak terlalu besar.

Format anggaran defisit lazim digunakan bagi negara yang mengacu pada Government Financial Statistic (GFS), seperti Jepang. Jika dalam RAPBN sebelumnya pos untuk menutup defisit dari utang luar negeri disebut penerimaan pembangunan, dalam RAPBN 2000 dijadikan pos pembiayaan defisit. "Ini lebih transparan, DPR lebih mudah melakukan *review* dan pemerintah pun mudah melakukan konsultasi," kata Menteri Keuangan Bambang Sudibyo kepada Anne L. Handayani dari FORUM, pekan silam.

Pengawasan terhadap utang luar negeri pemerintah sudah saatnya dilakukan. Dalam RAPBN 2000 yang berlaku 1 April-31 Desember 1999, defisitnya sudah lampu merah, berkisar empat sampai lima persen terhadap Produk Domestik Bruto. Sektor yang bisa diandalkan untuk menutupi defisit itu adalah dengan menjual aset yang dikuasai Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau menerbitkan obligasi pemerintah yang dijual kepada publik.

Harapan tersebut boleh jadi tercapai. Meski defisit masih membengkak, toh secara umum perkembangan ekonomi pada tahun pertama abad ke-21 itu lebih baik ketimbang sebelumnya. IMF mengisyaratkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula nol persen jadi dua persen. Kurs rupiah yang pada tahun anggaran 1999/2000 dipatok Rp 7.500 per dolar, maka pada tahun anggaran 2000 dipatok Rp 7.000 per dolar. Harga minyak mentah dipatok US$ 18 per barel, padahal sebelumnya hanya US$ 10 per barel.

Angka optimistis itu agaknya bukan tanpa alasan. Sinyalnya berasal dari sisi penerimaan negara. Untuk migas, misalnya, saat ini harga minyak mentah dunia membaik, sehingga target penerimaan APBN 1999/2000 yang semula dianggarkan Rp 20,5 triliun, realisasinya malah mencapai Rp 43 triliun. Dari nonmigas, penerimaan pajak penghasilan (PPh) bisa dijadikan andalan. Sebab, dari target Rp 79 triliun, hingga Oktober 1999 realisasinya sudah mencapai Rp 53 triliun. "Jika BUMN diefisienkan, labanya bisa mencapai Rp 5 triliun," kata Noor Fuad, Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter. Dan, pembengkakan laba itu tentu akan memberikan kontribusi pada peningkatan PPh.

Penghematan lain bisa dilakukan dari anggaran departemen yang sudah dialokasikan ke daerah, seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS). Lalu, bantuan proyek dari luar negeri bisa dikurangi karena difokuskan untuk proyek menengah, seperti pertanian atau koperasi.

Meski begitu, bukan berarti pemerintah bisa santai. Sebab, dari sektor pengeluaran juga bakal terjadi pembengkakan. Menurut mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, pos pengeluaran rutin akan meningkat 10 persen dari yang ditargetkan RAPBN 1999/-2000 Rp 137 triliun.

Penyebab utama pembengkakan itu berasal dari pos cicilan utang dan bunga yang diperkirakan Rp 60 triliun. Perinciannya, Rp 40 triliun cicilan untuk utang pokok dan bunga Rp 20 triliun. Padahal, dalam APBN 1999/2000 pembayaran utang itu ditargetkan Rp 44,4 triliun (utang pokok Rp 23,9 triliun dan bunga Rp 20,5 triliun). Nah, untuk meringankan beban anggaran tak ada jalan lain, kecuali pemerintah meminta penjadwalan ulang pembayaran utang luar negeri. "Kalau ada *rescheduling* kita bisa lega. Empat tahun lagi jika pertumbuhan ekonomi positif, bisa dibayar," kata Noor, yang optimistis penjadwalan itu bisa diperoleh.

Selanjutnya, pos lain yang bakal mendongkrak pos pengeluaran RAPBN 2000 adalah rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Besarnya minimal 25 persen. Dalam anggaran sebelumnya, pos untuk membayar gaji pegawai ini Rp 1,4 triliun. Berarti, untuk anggaran 2000, untuk pos ini pemerintah harus menyediakan tambahan minimal Rp 350 miliar. Biaya restrukturisasi perbankan juga ikut menggandoli RAPBN. Diperkirakan, untuk anggaran 2000 ini, beban bunga obligasi berkisar Rp 24 triliun. Itulah sebabnya, BPPN mesti beker-

KERANGKA LETTER OF INTENT

I. Pengantar

II. Strategi Ekonomi Jangka Menengah
- a. Kerangka Ekonomi Makro Jangka Menengah
- b. Kebijakan Restrukturisasi
- c. Pembangunan Kembali Institusi-Institusi Ekonomi
- d. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam

III. Kebijakan Ekonomi Makro untuk 1999/2000 dan 2000
- a. Kebijakan Fiskal dan Jaring Pengaman Sosial
- b. Kebijakan Moneter dan Kurs Mata Uang
- c. Neraca Pembayaran dan Kebijakan Eksternal

IV. Reformasi Struktural untuk 1999/2000 dan 2000
- a. Reformasi Struktural dan Kebijakan Perdagangan
- b. Reformasi Sistem Perbankan
- c. Perbaikan Pengelolaan Perbankan
- d. Penagihan Piutang dan Pemulihan Aset
- e. Restrukturisasi Bank-Bank BUMN dan Bank-Bank *Take Over*
- f. Restrukturisasi Bank-Bank Swasta
- g. Kerangka Hukum Pengaturan dan Pengawasan
- h. Restrukturisasi Korporasi, Pengelolaannya, dan Reformasi Hukum
- i. Reformasi dan Privatisasi BUMN
- j. Sektor Energi
- k. Kebijakan Persaingan dan Reformasi Struktural Lainnya
- l. Kebijakan Persaingan
- m. Kebijakan Pertanian
- n. Kehutanan
- o. Lingkungan
- p. Kebijakan Usaha Kecil dan Menengah

ja keras agar bisa menutupi beban tersebut dengan menjual asetnya.

Bagaimana dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik? Pada anggaran tahun berjalan, kedua subsidi itu ditargetkan Rp 28,2 triliun. Tapi, realisasinya akan lebih besar dari itu. Untuk BBM, misalnya, terjadi pembengkakan lebih dari 100 persen, dari target APBN Rp 10 triliun diperkirakan menggelembung menjadi Rp 25 triliun. Sedangkan untuk listrik, pada anggaran 2000 bakal membengkak 500 persen, menjadi Rp 10 triliun.

Maka, tak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali mengikuti anjuran IMF: mengurangi subsidi BBM mulai April 2000. "Tapi, itu akan dilakukan perlahan agar tak menimbulkan gejolak. Diprioritaskan untuk bahan bakar yang tak dinikmati rakyat kecil," kata Bambang Sudibyo. Diperkirakan, yang subsidinya dipangkas adalah solar dan diesel yang banyak digunakan industri. Sedangkan bensin dan minyak tanah tetap dipertahankan. Kalau subsidi itu tak dikurangi, "Jika industri itu berorientasi ekspor berarti pemerintah memberi subsidi bagi konsumen di luar negeri," kata Dirjen Migas Deptamben, Rachmat Sudibjo.

Tapi, ke mana "larinya" jatah untuk subsidi itu? Ada kecurigaan untuk membayar bunga obligasi bank yang mengikuti rekapitalisasi. Kalau benar begitu, artinya sia-sia saja upaya pemerintah mengurangi anggaran. Tapi, Bambang dan Noor Fuad membantah dugaan tersebut. "Penghapusan subsidi akan dikonversi pada kenaikan gaji pegawai negeri," katanya. Selain itu, dialihkan untuk bunga kredit program. "Pemerintah tengah merencanakan obligasi untuk kredit program yang nilainya Rp 5,4 triliun," kata Fuad.

Ira, Teguh S. Usis, dan Mochamad Husni

ANTRIAN MOBIL DI SPBU. *Anggaran lebih transparan.*

KRUS HARYANTO

Kepentingan IMF Lebih Besar

Dua minggu sudah berlalu. Selasa dua pekan silam, Tim Ekuin Kabinet Persatuan Nasional dan Tim Teknis International Monetary Fund (IMF) sudah menyelesaikan pembahasan *Letter of Intent* (LoI). Jika tak ada aral melintang, akhir Desember 1999, isi nota kesepakatan itu akan disetujui dan kucuran utang mengalir kembali. Selain lebih detail, kandungan LoI kali ini diperkirakan lebih manusiawi ketimbang sebelumnya.

Sekarang, *draft* LoI tersebut akan diserahkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk disetujui. Bersamaan dengan itu, Tim Teknis IMF yang dipimpin Anooy Singh kembali ke markasnya di Washington, Amerika Serikat, melaporkan hasil perundingan tersebut. "Kami akan kembali pada 7 Desember untuk membicarakan detail dan finansial LoI," kata Singh kepada FORUM.

Menurut Menko Ekuin Kwik Kian Gie, isi LoI tersebut lebih detail ketimbang yang lama. "Meski hanya empat bagian, secara umum, LoI yang kami bahas sekarang mencakup banyak hal dibanding LoI lama yang terdiri dari lima *pointers*," kata Kwik.

Dalam konsep lama, LoI antara lain terdiri dari kerangka dan kebijakan ekonomi makro, reformasi fiskal, perbankan, restrukturisasi perusahaan, serta hukum dan pemerintahan. Sedangkan konsep LoI yang baru di samping pengantar terdapat tiga bagian lainnya, yaitu strategi ekonomi jangka menengah, kebijakan ekonomi makro, dan reformasi struktural. "Tapi, setiap poin diperinci lebih detail, sehingga LoI sekarang akan lebih tebal," kata Kwik.

Di samping mengatur besaran ekonomi makro, seperti pertumbuhan dua persen dan patokan kurs Rp 7.000 per dolar, LoI juga berisi soal penghapusan subsidi secara bertahap. Baik tim ekuin maupun tim teknis belum bisa menjelaskan masalah tersebut lebih lanjut. "Soal ini belum dibicarakan secara detail. Yang pasti, kebijakan kami, rakyat harus dilindungi," kata Singh.

Bisa jadi, IMF kali ini benar-benar mau melindungi rakyat dan bersikap lunak. Setidaknya, hal itu bisa dilihat dengan pengembalian bea masuk impor gula dan beras. Berapa besarnya, memang belum ditentukan. Tapi, bea masuk setiap komoditas yang disetujui minimal di atas 25 persen. Padahal, selama ini IMF memaksa Indonesia menghapus berbagai tarif yang membuat industri dalam negeri menjerit.

Memang, sulit dimungkiri bahwa selama ini, meski berdalih demi pemulihan ekonomi, IMF kerap mendikte pemerintah RI melaksanakan program-program yang tak cocok dengan kondisi Indonesia. Walhasil, jangankan pulih, justru akhirnya muncul gejolak politik. Kegagalan itulah yang akhir-akhir ini mendapat kritik tajam dari pers AS yang melihat pemerintahan Gus Dur demokratis, sehingga perlu didukung.

Benarkah IMF insaf? Belum tentu. Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier berpendapat, semua itu untuk kepentingan IMF sendiri. "Kepentingan IMF lebih besar dari kita sendiri. Bahkan, mereka menawarkan utang lebih banyak. Ini kan lucu," kata Fuad kepada FORUM. Dengan begitu, Indonesia akan terus terlilit utang, sementara IMF bisa terus menikmati bunga. Bahkan, disinyalir, personel di IMF mendapat untung dari para investor yang berniat memburu rezeki dari obral aset-aset murah di Indonesia.

Toh, Kwik enggan mengomentari sikap IMF yang sekarang dinilai melunak. "Wah, saya tak berpengalaman dengan perundingan sebelumnya. Jadi, tak bisa membandingkan," ujarnya enteng. Tapi, menurut sumber FORUM, sebenarnya selama ini tim ekuin Indonesia yang memiliki mental lemah, sehingga tak memiliki posisi tawar-menawar yang kuat. Benarkah begitu? Jawabnya ada dalam LoI yang lama.

Ira dan Anne L. handayani

KRIS HARYANTO

Sinergi BUMN

PUPUK: Untuk menjalin kerja sama yang sinergi antar-BUMN, Senin pekan silam, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman *(memorandum of understanding/MoU)* antara PTPN IX, X, serta XI (berlokasi di Semarang dan Surabaya) dan PT Pusri. Kemudian, antara PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) dan PT (Persero) Pelayaran Bahtera Adiguna (PBA). "Kerja sama ini akan memberi keuntungan bagi BUMN itu sendiri," kata Meneg Investasi dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi.

MoU yang ditandatangani PTPN dan Pusri berisi soal pemberian kredit pupuk. PT Pusri akan menyediakan kredit senilai Rp 42,3 miliar untuk ketiga PTPN. Perinciannya, PTPN IX sekitar Rp 23 miliar, PTPN X Rp 7,8 miliar, dan PTPN XI sekitar Rp 11,5 miliar. Sedangkan MoU antara Pelindo III dan PBA berupa pembangunan dan pengoperasian terminal curah cair di Pelabuhan Bagendang Sampit dan Pelabuhan Kumai di Kalimantan Tengah. PT Pelindo memiliki fasilitas pelabuhan. Sementara itu, PBA mengoperasikan berbagai kapal barang, termasuk kapal tanker untuk muatan curah cair. □

Insentif Pajak

SEKTOR RIIL: Untuk menghidupkan sektor riil, Menteri Negara Investasi dan Pembinaan BUMN, Laksamana Sukardi, memberikan insentif pajak kepada PMA/PMDN. "Insentif pajak akan diberikan untuk proyek baru dan proyek investasi lama yang tersendat-sendat," kata Laksamana. Untuk proyek investasi baru, insentif mulai berlaku 1 April 2000. "Saat itu pemerintah akan memberlakukan kebijakan *tax allowance* (kelonggaran pembayaran pajak)," kata Laksamana. Bentuk fasilitasnya adalah pengurangan PPh untuk perusahaan, pembebasan PPN, penundaan PBB, dan fasilitas impor bahan baku.

Fasilitas pajak proyek lama berlaku Januari 2000 sampai 31 Desember 2000. Bagi perusahaan yang memiliki izin tapi belum beroperasi, mendapat fasilitas yang sama dengan perusahaan baru. Sedangkan proyek yang beroperasi di bawah kapasitas terpasang atau terhenti akibat krisis, mendapat kelonggaran menghidupkan kembali fasilitas impor bahan baku yang belum dimanfaatkan. Juga mendapat fasilitas impor bahan baku selama setahun. Kalau perusahaan itu menambah kapasitas produksi, mereka mendapat fasilitas tambahan mengimpor suku cadang lima persen dari nilai mesin terpasang. Ini juga diberikan bagi industri yang mesinmesinnya sudah beroperasi lima tahun. □

Temuan Gas Terbesar

PEMASARAN: PT Total Indonesia (TI) memperbarui kontraknya dengan Pertamina hingga 2017. Itu dilakukan lantaran kontraktor bagi hasil itu menemukan cadangan gas di lapangan Peciko. "Gudang" gas yang berlokasi di lapangan lepas pantai yang mengarah ke Selat Makassar, dekat Muara Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Tengah itu, diperkirakan mencapai enam triliun kakikubik atau setara dengan 1,2 miliar barel minyak.

Untuk menemukan kekayaan alam tersebut memang tidak mudah. Eksplorasi sudah dilakukan pada 1983. Dan, menurut rencana, mulai berproduksi pada Januari 2000. Untuk itu, TI sudah menanam investasi US$ 1,3 miliar. "Titik impas diperkirakan akan tercapai pada tahun ketiga atau kelima," kata Harvei Madeo. Bisa jadi, itu bukan isapan jempol. Sebab, dalam sehari TI bisa menyedot gas sekitar 800 juta standar kakikubik (MSCFD). Bahkan, jika dioptimalkan bisa mencapai 2 miliar MSCFD. "Temuan di Peciko ini merupakan yang terbesar di dunia," kata Distrik Manager TI kepada FORUM.

Dari segi produksi dan investasi, mungkin tidak jadi masalah bagi TI. Tapi, hambatan utama pengembangan gas tersebut terdapat pada pemasaran. "Saat ini hanya 70 persen gas yang dihasilkan dari Kalimantan Timur yang terjual. Sisanya belum ada yang membeli," kata Harvei. □

HUMAS TOTAL INDONESIA

Gagal Miliki KPC

MAHAL: PT Timah batal mengambil alih 30 persen saham tambang batu bara PT Kaltim Prima Coal (KPC). Menurut Dirut PT Timah, Erry Riyana Hardjapamengkas,

KRIS HARYANTO
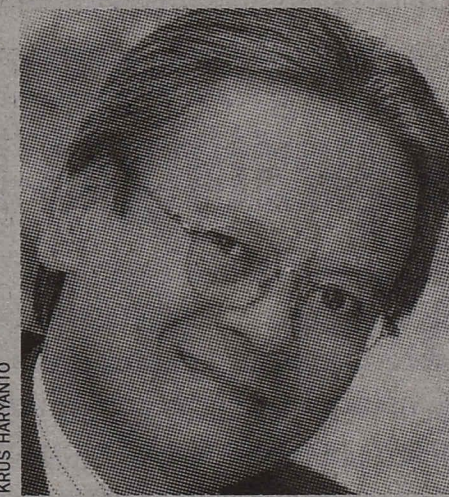
harga jual 30 persen saham KPC yang disepakati pemerintah dengan pemilik lama perseroan tersebut senilai US$ 175 juta. "Ini terlalu tinggi. Menurut perhitungan kami, seharusnya harga saham tersebut US$ 145 juta," kata Erry. Maka, selanjutnya PT Timah mempersilakan Pemda Kalimantan Timur mengambil alih saham tambang batu bara tersebut.

KPC merupakan tambang batu bara milik Rio Tinto Plc dan Amoco Plc. Sebelumnya, Kuntoro Mangkusubroto (Mentamben Kabinet Reformasi) pernah mengancam akan memberikan penalti kepada KPC jika tak segera melakukan nasionalisasi saham. Akhir Oktober lalu, pemerintah memberikan kesempatan kepada PT Timah membeli saham KPC. □

KOMPUTER MODIS, MENGAPA TIDAK?

Gaya IBM menjerat konsumen asyik juga. Barubaru ini, raksasa komputer dunia ini memperkenalkan ThinkPad i Series 1400 yang lebih menantang, baik dari segi teknologinya maupun dari segi penampilannya, juga harganya.

ThinkPad i Series 1400 yang baru ini menyediakan 7 penutup yang dapat diganti-ganti dengan tujuh warna pilihan, yakni merah, hijau, biru metalik dan merah, hijau serta biru biasa, ditambah warna perak. Komputer jinjing ini lebih tipis, lebih ringan, dan layarnya lebih lebar.

Harga yang ditawarkan untuk ThinkPad i Series 1400 ini berkisar US$ 1.600. Untuk model 1460 dan 1480, stok sudah tersedia di pasar, sementara model 1420 akan menyusul akhir bulan ini. Demikian juga dengan kap atau penutup yang warna warni, sebentar lagi dapat dibeli konsumen dengan harga sekitar 50 dolar AS per jenis warna.

Pasar untuk *notebook* yang bisa gonta-ganti "baju" ini, ya, memang ada dan IBM yakin akan laku karena eksekutif modis memang banyak. Kalau memang komputer modis ini bisa juga buat menaikkan gengsi di mata klien atau calon mertua, mengapa tidak? ❑

MEMBUAT HIDUP LEBIH BERHARGA

Astra CMG Life punya sesuatu yang baru buat nasabah dan calon nasabahnya. Perusahaan ini menawarkan suatu pilihan untuk membeli paket yang meliputi perlindungan lengkap terhadap penyakit kritis, meninggal dunia akibat suatu penyakit, cacat, atau meninggal dunia karena kecelakaan, serta jaminan hari tua. Paket tersebut dinamakan *Danatra CItra Plus*.

Para nasabah diberikan keleluasaan untuk memilih 3 jenis paket uang pertanggungan yang diatur sebagai berikut:

Paket Silver, totalnya Rp 50 juta
Paket Gold, besarnya Rp 100 juta
Paket Diamond, Rp 150 juta

Penyakit-penyakit yang dimaksudkan dalam paket perlindungan ini misalnya berbagai jenis kanker, serangan jantung, pencangkokan organ utama seperti jantung, paru-paru, hati, dan sumsum tulang, luka bakar, atau *stroke*. Paket ini juga memberi perlindungan jika orang mengalami koma akibat penyakit atau kecelakaan.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi 250-0350, 250-0380, 522-7640. ❑
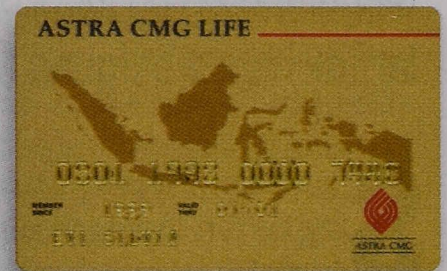
Bagi produsen yang berminat memanfaatkan rubrik ini, silakan menghubungi Bagian Iklan Majalah FORUM melalui telepon (021) 7255625 atau faksimile (021)7255650.

Yang Perdana dan Bergizi

Menampilkan 65 judul dari berbagai penjuru dunia, JiFFest pertama digelar. Tak hanya berguna bagi para sineas, tapi juga bergizi bagi penikmat film.

Sendirian, di kesunyian pagi, bocah kecil itu berdiri di tengah jalan. Air matanya berlelehan membasahi pipi. Lantas, pelan-pelan, ia mengambil teropong kecil yang di dalamnya berisi potret dirinya bersama Dora, perempuan tua yang selama beberapa hari itu dekat dengannya. Di jalan itu juga, beberapa mil dari si bocah, Dora juga melakukan hal serupa: Meneropong potret itu sambil tersenyum samar dalam linangan air mata. Adegan akhir *Central do Brazil (Central Station)* ini sangat menyentuh dan digarap dengan sangat baik. Tak terkesan cengeng, toh, isakan tangis terdengar dari berbagai sudut gedung perfilman Pusat perfilman Usmar Ismail, bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Bukan karena kisahnya menyentuh, panitia Jakarta International Festival Film Festival (JiFFest) memilih film Brasil tadi sebagai film pembuka. Namun, memang, garapan sutradara Walter J. Salles ini memukau dan layak dijadikan film pembuka. Lihat saja, sederetan prestasi yang dikantongi film ini. Tahun ini saja, film neorealisme itu meraih Golden Bear di Festival Film Berlin, penghargaan dari Sundance Film Festival, Piala Golden Globe, dan Piala Oscar untuk Film Asing Terbaik. Sementara, Fernanda Montenegro, pemeran Dora, masuk sebagai salah seorang nominator Oscar untuk artis terbaik.

Film ini juga memiliki "persamaan" dengan film Garin Nugroho, *Daun di Atas Bantal.* Sama-sama bercerita tentang kaum terbuang yang teralienasi di keriuhan kota kosmopolitan. Kisah persahabatan antara Dora dan Josue (yang diperankan dengan sangat baik oleh Vinisius de Oliverita, 12 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang semir sepatu), mirip persahabatan Asih (Christine Hakim) dengan Kancil dan Sugeng. Kehidupan getir yang dipaparkan Salles lewat tokoh-tokohnya juga berlaku universal, tidak dibatasi dinding waktu, tempat, dan budaya. Maka, publik Jakarta pun akrab dengannya. Jadi, sekali lagi, film ini memang layak dijadikan pembuka festival film berskala internasional yang baru pertama kali diadakan ini.

Sebenarnya, Jakarta terbilang sangat terlambat. Memang, kita sering menemukan festival film dari beberapa negara semacam Festival Film Inggris, Festival Film Prancis, atau Festival Film Meksiko, yang diadakan kedutaan-kedutaan besar di Jakarta. Tapi, acara yang diselenggarakan oleh "pihak" Indonesia, swasta ataupun pemerintah, sampai saat ini belum pernah ada. Dan, untuk sebuah metropolitan dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa, keadaan itu terbilang aneh. Sementara, Singapura sudah 12 kali menyelenggarakan acara sejenis, Hong Kong 13 kali, Tokyo lebih dari 10 kali, dan Pusan tiga kali.

Maka, bisa dimaklumi bila Shanty Harmayn, Natacha Devillers, Rayya Makarim, dan beberapa temannya geregetan melihat keadaan ini. Padahal, sinema Indonesia tak benar-benar wafat. Sejumlah sienas muda menggeliat. Tahun lalu, tepat di saat Indonesia sedang dicekik resesi, ide mengadakan festival film bertaraf internasional pun muncul. "Banyak orang bilang kami gila punya ide ini. Orang lagi resesi kok nekat bikin festival film, bertaraf internasional lagi," kata Shanty, produser film dokumenter yang juga pemilik Rumah Produksi SALTO. Toh, Shanty, yang belakangan dipercaya jadi Direktur JiFFest, pantang mundur. Selama setahun ini Shanty, Natacha (Ketua Pelaksana JiFFest), dan beberapa temannya bekerja keras. Mulai dari memilih film-film yang dinilai layak, mencari sponsor, sampai mengurus tetek bengek lainnya. "Maklum, kami lembaga mandiri yang tidak tergantung pada pemerintah," ujar Shanty.

M.RIZAL

JIFFEST PERTAMA. *Orang bilang kami gila.*

Tak kurang 65 film digelar selama sembilan hari (20-28 November) yang diputar di beberapa tempat, yakni Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Graha Bhakti Budaya, TIM 21, dan Erasmus Huis. Panitia berhasil mengumpulkan film-film itu dari 24 negara dari seluruh benua, kecuali Afrika. Film-film tersebut akan disandingkan dengan film-film Indo-

SLEEPING MAN: *Lambang sinergi sineas Asia.*

DOK. FORUM

nesia mutakhir, seperti *Sri* (Marselli Sumarno) dan *Kuldesak* (Mira Lesmana dkk.), ataupun film lama semacam *Suci Sang Primadona, Pengemis dan Tukang Becak*, dan *Kejarlah Daku Kau Kutangkap*.

Wajah Asia diwakili karya sutradara-sutradara muda asal Jepang, Malaysia, Singapura, Korea, Filipina, Hong Kong, Iran, Kamboja, dan Taiwan. Singapura, misalnya, menampilkan komedi satire *12 Storeys* arahan Eric Khoo yang disebut-sebut sebagai salah seorang sutradara besar di Negeri Singa itu. Malaysia mengirim *Kaki Bakar*, arahan U-Wei Bin Hajisaari dan adaptasi dari cerpen Faulkner *Gudang yang Terbakar*, yang banyak mendapat pujian di Festival Film Cannes. Ada pula karya Erma Fatima Ahmad, alumni IKJ, *Perempuan Melayu*, yang bercerita tentang pencarian identitas seorang penulis naskah teater yang terlalu lama menghabiskan waktunya di Barat.

Korea mengirimkan *Contact*, karya Chang Yoon Hyun, adaptasi film Hollywood *You've Got Mail*. Sementara, Kamboja diwakili film yang terbilang baru, *One Evening After The War (Rithy Pahn)*, kisah cinta sederhana yang bersemi seusai perang yang meluluhlantakkan negara itu. Sedangkan Jepang, salah satu pusat perfilman di Asia, diwakili banyak karya. Termasuk *Sleeping Man (Nemuro Otoko)* arahan sutradara terkemuka Jepang, Kohei Oguri. Film ini dijadikan film penutup bukan hanya karena sosok Oguchi. Tapi, di film inilah Christine Hakim ikut menampilkan kekuatan aktingnya. Barangkali, film ini merupakan "lambang" sinergi sineas Jepang dan Indonesia.

Eropa diwakili film-film yang mendapatkan penghargaan dalam berbagai festival, seperti *Beyond Silence* karya sutradara Jerman Caroline Link. Berkisah tentang gadis yang dibesarkan orang tua bisu-tuli, film ini merupakan nominator Oscar untuk Film Berbahasa Asing Terbaik 1997. Atau *Black Cat, White Cat*, karya sutradara Serbia peraih dua Palme D'Or di Festival Film Cannes, Emir Kusturica. Selain itu, ada pula saduran dari cerita karya Karol Mojtyla (sekarang dikenal sebagai Paus Paulus II), *Brother of Our God*, yang disutradarai Krysztof Zanussi dari Polandia. Sementara, sinema Inggris diwakili *Brassed Off* (Mark Herman) yang disebut-sebut sebagai film Inggris yang paling menghibur sejak *Four Weddings and a Funneral*. Adapun aroma *latino* di luar telenovela yang sekarang banyak ditayangkan televisi kita, selain *Central Station*, diwakili *Live Flesh* (Spanyol), *My Last Man*, dan tujuh film lainnya dari Chile. Sementara, Hollywood diwakili beberapa film karya sutradara andal macam M. Night Shyamalan (*Wide Awake USA*) dan Gus Van Sant (*Good Will Hunting*).

Selain menyajikan berbagai genre film cerita, festival ini juga memberi tempat kepada film dokumenter. *Jalan Pos*, misalnya. Karya sutradara Belanda Bernie Ijdis ini mendokumentasikan kehidupan di sepanjang jalan raya Anyer-Panarukan, jantung Jawa sekaligus monumen kekejaman Jenderal Daendels. Dibuat berdasarkan esai Pramoedya Ananta Toer, tak pelak film ini filmnya Pram. Banyak adegan berfokus kepadanya, bahkan suara sastrawan Pulau Buru itu pun menjadi latar belakang film ini.

CENTRAL DO BRAZIL: *Penuh gizi dan kaya rasa.*

DOK. FORUM

Melihat animo publik yang begitu besar selama pelaksanaan festival—maklum tiketnya murah, hanya Rp 5.000, tak mengherankan jika Shanty dkk. optimististis festival semacam ini bisa diselenggarakan kembali tahun depan. Bakal dijadikan ajang kompetisi? "Idealnya memang begitu," kata Shanty berharap. Dan, tentu saja kita berdoa, semoga harapan Shanty itu terlaksana. Sebab, lewat ajang seperti inilah kita, juga para sineas, mendapatkan santapan lain yang penuh gizi dan kaya rasa. Apalagi, festival ini pun dilengkapi sesi diskusi yang diadakan selama tiga hari.

Sri Raharti H

KOLOM

Achem, Bantam, Macassar

Eropa tengah dimabuk harumnya lada, rempah-rempah, candu, mutiara, dan sutra di Timur Jauh. Soalnya, itulah komoditas sangat menguntungkan di pasar internasional Venesia, Italia, dan Antwerpen, Belgia. Tak aneh bila di sejumlah lautan, armada Portugal, Belanda, dan Spanyol saling berebut pengaruh dan barang dagangan, kendati di Timur Jauh, akhirnya Belandalah yang tampil sebagai jawara.

Noorca M. Massardi

Awal petualangan Belanda itu dimulai dengan perintisan yang dilakukan J.H. Van Linnchotten pada 1582 dan Cornelius Houtman pada 1592, dengan menyamar sebagai penumpang gelap di kapal-kapal Portugis yang menuju ke India. Namun, ketika akhirnya mereka tertangkap dan dijebloskan ke penjara, para saudagar Belanda di Rotterdam segera membebaskan mereka dengan membayar sejumlah uang kepada pihak Portugis. Dan, begitu mereka kembali ke negerinya, pada 2 April 1595, dari Rotterdam, mereka segera diberangkatkan dengan armada empat kapal besar. Pihak Portugis pun tak berdaya dan tak bisa menghalangi ekspedisi damai itu.

Setelah melintasi Tanjung Harapan, Mozambik, Madagaskar, dan Kepulauan Maladewa, pada Juni 1595, di utara Khatulistiwa, armada Houtman bertemu dengan dua kapal besar Portugis yang tengah menuju ke Goa, India. Di tengah laut itu, mereka melakukan barter makanan: Selai Portugal ditukar dengan keju dan daging babi asap Belanda. Dan, setelah menyisiri pantai Sumatra, lalu ke Selat Sunda, pada 22 Juni 1596, akhirnya mereka mendarat di Bantam (Banten), pelabuhan besar yang sangat kaya di ujung Pulau Jawa.

Usai membeli sejumlah komoditas di Bantam, mereka lalu kembali ke negerinya dengan tiga kapal dagang penuh muatan, dan diawaki kurang dari seratus orang. Mendarat di Amsterdam pada 14 Agustus 1597, secara ekonomis, hasil penjualan komoditas itu memang hanya memberikan sedikit keuntungan. Toh, mereka yakin, dalam pelayaran selanjutnya, laba sangat besar akan segera diraih.

Namun, pada April 1599, berita pertemuan kapal Portugis dan Belanda di tengah laut itu telah dimanipulasi oleh para pedagang Yahudi asal Portugis di Amsterdam. Mereka menyebarkan isu bahwa muatan kapal-kapal Portugis telah dijarah awak kapal Belanda. Akibatnya? Pada 1599-1601, armada Belanda yang dipimpin Etienne Van den Hagen diserang saat berlabuh di Amboine (Ambon), Maluku. Toh, antara tahun 1598-1602, lalu lintas laut Belanda-Insulinde tercatat berlangsung 14 kali, dengan pengerahan sekitar 65 kapal. Di antaranya, ada dua kapal yang mendarat di Achem (Aceh), Sumatra, pada 21 November 1600.

Lalu-lintas laut yang serabutan itu akhirnya mulai diatur, ketika pada 20 Maret 1602, atas campur tangan Staat-Generales, Grand Pensionnair Barneweldt, dan Maurice de Nassau, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) didirikan. Sejak itu, VOC yang merupakan persekutuan perusahaan pelayaran sebelumnya *(vorkompagnien)* segera menjadi kekuatan besar yang independen, yang bahkan bisa disebut "Negara dalam Negara" *(Staat-builen-de-Staat)*.

Toh, hingga 1608, banyak saudagar yang turut dalam perjalanan ke Insulinde, memprotes penggunaan kekerasan oleh kapal-kapal dagang itu. "Peralatan tempur di kapal itu dilengkapi untuk maksud damai dan berniaga secara jujur, bukan untuk membangun benteng-benteng di pelabuhan, atau menangkapi kapal-kapal Portugis," kata mereka. Lalu, pada 9 April 1609, kesepakatan damai Belanda-Portugis pun diteken untuk jangka waktu 12 tahun. Namun, gencatan senjata itu sulit dilaksanakan di wilayah selatan Khatulistiwa, kendati Atlantik Selatan dan Samudra India dinyatakan sebagai zona bebas. Akibatnya? Setelah lima tahun sebelumnya mampu menggempur benteng Portugis di Ambon, armada VOC pun menaklukkan armada Spanyol di Malaka pada 1610, dan menundukkan mereka di Pulau Ternate.

Tak puas dengan menyerang Portugis dan Spanyol di Manila dan Tidore, armada VOC pun menyerang armada Inggris di sejumlah tempat. Termasuk, kapal-kapal dagang Turki, Armenia, Jawa, Cina, Bengali, Arab, Persia, dan Gujarat. Akhirnya, setelah berjuang keras menguasai jalur perdagangan Insulinde yang menghubungkan lalu-lintas perdagangan India-Cina-Jepang itu, VOC pun menguasai semua komoditas paling berharga di Timur Jauh.

Keberhasilan strategi Gubernur VOC pertama, Jan Pieterszoon Coen (1617-1623; 1627-1629) yang luar biasa, itu memang sudah diramalkan. Untuk bisa berdagang secara efektif dan berkelanjutan, mereka memang harus menghancurkan lawan dengan keras, membangun benteng, dan menjajah pribumi. Dan, setelah dapat menjalin hubungan dengan Jepang (1616), dan Kota Batavia (Jakarta) mulai dibangun (1619), mereka pun menjalin hubungan dengan Formosa (Taiwan) pada 1624. Namun, pada 1622, mereka gagal merebut Macao dari Portugis.

Baru setelah Jepang berhasil mengusir penjajah Portugis (1638), Belanda akhirnya benar-benar menguasai Malaka (1641). Sejak itulah, Kerajaan Achem di Sumatra kemudian menyerah kepada Belanda (1667), dan Macassar pun jatuh (1669). Puncaknya, pada 1682, Bantam – kota pelabuhan yang kaya dan saingan Batavia, yang dijuluki "Venesia di Insulinde"– takluk pula kepada Belanda. "Dan, itulah sesungguhnya awal kesalahan besar Belanda," tulis sejarawan Fernand Braudel, dalam karya tiga volumenya: *Civilisation Materielle, Economique et Capitalisme XV-XVIIIe Siecle* (Paris, 1979).

Maksudnya? "Nafsu besar Belanda untuk menguasai semua perdagangan di Timur, dengan membatasi produksi, membangkrutkan perdagangan pribumi, mempermiskin dan memecah belah mereka, itu sama artinya dengan membunuh ayam bertelur emas," tulis Braudel (1902-1985), salah seorang pendiri aliran "sejarah baru" dari Prancis itu.

Dan, kini, tiga setengah abad kemudian, "ayam-ayam bertelur emas" bernama Aceh, Makassar, dan Banten (yang akan menjadi provinsi baru) itu sedang tampak menggeliat, dan mencoba hidup kembali. Tapi, untuk siapa? ❑

bikin hidup
LEBIH hidup
A REAL MILD KRETEK
STAR MILD
14.0 MG TAR 1.0 MG NICOTINE
LOSTA MASTA

Kami awali petualangan ini di pagi hari di suatu tempat di benua Afrika yang masih awam bagiku. Kupercayakan perlengkapan logistik pada rekan-rekan setempat yang kusebut dalam buku harianku sebagai The Afrikaans.
Jeep telah kami tune up dengan sempurna.
Rakit kami selesaikan dua hari sebelumnya.

Time to cross. Kulihat arlojiku: 05:11 pagi
Temperatur: 5 derajat celcius
Tujuan: Puncak pegunungan ± 3000 m
jarak 300 km
Harus ditempuh dalam 7 jam

Sadar akan jauh dan kejamnya jalan yang menghadang di depan kami, tidak ada jalan lain selain memacu jeep kami semaksimal mungkin. Rata-rata 80 km/jam atau dapat disamakan dengan 200 km/jam di tol Jagorawi. Atau kami akan terlambat dan tujuan akhir kami akan gagal.
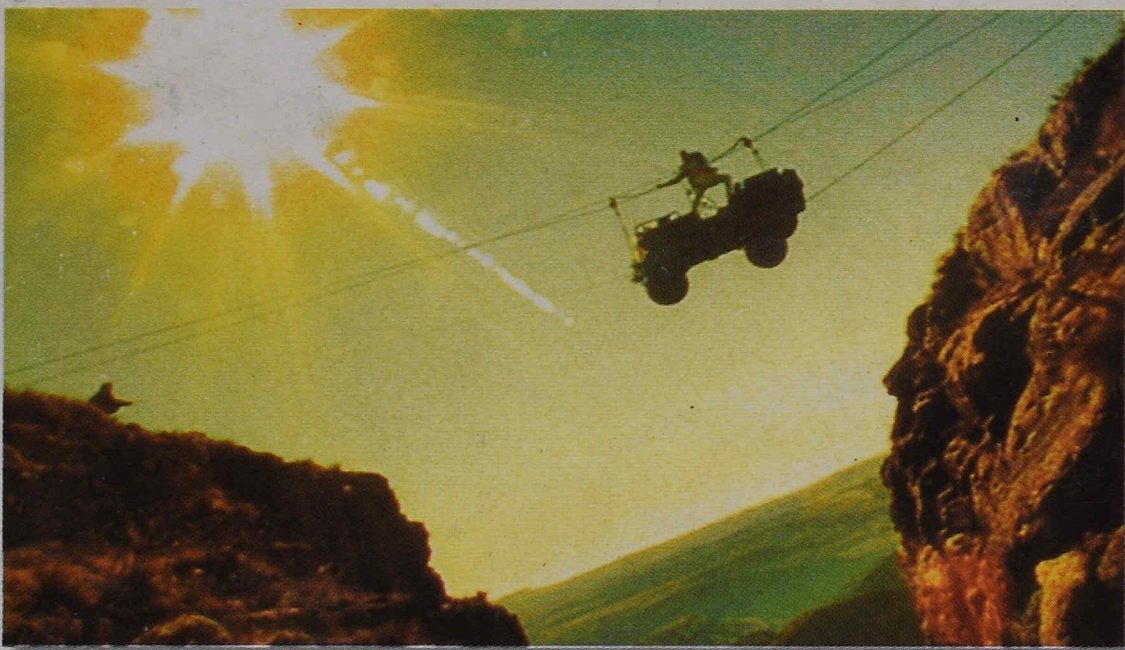
Wow....!
Tidak ada jalan lainkah?
Kami berembuk.
Kami putuskan.
Kami lakukan,
dan berhasil!
Kepuasan yang luar biasa
Kucatat dalam buku harianku:
badan kami berkeringat dingin biarpun temperatur menunjukan 10 derajat celcius

Tempat yang ideal untuk tujuan kami:
Hang-gliding.
Waktu: 13:25. Terlambat ± 1 jam lebih.
Record yang kucatat: Excellent.
Kini waktunya untuk melayang ...

YANG PENTING,
RASANYA
BUNG!